ISHAK SALIM, dkk

DIFABEL & PERLAWANAN kecil SEHARI-HARI

ISHAK SALIM, dkk

DIFABEL & PERLAWANAN kecil SEHARI-HARI

Difabel & Perlawanan Kecil Sehari-hari
Penulis
Ishak Salim
Nur Syarif Ramadhan
Fajri Nursyamsi
Andi muhammad mardhatilla
Azis Kuba (Tim Media PerDIK)

Diterbitkan pertama kali oleh
PerDIK
Jalan Pendidikan I Blok B5 No. 8
Makassar 90222 | 08124106722
perdiksulsel@gmail.com | http://ekspedisidifabel.wordpress.com
Penyunting
Ishak Salim
Tataletak/Olah foto & Gambar
Ishak Salim
Foto
Dokumentasi PerDIK dan Tim Ekspedisi Difabel

Foto Sampul
Milik Tim Ekspedisi PerDIK
Desain Sampul
PerDIK
Cetakan Pertama, Januari 2018
Katalog Dalam Terbitan KDT)
Salim, Ishak, dkk
Difabel & Perlawanan Kecil Sehari-hari/ Ishak Salim, dkk;
penyunting, Ishak Salim—cet.1—
Sulawesi Selatan—Makassar: PerDIK, 2018
1. Gerakan Disabilitas 2. Difabel 3. Hak-Hak Difabel 4. Sulawesi Selatan
I. Judul

Terima Kasih

untuk kawan-kawan semua
yang telah berkontribusi
dalam perlawanan ini baik melalui aksi maupun tulisan,
kami mengucapkan terima kasih.
dari pengalaman ini, kami menyadari bahwa hak-hak difabel
tidak bisa hanya [sekadar] diatur dalam regulasi,
tapi hak itu harus direbut dan dipertahankan.
benar, isi regulasi bisa berubah dan berpihak,
tapi cara berpikir *ableism* atau berbasis kenormalan,
medik, amal dan individual
masih bersemayam di pikiran banyak
orang. sehingga jika orang-orang
seperti ini memegang posisi penting
dalam pemerintahan maupun pembangunan,
maka penghapusan diskriminasi atas
difabel sampai keakar-akarnya
tak akan pernah tercapai.

DAFTAR ISI

SALAM PERGERAKAN

Ini bukan sebuah buku yang harus diberikan kata pengantar panjang-panjang, karena perlawanan sehari-hari memperjuangkan hak difabel tak memungkinkan kita lagi untuk mengucapkan sejumlah basa-basi.

Ayok baca, dan tetaplah melawan!

Abd. Rahman, S.Pd

Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)

Semua tulisan dalam buku perlawanan ini

Pernah diterbitkan di

www.ekspedisidifabel.wordpress.com

sejak 24 Oktober 2016

terbitan perdana hanya berkalimat

**"Setiap manusia memiliki keterbatasan,
tetapi tak ada seorangpun yang tahu di mana batas dari keterbatasan itu (PerDIK)**

BAGIAN 1

MENYISIPKAN ISU DIFABEL DALAM FESTIVAL PENULIS INTERNASIONAL MAKASSAR: CATATAN DARI MIWF 2017

June 11, 2017

Nur Syarif Ramadhan

"Semalam, seseorang yang berpengaruh di kota, ini menghubungi saya. 'Lili, kapan MIWF akan dimulai?' katanya."

"'Besok malam ceremony pembukaannya, pak. Akankah bapak akan datang?''"

"'Saya lihat jadwal dulu, ya.''"

"Sore tadi, sebelum acara ini kita mulai, saya kembali mengonfirmasi ke yang bersangkutan perihal kedatangannya. Tapi, ajudannya yang memberi jawaban: 'Maaf, bapak lagi ada rapat politik. Tidak bisa diganggu''"

"Ini adalah festival sastra internasional terbesar dan satu-satunya di Indonesia Timur! Kita menyelenggarakan ini secara mandiri, tanpa turut campur pemerintah kota. Jadi, jika acara opening MIWF tak dihadiri pejabat, itu tidaklah menjadi perintang terlaksananya acara ini!"

MALAM ITU, IBU LILY YULIANTI FARID membius kami dengan pidatonya yang membahana dalam acara Opening Ceremony Makassar Internasional writers festival (MIWF) 2017 di Main Plaza Fort Rotterdam. Tahun 2017 menjadi edisi ke-

tujuh dalam pelaksanaan MIWF. Festival literasi internasional pertama dan satu-satunya di Indonesia Timur ini diselenggarakan oleh Rumata' Artspace sebagai program tahunan.

Pertama digelar 2011, festival ini menjadi salah satu acara sastra yang hidup dari semangat hampir 200 relawan, melahirkan kerja kreatif dan kerjasama warga dari berbagai kalangan. Setiap tahun, MIWF selalu menyajikan para penulis dan pembicara penting untuk membagi pengalaman dan gagasan mereka dalam berbagai topik pilihan. Sebut saja Bénédicte Gorrillot penulis buku-buku Perancis kontemporer dan sejak 2005 sudah menulis lebih dari enam puluh artikel tentang puisi-puisi karya penyair-penyair Perancis. Shida Bazyar, penulis berdarah Iran yang lahir dan tinggal di Jerman, ia banyak menulis tentang keluarga-keluarga migran dari Iran yang tinggal di Jerman. Xu Xi penulis asal Hong Kong, Ridwan Saidi, Lokman Hakim dan Shaz Johar penulis asal Malaysia, Ypil Lawrence seorang penyair dan esais dari Cebu, Filipina. Mark Heyward penulis dan peneliti asal Australia yang sudah 25 tahun melakukan penelitian di Indonesia, dua bukunya tentang Indonesia "Crazy Little Heaven, an Indonesian Journey" dan "Looking for Borneo". Hadir juga empat penulis Australia lainnya Antje Missbach, Derek Pugh, Jemma Purdey, dan Madelaine Dickie.

Lantas bagaimana dengan penulis-penulis dari Indonesia?

Tentu saja tak ketinggalan. Sebut saja penyair Sapardi Djoko Damono, Sastrawan Budi Darma dan Bondan Winarno, Penulis novel-novel remaja Esti Kinasih, penulis skenario film Salman Aristo, penulis dan jurnalis Maggie Tiojakin, penulis novel dewasa dan buku anak-anak Clara Ng, Arief Ash Shiddiq, Endy Bayuni, Debra Yatim, Lala Bohang, Devi Asmarani, dan tentu saja penyair dan penulis dari Makassar M Aan Mansyur.

Sebenarnya masih banyak penulis lainnya yang turut berpartisipasi, akan tetapi, saya tidak bisa mengabsen mereka satu per satu.

*

PERTAMA KALI SAYA MENDENGAR MIWF tahun 2012, atau pada edisi kedua pelaksanaannya. Saat itu saya masih duduk di bangku SMA, dan mulai tertarik dengan dunia kepenulisan. Sayangnya, keterbatasan informasi membuat saya hanya dapat memimpikan untuk ikut MIWF. Tahun demi tahun acara tersebut tetap berlangsung, dan saya masih belum menemukan cara untuk dapat berpartisipasi.

Akhir 2016, sekelompok aktifis difabel muda di Makassar berkumpul dan mendirikan sebuah organisasi yang kemudian diberi nama: Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK). Organisasi inilah yang menjembatani saya sehingga saya pada tahun ini (2017), akhirnya dapat mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung di MIWF.

Di PerDIK, saya dipertemukan dengan Ishak Salim, seorang aktifis difabel yang saat ini menjabat sebagai ketua Badan Pengurus PerDIK. Orang inilah yang mendorong saya untuk dapat berpartisipasi di MIWF. Dia selalu berupaya agar difabel dapat berpartisipasi di setiap event yang berlangsung di Kota Makassar. Ini penting agar difabel di Makassar tidak malu dan merasa canggung jika berinteraksi dengan mereka yang bukan difabel dan sebaliknya orang-orang menjadi paham bagaimana berinteraksi dengan difabel secara benar.

"Alangkah jauh lebih bermanfaat jika kita bisa memfasilitasi difabel untuk ikut ambil bagian di MIWF. Minimal, di tiap-tiap sesi acara di MIWF, ada perwakilan difabel yang hadir." Suatu ketika kak Ishak melempar ide tersebut dalam percakapan kami via *whatss app*.

“Menarik kita coba, kak!”

Saya pun mencoba menghubungi teman sesama difabel, mengajak untuk mengikuti MIWF. Lewat beberapa grup *social media* komunitas difabel, saya mencoba menjelaskan apa itu MIWF, serta hal-hal positif yang bisa kita peroleh jika berpartisipasi di MIWF. Setidaknya, kita bisa menunjukan eksistensi difabel pada masyarakat. Ajakan saya mendapat tanggapan yang beragam. Tetapi pada intinya belum ada difabel yang semangatnya melampaui semangat yang saya miliki untuk ikut berpartisipasi di MIWF.

*

HARI PERTAMA MIWF (Rabu, 17 Mei 2017)

Book Launch and Discussion: “Dari Timur“ menjadi acara pertama yang saya ikuti. Acara ini berlangsung pukul 14:00-15:30 di Chapel Fort Rotterdam. Sebagai pembicara empat penulis dari Timur yang karyanya termuat dalam buku yang sedang di launching. Mereka adalah: Faisal Oddang, Erni Aladjai, Emil Amir dan Ibe S Palogai. Sesi ini dipandu oleh Shinta Febriany.

Kondisi lalulintas di kota Makassar yang amburadul membuat saya terlambat dalam mengikuti sesi ini. Belum lagi saya belum hapal betul area Fort Rotterdam. Saat saya mendekati meja registrasi, Faisal Oddang sudah mempresentasikan cerpennya: ‘Orang-orang Dari Selatan Harus Mati Malam Itu’, cerpen yang pernah dimuat di harian kompas tersebut terpilih menjadi salah satu karya yang termuat dalam buku yang sedang di *launching*.

Secara bergantian, keempat pembicara menjelaskan karyanya yang dimuat dalam buku “Dari Timur”. Mereka menceritakan proses kreatif mereka dalam menulis karya tersebut, serta motivasi mereka dalam menulis karya tersebut. Dari keempat pembicara, saya hanya pernah membaca karya Faisal Oddang dan Emil Amir. Saya pernah menemukan cerpen Emil Amir di Kompas. Kalau tak salah ingat, judul cerpennya “Ambe Masih Sakit”, dan di muat di kompas tahun 2012. Tapi bukan tulisan itu yang termuat dalam buku “Dari Timur”. Tulisan Emil yang dimuat dalam buku tersebut berjudul “Silariang”. Sayangnya, saya belum pernah membaca cerpen tersebut, sehingga saya tidak bisa berkomentar banyak.

Untuk Faisal Oddang, harus saya akui, saya adalah penyuka karyanya. Hampir semua cerpennya yang dimuat di koran sudah saya baca. Cerpen-cerpen tersebut diantaranya: Bung Parani (Harian Fajar 1 Juli 2012), Mawar di Atas Tanah Merah (Harian Fajar, 12-Februari-2012), Sepasang Pohon di Pinggir Sungai (Lombok Post, 27 Maret 2016), Di Tubuh Tarra, Dalam Rahim Pohon (Kompas, 4 Mei 2014), Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon? (Kompas edisi 21 Februari 2016), Orang-Orang Dari Selatan Harus Mati Malam Itu (Kompas, 28 Juni 2015), Sebelum dan Setelah Perang, Sebelum dan Setelah Kau Pergi (Kompas, 16 Oktober 2016), dan Jangan Tanyakan tentang Mereka yang Memotong Lidahku (Cerpen ini pernah dimuat di Koran Tempo akhir pekan 19–20 Maret 2016, dan memenangkan ASEAN Young Writers Award 2014).

Dua pembicara yang lain: Erni Aladjai dan Ibe S Palogai, sama sekali saya belum pernah membaca karyanya. Hari itu merupakan pertama kalinya saya mengenal mereka. Pada intinya, dalam menulis karya, semua penulis tidak pernah mengambil tema yang jauh dari kehidupan mereka. Keempatnya lebih senang menulis dengan tema lokalitas dari daerahnya masing-masing.

Di sesi tannya jawab, ada empat peserta yang mengacungkan tangan. Kazuhisa Matsui, Kak Dandi dari kata kerja, seorang ibu PNS dari Maros, dan saya. Saya mengunakan sesi ini untuk memperkenalkan apa itu difabel. Saya menceritakan saat pertama kali mendengar event MIWF, serta masih kurangnya informasi yang sampai pada difabel terkait event ini.

"Boleh jadi, diluaran sana ada banyak difabel yang ingin berpartisipasi dalam event ini, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk dapat berpartisipasi, atau boleh jadi mereka ingin mengikuti rangkaian kegiatan MIWF, tetapi lokasi yang menjadi

tempat berlangsungnya acara ini tidak aksesibel buat mereka. Saya menyarankan, untuk pelaksanaan MIWF tahun berikutnya, Panitia harus lebih gencar lagi menyebarkan informasi terkait MIWF, buatlah agar informasi tersebut sampai ke komunitas-komunitas difabel di Kota Makassar."

Sebelum saya mengakhiri, saya mengajukan tantangan pada keempat penulis untuk menulis karya yang bertemakan difabel. Saya memberi gambaran, ada begitu banyak hal yang dapat digali dari kehidupan difabel.

"Selama ini, difabel hanya bisa ditemukan lewat penyajian berita dari koran-koran, ataupun media lain. Masih sangat sedikit sastrawan yang mengangkat tema difabel dalam sebuah prosa, puisi ataupun cerpen."

Shinta Febriany, moderator diskusi, mempersilahkan Faisal Oddang sebagai narasumber pertama, untuk menanggapi pertanyaan saya.

"Sebenarnya, kehidupan saya tak jauh dari difabel. Saya dibesarkan oleh seorang difabel. Salah seorang dari keluarga kami—Om saya—adalah seorang bisu," Faisal Oddang memulai ceritanya. "Sebenarnya, isu difabel bukanlah isu yang berat untuk dituliskan dalam sebuah karya sastra. Saat ini saya sedang menulis sebuah novel, yang dalam novel tersebut terdapat satu tokoh yang seorang difabel." Faisal Oddang mengakhiri.

"Sebenarnya, dalam karya puisi saya, kadang kala saya terinspirasi dari seorang difabel," pembicara selanjutnya, Ibe S Palogai memulai. "kamu mungkin bisa mencoba membaca karya saya, jika kamu bisa memaknai puisi yang saya buat, kamu mungkin akan mengetahui jika karya tersebut terinspirasi dari difabel."

Jawaban tak terduga diutarakan Erni Aladjai:

"Saya pernah membuat sebuah monolog tentang difabel. Dan dimuat di harian kompas tahun 2011. Sebelum menulis karya tersebut, saya pernah tinggal selama seminggu di salah satu komunitas difabel netra di kota Makassar. Di sana saya banyak belajar tentang difabel, dan lewat pengalaman itulah saya bisa menulis sebuah karya yang bertemakan difabel. Saya juga senang membaca karya para difabel. Saya sering membuka web kartunet.com, dan menikmati tulisan-tulisan yang teman-teman difabel buat."

Tanggapan yang berbeda disampaikan Emil Amir. Menurutnya, tema difabel merupakan tema yang cukup sulit baginya.

“Terus terang, saya belum bisa menulis dengan bertemakan difabel. Mungkin, jika harus menulis sebuah karya sastra yang bertemakan difabel, saya harus tinggal di komunitas mereka, dan mempelajari kehidupan mereka. Tapi saya rasa, itu pun masih cukup sulit.” Di akhir penjelasannya, Emil Amir, memberi semangat pada saya untuk menulis. “Sebuah karya yang bertemakan difabel akan lebih terasa keindahannya jika difabel itu sendiri yang menuliskannya. Jadi, alangkah jauh baik jika si penanya yang melatih kemampuannya dalam menulis, kemudian membuat sebuah karya sastra yang bertemakan difabel.”

Sebelum sesi tersebut berakhir, Shinta Febriany menerangkan beberapa sastrawan yang pernah menulis karya sastra yang bertemakan difabel. Di Indonesia bisa kita temukan dalam karya Seno Gumira Ajidarma dalam novelnya yang berjudul Biola Tak Berdawai, atau mungkin bisa ditemukan dalam puisi-puisi Aprizal Malna.

*

SELANJUTNYA SAYA MENGIKUTI sesi *Networking and Opportunities, Meet the Publishers: “What kind of stories do we after?”* di Verandah I Fort Rotterdam. Sesi ini menghadirkan pembicara yang mewakili tiap-tiap penerbit: Kedai Buku Jenny, Ininnawa, Gramedia Pustaka Utama, Gagas Media, Mizan, Noura Books, Bentang Pustaka dan Penerbit Buku Perempuan.

Tak banyak yang dapat saya ceritakan dalam sesi ini. Tujuan utama saya menghadiri ini adalah untuk mencari informasi kira-kira penerbit mana yang cocok dengan novel yang sedang saya tulis: “Sebab Kau Bukan Emas”. Novel ini masih sedang saya kerjakan, dan setelah mendengarkan kriteria buku yang biasanya diterbitkan oleh masing-masing penerbit yang hadir pada sore itu, kini saya sedikit memiliki gambaran,

mengenai penerbit yang mungkin saja berjodoh dengan novel saya.

Menjelang magrib, atau pukul 17:30 wita, bertempat di Taman Rasa Fort Rotterdam, berlangsung sesi *A Cup of Poetry*: *An Afternoon Coffee with Poetry Reading*. Acara ini menjadi panggung bagi siapa saja yang ingin tampil membaca puisi. Pada sesi ini, kita juga bisa menikmati secangkir kopi yang disediakan panitia.

Hingga tibalah saat opening ceremony MIWF 2017. Acara tersebut dirangkaikan dengan beberapa pertunjukan. Salah satunya adalah *Papermoon Puppet Theatre*. Begitulah mungkin nama pertunjukannya seperti yang dikatakan MC. Jujur, saya tidak terlalu menikmati pertunjukan ini. Yah. Sajian ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang melihat dengan matanya. Yang menarik adalah, ada difabel yang terlibat dalam pertunjukan ini. Saat para pemain *Papermoon Puppet Theatre* memperkenalkan diri, saya mendengar suara kak Cikki di sana. Bersama dua Tuli yang lain: Adit dan Bambang, mereka turut ambil bagian pada malam itu. Cikki adalah seorang pencinta seni dan penerjemah bahasa isyarat Bisindo. Dia berkawan dengan banyak kawan Tuli yang tergabung dalam Gerkatin Sulawesi Selatan.

Acara *opening ceremony* MIWF berlangsung sederhana. Tak ada sambutan walikota, gubernur, apalagi bapak presiden di

sana. Hanya pidato kak Lily Yulianti Farid yang begitu sarat makna.

"Setidaknya, acara kita malam ini tidak memakan banyak waktu dengan harus menunggu kehadiran para pejabat," salah satu kalimat Lily yang mendapat sambutan tepuk tangan yang begitu meriah.

"Jika kelak, diluaran sana seseorang bertanya tentang kota Makassar, mungkin akan ada yang berkata: 'Oh, Makassar yang pantainya di reklamasi, kan?' atau mungkin berkata 'Makassar itu yang banyak begalnya, kan?' tapi, akan ada juga yang berkata dengan teramat bangga, 'Makassar yang ada MIWF-nya, kan?" Lagi-lagi, kalimat itu disambut dengan sorakan dan tepuk tangan yang membahana dari seluruh penjuru Fort Rotterdam.

Rangkaian pesta malam itu ditutup dengan pemutaran film berbahasa Bugis yang tak kumengerti. Malam mulai menua, satu demi satu pengunjung Fort Rotterdam mulai beranjak. Begitupun saya.

*

HARI KEDUA MIWF (Kamis, 18 Mei 2017)

Event yang berlangsung di hari kedua MIWF semakin meriah. Program MIWF *Goes to Campus* mulai dilangsungkan di hari itu. Selain almamaterku, UNM, kampus lain yang mendapatkan kehormatan sebagai lokasi berlangsungnya acara MIWF adalah UIN Alauddin. Di UIN Alauddin dilangsungkan: *Writing Workshop* bersama Madelaine Dickie dan sebagai *Host* adalah Astrid AF. Sedang saya mengikuti *Writing Workshop* yang berlangsung di UNM, di *Bollroom* lantai dua gedung Phinisi. Hadir sebagai pemateri dua penulis dari Australia yakni Derek Pugh dan Mark Hayward, dan dipandu oleh Yola.

Kedua pemateri memberi motivasi pada peserta tentang pentingnya menulis. Mereka juga memberikan beberapa tips and trik agar tulisan yang kita buat mengalir dan enak dibaca. Setelah itu, salah seorang penulis menampilkan contoh tulisannya pada peserta. Tulisan tersebut berbahasa inggris dan menceritakan tentang sebuah tradisi di Tana Toraja.

Karena tulisan dari Mark Hayward berbahasa Inggris, maka setiap ia usai membaca beberapa kalimat, Yola —moderator akan menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.

Usai menikmati penyajian tulisan dari Mark Hayward, selanjutnya peserta diberi kesempatan untuk menulis apa saja selama kurang lebih 30 menit dengan panjang tulisan minimal 500 kata. Di benak saya, tiba-tiba terlintas ide untuk menulis sebuah esai berupa kritikan sederhana terhadap Universitas Negeri Makassar. Dalam tulisan itu, saya mengkritisi desain bangunan Menara pinisi yang cenderung masih belum aksesibel bagi difabel. Memang, pada lift gedung sudah dilengkapi dengan huruf braille pada tombolnya, akan tetapi, itu belum dapat dikatakan sempurna jika belum dilengkapi dengan *voice reader*, yang fungsinya mengubah teks yang tertulis ke dalam bentuk suara.

Selama ini, jika seorang difabel netra ingin menggunakan lift di gedung Phinisi, mereka masih butuh bantuan dari mereka yang non-difabel. Huruf braille pada tombol lift belum cukup membantu, Karena tak ada informasi suara yang memudahkan difabel netra untuk mengetahui jika tiba-tiba lift berhenti di sebuah lantai, serta ketika pintu lift tertutup maupun terbuka. Selain itu, bangunan itu juga belum terlalu aksesibel bagi difabel tuli maupun difabel kinetik, seperti pengguna kursi roda, protese, maupun kruk.

30 menit berlalu, tulisan itupun selesai. Di luar judul, tulisan itu tepat berjumlah 500 kata. Tentu saja masih banyak kekurangan di dalamnya, masih banyak hal yang ingin saya tuangkan di dalamnya. tetapi Batasan 500 kata menghalanginya.

Selanjutnya peserta dipersilahkan untuk membacakan karyanya masing-masing. Banyak orang yang mengangkat tangan, namun hanya segelintir yang dipilih. Sayangnya, saya tidak termasuk yang segelintir itu. Tak apalah, setidaknya setelah kukembangkan, tulisan ini bisa menjadi penghuni setia blog ekspedisidifabel, ataupun kartunet[].

LITERASI
[2]

KETIKA RABAAN PERTAMA MEMBUATKU JATUH CINTA

July 13, 2017

Nur Syarif Ramadhan

KIRA-KIRA SAAT SAYA MASIH DUDUK di bangku SMA (2009-2012), saya akrab dengan novel-novel karangan Esti Kinasih. Saya masih ingat, setiap pulang sekolah, saya akan menjadi penghuni setia perpustakaan asrama hanya untuk mendengar *digital talking book* novel triologi Matahari Senja. Saat itu, untuk membaca novel bagi difabel netra di Makassar, khususnya yang menjadi binaan YAPTI—di mana saya tinggal di asramanya, dimanjakan dengan kiriman 'buku bicara' dari Yayasan Mitra-Netra Jakarta.

Yayasan Mitra Netra—berdiri sejak 1991—adalah salah satu organisasi yang menghimpun relawan pembaca buku yang suaranya direkam. Yayasan yang didirikan oleh beberapa difabel netra alumni perguruan tinggi di Jakarta ini memulai kerja sosialnya dengan memproduksi 'buku bicara'. Padahal saat itu belum ada sekretariat maupun alat rekam secanggih sekarang. Mereka memulainya dengan cara yang amat biasa sesuai dengan kemampuan saat itu. Siapapun anggotanya yang punya kaset bekas yang tak dipakainya lagi, maka mereka bisa menyumbangkan ke Mitra Netra. Jika mereka membutuhkan lebih banyak lagi kaset, maka mereka akan menghimpun kaset-

kaset bekas dari manapun. Setelah itu, mereka membaca buku-buku dengan merekam suaranya menggunakan *tape recorder* sederhana.
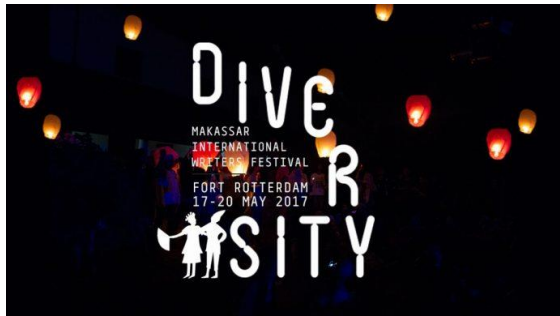
Pertama kalinya saya menikmati buku bicara dari Yayasan Mitra Netra, formatnya sudah dijital, yakni mp3. Saat itu, YAPTI menjadi salah satu yayasan yang pada saat itu rutin menerima kiriman buku bicara dari Yayasan Mitra Netra.

Pada MIWF 2017, saya tak menyangka jika penulis buku triologi Matahari Senja, yaitu mbak Esti Kinasih, menjadi salah satu pembicara. Sekarang saya sudah tidak pernah membaca karya beliau lagi, sebab bukunya sudah jarang saya jumpai. Atau boleh jadi bukunya masih ada di toko buku, tetapi saya belum menemukannya. Saya tertarik mengikuti sesi beliau, hanya karena ingin belajar, atau mungkin ingin mengetahui trik dan tips Esti Kinasih dalam menulis novel remaja. Acara itu berlangsung di hari kedua MIWF, bertempat di VERANDAH 2 Fort Rotterdam, yang dipandu oleh Ibe S Palogai.

"Saya juga suka menulis, Mbak. Saat ini saya sedang berusaha menyelesaikan novel pertama saya. Tetapi, setelah saya membaca ulang setengah dari novel yang telah saya tulis tersebut, saya merasa bahwa saya kurang piawai dalam mendiskripsikan sesuatu objek seperti ruang, suasana, benda, atau bahkan menggambarkan fisik seseorang. Mungkin karena saya seorang difabel netra, hal tersebut begitu sulit bagi saya."

Saya memberanikan diri berkomentar di sesi tanya jawab. Saya prihatin pada moderator, karena sedari tadi ia membuka sesi itu, tetapi tak ada satu pun yang bertanya perihal kepenulisan. Sebagian besar peserta yang mengikuti sesi tersebut adalah perempuan. Bahkan, setelah mengamati lebih jeli, dan malu-malu bertanya pada kakak panitia, ternyata hanya ada dua peserta laki-laki yang mengikuti sesi tersebut.

“Wow, cukup sulit menjawab pertanyaanmu, Mas,” Esti Kinasih merespon pertanyaan saya dan berpikir sejenak. Mungkin mencari ide menanggapi pertanyaan saya.

“Mungkin, ketika Mas ingin mendeskripsikan sesuatu, Mas bisa meminta bantuan pada orang lain, minta tolong dijelaskan ataukah digambarkan tentang sesuatu hal yang ingin Mas masukkan ke dalam novel Mas.”

Saya tidak begitu puas dengan saran Esti Kinasih. Memang, jawaban itu tidak salah. Tetapi saya merasa pasti ada jawaban yang lebih baik lagi dari jawaban itu, yang bisa memberi rasa puas bagi saya, meskipun hanya sedikit. Perkara deskripsi ini memang menjadi hambatan tersendiri bagi saya yang kelak harus ada jalan keluarnya.

SUDAH MENJADI RUTINITAS selama MIWF 2017, setiap sore, di Taman Rasa Fort Rotterdam, berlangsung *A Cup of Poetry: An Afternoon Coffee with Poetry Reading*. Sayangnya saya lagi-lagi tak berani tampil membacakan sepenggal puisi. Tapi saya menerima tawaran Faisal Oddang untuk menikmati secangkir kopi. Jadilah sore itu, bersama pacar seseorang (yang sebelumnya saya curi) kami menikmati senja di Fort Rotterdam dengan menikmati secangkir kopi dan suguhan puisi yang dibacakan. Sepertinya, pada MIWF tahun depan, saya harus menemukan wanita yang mau saya pacari, dan mau menemani saya mengikuti MIWF. Hahaha.

Sebuah *band* indi asal Palu menjadi penampil pertama pada malam harinya. Mereka menampilkan beberapa lagu berbahasa lokal Sulawesi tengah, yang sayangnya (lagi-lagi) tak kumengerti. Saya lebih senang dengan penampil selanjutnya. Mereka adalah enam penulis terpilih (*Emerging Writers* 2017).

Tahun ini, enam penulis yang terpilih adalah: Anaci Tnunay (Kupang), Ashari Ramadana T (Makassar), Bayu Pratama (Mataram), Maria Pankratia (Ende), Muhammad Arham (Luwu), dan Nurdahlia Simba Manna (Kolaka). Secara bergantian, mereka tampil di panggung *Main Plaza* Fort Rotterdam, membacakan karya masing-masing, yang telah membuat mereka terpilih menjadi *Emerging Writers* 2017. Bagi mereka yang ingin terpilih menjadi Emerging Writers pada pelaksanaan MIWF tahun berikutnya, tentu bisa mempelajari karya-karya keenam penulis tersebut.

Mungkin, sebahagian orang beranggapan bahwa, seorang difabel netra hanya dapat membaca buku jika buku tersebut dalam bentuk braille. Sehingga banyak yang tak terlalu memperhatikan sisi "keaksesibilitasan" sebuah buku ketika dicetak. Memang sulit membayangkan seorang difabel netra apalagi yang *totally blind* akan dapat mengakses sebuah buku awas (nonbraille).

Saat ini, dalam mengakses sebuah buku non-braille, seorang difabel netra dapat menggunakan *scanner* atau mesin pemindai. Jadi, agar

buku tersebut dapat mereka baca, terlebih dahulu mereka harus men-scan atau memindai buku tersebut. Biasanya, jika seseorang memindai sebuah buku, maka tampilan formatnya ketika dibuka di komputer akan berformat *image* (jpg). Ini tentu saja belum aksesibel, karena format image tidak dapat dibaca oleh program *screen reader*(jaws/damayanti). Maka dari itu, saat ingin melakukan pemindaian, seorang buta lagi-lagi membutuhkan *software* tambahan yang akan memroses hasil *scanning* buku tersebut dalam bentuk teks (txt/rtf/doc/pdf). Saya sendiri saat ini menggunakan *Kurzweil* saat memindai buku. Aplikasi lain yang juga banyak digunakan oleh difabel netra adalah *OpenBook*.

Hal tersebut tentu saja baru bisa dilakukan ketika difabel netra telah sampai ke rumah dan memiliki scan, ataupun mendatangi penyedia jasa scan. Lantas bagaimana jika seorang difabel netra ingin ke toko buku dan membeli buku? Tentu saja banyak hal yang perlu dipertimbangkan seperti (lagi-lagi) soal aksesibilitas area toko buku, dan buku itu sendiri. Sependek sepengetahuan saya, memang, belum ada toko buku maupun perpustakaan umum di Makassar yang mencoba memerhatikan aspek aksesibilitas bagi difabel netra. Tapi bukan berarti difabel netra jarang atau bahkan tidak pernah ke toko buku.

Sejak SMP, saya sudah sering ke toko buku. Saat itu, senior saya di Asrama YAPTI baru saja putus dengan pacarnya. Sebagai pelampiasan, ia rajin sekali ke toko buku, dan membaca buku-buku motivasi. Saat itu kami belum akrab dengan mesin *scan*, jadi sebagai solusinya, kami membawa seorang pembaca (*reader* bernyawa). Tiap sabtu, kami akan menjadi penghuni setia TB Gramedia MP dan MARI, membaca buku motivasi.

Saat bersekolah di SMA 6 Makassar, saya semakin sering ke toko buku, membeli buku mata pelajaran yang terkadang disertai satu dua novel. Sayapun tak ketinggalan saat toko buku online mulai *nge-trend*. Ketika kesulitan mendapatkan relawan saat ingin ke toko buku, saya akan berbelanja online. Bagi saya keberadaan toko buku *online* cukup membantu bagi difabel netra seperti saya, karena saya bisa dengan mandiri membeli buku, tanpa memerlukan bantuan dari teman non-difabel.

Ada satu hal menarik yang sering difabel netra lakukan saat ke toko buku. Kami acap kali mengadakan kompetisi kecil-kecilan, Perihal siapa paling cepat menebak sebuah judul buku. Dengan jari yang sudah terbiasa meraba *taktil* braille, kami meraba sampul sebuah buku, berusaha merasakan dan mengenali huruf yang tercetak di sana. Teman awas yang kami bawa berlaku sebagai jurinya. Tentu saja tidak semua buku bisa kami baca judulnya dengan tepat. Kadang yang terbaca hanya pengarang bukunya, atau jika bertemu dengan buku yang memiliki judul yang cukup panjang, atau mungkin cetakan huruf pada buku tersebut bervariasi, maka kami kesulitan untuk mengenalinya. Hal lain yang paling menyulitkan adalah ketika bertemu dengan buku yang menggunakan tulisan indah atau huruf bersambung, saya sama sekali tidak bisa mengenalinya.

Ada beberapa stan buku yang turut meramaikan festival MIWF 2017. Yang terkenal dan cukup ramai tentu saja stan buku Gramedia dan Gagasmedia. Saya, (masih bersama pacar seseorang yang saya culik tadi), tak mau ketinggalan, turut meramaikan ke dua stan buku tersebut. Meski ada diskonnya, ternyata buku yang terpajang di stan tersebut mahal-mahal.

Jika pengunjung lain menggunakan mata untuk mencari buku, maka saya berusaha percaya diri menggunakan jari telunjuk untuk meraba-raba buku yang tertata anggun di rak. Dan tiba-tiba saja buku kumpulan puisi dari Shinta Febriany

(Berjudul: Gambar Kesunyian di Jendela) menyita perhatian saya. Buku itu membuat saya jatuh cinta pada rabaan pertama. Tanpa pikir panjang, saya langsung meminang dan menebus maharnya. Saya juga membeli buku terbaru dari Khrisna Pabichara: 'Cinta Yang di Acuhkan'. Untuk buku ini, saya cukup sering membaca promosi penulisnya di *facebook*. Tapi bukan sebab itu yang mendalangi saya membelinya.

Belakangan saya mulai jatuh hati pada buku-buku Khrisna Pabichara, karena beliau banyak menggunakan kata-kata arkais (kata-kata tak lazim), yang sangat menarik. Melalui karya-karyanya, saya kemudian banyak menemukan perbendaharaan kata baru yang tentu saja tidak jelek ketika digunakan saat menulis.

DI HARI KETIGA PAGELARAN MIWF (19 Mei 2017), saya mengikuti tiga sesi yakni: *Emerging Writers* 2017 (*Discovering New Writing From Eastern Indonesia*), *Writing the traditions*, dan *Book Launch* (Cinta Yang Diacuhkan) by Khrisna Pabhicara. Saat itu saya alpa mengikuti acara malam harinya di *Main Plaza* Fort Rotterdam.

Hari itu, saya pulang lebih awal karena saya ingin mempersiapkan sesuatu. Dari *schedule* yang saya peroleh, pada hari keempat MIWF (atau hari terakhir), akan ada *book launch* dari Shinta Febriany: "Gambar Kesunyian Di Jendela". Buku yang sebelumnya membuat saya jatuh cinta pada rabaan pertama. Ada hal yang ingin saya persiapkan dan akan saya sampaikan pada acara itu.

Dan sebelum acara *book launch* dari Shinta Febriany berlangsung, saya mendapat sebuah moment spesial berbicara langsung dengan dua penulis top yakni: Shinta Febriany dan Erni Aladjai. saat itu, saya sedang menunggu acara dimulai

ketika Erni Aladjai mendekati saya. Dan tak berselang lama, Shinta Febriany juga bergabung. Mereka tentu mengenal saya, karena pada hari pertama MIWF, saya sempat berpartisipasi pada sesi mereka: *book launch* “Dari Timur”. Demi sopan santun, kamipun berkenalan.

Dalam obrolan kami sore itu, saya akhirnya banyak tahu tentang Shinta Febriany: tentang puisi-puisinya, tentang bukunya yang telah terbit, serta beberapa naskah teater yang sedang dan pernah ia tulis. Erni Aladjai bercerita tentang bagaimana ia berinteraksi dengan difabel, tentang pengalamannya tinggal beberapa hari di Asrama Tunanetra YAPTI, yang kemudian melahirkan sebuah tulisan yang termuat di kompas dan melambungkan namanya.

Saya pun menceritakan pada keduanya tentang novel yang sedang saya tulis, bagaimana saya menulis, bagaimana saya bisa membaca buku. Serta bagaimana caranya saya bisa mandiri mengikuti MIWF. Sementara itu, panitia MIWF mulai menyiapkan beberapa perlengkapan yang diperlukan dalam acara tersebut. Di penghujung obrolan kami, seorang perwakilan dari Gramedia (penerbit buku yang akan di launching) menghampiri kami. Ia langsung menyalami saya. Ia mengaku bahwa kami sudah tiga kali berjumpa di MIWF, (yang sayangnya tak pernah saling menyapa). Ah, ternyata saya cukup terkenal juga.

*

Acara launching buku “Gambar Kesunyian di Jendela” dihelat di Verandah 2 Fort Rotterdam. Erni Aladjai yang bersama Shinta Febriany yang sebelum acara berbincang dengan saya, bertugas sebagai *host*. Sedang penyair sastrawan nasional, Afrizal Malna mendapat kehormatan sebagai pembedah buku. Sepuluh menit pertama diberikan pada Afrizal Malna untuk

mengomentari ataupun mengkaji lebih mendalam kumpulan puisi dalam buku tersebut.
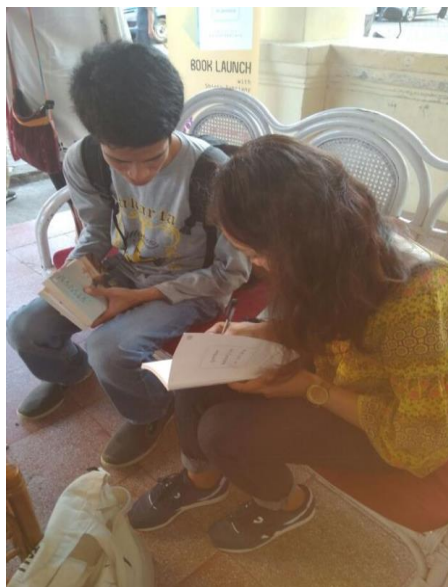
Selanjutnya, Shinta Febriany bercerita proses kreatif dalam proses penulisan puisi-puisi yang terdapat dalam buku tersebut. Secara garis besar, puisi-puisi dalam buku tersebut dibagi dalam tiga sub judul yakni; Perihal Kekasih (terdiri dari 18 puisi), Tubuh Ingatan (juga terdiri dari 18 puisi), dan Metafora Kematian (terdiri dari 19 puisi).

Saya tidak begitu bisa menjelaskan lebih rinci tentang isi buku tersebut, karena sayapun belum membacanya. Tetapi itu bukanlah penghalang yang dapat merintangi keinginan saya untuk mengacungkan tangan pada sesi diskusi. Dan saya pun mengacungkan tangan paling akhir, ketika tak ada lagi peserta diskusi yang ingin berkomentar.
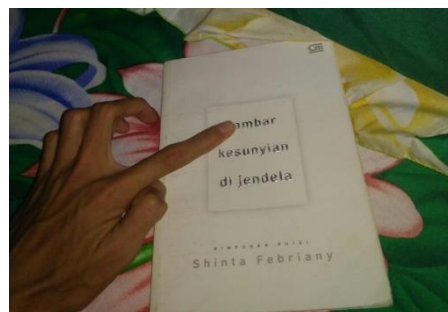
“Saya tak akan berkomentar banyak terkait isi buku ini, terlebih karena saya belum lama menggenggam buku ini,” begitu saya memulai kalimat saya.

“Ada hal lain yang saya rasa cukup menarik dari buku ini, yang saya rasa belum banyak orang yang mengetahuinya,” ujara saya hendak menceritakan bagaimana saya menemukan buku tersebut. Saya menyelipkan sepotong kisah tentang bagaimana seorang difabel netra saat ke toko buku.

“Jujur, saat pertama kali saya meraba buku ini, saya merasa jatuh cinta, kenapa? Karena desain sampul buku ini cukup memudahkan saya untuk mampu mengetahui judulnya. Cetakan huruf pada judul buku begitu timbul sehingga mudah diraba,” kata saya berupaya meyakinkan. Namun, mendengar kata ’meraba dan diraba’ sebagian peserta diskusi dari bagian belakang Verandah 2 kudengar tertawa cecekikan. Tapi itu tidak mengganggu konsentrasi saya untuk mengomentari buku tersebut.

Saya melanjutkan cerita.

“Setelah saya menebus mahar buku ini kemarin, saya langsung meninggalkan Fort Rotterdam. Tadi malam, saya mengunjungi beberapa kawan difabel netra yang juga gemar ke toko buku, hanya untuk merabakan buku ini pada mereka, dan meminta komentar mereka terkait desain sampul dan cetakan huruf pada judul buku ini,” saya berhenti sejenak mengatur nafas.

“Di antara kami sesama difabel netra, ada yang bisa membaca judul buku lewat rabaan dengan mudah, dan ada pula yang secara perlahan-lahan. Bagi difabel netra *low vision* atau masih memiliki sisa penglihatan walau terbatas, desain sampul seperti buku Febriany cukup memudahkan bagi kami. Terlebih karena latar sampul buku berwarna putih polos,” kata saya yang masih ingin melanjutkan cerita.

“Tetapi, ada juga komentar dari teman saya yang buta total. Katanya, cetakan huruf pada judul buku ini sudah cukup timbul,

akan tetapi akan lebih aksesibel lagi jika ukuran ataupun *fonts* hurufnya bisa diperbesar lagi." Saya mengakhiri komentar saya dengan menunjukkan buku *critical eleven* dari Ika Natasah. Buku terbitan Gramedia ini memiliki cetakan huruf pada judul bukunya cukup timbul, dan ukuran hurufnya juga cukup besar.

Diakhir acara itu, saya mendekati Shinta Febriany, meminta ia membubuhkan tanda tangannya di buku. Kami saat itu sepakat untuk bertemu dan berdiskusi lagi di kesempatan lain.

"Ditunggu komentarmu terkait isi buku ini, ya," ujarnya penuh harap.

*

Malamnya, saya mengikuti acara penutupan MIWF di Main Plaza Fort Rotterdam. Ada banyak penampilan yang tersaji malam itu. Ada pembacaan puisi dari Joko Pinurbo dan Shinta Febriany, beberapa band dan penyanyi lokal, serta catatan dari notulen kondang Maman Suherman. Sajian manis paling akhir tentu saja hadir dari Pidato Lily Yulianti Farid yang penuh semangat. Ia berhasil menggugah hadirin dan menyematkan hasrat di hati pendengarnya untuk kembali menantikan MIWF tahun berikutnya[].

"MIWF adalah merayakan kekayaan. Indonesia memiliki kekayaan luar bisaa dalam khazanah seni dan sastra, di mana Makassar adalah salah satu titik yang penting," (Riri Riza).

"MIWF itu ibarat sumur ide, di mana ide-ide baru terus bergulir," (Lily Yulianti Farid)

LITERASI

[3]

BUDAYA TULI
Sebuah Catatan Seri Diskusi Difabilitas

April 22, 2017

Narasumber: Hj. Ramlah

(Ketua Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia – Sulawesi Selatan)

SEBELUM MENULISKAN CATATAN DISKUSI INI, saya mengirim satu pertanyaan kepada sejumlah kawan yang namanya ada dalam henpon-ku. Saya hanya mengambil satu nama dari setiap abjad yang ada. Dari A – Z saya mencari nama-nama kawan untuk menjawab pertanyaan ini.

Pertanyaannya sederhana saja, "Apa sajakah yang Anda ketahui tentang orang Tuli?"

Saya akan kutipkan sejumlah jawaban. Tidak seluruhnya, apalagi tidak semua kawan juga bersedia menjawab pertanyaan walau sudah membacanya.

"Orang tuli itu orang yang memiliki telinga dengan kemampuan yang kurang atau tidak mampu sama sekali mendengar suara atau bunyi. Orang tuli ada yang dialami sejak lahir yang biasanya bergandeng dengan ketidakmampuan berbicara atau tuna rungu. Ada juga faktor lain seperti sakit/penyakit dan usia lanjut."

"Orang Tuli adalah orang yang memiliki cara dan metode pendengaran yang khas/berbeda dengan orang pada umumnya. Mereka mendengar dengan menggunakan metode isyarat gerakan mulut, gesture,

mimik wajah, dan alat bantu pendengaran. Ini disebabkan, tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan organ pendengaran yang dimilikinya."

"Tuli artinya kesunyian. Saya pernah mengalami ketulian akibat virus. Saat pemulihan saya melihat semua gerakan tanpa suara. Sunyi."

"Ada 2 klasifikasi orang Tuli, yaitu Tuli total dan kurang pendengaran. Tuli total yaitu orang yang mengalami hambatan pendengaran secara permanen. Kurang pendengaran yaitu Tuli yang jika diberikan alat Bantu maka ia dapat mendengar. Orang Tuli berkomunikasi dengan bahasa minoritas yaitu bahasa isyarat, kosa kata yg kurang, dan pengetahuan tentang SPOK belum memadai."

"Tuli tidak bisa mendengarkan suara layaknya orang kebanyakan. Biasanya diikuti dengan gangguan bicara. Bagi kebanyakan orang tua butuh kesabaran ekstra menghadapi situasi ini."

"Tuli adalah orang yang tidak bisa mendengar: karena bawaan lahir atau kecelakaan. Orang tuli tidak bisa menikmati pelayanan publik secara maksimal. Belum ada fasilitas khusus di ruang publik untuk orang tuli dan bisu."

"Orang yang tidak bisa mendengar akan tetapi biasanya punya kepekaan indera lain yang sangat tinggi sehingga bisa menggantikan fungsi telinga untuk mengetahui sesuatu di sekitarnya walau tidak semuanya."

"Ada kelainan di indra pendengarannya, baik karena bawaan sejak lahir, atau pengaruh dari luar. Tuli sejak lahir berkaitan dengan kemampuan komunikasi verbal seseorang (bisu), namun bukan karena pita suaranya, tapi karena tidak mendengarkan nada suara atau bahasa, maka jadinya kesulitan berbicara. Orang tuli bisa menggunakan alat bantu pendengaran. Kalau tuli sejak lahir saya belum tau apa alat bantunya atau apakah memungkinkan jika dioperasi."

Jawaban-jawaban di atas hampir seragam, berada ditataran permukaan: menganggapnya sebagai gangguan fisik, bisa diatasi dengan alat bantu pendengaran, berbahasa isyarat, dan tidak bisa menikmati layanan publik secara setara.

Nah, Seri Diskusi bulanan ini tentu menjadi bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita terkait hal-hal yang mungkin sederhana pada awalnya namun ternyata amat kompleks pada kenyataannya. Kepada kawan-kawan yang sudah menjawab, terima kasih.

*

HAJJAH RAMLAH, AKTIVIS TULI SULAWESI SELATAN turun dari mobil pribadinya. Sebelum melangkah ke halaman Sekretariat PerDIK ia berpesan agar menjemputnya saat Magrib. Sore ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4.

Ada sekitar 20 kawan dan partisipan yang sudah menanti kehadiran Ibu Ramlah pun bersalaman bergantian. Selain pengurus PerDIK, Direktur LBH Makassar, Aswandi dan staf LBH, Ali, hadir juga kawan dari Aksara Institute Bantaeng, jurnalis dan pegiat Disabilitas lainnya. Hanya yang pandai berbahasa isyarat yang mengajaknya berkomunikasi. Selebihnya hanya saling berbalas senyum. Rahman, direktur PerDIK langsung mempersilakan Ibu Ramlah menuju ruang tamu yang sudah ditata menjadi ruang diskusi, lesehan.

Diskusi sore ini adalah kali pertama PerDIK melaksanakannya. Ini adalah permintaan pengurus yang kebanyakan belum memiliki pengetahuan memadai terkait isu-isu difabelitas. Rencananya akan dibuat berseri. Untuk dua tema pertama, terkait dengan Difabel Sensorik, yang meliputi Tuli dan Buta/Low vision. Diskusi berseri ini didesain untuk mengantar pemahaman aspek-aspek difabilitas atau disabilitas kepada khalayak umum dan kemudian pada waktu lain yang

lebih panjang dan dikelola lebih serius dapat mendalami setiap tema itu secara mendalam. Misalnya mendiskusikannya dari aspek medik, budaya, politik atau diskursus.

Pilihan tema 'Mengenal Budaya Tuli' kami pilih karena selama beberapa hari ini, PerDIK melalui Rahman Gusdur rutin berkomunikasi dengan kawan-kawan Gerkatin. Yakni saat Rahman membantu sejumlah persiapan dan saat kedatangan Michael Stein, seorang aktivis Deaf dan Hakim dari Amerika Serikat.

Rahman membuka diskusi dengan memberikan pengantar singkat mengenai PerDIK dan Seri Diskusi ini. Beruntung, Gerkatin mengikutsertakan salah seorang Penterjemah Bahasa Isyaratnya, Ciki. Bahasa verbal Rahman, yang tidak dapat didengar oleh Hajjah Ramlah, Arfan dan Bambang yang Tuli, langsung ditransfer menjadi bahasa isyarat. Ciki sempat memprotes Rahman yang dengan gayanya bicara cepat membuatnya kesulitan mengikutinya.

“Pelan-pelan!” ucap Ciki menegur Rahman sambil memeragakan gerakan silat. Semua tertawa. Rahman meminta maaf dan mulai bicara dengan lambat.

Setelah Rahman mempersilakan Ibu Ramlah, gantian Ciki yang menerjemahkan bahasa isyarat ke verbal. Hajjah Ramlah tak kalah gesitnya dalam berbahasa isyarat. Ia mengawali materinya dengan menceritakan pengalaman sebelum mengurus Gerkatin dengan mengikuti sejumlah pertemuan dan pelatihan. Gerakan tangan, jari, ekspresi wajah dan mata serta ucapan untuk menegaskan maksud isyarat tangan pun berayun silih berganti. Nyaris seluruh mata memerhatikan Hajjah Ramlah dan membiarkan gendang telinga mereka menangkap penjelasan Ciki. Memang begitu etikanya jika mendengarkan cerita Tuli. Kita harus fokus kepada pembicara dan bukan kepada penterjemah.

Ciki seorang penerjemah bahasa isyarat yang *ciamik*. Ia bukan Tuli tapi aktivis Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia, khususnya dari aspek Deaf Art. Tidak seperti beberapa penerjemah bahasa isyarat lain yang pernah saya temui, datar

dan garing. Ia menerjemahkan *gesture* itu ke dalam bahasa verbal yang membuat pendengarnya menikmati penjelasan. Intonasinya persis serupa orang bercerita, nyaris tanpa jeda. Ia seperti sudah mengenali semua jenis isyarat yang diperagakan Ibu Ramlah.

Menurut Ibu Ramlah, para pengelola pertemuan dan berbagai pelatihan yang diikutinya itu sama sekali tidak memahami kebutuhan Tuli. Nyaris semua yang diikutinya itu tidak menyediakan bahasa isyarat sama sekali. Tinggalnya dirinya melongo tidak memahami apa yang disampiakan narasumber. Belakangan, saat desakan Tuli kepada publik untuk memahami pentingnya bahasa isyarat untuk menjamin aksesibilitas Tuli barulah saat ini ada kesadaran untuk itu.

Lebih jauh ke belakang, di saat ia masih anak-anak, orang tuanya juga sering memaksanya untuk berbicara atau mengikuti budaya orang bicara. Menurutnya, Tuli tidak menggunakan logika verbal. Kami tidak mendengar dan tidak bicara dengan mulut. Keduanya sudah membelikan berbagai alat bantu dengar, bahkan sampai ke Jakarta alat-alat mahal itu dibelikan. Bertahun-tahun lamanya, orang tua Hajjah Ramlah melakukan kekeliruan demi kekeliruan karena memaksanya untuk mengikuti budaya mainstream, oral.

Setelah dewasa, kini Hajjah Ramlah sudah bisa meyakinkan orang tuanya bahwa tidak ada masalah dengan ketulian ini. Ia kini bisa hidup mandiri tanpa alat bantu apapun. Ia pun sudah mendapatkan pengajaran bahasa isyarat dari kawan-kawan Tuli lainnya saat dia di Jakarta. Bahasa isyarat ini berbeda dengan bahasa isyarat yang dibuat oleh mereka yang berasal dari 'budaya bicara' yang penuh aturan-aturan linguistik serupa tata bahasa, SPOK dan seterusnya. Tuli menyebutnya Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia, bukan SIBI yang dibuat oleh negara.

Bagi orang tua, Hajja Ramlah memberikan sejumlah saran. Menurutnya, deteksi dini perlu dilakukan oleh setiap ibu kepada anaknya. Jika anak tidak memberikan respon atas suara, maka harus segera memeriksakan ke dokter spesialis. Jika memang ada masalah dengan pendengaran, maka segeralah orang tua mempelajari bahasa isyarat dan mengajarkan kepada anaknya. Bahasa isyarat bagi anak Tuli adalah hak paling mendasar. Itulah bahasa ibu seorang anak Tuli. Jika terlambat diberikan, maka akses anak terhadap pengetahuan dan berbagai informasi dari dunia luar akan terhambat sama sekali.

Hajjah Ramlah menceritakan banyak pengalamannya dan Tuli lainnya dalam ranah publik. Mulai dari dunia pendidikan SLB maupun perguruan tinggi hingga urusan pengurusan kartu SIM bagi Tuli.

Hajjah Ramlah sesekali memberi kesempatan kepada Bambang dan Arfan. Dua kader Gerkatin yang masih kuliah di perguruan tinggi. Ciki juga sesekali menyesap air mineral melalui pipet bening yang ia tancapkan di mulut gelas pelastik.

Arfan berbagi pengalaman saat ia mengikuti tes wawancara untuk sebuah pekerjaan. Ia tidak ada masalah dengan tes tertulis maupun tes lisan jika saja tersedia penerjemah bahasa isyarat. Persoalannya adalah, pihak pemberi kerja ini tidak mempertimbangkan hal ini dalam menolaknya, selain bahwa ia Tuli. Menurut Arfan itu adalah tindakan diskriminatif yang dihadapi Tuli. Contoh lain ia paparkan di SLB. Menurut Ibu Ramlah maupun Bambang, materi pelajaran di SLB bagi Tuli itu jauh tertinggal dibandingkan sekolah lain. Hal ini dialami pula oleh Bambang.

Menurut Bambang, saat ia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, ia merasakan soal-soal itu sangat sulit. Akibatnya banyak soal ia kerjakan dengan menebak-nebak saja

jawabannya. Baginya, materi pelajaran yang ia pelajari di SLB memang tidak berbanding lurus dengan materi di sekolah umum. Ini adalah diskriminasi bagi Tuli.

Bambang juga menceritakan pengalaman kuliah di kampus. Ia menceritakan sejumlah praktik eksklusi atau pengabaian mahasiswa Tuli. Ketidaktersediaan penerjemah bahasa isyarat di dalam kelas menjadi persoalan utama. Beruntung ia masih memiliki pendengaran yang lebih baik di telinga kirinya sehingga ia bisa menggunakan alat bantu pendengaran. Tetapi menurutnya, alat bantu ini tidak banyak membantu jika orang berbicara cepat dan membelakanginya. Jika orang berbicara lebih lambat dengan gerak bibir yang lebih ekspresif, maka ia bisa membaca gerak bibir itu dan sedikit bantuan dari alat pendengarannya.

Sebenarnya Gerkatin beberapa kali menyalurkan bantuan alat bantu mendengar bagi Tuli. Mereka pernah menyalurkan sebanyak 280 *hearing aids*. Tapi seperti ia ungkapkan di atas, tidak semua Tuli cocok dengan alat bantu itu. Sekarang ini ada banyak alat bantu yang dibuat oleh perusahaan kesehatan. Salah satunya adalah teknologi implantasi pada kepala bayi. Menurutnya, teknologi ini sangat berbahaya. Ia mengatakan bahwa sudah ada korban dari kegagalan metode implantasi ini.

Hajjah Ramlah juga mencontohkan sejumlah niat baik orang dalam memenuhi hak Tuli. Salah satunya adalah niat baik dari KPU Takalar pada debat publik paslon bupati/wakil bupati Januari lalu. Telah tersedia penerjemah bahasa isyarat, namun letaknya di layar masih terlalu kecil sehingga masih sulit bagi Tuli untuk mengetahui 'bunyi' isyarat itu. Ibu Ramlah berharap pengelola TV mencontoh salah satu TV di Rusia atau sejumlah negara maju yang menyiapkan penterjemah isyarat dengan porsi ruang yang lebih lebar (50:50).

Dalam diskusi ini, kebetulah kawan dari Aksara Institute, Ita usai mengantar seorang ibu dengan anaknya berusia 13 tahun bernama Ilham. Ibunya membelikan satu alat bantu pendengaran kepada Ilham. Alat itu sudah terpasang di telinganya. Ibu Ilham diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman memiliki anak Tuli.

Menurut Ibu Ilham, suhu badan Ilham saat masih berusia belasan bulan beberapa kali mengalami panas dan kejang-kejang. Pada usia 15 bulan suhu tubuhnya sangat tinggi yang menyebakan pendengarannya mengalami gangguan hingga menjadi Tuli. Tetapi karena ia tinggal di tempat yang jauh dari kota, di desa Labo di kabupaten Bantaeng, ia pun tidak mengetahui apapun terkait Tuli apalagi budaya Tuli. Barulah saat ini, setelah Ilham berusia 13 tahun ia dapat informasi soal alat bantu pendengaran. Ia mengleuhkan harganya yang mahal mencapai 3-4 juta sementara JKN atau BPJS yang ia ikuti hanya menanggung 1 juta rupiah.

Menurut Hajjah Ramlah, Ilham harus segera memperoleh pengajaran bahasa isyarat. Ia kembali mencontohkan bagaimana kedua orang tuanya bersusah payah membelikannya berbagai jenis alat bantu mendengar. Sementara itu, pandangan dari Bambang, Ilham harus bersekolah di SLB agar mendapatkan pengajaran bahasa isyarat, atau mendapatkan guru isyarat. Sekolah adalah penting bagi Tuli, simpul Bambang.

Diskusi ini diskusi yang berisi. Apalagi dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan dari partisipan. Wawan dari LBH menceritakan bahwa mereka memiliki dua pengalaman pendampingan kasus di mana Tuli sebagai korban dan saksi. Pihak LBH mengalami kesulitan mengingat keduanya tidak dapat berbahasa isyarat—baik SIBI maupun BISINDO saat

dihadirkan penerjemah isyarat. Tetapi menurut direktur LBH Makassar ini, kedua Tuli ini malah mengerti bahasa 'isyarat orang tua'.

Pertanyaan lain terkait bagaimana pengalaman Bambang dalam mengakses dan membaca bahan bacaan ilmiah di kampus. Bukankah bahasa Tuli adalah isyarat dan tidak memiliki kaidah tata bahasa verbal subjek-predikat-objek-keterangan? Apalagi kosakata Tuli juga terbatas dan masih kurang bahasa ilmiah.

Bambang menjawab bahwa itu memang kendala berat yang dihadapi tuli, tetapi mau tidak mau, untuk memudahkannya mengakses pengetahuan luar, ia harus sering-sering membuka kamus untuk menambah kosakatanya.

Akhirnya, saat azan Magrib berkumandang, diskusi soal Tuli diakhiri. Rahman menyampaikan banyak terima kasih buat kawan-kawan Gerkatin dan partisipan dan terkhusus kepada Ciki yang sudah membuat diskusi ini akses bagi Non-Tuli. Tanpa kehadiran Ciki tentu diskusi ini tidak akan berlangsung baik.

Terima kasih kami kepada Tuli!

LITERASI

[4]

MENGUKUR KEMAMPUAN JASMANI & ROHANI CALON KANDIDAT DALAM PEMILU DAN PILKADA: SEBUAH PERSPEKTIF DISABILITAS

January 19, 2018

Ishak Salim

Mengapa Difabel Protes?

SURAT KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 menuai protes dari komunitas difabel di seluruh Indonesia. Keputusan ini terkait Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Di awali dari Kota Makassar, protes komunitas penggiat isu disabilitas kepada Misnah Attas, komisioner KPU Sulsel yang menyatakan bahwa jika seorang bakal calon teridentifikasi memiliki disabilitas-medik, maka pencalonannya dapat dibatalkan dan diganti oleh pihak pengusul.

Ishak Salim

“Kalau ada kandidat yang mengalami disabilitas medik dan menurut kesimpulan tim pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi persyaratan maka itu bisa dilakukan pergantian,” ujar Misna Attas, Komisioner Devisi Teknis KPU Provinsi Sulsel di Private Care Centre RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sabtu (13/1/2018)”. **https://kabar.news/kpu-kandidat-bisa-diganti-jika-alami-disabilitas-medik**

Pernyataan lain berbunyi, “Berpatokan pada aturan pemilihan, bila ada pasangan calon yang diketahui disabilitas (cacat medis), maka bersangkutan bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat,” kata Komisioner KPU Sulsel, Misna M Attas, Sabtu (13/1/2018).” **https://www.sulselsatu.com/2018/01/13/politik/kpu-bisa-anulir-pencalonan-kandidat-yang-cacat-medis.html**

Pengurus PerDIK Sulawesi Selatan segera merespon pernyataan Komisioner KPU Sulsel dengan 3 hal: Pertama, Pernyataan komisioner KPU Sulsel itu bisa disamakan dengan “KPU menolak warga dengan disabilitas (difabel) menjadi calon kepala daerah” dan itu artinya KPU melanggar Hak Politik Difabel untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana diatur dalam UU. No 19 tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua, Komisioner memaknai disabilitas sebagai ‘orang sakit’ dan tidak cakap. Hal ini merupakan ‘prasangka’ terhadap difabel/penyandang disabilitas yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang pejabat publik (komisioner).

Ketiga, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjamin hak-hak difabel (Pasal 5: Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih,

sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu). Artinya UU Pemilu ini menjamin hak penyandang disabilitas ketika memenuhi syarat, artinya bukan karena ia menyandang disabilitas lantas dianggap tidak memenuhi syarat dan dapat diganti, sebagaimana diucapkan komisioner KPU Sulsel."

Bagi Difabel, Keputusan KPU di atas, yang mengatur sejumlah hal terkait aspek medik ada sejumlah kategori yang masuk kategori 'tidak mampu jasmani', seperti jika bakal calon kepala daerah memiliki 'Gangguan Penglihatan, seperti Buta/Low vision', 'Gangguan Pendengaran', seperti Tuli atau Hard of Hearing (kesulitan mendengar) maupun 'Gangguan Motorik' (sehingga harus menggunakan kursi roda) serta 'Gangguan-gangguan' jenis lainnya seperti terkait mental dan intelektual.

Aturan ini jelas berpotensi menghilangkan Hak Politik Difabel, mengingat semua kategori yang dapat dinyatakan sebagai tidak mampu jasmani dimiliki oleh difabel atau penyandang disabilitas jika menggunakan kategori medik tersebut. Aturan berisi Panduan bagi IDI, HIMPSI, dan BNN-P yang akan menentukan seseorang apakah memenuhi kriteria Mampu Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan Narkoba bisa dikatakan akan merugikan difabel jika hendak mencolonkan diri sebagai kepala daerah dan atau anggota legislatif maupun presiden.

Kekhawatiran yang berujung pada aksi protes ini semakin menguat ketika merujuk kepada '**kesimpulan** dalam aturan ini, yakni, jika Tim Medis melihat ada salah satu unsur "disabilitas medik" dalam aturan ini—seperti buta, tuli, disabilitas intelektual, dan kategori lainnya—maka tim akan memutuskan/menyatakan:

"… pada saat ini ditemukan disabilitas-medik yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota".

Untuk itu, jika dikontekstualisasikan ke dalam contoh berikut ini, kita bisa menyatakan bahwa jika [seandainya] Jonna Damanik (PERTUNI) atau Joni Yulianto (SIGAB), Tolhas Damanik (GIZ) atau Abd. Rahman (PerDIK)–semuanya aktivis difabel, buta–sebagai bakal calon gubernur, bupati atau walikota, lalu diperiksa dan dia ternyata ketiganya buta (total, low vision yang masuk dalam kategori disabilitas medik versi WHO–sebagaimana diatur dalam keputusan ini), maka mereka jelas akan dianggap berdasarkan peraturan ini "kondisi jasmaninya dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya".

Pun demikian dapat menimpa Dwi Ariyani (DRF), Risnawati Utami (OHANA), Juniati Effendi (GERKATIN), M Ismail (SIGAB), Mia Un (HWDI Sul-sel), Surya Sahetapy (GERKTIN), Bahrul Fuad (PUSKAPA-UI), Faisal Rusdi (JBFT), Cucu Saidah (JBFT), Nuning Suryatiningsih (CIQAL), dan kawan-kawan aktivis difabel yang lain dengan beragam jenis disabilitasnya, juga akan mengalami nasib sama dianggap sebagai tidak mampu secara jasmani.

"Mampu" Jasmani dan Rohani dalam Keputusan KPU terlalu *medik*kurang *sosial*

PADA BAB II KEPUTUSAN INI, diatur mengenai Standar Mampu Secara Jasmani dan Rohani. Ada dua aspek yang mencakup standar kemampuan jasmani dan rohani. Pertama adalah Mampu dari Aspek Kesehatan Fisik – Psikiatri

dan Kedua adalah Aspek Kesehatan Psikologi. Sebelum menjabarkan rincian dari kedua aspek tersebut, terlebih dulu dijelaskan terkait pengertian 'Disabilitas Medik' (DM), yakni keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah.

Cakupan Aspek Kesehatan 'Fisik – Psikiatri' meliputi [1] Kesehatan Jiwa ([apakah sedang] mengidap psikosis, neurosis berat, retardasi mental dan gangguan intelektual berat, atau gangguan kepribadian) [2] Kesehatan Jasmani ([apakah sedang mengidap gangguan] Sistem saraf, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, bidang penglihatan (*buta, low vision*), bidang telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher (*gangguan pendengaran/Tuli*), disfonia, sendi rahang berat, kista rongga mulut, kelainan kongenital mulut, gusi dan langit-langit, phonetik berat, dan abses berat.

Cakupan Aspek Kesehatan 'Psikologi', meliputi: [1] memiliki intelejensia yang baik, [2] mampu mengendalikan diri dan emosinya (kecerdasan emosi, stabilitas emosi dan pengendalian diri, [3] memiliki harapan hidup dan kapasitas mencapai tujuan hidup (optimis, penerimaan diri, mandiri), [4] mampu memanfaatkan potensi untuk bekerja produktif, [5] mempunyai sikap hidup sesuai norma masyarakat (karakter moral, penyesuaian diri, kualitas hubungan dengan orang lain.

Kedua cakupan aspek sehat jasmani dan rohani di atas kemudian disosialisasikan ke bakal calon agar dapat mempersiapkan diri sebelum pemeriksaan oleh tim IDI dan HIMPSI dilakukan.

Selanjutnya diatur juga soal Standar Pemeriksaan Kesehatan dan **Penyajian Laporan pemeriksaannya**. Untuk pemeriksaan kesehatan dan bebas penyalahgunaan narkotika,

dalam keputusan itu tidak dicantumkan soal ketentuan penyajian laporan pemeriksaannya sebagaimana terdapat untuk pemeriksaan psikologi. Hal ini patut dipertanyakan pula soal mengapa format pelaporan pemeriksaannya tidak disediakan.

Keputusan KPU itu tampak "terlalu medik" dan abai pada perspektif 'model sosial disabilitas' (*social model of disability*). Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan adanya kelalaian dalam mencermati keberagaman warga negara, dalam hal ini adanya perbedaan kemampuan yang didasarkan kepada kondisi tubuh seseorang (difabel/penyandang disabilitas) dan ketidakaksesan mereka dalam berinteraksi dengan hal di luar dirinya baik secara fisik maupun non fisik. Ini jelas mengancam Hak Politik Difabel saat ini dan pada momen Pemilu mendatang.

Mencermati isi keputusan KPU RI ini, menunjukkan bahwa Komisioner KPU kurang memahami makna "kemampuan" bagi difabel. Cobalah perhatikan salah satu diktum dalam keputusan ini yang berbunyi:

"Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment*ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri **tanpa hambatan yang bermakna**dan **tidak memiliki penyakit** yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya. Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai 'kepala daerah' dalam arti kesehatan adalah keadaan

kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas-medik."

Perhatikan, aturan di atas ini menyebutkan bahwa 'mampu' tidak berarti harus terlepas dari impairment atau disfungsi tubuh/mental dan itu sudah benar, tetapi diakhir kalimat sebagai kesimpulan, disebutkan bahwa terbebas dari disabilitas – medik. Tampaknya, Komisioner tidak memahami arti disabilitas di atas. Ada dua regulasi terkait Disabilitas, yakni UU No 19 tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penggunaan frase 'Penyandang Disabilitas' dalam kedua regulasi ini menunjukkan bahwa 'disabilitas' itu "melekat atau ada" dalam diri seseorang.

Namun, perlu diketahui oleh komisioner KPU yang terhormat bahwa pengertian 'disabilitas' itu sendiri bukan sekadar merujuk kepada diri-individu seseorang. Dalam berbagai literatur, 'disabilitas' memiliki makna sebagai 'hasil interaksi antara kondisi tubuh seseorang (dengan beragam kemampuan) dengan lingkungan (desain sosial) yang [justru] menghambat aktivitas dan partisipasinya dalam lingkungan eksternalnya (sosial). Hambatan-hambatan inipun tidak tunggal melainkan berlapis-lapis di banyak sektor penghidupan masyarakat dan layanan publik negara. Sekali lagi, bukan karena kondisi tubuhnya, melainkan hambatan datang dari luar dirinya. Dampak dari disabilitas ini adalah difabel mengalami penidakmampuan, pengabaian, peminggiran, dan pemiskinan serta diskriminasi.

Jadi, kekeliruan memaknai "kemampuan jasmani dan rohani" bagi difabel akan terjadi jika keputusan ini tidak segera direvisi.

Memaknai "Kemampuan" Difabel sebagai Mampu Jasmani dan Rohani

DALAM BAHASA INGGRIS, ada 3 kata yang sama-sama bisa merujuk kepada pengertian 'mampu' atau 'kemampuan', yakni *capacity* (kapasitas), *ability* (abilitas), dan *capability* (kapabilitas).

Kata 'kapasitas' dan 'abilitas' walaupun sama-sama berarti kemampuan memiliki makna yang berbeda. Kapasitas merujuk pada kemampuan yang ada sejak lahir atau bakat. Sementara, abilitas yang juga berarti kemampuan merupakan kemampuan yang diperoleh dari proses belajar, berlatih dan praktik, atau dapat disebut 'kecakapan'. Misalnya, seseorang punya kemampuan menyanyi sedari kecil (kapasitas, bakat) namun untuk mampu (abilitas, cakap) menjadi penyanyi profesional ia harus banyak belajar, berlatih, dan praktik. Sedangkan kapabilitas seringkali merujuk kepada kemampuan tingkat tinggi, seperti 'terampil' atau 'piawai' atau 'maestro'. Misalnya, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki abilitas (kecakapan) untuk menulis dengan baik, saya akan bertanya apakah Anda memiliki kapabilitas (kemampuan) untuk menulis esai 10 halaman besok.

Contoh lain, saya bisa saja mengatakan bahwa saya memiliki abilitas (kemampuan) untuk menulis, tapi saya tidak memiliki kapabilitas (kemampuan) untuk menulis sebuah novel. Artinya, kapabilitas adalah kemampuan yang lebih, yang bisa jadi ditopang oleh sejumlah dukungan di luar dirinya, seperti ketersediaan alat bantu, kesanggupan finansial, pendidikan tinggi, jaringan kemitraan yang luas, dan dalam konteks difabel adalah bekerja dengan ketersediaan sarana aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Singkatnya, untuk tiba kepada posisi politik tingkat presiden, kepala daerah atau anggota parlemen, maka konteks kemampuan yang digunakan sedapat mungkin

adalah capaian kondisi 'Kapabilitas'-nya dan bukan sekadar 'Kapasitas'.

Dalam kajian ilmu sosial, pendekatan Kapabilitas (*capability approach*) diperkenalkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum. Jika konsepsi kapabilitas Sen kini digunakan dalam mengukur **Indeks Pembangunan Manusia**, maka konsep kapabilitas Nussbaum merupakan penyempurnaan dari konsepsi Sen terkait kapabilitas.

Konsep Kapabilitas ini diartikan sebagai serangkaian pilihan yang secara aktual bisa seseorang lakukan/akses atau capai. Atau apa saja yang dapat atau mampu seseorang lakukan dan 'menjadi' secara aktual. Untuk memperjelasnya, kedua ahli ini membedakan antara Kapabilitas (*capabilities*) dan Pemungsian (*functioning*) . Istilah belakangan ini berarti 'bagaimana orang menjalani hidup secara riil, dengan memfungsikan kapabilitasnya'. Dengan demikian, Kapabilitas adalah potensi, sedangkan Pemungsian adalah capaian dari potensi tersebut.**[3]**

Contoh, Kapabilitas seperti kesehatan, membuka pilihan bagi orang untuk dapat melakukan banyak hal dengan tubuhnya yang sehat, misalnya memfungsikan tubuhnya untuk belajar dan bekerja mencari nafkah yang memadai; atau kebebasan untuk berkumpul dan berserikat sehingga, misalnya, orang bisa memfungsikan kebebasannya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang memengaruhi hidup mereka.

Dalam konteks 'kapabilitas seorang difabel', potensi dirinya dapat difungsikan secara maksimal jika desain sosial di lingkungan eksternalnya mendukung keunikan kemampuannya. Misalnya, kemampuan menulis seorang difabel netra hanya bisa difungsikan jika potensi atau kapabilitasnya bertemu dengan desain yang akses baginya untuk menulis serta ketersediaan akomodasi yang tepat baginya untuk bekerja/menulis. Semisal,

Ia mampu menulis dengan menggunakan 'laptop atau HP bicara' di mana dengan aplikasi *screen reader*ia dapat menjalankan kerja penulisan seperti menyusun kerangka tulisan, menulis, mengedit dan mengeposkan tulisan di media daring.

Nussbaum (Op. Cit.) menyarankan agar 'pendekatan Kapabilitas' menghormati pilihan orang dari budaya tertentu yang bisa jadi kurang berterima di budaya lain. Contoh 'difabel kinetik' bergerak dengan kursi roda sehingga dengan pergerakan sehari-hari dan interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya (keluarga , komunitas, masyarakat) telah membentuk 'budaya difabel' di mana produk kebudayaannya berupa aneka kursi roda adaptif, desain rampa, desain pintu geser, desain lift, desain toilet akses sampai hadirnya seperangkat 'etika disabilitas' yang mengatur pola interaksi yang tepat antara difabel dengan non-difabel. Misalnya bagaimana etika mengobrol dengan difabel yang [sedang] memakai kursi roda dengan orang yang tidak berkursi roda, tata cara menawarkan bantuan, dst. Artinya, jika mengacu kepada hal 'difabel memperjuangkan hak politiknya untuk dipilih sebagai kepala daerah', maka keseluruhan proses pemilihan sampai pada saat ia bekerja setelah terpilih secara resmi, pihak penyelenggara pemilihan maupun pengelola kantor pemerintah daerah dan rumah jabatan kepala daerah harus menyesuaikan seluruh aspek yang memungkinkan kepala daerah difabel memungsikan kapabilitasnya, yang jika merujuk ke pendapat Nussbaum terdiri dari: [1] kemampuan hidup wajar, [2] kesehatan yang prima, [3] kekuasaan atas tubuh, [4] Sense, imajinasi dan pemikiran; [5] emosi/perasaan; [6] menalar; [7] berafiliasi; [8] hidup dengan spesies lain; [9] bermain [10] kontrol terhadap lingkungan politik dan material.

Seluruh kapabilitas ini penting ada secara bersamaan, dan tidak bisa mengutamakan yang satu dengan mengorbankan yang lain. Namun dua diantaranya sangat penting karena berpotensi

menjamin keberadaan ‘kapabilitas’ yang lain, yaitu kemampuan menalar dan berafiliasi sebab keduanya mengorganisir dan mengisi seluruh kapabilitas yang lain, membuat pemenuhan keduanya bisa benar-benar memanusiakan (*truly human*). “Manusia harus berfungsi sebagai mahluk yang berpikir, bukan sekadar baut dalam mesin; dan harus bisa dilakukan bersama dan terhadap orang lain dengan melibatkan sikap saling menghargai.” (ibid., h. 82).

Menurut Nussbaum, kemampuan ini harus tersedia bagi seluruh individu, dan kerja sebuah masyarakat atau negara adalah menyediakan basis untuk kemampuan ini hingga setidaknya di batas minimum, yang di bawah batas ini diyakini bahwa manusia tidak lagi bisa berfungsi sebagaimana layaknya manusia bermartabat (ibid., 5-6). Untuk sampai kepada kapabilitas maksimal, baik masyarakat maupun negara harus menyiapkan sebanyak mungkin sarana dan prasarana yang akses bagi seluruh warga negara, termasuk difabel. Jika ada segregasi (pemisahan) maupun diskriminasi (pembedaan perlakuan secara negatif) terhadap warga tertentu maka hal itu akan berimplikasi kepada besaran kapabilitas-nya sehingga berpengaruh pula pada pemungsian kapabilitasnya di tengah-tengah masyarakat. Menjadi kepala daerah tentu merupakan bagian dari upaya memungsikan diri dengan kapasitas, abilitas, dan kapabilitas yang dimiliki dan di sisi lain menjadi kepala daerah juga berarti adalah proses meningkatkan kapabilitas itu sendiri.

Dengan meneropong Kapabilitas, kita bisa melihat sejauhmana tingkat kesejahteraan (well-being) sebuah bangsa. (h.12) Seperti pelayanan kesehatan (agar sehat), pendidikan (agar mampu bernalar sehat dan berimajinasi), ruang terbuka (agar bisa mengakses kegiatan rekreatif), dan seterusnya. Karena itu, Nussbaum menyarankan agar Kapabilitas, dan bukan *functioning*, yang menjadi proyek politik, sebab

mendorong pemungsian hanya merupakan hasil dari tersedianya Kapabilitas. Orang bisa bekerja mencari nafkah atau menjadi bupati karena tersedia layanan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan dirinya 'sehat' dan 'mampu bernalar' dengan baik. Orang bisa menikmati kegiatan rekreasional karena tersedia waktu luang dan ruang khusus untuk itu.

Sayangnya, dalam konteks difabel, seringkali proses menjadi cakap (abilitas) dan terampil (kapabilitas) tidak semudah non-difabel dalam mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia. Ada banyak hambatan ditemui difabel untuk bersekolah di sekolah terbaik, menikmati fasilitas kesehatan terbaik, memperoleh alat-alat bantu aktivitas sehari-hari yang terbaik, beribadah secara nyaman, serta ketersediaan akomodasi layak terbaik di sekolah, kampus, kantor dan tempat publik/layanan publik lainnya.

Selanjutnya, Amartya Sen dkk. (2010) menyarankan bahwa pemerintah bisa berperan dalam menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan publik, dan masyarakat bisa menyumbang kepada perbaikan taraf hidup sebuah keluarga. Dalam kenyataannya, masih banyak layanan-layanan publik yang disediakan pemerintah maupun masyarakat yang tidak akses bagi warga difabel sehingga peluang menjadi sejahtera menjadi tidak setara. Belum lagi pelabelan, penyematan stereotip, pemisahan bahkan diskriminasi kepada difabel telah membangun stigma yang memosisikan difabel sebagai marjinal, sub-ordinat, rentan, miskin, lemah (powerless). Sebagai contoh di bidang pendidikan, di mana kualitas pendidikan bagi difabel di SMA – Luar Biasa kebanyakan masih jauh di bawah kualitas jika difabel bersekolah di SMA umum. Perbedaan kualitas ini bukan hanya terkait kurikulum yang digunakan, tetapi lebih jauh dari itu, yakni sekolah umum lebih menawarkan difabel dapat berinteraksi dengan non-difabel dan saling memahami, dari

pada difabel di SLB yang hanya berinteraksi sesama difabel yang bisa menambah eksklusivitas dan rasa inferior.

Kembali kepada konsepsi 'Kemampuan' dalam SK KPU 231 tersebut, maka sudah seharusnya tim penilai kemampuan jasmani maupun rohani itu tidak harus hanya terdiri dari para pakar medis (IDI, para dokter) maupun psikolog (HIMPSI) saja, melainkan harus melibatkan juga pakar disabilitas dan aktivis disabilitas dari koalisi organisasi-organisasi yang fokus ke isu disabilitas. Saat ini, dengan payung hukum yang kuat bagi warga difabel, maka tidak menutup kemungkinan, akan ada warga difabel mendaftarkan diri untuk menjadi kepala negara, kepala daerah maupun anggota parlemen dan jabatan publik lainnya.

Difabel dengan beragam jenis kemampuannya memiliki alat-alat bantu yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Jika 'bakal kandidat' adalah seorang difabel netra, maka ia akan membutuhkan 'tongkat putih' untuk berjalan, magnifier untuk membaca teks (low vision tertentu), aplikasi pembaca layar pada HP atau laptopnya, bahan bacaan berhuruf taktil (braille), mesin cetak braille dan *guiding block*. Jika bakal calon itu adalah difabel kinetik, maka ia membutuhkan tongkat, atau kursi roda, kruk atau protese serta akomodasi yang spesifik untuknya berupa desain ruangan akses kursi roda saat bekerja . jika ia Tuli maka ia akan mengunakan alat bantu mendengar dan kemampuan berbahasa isyarat dan untuk itu membutuhkan ada penerjemah bahasa isyarat yang harus didatangkan sebagai persyaratan pemenuhan *reasonable accomodation*.

Jika keberagaman disabilitas itu tidak dipahami, maka jebakan cara pandang 'normalisme' (*abled bodies*) akan menjadi satu-satunya cara mengukur kemampuan para kandidat. Berkomunikasi dengan Tuli yang berbudaya isyarat akan sulit dinilai mampu 'bertukar pikiran' ketika penilai bersandar pada

cara pandang 'budaya bicara dan mendengar'. Pun demikian, jika penilai bersandar bahwa para kandidat semuanya berkaki dua dan bergerak tanpa alat bantu, maka ia akan keliru menilai kandidat berkursi roda yang dilihatnya akan mengalami banyak hambatan (dan kemudian dianggap tidak mampu) saat melakukan aktivitas gerak berpindah dari lantai satu ke lantai lainnya yang hanya tersedia anak-anak tangga. Jelas, para difabel akan dinilai tidak mampu jika perspektif *ableism* (abelisme/able bodies) tetap menjadi satu-satunya cara pandang mereka. Jika KPU tidak mengubah cara pandang kenormalan atau abelisme semacam ini, maka KPU adalah bagian dari kekuatan yang menggerakkan politik pencacatan/penidakmampuan di negeri ini[].

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) berkomitmen bersama 'Koalisi Masyarakat Difabel/Penyandang Disabilitas' untuk mendesak KPU agar:

Pertama, meninjau ulang materi Bab II dalam Lampiran Keputusan KPU sebagai Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak 2018, dengan tidak sekadar bersandar kepada pendekatan 'model medik' (*medical model of disability*) namun juga menggunakan 'model sosial' (*social model of disability*) dan pendekatan kapabilitas dengan mempertimbangkan aspek pemungsian (*functioning*) kapabilitas tersebut dalam menjalankan fungsi kepemerintahan.

Kedua, Melibatkan pakar kajian Disabilitas atau Aktivis Difabel/Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam satu organisasi Difabel/Penyandang Disabilitas dalam penilaian atau

pengujian Kemampuan Jasmani dan Rohani bersama tim yang telah ditunjuk seperti IDI, HIMPSI, dan BNN-P.

Ketiga, Menjadikan hasil dari pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani sebagai catatan untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota setelah terpilih dan menjalankan tugasnya;

Keempat, KPU segera melakukan revisi terhadap materi Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, khususnya pada Bab II, yang menafsirkan syarat "mampu jasmani dan rohani" sekadar dalam cara pandang medik paling lambat 12 Februari 2018, sebelum masuk dalam tahapan penetapan pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2018; dan

Kelima, Melibatkan kelompok Difabel/Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan revisi terhadap standar kemampuan jasmani dan rohani dalam Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.

Makassar, 18 Janu

---

[1] Tulisan ini dibuat sebagai dukungan kepada 'Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas' yang hari ini bergerak mendesak KPU RI untuk mengubah Surat Keputusan KPU RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017yang dinilai diskriminatif dan berpotensi membatasi Hak Politik Difabel dalam Pemilu maupun Pilkada.

[2] Penulis adalah kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Staf Pengajar di Universitas Teknologi Sulawesi.

[3] Des Gasper (2002) 'Is Sen's Capability Approach An Adequate Basis for Considering Human Development?' *Review of Political Economy*, Vol 14(4) ; Martha C. Nussbaum (2000) *Woman and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge University Press

LITERASI

[5]

PRAKTIK KUASA-PENGETAHUAN DIBALIK PEMIKIRAN SEORANG PENULIS: RESPON KRITIS ATAS TULISAN DAENG GASSING

May 10, 2017

Ishak Salim, Ketua Badan Pengurus PerDIK

Tulisan Ipul Daeng Gassing menggoda saya untuk mengomentarinya dengan sudut pandang sebagai seorang aktivis difabel. Saya dan sejumlah kawan mendirikan organisasi yang kami sebut PerDIK, Pergerakan Difabel Indonesia untuk

Kesetaraan yang memiliki mandat memproduksi pengetahuan terkait perlawanan atas segala bentuk Politik Pencacatan di negeri ini.

Tentu saja, komentar saya bukan untuk mendistorsi semangat Daeng Gassing yang telah mengangkat isu-isu difabilitas dalam tulisan-tulisannya, tetapi saya melakukannya untuk berbagi pengetahuan dan berharap cara pandang kita terhadap persoalan disabilitas bisa lebih luas lagi.

Tulisan Daeng Gassing berjudul **'Fajrin dan Pendar Cahaya dari Hatinya'**, yang terbit setahun lalu (maklum baru saja saya membacanya). Isinya berkisar pengalaman pertemuan Daeng Gassing dengan Fajrin dan teman-temannya di YAPTI Makassar.

Pada kalimat awal, pembuka tulisan tersebut, sudah membuat saya memberi komentar. Simak kalimat ini, '*Meski matanya tak sempurna, tapi semangatnya luar biasa'*.

Mengapa penulis menempatkan kalimat "Meski mata tak sempurna" harus diletakkan di depan kalimat "tapi semangatnya luar biasa"?

Apa yang hendak ditonjolkan penulis? 'Mata tak sempurna' atau 'semangat yang luar biasa'?

Cara pandang apa dibalik pikiran penulis saat dia menuliskan kalimat pembuka di atas? Apakah dia hendak menonjolkan 'salah satu organ tubuh?' dan dengan itu dia sedang mengamini butir-butir pengetahuan yang ia petik dari 'ilmu medik'?

Mengapa ia memilih 'pendekatan medik' itu? Itu karena rezim kebenaran—meminjam konsep kekuasaan Foucault *the regime of truth*—sejak berabad lamanya sudah menguasai alam pikiran yang bersemayam di kepala orang-orang. Penulis artikel

inipun tak lepas dari kungkungan rezim itu. Jika demikian, maka tulisan ini adalah suatu proses medikalisasi untuk aspek-aspek yang seharusnya bukan soal medik.
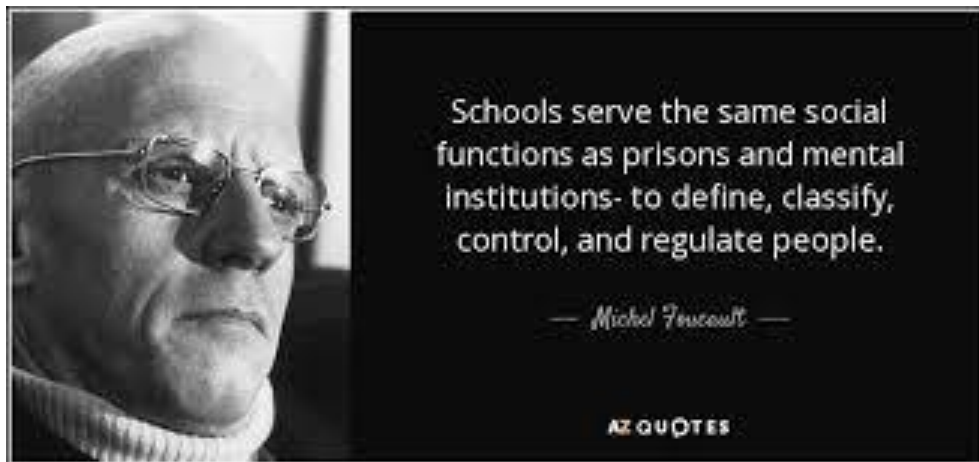
<u>Kutipan</u>

"Saya bukannya tidak bisa membaca Quran bu, tapi saya tidak bisa melihat huruf-hurufnya." Kata Fajri dengan memendam rasa sakit di dalam hatinya.

Malam itu sang ibu marah tak terbendung ketika Fajri tak juga mampu mengikuti perintahnya, membaca deretan huruf hijaiyah di lembaran kitab suci Al Quran. Ibunya marah karena Fajrin dianggapnya bodoh, tak bisa membaca. Padahal dia tak tahu apa yang sebenarnya dirasakan Fajrin.

Fajrin adalah salah satu penghuni asrama milik Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Makassar. Saya menemuninya di suatu hari yang gerah. Waktu itu bersama dua orang kawan saya hadir untuk berbagi tentang bagaimana menulis yang baik kepada Fajri dan teman-temannya, penghuni asrama Pertuni. Sebuah pengalaman yang dengan

segera membuka mata saya, membuat saya menemukan cahaya-cahaya terang dari Fajrin dan teman-temannya.

*

"Sudah lama mi sebenarnya saya suka menulis kak, tapi jelek ki. Ndak ada yang ajar ka." Kata Ade Saputra, salah seorang peserta kelas hari itu. Katanya dia sudah lama mau belajar menulis, hanya saja tak ada orang yang bisa ditempatinya belajar.

Ade yang tambun dan selalu tampak ceria itu adalah seorang penyandang tuna netra kategori low vision. Dia masih bisa melihat meski sangat kabur dan gelap. Ade sangat ceria, sepanjang pertemuan dia nyaris tak bisa diam, terus saja berbicara dan sesekali bercanda. Keceriaannya selaras dengan umurnya yang belum lagi menyentuh angka 20.

Selain Ade satu lagi yang saya ingat betul hari itu. Seorang pria tak seberapa tinggi yang umurnya saya taksir antara 20-25 tahun. Namanya Andi Zulfajrin. Fajrin, begitu dia menyebut nama sapaannya-ternyata sudah lama senang menulis. Dia rajin mencatat kisah kehidupannya meski tak berani memperlihatkannya kepada orang lain. Selama ini catatan-catatannya hanya tersimpan rapi, hanya untuk dirinya sendiri.

Fajrin terlahir sebagai anak yang tak berbeda dengan anak-anak lainnya, sehat dan normal. Dia baru merasakan ada yang berbeda dengan dirinya ketika duduk di bangku kelas tiga SD. Perlahan-lahan penglihatannya mulai mengabur tak lagi sejelas dulu. Awalnya Fajrin tidak paham apa yang terjadi pada dirinya, pun dengan orang tuanya. Satu hal yang paling diingatnya adalah ketika suatu malam sang ibu memarahinya karena tak bisa membaca Al Quran seperti yang diperintahkan.

Dengan memendam rasa sakit di hatinya Fajrin bergumam. "Saya bukannya tidak bisa membaca, tapi saya tidak bisa melihat huruf-hurufnya."

Fajrin sebenarnya anak yang cerdas, di sekolah dia sempat menjadi pemuncak rangking pertama. Hingga kemudian perlahan-lahan pandangannya mulai mengabur, tak lagi setajam dulu. Fajrin terpaksa berhenti bersekolah, meninggalkan keceriaan kehidupan anak-anak yang dulu menemaninya. Hidupnya berganti dari beragam warna menjadi hanya hitam pekat.

Komentar

Saya mengomentari pada paragraph terakhir di atas. Sebenarnya, jika penulis tahu, ia bisa saja menelusuri soal lain selain soal 'mata yang menjadi sakit'. Tampaknya, fokus penulis berpusat pada individu Fajrin yang menjadi buta dan akhirnya memilih 'berhenti sekolah' dan itu berarti penulis (sebagaimana mungkin Fajrin juga berpikir demikian) menganggap bahwa persoalan kondisi tubuhnya-lah yang menjadi alasan mengapa ia harus memutuskan berhenti bersekolah. Sebenarnya, kemungkinan lain yang saya pikirkan (mengingat Daeng Gassing tidak menuliskannya) mengapa Fajrin 'berhenti bersekolah' adalah karena baik pihak guru maupun kepala sekolahnyalah yang memaksa menghentikan Fajrin (yang telah menjadi *low vision*) bersekolah. Artinya, seluruh aspek yang menggerakkan sistem pembelajaran di sekolah saat itu tidak akan mampu mendidik Fajrin dengan kondisi barunya .

Jika penulis punya cara pandang lain, bahwa titik persoalan 'keluarnya Fajrin dari sekolah' diletakkan bukan pada kondisi tubuhnya (baca alasan medik), maka alasan dikeluarkannya (atau keluarnya Fajrin) dari sekolah adalah karena faktor lain, yakni ketidakmampuan sekolah dalam hal ini 'sistem pembelajaran/pendidikan yang diberlakukan maupun kualitas para tenaga pengajarnya. Itu berarti, kita melihat persoalan non-medis yakni 'aspek sosial' dalam konteks keluar atau dikeluarkannya Fajrin dari sekolahnya. Ini yang disebut dalam 'kajian disabilitas' sebagai pendekatan *social model of disability*atau

ketidakmampuan seseorang bukan karena kondisi tubuhnya, melainkan desain sosialnya.

Mari kembali ke tulisan Daeng Gassing.

Keluarga besarnya sebenarnya sempat mencari beragam cara untuk mengobati Fajrin. Dari pengobatan medis di Puskesmas sampai pengobatan alternatif yang sulit dicerna logika. Tapi semua tak ada hasilnya. Fajrin kecil sempat terpuruk kehilangan harapan. Api semangat yang dulu berkobar-kobar dalam dadanya seperti padam tak berbekas.

<u>Komentar</u>

Apa yang membuat keluarga Fajrin harus pontang-panting berupaya menyembuhkan mata Fajrin? bisa jadi karena kuatnya stigma (cap miring) bahwa orang buta tidak akan punya masa depan yang cerah, menjadi tukang pijat dan lain-lain. Banyak aspek sosial yang bisa kita duga untuk kemudian menelusurinya lebih mendalam terkait hal-hal apa yang membuat keluarga ini dihantui kecemasan dan semangat Fajrin memadam hingga redup. Kecemasan dengan kondisi anggota tubuh yang mengalami disfungsi merupakan konsekuensi dari cara berpikir yang disebut abelisme (*ableism*).

Cara pandang abelisme ini adalah bentuk dari cara berpikir bahwa manusia itu 'sempurna tubuh jasmani dan rohaninya' dan untuk itu segala produk sosial atau aneka desain untuk memungkinkan seseorang bergerak atau bertindak itu didasarkan pada kesempurnaan fungsi anggota tubuhnya: mata yang melihat untuk membaca dan memandang sekeliling, dua kaki melangkah/berjalan/berlari/melompat, telinga mendengar, mulut bicara atau berbahasa secara verbal, hidung membaui, jemari meraba dan menulis, lengan mengayun, dan seterusnya.

Dalam keadaan produk sosial berbasis ‘kenormalan’ atau ‘kesempurnaan’ anggota tubuh itulah yang sesungguhnya telah berkontribusi dalam menidakmampukan orang buta, tuli, atau pengguna kursi roda dalam beraktifitas maupun berpartisipasi dalam beragam sektor kehidupan sehari-hari (*disabling condition*). Jadi, kepanikan orang-orang ketika mengalami disfungsi tubuh (*impairment*) akan berimplikasi mengalami ketidakmampuan (*disability*) ketika tidak tersedia berbagai alat bantu (*adaptive devices*) dan akomodasi yang layak (*reasonable accommodations*) di setiap ruang publik di mana seseorang bisa bergaul atau belajar dan bekerja bersama-sama dengan manusia lainnya dengan cara yang berbeda.

Parahnya, di banyak kota maupun kampung, desain-desain sosial ini sudah begitu banyak dibuat yang tidak mempertimbangkan keragaman tubuh, pikiran maupun mental seseorang yang dalam tulisan ini disebut sebagai penyandang ketunaan (misalnya penyandang tuna netra).

Kutipan

Tapi rupanya Tuhan berkata lain. Meski sempat berada di titik terendah kehidupannya Fajrin toh bisa bangkit juga. Dengan penuh semangat dia meminta untuk disekolahkan di SLB di kota Makassar.

Komentar

Dalam banyak pengalaman seseorang mengalami *impairment* seperti sakit baik akibat kecelakaan, virus maupun kesalahan dalam konsumsi makanan atau obat atau sejak dalam kandungan, akan ada fase setelah ‘kesembuhan’ di mana seseorang menerima dirinya secara seutuhnya. Misalnya menerima identitas barunya sebagai ‘orang buta’ dan percaya bahwa ia bisa melakukan banyak hal dengan cara dan tingkat kemampuan yang berbeda. Perubahan menuju penerimaan diri ini sangat ditentukan oleh jenis informasi yang diterimanya. Jika

pikiran-pikiran medik maupun magis yang dominan, maka penerimaan akan dirinya mengikuti logika-logika medik, misalnya menganggap diri tuna (rusak), sakit, dan subjek yang menderita. Dengan penerimaan seperti itu, maka orang ini akan berperilaku layaknya orang sakit, orang tidak mampu, dan memilih menjadi kelas pinggiran. Inilah yang disebut Foucault sebagai '*the technology of self*' di mana seseorang mengamini label yang dilekatkan kepadanya berdasarkan konsepsi kebenaran (pengetahuan) yang sedang dominan atau berkuasa.

Pun demikian orang-orang terdekat maupun tetangga di sekitarnya akan memperlakukannya sesuai dengan cara pandang yang bersemayam dalam pikirannya, seperti mengasihani 'si sakit atau si penderita', meminta si penderita untuk tabah dan menerima kebutaan sebagai ujian dariNya, menanti keajaiban dan seterusnya. Boleh jadi, Fajrin kecil menerima asupan informasi positif bahwa kebutaannya bukanlah suatu persoalan besar sehingga ia tidak harus mengurung diri dan berhenti belajar melainkan harus tetap ke sekolah, bergaul dengan anak-anak yang lain, dan seterusnya. Perlawanan inilah yang lagi-lagi meminjam Foucault sebagai bentuk resistensi atas tekanan kuasa dari atas (setiap praktik kuasa akan ada perlawanan) atau konsep lain seperti yang diperkenalkan James Scoot sebagai 'perlawanan orang-orang tertindas'.

Kutipan

Awalnya sang nenek yang lebih banyak merawatnya tak setuju. Dalam pikiran kolotnya apa yang dialami Fajrin berkaitan dengan mitos yang masih dipercayanya. "Kalau Tuhan mau Fajrin sekolah, dia pasti akan bisa melihat kembali." Begitu katanya.

Tapi Fajrin kepala batu. Niatnya untuk kembali bersekolah sudah kadung membaja. Orang tua dan neneknya menyerah, membiarkan Fajrin menyisir jalan ke kota Makassar dan bergabung di sebuah SLB

milik Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Tunanetra. Di SLB Fajrin berhasil menamatkan pendidikan dasarnya ketika seorang kawannya memotivasi dia untuk melanjutkan sekolah ke SMP umum. Fajrin awalnya gamang, tak berpikir akan bisa. Tapi teman lain semakin mendorongnya untuk bersekolah di SMP umum.

<u>Komentar</u>

Pilihan bersekolah di Sekolah Luar Biasa atau lebih kebelakang lagi yaitu alasan berdirinya sekolah model ini juga tak lepas dari kuatnya cara pandang 'medik' yang dianut aparatus pemerintah yang menganggap bahwa orang-orang yang memiliki kondisi tubuh, pikiran dan mental yang tidak sehat (kondisi medik) maka harus bersekolah di tempat yang berbeda dari sekolah pada umumnya (tempat orang-orang sehat, sempurna, normal, dan *ableist*). Bahkan yang lebih parah, menurut sejumlah informasi yang saya terima dari beberapa diskusi dengan aktivis difabel ada banyak pengelola SLB yang bersikap tidak serius mengelola sekolah ini dan menjadikan sekolah ini atau pola pendidikan segregatif ini sebagai alat pengumpul rente (pundi-pundi bantuan).

<u>Kutipan</u>

Di suatu hari di bulan Juli 2011, Fajrin menguatkan niatnya. Dengan diantar oleh orang panti dia akhirnya mendaftar di sebuah SMP umum seperti layaknya anak lain yang tak berkekurangan. Modal semangat saja ternyata tidak cukup, pihak sekolah awalnya memandang sebelah mata pada Fajrin yang datang dengan keterbatasannya. Mereka tak acuh dan seperti tak berniat menerima Fajrin.

Sekolah itu mengaku belum pernah menerima siswa tuna netra sebelumnya, dan karenanya mereka akan membahasnya dulu dengan pengajar dan kepala sekolah. Lama Fajrin menanti tapi tak ada kabar, satu per satu pengurus sekolah itu membuang muka dan tak memberi kejelasan pada nasib Fajrin.

Komentar

Nah, begitu kuatnya cara berpikir medik ini sebagai *the Regime of Truth* juga menghinggapi para pendidik ini. Konsekuensinya adalah, titik persoalan selalu merujuk kepada sisi personalitas seseorang, bukan kepada sistem pendidikan yang seharusnya dirombak, pola pembelajaran yang mesti menyesuaikan dengan siswa didik, perlunya metode-metode dan alat-alat pembelajaran baru yang adaptif dan kapasitas guru yang perlu ditingkatkan. Bagi para pengajar konservatif semacam ini, anak buta, anak Tuli, Autisme, Sindroma Down, lambat dan kesulitan belajar (*learning disabilities and difficult disabilities*) atau dengan istilah negara 'anak berkebutuhan khusus' [padahal tentu saja setiap orang apalagi setiap anak adalah berkebutuhan khusus] harus bersekolah di sekolah luar biasa. Titik!

Akut*mi* cara berpikir semacam ini, nyaris tidak bisa *move-on* lagi kecuali ada advokasi dan pengorganisasian terhadap kedua belah pihak, murid dan pendidik.

Kutipan

"Karena sikap pihak sekolah yang tidak jelas itu saya akhirnya minta bantuan teman-teman di PERTUNI. Mereka juga yang akhirnya membantu saya, menjadi mediator sampai akhirnya saya bisa diterima di SMP itu." Kata Fajrin dalam tulisannya.

Meski berbeda dan dianggap punya kekurangan, Fajrin toh tidak menyerah begitu saja. Bersaing dengan anak-anak lain yang lebih sempurna fisiknya dari dia tak membuatnya patah semangat. Fajrin memberi bukti, dia bisa menduduki rangking tiga umum mengalahkan ratusan murid lain yang tak punya keterbatasan fisik sepertinya.

"Meskipun saya harus menghadapi beribu tantangan dan menghadapi guru-guru yang kadang tidak dapat memahami keadaan saya yang tunanetra ini, namun semua itu harus saya lewati." Kata

Fajrin. Lalu dia menutup dengan kalimat, "Karena hidup akan selalu indah apabila kita menyikapinya dengan hati yang teguh. Karena keterbatasan tak membatasi kita untuk dikatakan pantas."

Komentar

Gagasan sistem pendidikan inklusi sepertinya belum tampak dalam rentetan kalimat di atas. Dari gambaran di atas, Fajrin pada akhirnya harus tetap menghadapi sistem pembelajaran berbasis 'kenormalan' sehingga ia sebenarnya mau tidak mau harus bekerja lebih keras dibandingkan kawan-kawannya yang lain yang sudah diuntungkan dengan desain pembelajaran sesuai kemampuan mereka. Fajrin berada dalam kepungan sistem pendidikan integrasi.

Kira-kira pihak sekolah setelah mendapat tekanan dari kawan-kawan Fajrin di Pertuni mengatakan, "Oke, kami dapat menerima Fajrin, tetapi *there is nothing should be changed!* dan silakan masuk lalu *fight* dengan sistem kami!"

Dengan demikian, maka kondisi sekolah yang berpotensi menidakmampukan siswa itu sepertinya dianggap bukan sebagai masalah atau sebaliknya menganggap bahwa seperti itulah konsekuensi ketika Anda menjadi buta, berjuang lebih keras dan diperlakukan tidak setara. Kalau Anda sukses melewatinya, maka jadilah Anda orang paling luar biasa.

Kutipan

Andi Zulfajrin hanya satu dari sekian anak luar biasa yang saya temui hari itu. Di balik fisik mereka yang buat kita tak sempurna ternyata tersimpan semangat yang mungkin malah mengalahkan kita yang merasa sempurna. Mereka menantang jutaan rintangan, hanya agar diberi kesempatan sama dengan kita. Dihargai sebagai manusia dan diberi kesempatan sebagai manusia.

Komentar

Daeng Gassing di sini memilih diksi 'perjuangan keras Fajrin' dan bukan kepada 'kejumudan berpikir para pendidik' dan 'kebodohan mereka untuk mengubah cara atau sistem pendidikan agar lebih *inclusive* seperti yang saya kemukakan di atas. Menurut saya, setiap murid bersemangat bagaimanapun kondisinya, tetapi karena desain sekolah yang tidak ramah pada perbedaan kemampuan seseorang yang membuat akhirnya Fajrin menjadi tampak (ditampakkan) luar biasa. Dalam cara berpikir masyarakat jauh sebelumnya, orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi tubuh ini kerap dikategorikan sebagai 'orang sakti', alias 'Luar Biasa', atau *the hero*. Untuk cara berpikir seperti itu, maka sepertinya kalimat Einstein cukup mengena sebagai kritik, yakni "*Everybody is a Genius. But If You Judge a Fish by Its Ability to Climb a Tree, It Will Live Its Whole Life Believing that It is Stupid*".

<u>Kutipan</u>

Fajrin dan teman-temannya membuat saya malu. Malu karena selama ini saya masih sering mengeluh tak puas pada apa yang terjadi di sekitar saya. Malu karena begitu mudahnya saya melewatkan kesempatan yang ada di depan mata, sementara mereka tak pernah menyerah mencari kesempatan hanya agar keberadaan mereka diakui.

Fajrin dan teman-temannya membuktikan kalau mereka adalah pemilik sesungguhnya atas cahaya terang dari kegelapan. Mereka menolak pameo bahwa orang tuna netra hanya cocok sebagai pengemis atau paling mujur sebagai pemijat. Mereka tidak mau itu, mereka berjuang mencari ilmu dan mengasah kemampuan dengan cara yang mungkin tak bisa dibayangkan oleh mereka yang merasa normal.

Dalam sebuah tulisannya yang dimuat di buku "Jurnalisme Plat Kuning; Makassar Nol Kilometer", Ade Saputra berkata, "Ingatlah bahwa kami selaku para penyandang disabilitas adalah manusia yang

dilahirkan ke muka bumi ini untuk dapat melakukan hal-hal yang sama dengan orang-orang normal pada umumnya."

Sungguh sebuah semangat yang mampu meluruhkan kesombongan saya, mungkin juga kesombongan kita yang mengaku normal. [dG]

<u>Komenter</u>

Saya tidak mengomentari penutup dari tulisan Daeng Gassing, karena siapa tau ada*mi* pembaca yang *mannoko-noko* (menggerutu), *'santai lalo mako!'* hehe.

Terima kasih atas tulisanta, Daeng! Salam inklusi[].

LITERASI

[6]

SARAN DARI UBUD UNTUK SEORANG PENULIS BUTA

January 3, 2018

Nur Syarif Ramadhan

PERTAMA KALI SAYA MENDENGAR event Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) kira-kira 2014. Saat itu, saya memiliki sejumlah teman penulis yang mengeposkan (*posting*) di akun media sosialnya masing-masing perihal keikutsertaan mereka di kegiatan tahunan tersebut. Sebagai seorang yang suka menulis dan membaca buku-buku sastra, saya pun mengimpikan, kelak saya akan mengikuti *event* tersebut.

Pada 2017, hampir sebagian do'a saya terkabul. Setelah pada Mei 2017 lalu, saya mengikuti Festival Penulis Internasional Makassar (MIWF, Makassar Internasional Writers Festival) selama seminggu, 4 bulan kemudian, saya berangkat ke Bali. Saya menjadi salah seorang penerima beasiswa dari Pemerintah Australia untuk mengikuti kursus IELTS selama tiga bulan: September – Desember 2017. Kursus ini merupakan bagian dari persiapan melamar Beasiswa Australia Award Scholarship 2018 yang disebut ELTA atau *English Language Training Assistance*.**[1]** Selama mengikuti kursus ini, saya menetap di kota Denpasar. Beruntung, saat Festival Ubud ini berlangsung, saya juga sedang berada di Bali. Sayapun berupaya mencari informasi terkait festival ini dan berniat mengikutinya.

Sayangnya, guna memperoleh informasi memadai, website UWRF tak begitu akses bagi pengguna *screen reader* seperti saya—*low vision*. Aplikasi JAWS—sebagai pembaca teks pada layar—kesulitan mengidentifikasi sejumlah informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan informasi non-teks lainnya. Selain itu, panitia festival juga mematok harga tiket yang tinggi. Belum lagi bagaimana cara saya bisa pergi ke Ubud, saya sama sekali belum punya informasi.

*

DI DENPASAR, SAYA TINGGAL DI RUMAH KOS sederhana yang tak begitu jauh dari IALF. Tepatnya di Gang Pakuk Sari II, kira-kira 250 meter dari IALF, 45 menit dari bandara Ngurah Rai menggunakan mobil. Di jalur pedestrian sekitar IALF, tersedia *guiding block* untuk Difabel Netra. Sayangnya, banyak orang tidak mengetahui fungsi 'ubin berwarna kuning dan bergelombang' itu. Saya menemukan

sejumlah motor parkir di trotoar tersebut dan juga sesajen yang membuat saya berpikir melewatinya.

Selama mengikuti program, ada empat pelatih (*Master Trainers*) membina kami. Semuanya ahli dalam hal pengajaran Bahasa Inggris. Mereka adalah Miss Eri (Aceh), Miss Iva (Kupang), Miss Nurul (Papua), dan Miss Komang (Bali). Adapun koordinator Program ELTA seluruh Indonesia adalah Ibu Agung Sudiani. Mereka inilah yang membantu kami meningkatkan kemampuan dalam berbahasa inggris, meliputi keterampilan dasar *Listening, Speaking, Reading* dan *Writing*. Khusus untuk Ibu Ani, dialah yang menyeleksi 1583 peserta tadi, menyaringnya menjadi 132. Dia pulalah yang dulu mewawancarai saya pada tahap wawancara sewaktu seleksi. Bukan hanya itu, ia juga menyediakan materi pembelajaran yang memudahkan saya dan difabel netra lain mengakses materi yang diajarkan di kelas. Terakhir, Ibu Ani pulalah yang kemudian memfasilitasi saya bisa mengikuti Festival Pembaca dan Penulis Ubud tahun ini, 2017.

Sore itu, sebagai ketua kelas, saya sedang berada di ruangan kantor para Trainers, Saya akan mengambil materi pembelajaran yang akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Saat itulah, bu Ani menawarkan tiket UWRF kepada saya. Ada beberapa item kegiatan dan saya harus memilih saat itu. Miss Nurul membantu kami menelusuri informasi di website UWRF. Dia membacakan semua daftar kegiatan yang tersaji. Saya jelas tidak bisa mengikuti keseluruhan momen festival ini. Saya harus mengikuti kelas kursus dari Senin sampai Jumat. Usai menimbang, kami memutuskan akan mengikuti Workshop tentang '*how to build a character in fiction writer',* 28 Oktober 2017. Saat kami hendak memesan tiket, rupanya *soldout*. Tiket telah ludes. Tapi Bu Ani punya cara lain memeroleh tiket buat kami. Entah bagaimana caranya, kelima tiket tersebut berhasil dibelinya entah di mana.

Setelah mengikuti Mock IELTS Test 1 yang hasilnya tidak baik-baik saja, kami (saya, Miss Nurul, Miss Iva, Miss Eri dan tentu saja Ibu Ani) pun menuju Ubud. Hari itu, kami meninggalkan IALF kira-kira setengah sebelas siang menggunakan mobil Rental dengan Ibu Ani duduk di kursi pengemudi. Pukul 12 siang, kami tiba di Ubud. Setelah menemukan lokasi parkir yang pas, kami kemudian bersantap siang di salah satu restoran terdekat. Sejam kemudian, kami beranjak mencari lokasi workshop sebagaimana tertera pada tiket.

Ubud siang itu cerah dengan suhu udara yang panas. Dalam pencarian menuju Taksu (lokasi workshop), kami melewati deretan restoran yang menyediakan aneka menu makanan lokal maupun internasional, dan puluhan toko menjajakan mulai dari pakaian, ukiran, dan sejumlah hal menarik lainnya.

Saat itu, saya merasa seperti berada di jalan Somba Opu Makassar yang berjejer toko-toko beraneka rupa. Sedangkan kelima pemandu saya menggambarkan suasana itu seperti di Melbourne. Hampir tiap langkah kami berpapasan dengan turis internasional, dengan beragam bahasa dan aksen berbeda. Sayangnya, lagi-lagi Ubud tak begitu ramah bagi difabel seperti saya. Tak usah membayangkan *guiding block*. Area yang kami lewati siang itu terlalu dipadati restoran dan toko serta puluhan kendaraan terparkir di tepi jalan yang sebenarnya bisa diakses pejalan kaki. Area pejalan kaki sangat kecil, kira-kira lebarnya hanya 50 sentimeter, sehingga tidak memungkinkan
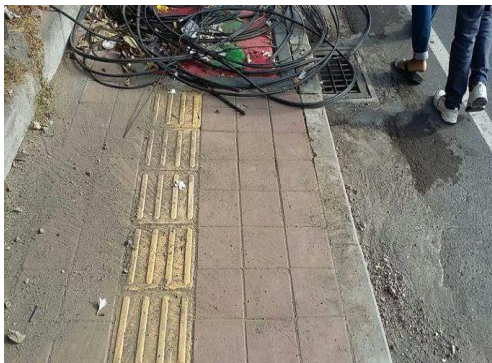
pejalan berjalan bersisian. Belum lagi jika kita berpapasan dengan seseorang, harus ada yang mengalah agar tidak menimbulkan kemacetan pejalan kaki. Kondisi jalanya pun tidak rata, sangat tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda. Saya pun harus berpegangan pada ransel *Miss* Eri, agar tidak terjerembab.

Setiba di Taksu, keempat kawan saya memuji indahnya pemandangan yang tersaji sebelum memasuki ruang workshop. Tapi, lagi-lagi, menurutku, area jalan memasuki gedung sama sekali penuh rintangan. Saya membayangkan pengunjung yang menggunakan kursi roda akan kesulitan bergerak dalam ruangan ini. Jika penyelenggara tidak menyediakan akomodasi yang layak dan sejumlah alat bantu mobilitas, maka panitia setidaknya harus menyediakan sejumlah volunteer guna mengakomodasi kepetingan pengunjung difabel.

Kami memasuki sebuah ruangan persegi panjang. Di dalamnya telah tertata meja dan kursi membentuk huruf U. Sekitar dua langkah dari pintu masuk, kami berbincang dengan seorang wanita parubaya beraksen British, yang meminta kami menunjukkan tiket. Ibu Ani dan Miss Nurul memperlihatkan tiket sekaligus menjelaskan pada wanita tersebut bahwa saya seorang difabel netra (*visual Impairment*). Wanita tersebut berbincang sejenak dengan saya, dan menyilakan saya memilih tempat duduk yang pas.

Setelah duduk, kembali seorang wanita yang kira-kira berusia di atas 50, menghampiri dan menyalami kami. ia memperkenalkan nama. Ia mengaku berrnama Shelley Kenigsberg, ia seorang Afrika tapi tidak berkulit hitam. Sampai di sini, saya masih bisa memahami kalimat-kalimat yang dikatakan Shelley. Pilihan katanya masih mudah bagi seorang pelajar bahasa Inggris pemula seperti saya.

Dari tulisan singkat yang saya baca di website UWRF 2017, ada dua paragraf singkat yang menjelaskan tentang Shelley dalam bahasa Inggris dan Indonesia:

Shelley is a Sydney-based freelance writer and editor fortunate enough to run writing and editing retreats in paradisiacal places. The retreats provide deep support to begin, develop and complete manuscripts of all genres. Shelley mentors privately, through Australian Society of Authors, Byron Writers Festival and monthly writing salons, and teaches at Academy of Literary Arts & Publishing and writers festivals. Shelley adalah Penulis paruh waktu asal Australia dan seorang Editor yang cukup beruntung dapat mengelola kelas menulis dan mengedit di lokasi-lokasi yang menyerupai surga. Kelas tersebut memberikan dukungan mendalam untuk memulai, mengembangkan, dan melengkapi manuskrip semua jenis tulisan. Shelley memberikan bimbingan privat untuk Australian Society of Authors, Byron Writers Festival dan perkumpulan menulis bulanan, dan mengajar di Academy of Literary Arts & Publishing dan festival penulis.

*

SELANJUTNYA, SAAT SHELLEY mulai menyampaikan materinya, Miss Nurul dan Miss Eri secara bergantian menjelaskan makna dari kalimat-kalimat penjelasan Shelley. Masih sedikit kalimat yang saya pahami dari penyampaian

materi Shelley. Apa lagi Ia menjelaskan soal kesusastraan yang bukan menjadi latar pendidikan saya.

"Beginilah suasana perkuliahan di Australia, Syarif," bisik Miss Nurul. "Kamu beruntung bisa mengikuti acara seperti ini," ujarnya lagi. Saya masih mendapati diri saya kesulitan memahami keseluruhan pembahasan.

Satu persatu peserta workshop memperkenalkan namanya, dan mendeskripsikan secara singkat karya yang sementara mereka tulis. Dari situlah kemudian saya bisa mengetahui jika hampir 80% peserta workshop merupakan para penulis profesional yang telah menggeluti pekerjaannya sebagai penulis kurang lebih beberapa tahun. Di hadapan dan di samping saya ada *travel blogger* dari Australia, cerpenis dan novelis dari beberapa negara di Asia Tenggara, serta beberapa *Essays* yang juga ketika berbicara tak menggambarkan kalau mereka orang Indonesia. Mungkin hanya kami berempat yang dari Indonesia, dan satu peserta lagi yang memperkenalkan dirinya bernama Gusti, seseorang yang baru tertarik pada dunia kepenulisan. Menurut ceritanya, ia berasal dari Pontianak,

sengaja datang ke Bali hanya untuk mengikuti UWRF ini.

Di sela-sela workshop, Miss Nurul mengajak saya menemui Shelley. Ia ingin saya mendiskusikan permasalahan utama yang saya hadapi saat menulis cerita. Saya mengiyakan ajakan Nurul. Sekalian saja mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris yang saya miliki dengan Shelley.

Saya bercerita kepada Shelley tentang novel yang saat ini sedang saya tulis. Shelley dengan penuh perhatian menyimak cerita saya yang terbata-bata. Pun demikian saat saya menyampaikan sejumlah kelemahan saya menuliskan detail peristiwa mengingat kemampuan penglihatan saya yang rendah. Bagaimana saya memaparkan objek dalam tulisan saya dengan baik? Kira-kira begitu pertanyaan saya kepadanya. Saya ingin tulisan-tulisan saya mampu menggambarkan detail suasana sebaik para novelis ternama melakukannya.

Menanggapi pertanyaan saya, Shelley mengatakan beberapa hal.

"Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan tulisanmu. Kamu merasa tulisanmu jelek karena buku-buku yang kamu baca merupakan hasil karya penulis-penulis yang telah berpengalaman, di mana kamu berusaha mengikuti gaya menulis mereka," ungkapnya membeberkan cara pandangnya.

Ia lalu menyarankan sejumlah tips.

"Saran saya, cobalah menulis dengan gayamu sendiri dan tak perlu galau dengan jelek bagusnya sebuah tulisan. Selesaikan saja dulu, nanti ketika tulisan itu selesai, coba baca ulang, dan perbaiki yang keliru," paparnya ramah.

"Soal mendeskripsikan sebuah objek, cobalah membaca tulisan penulis lain, pelajari gaya mereka dalam menggambarkan sebuah objek, lalu tulis ulang dengan gaya tulisanmu sendiri.

Saran lain, cobalah membaca novel-novel atau tulisan hasil karya seorang *visual impairment* sepertimu, kamu bisa belajar dari cara mereka menulis," ujarnya penuh semangat.

"Yang paling penting, Syarif, meskipun kamu tidak bisa melihat, kamu masih memiliki indera lain, yang dapat membantumu dalam mendeskripsikan sebuah objek," Shelley memaparkan pandangan alternatifnya yang tidak serupa pandangan orang pada umumnya.

"Misalnya begini, kamu bisa menjelaskan sebuah benda dengan menceritakan bagaimana kamu merabanya, apa yang kamu rasakan saat kulitmu menyentuh benda tersebut. Atau dengan indera lainnya, misalnya mendengar suara. Kamu bisa memaparkan penjelasan bagaimana sebuah pintu tertutup bukan pada deskripsi pintinya, tetapi dari suara gesekannya serta suara-suara lain yang menarik diceritakan, tetapi luput ditulis," pandangan Shelley menyemangati pikiranku. Ini benar-benar nasihat yang berharga untuk saya.

Di akhir diskusi kami, Shelley bersedia membaca dan mengoreksi tulisan saya, namun, ia masih belum bisa berbahasa Indonesia, dan semua tulisanku juga dalam bahasa indonesia. tapi ia berharap, kelak saat kami berjumpa lagi, kemampuan bahasa inggrisku dan bahasa indonesianya sudah lebih baik, sehingga bahasa bukan lagi penghalang baginya dalam membaca tulisanku.

Saat meninggalkan lokasi *workshop*, saya berjalan bersisian dengan penulis muda asal Korea Selatan. Kami pun sempat berbincang sejenak, ia mengaku tertarik menulis isu difabel, utamanya yang ia temui di negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Sebuah obrolan yang singkat namun berkesan[]

***

[1] Tahun ini, ada kurang lebih 1583 peserta yang melamar program ELTA, akan tetapi, yang terpilih mengikuti program hanya sebanyak 132 peserta. dari 132 peserta tersebut, ada 7 orang difabel (termasuk saya) yang beruntung lulus mengikuti program. Dari 7 orang difabel tersebut, 3 difabel netra mengikuti training di Denpasar, 3 orang difabel Daksa di Mataram, dan seorang difabel Lowvision mengikuti training di Kupang[].

[7]

UNIVERSITAS TEKNOLOGI SULAWESI (UTS) MEMPERINGATI HARI DIFABEL INTERNASIONAL 2016 MELALUI SEMINAR SEHARI.

November 28, 2016

HARI INI BERTEMPAT DI HOTEL *The One* Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) bekerjasama dengan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) SulSel memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2016 melalui kegiatan Kuliah Umum dan Seminar Sehari. Kuliah umum disampaikan oleh Bapak H. Ibrahim Saleh, SE. MM. sebagai Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Seminar Sehari diisi oleh Kepala UPT Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya, Makassar) bapak Drs. Aladin, Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UTS, Bapak Drs. Moch. Soleh, MM, dan Direktur Perdik Sulsel Bapak Abd. Rahman, S.Pd.

Dalam penyampaian kuliah umum tersebut, H. Ibrahim Saleh menyampaikan pengalamannya sebagai pekerja sosial dan selama menjabat sebagai kepala dinas sosial. Ibrahim Saleh juga mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Makassar sudah

mengakomodasi kepentingan difabel melalui Perda No. 6 tahun 2013 tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Dihadapan para akademisi dan mahasiswa Univ. Teknologi Sulawesi (UTS) Bapak Ibrahim Saleh memberikan trik-trik bekerja sebagai Pekerja Sosial. Menurutnya, sebagai pekerja sosial kita wajib mengedepankan 'sentuhan hati' dalam mendampingi warga dengan disabilitas. Misalnya, saat Bapak Ibrahim berkunjung ke rumah salah satu eks-penyandang kusta di kompleks Dangko, ia tidak segan-segan meminta tuan rumah menyediakan segelas kopi. Ia menyadari bahwa masih banyak masyarakat salah mengerti kepada penderita kusta. Menurutnya, virus penyebab lepra adalah virus menular namun sulit menulari orang lain. Dengan berbekal pengetahuan medik itu, Ibrahim tidak ragu-ragu bersalaman dengan eks-penderita kusta.

Dalam seminar, Drs Aladin banyak menceritakan pengalaman ia mengelola UPT Panti Sosial Binadaksa Wirajaya. Ia menyebutkan bahwa UU baru terkait Penyandang Disabilitas adalah peluang bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Drs. Aladin menguraikan pengertian dasar dari disabilitas berdasarkan UU baru terkait disabilitas dan sejumlah hak yang dimiliki penyandang disabilitas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Pemateri lainnya adalah Drs. Moch Saleh. MM menyampaikan bagaimana seorang pekerja sosial seharusnya bekerja.

Direktur PERDIK, Abd Rahman mewakili penyandang disabilitas dalam seminar ini. Kehadiran Abd Rahman dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional ini adalah untuk menyampaikan pandangan dari sudut pandang difabel. Menurutnya, dalam gerakan difabel dunia ada istilah '*Nothing about us without us*' yang artinya 'tidak ada hal terkait disabilitas

tanpa kehadiran difabel' menjadi prinsip dalam membicarakan kepentingan difabel. Rahman atau yang lebih akrab disapa "Gus Dur" menyebutkan bahwa difabel bukan insan yang sakit atau sakit seumur hidup. Menurut Rahman, dihadapan para mahasiswa prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial menjadi pekerja sosial harus bisa memahami kondisi difabel tanpa melabeli stigma terhadap difabel. Hal ini supaya dalam mendampingi difabel dalam kerja-kerja sosial, pendekatan atau solusi terhadap difabel bisa tepat sasaran.

Selamat Hari Difabel Internasional 2016.[]

LITERASI

[8]

ORANG MAKASSAR DAN KAITANNYA DENGAN DITEMUKANNYA HURUF BRAILLE

January 5, 2017

Ishak Salim

SUATU KETIKA, Nappo Daeng Liong Battu Ri Bonerate sedang memimpin pasukan dan bersiap menaklukkan musuh di Tanah Perancis. Tidak tanggung-tanggung, perwira asal Selayar berperawakan pendek ini sudah berkali-kali memenangkan berbagai pertempuran bahkan beberapa peperangan di sana. Ia sudah nyaris membawa Imperium Perancis di puncak kejayaannya.

Di awal abad ke-19, ada satu perang yang harus dimenangkannya dan ia membutuhkan satu bentuk 'komunikasi senyap' di malam gulita. Begitu pentingnya pergerakan pasukan di malam hari sehingga harus ada satu kode rahasia yang tak dapat dibaca musuh.

Ia lalu memerintahkan salah satu rekannya asal Sulawesi yang bernama Daeng Se're yang saat itu turut dalam pasukan. Ia tahu Daeng Se're salah satu pasukan yang pandai beberapa bahasa asing dan cakap dalam soal keaksaraan. Ia memanggil Daeng Se're ke ruang meeting para Jenderal.

What is Braille?

Nappo Daeng Liong Daeng Se're Louis Braille Walikota Makassar

Saat di tengah para perwira militer, Daeng Liong menyampaikan maksudnya ke Daeng Se're dalam bahasa Makassar yang kental logat Takalarnya. Maklum, Daeng Se're asli Takalar dan Daeng Liong sewaktu kecil sempat lama tinggal bersama salah seorang Karaeng dari Sanrobone. Perwira-perwira asal Perancis yang ada saat itu tidak tahu apa persisnya yang mereka bicarakan.

Berkatalah Daeng Liong kepada Daeng Se're, "Daeng Se're, buatlah satu kode rahasia untuk kita bisa berkomunikasi di gelapnya malam tanpa berbicara," ujar Nappo Daeng Liong. Daeng Liong memberikan gambaran pertempuran yang akan mereka hadapi dan Daeng Se're manggut-manggut tanda mengerti. Ia pun berpamitan dan meminta waktu beberapa hari.

Singkat cerita, Daeng Se're berhasil menciptakan satu kode yang disebutnya dalam bahasa Perancis "Ecriture Nocturne" atau 'tulisan malam'. Ini adalah sistem aksara dengan menggunakan titik-titik timbul dengan rumus yang dibuat dari 36 kotak (6X6). Tentu saja sistem aksara malam ini cukup rumit, tapi Daeng Se're dapat menyederhanakan penyampaiannya kepada para spionase alias mata-mata Daeng Liong.

Akhirnya, dengan cara ini, komunikasi dalam perang khususnya di tengah pasukan Nappo Daeng Liong berhasil dijalankan dan perang lagi-lagi berhasil dimenangkan.

Beberapa tahun kemudian, pada 1821, para siswa di Royal Institution for Blind Youth atau sekolah untuk para siswa buta di Paris meminta agar Daeng Se're memperkenalkan sistem aksara itu agar bisa dipakai membaca oleh orang buta. Ia pun mempresentasikannya walaupun ia ragu sistem huruf ini bisa dengan mudah digunakan.

Kebetulan, salah satu anak yang mengikuti pelajaran 'tulisan malam' itu adalah Louis Braille, anak Perancis yang buta sejak usia 3 tahun. Ia mengikuti pelajaran tersebut secara seksama dan berpikir bahwa kelak ia harus menyederhanakan sistem aksara ini. Memang dia anak yang cerdas. Tapi walaupun cerdas, ia menyimpan kejengkelan karena tak ada satupun buku di perpustakaan yang akses bagi dirinya yang buta. Dita

mbah lagi, Louis Braille tidak dapat menulis apapun yang ia ketahui untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ia hanya harus menghapalnya dan menyimpannya dalam memori di kepalanya dan menyampaikannya secara verbal.

Karena pintar, akhirnya Louis Braille berhasil memodifikasi aksara Daeng Se're itu dengan sistem yang lebih sederhana (2 kolom; 6 baris). Saat remaja, sekitar usia 20 tahun, sistem aksara

timbul itu semakin sempurna dan ia pun meminta kepada pihak sekolah agar mengizinkannya menggunakan aksara itu untuk memberi kemudahan kepada murid buta agar dapat menulis dan membaca dengan mudah. Akhirnya, huruf braille itupun berhasil diterima sebagai kurikulum membaca dan menulis di sekolah-sekolah di Perancis.

Demikianlah, atas penghargaan kepada Louis Braille, hari kelahirannya, 4 Januari diperingati sebagai Hari Braille se-Dunia, dan tahun ini sudah memasuki tahun ke-208.

Lalu siapakah sebenarnya kedua orang Makassar yang diceritakan di atas? Nah, konon kabarnya, Nappo Daeng Liong Battu Ri Bonerate itu adalah NAPOLEON BONAPARTE dan Daeng Se're itu adalah CHARLES BARBIER DE LA SERRE.

Tentu saja cerita Napoleon dan De La Serre sebagai Daeng Liong dan Daeng Se're hanya humor belaka. Dan untuk itu, sebagai orang Bugis yang menghargai upaya Louis Braille menyempurnakan aksara De La Serre dan kemudian menjadi apa yang saat ini dikenal sebagai aksara braille, saya ingin mengucapkan:

"Selamat Hari Kelahiran Louis Braille!"

Kontribusimu untuk difabel Netra di seluruh dunia sungguh besar sekali. Dari sana telah lahir begitu banyak difabel netra yang melek pengetahuan dan berkontribusi untuk kesejahteraan ummat manusia.

Bayangkan jika Louis Braille tidak membuat aksara itu, manalah mungkin Walikota Makassar bulan lalu, 3 Desember 2016 mendapatkan penghargaan Rekor MURI atas upayanya menghadirkan relawan juru ketik untuk 50 ribu buku yang akan ia transfer menjadi 50 ribu buku bercetak braille.

Benar tidaknya 50 ribu buku itu dicetak dalam huruf braille, soal untuk itu, saya Wallahu ‘alam bishshowab![]

Tambahan informasi:

Beberapa hal dan dampak penting setelah huruf Braille diterima di banyak negara:

1. Kode Braille sering disalahpahami sebagai sistem bahasa yang berbeda. Hal ini sebenarnya merupakan alternatif huruf yang dapat digunakan dalam bahasa manapun. Alih-alih berbentuk karakter, Kode Braille hanya terdiri dari titik-titik timbul di atas kertas.
2. Selain menyempurnakan huruf braille, Louis Braille juga mengembangkan seperangkat huruf untuk notasi musik. Saat ini, hampir setiap bahasa, termasuk bahasa komputer, memiliki versi Braille.
3. Braille terinspirasi oleh ‘desain kode’ seorang Perwira Perancis bernama Charles Barbier de la Serre, di mana saat itu atas permintaan Napoleon Bonaparte untuk membuat ‘sistem penulisan malam’ dalam situasi perang.
4. Orang menggunakan papan tulis (slate, regleta braille), pena tindis (stylus) untuk menulis serta kertas agak tebal (paper) dalam metode Braille. Teknik penulisan tetap sama seperti menulis atau mencetak di kertas.
5. The World Blind Union pada 2014/5 mengampanyekan soal Hak Membaca pada pertemuan/perjanjian Marrakesh. Perjanjian itu akan menjamin bahwa undang-undang hak cipta internasional termasuk bahan bacaan dalam format yang mudah diakses untuk individu yang memiliki hambatan visual. Saat ini, hanya 1 – 7 % dari buku yang diterbitkan di dunia yang tersedia dalam huruf Braille.

6. Huruf Braille telah menjadi bentuk yang paling dimanfaatkan dalam berbagai media alternatif di dunia. Sistem ini melayani sebagian besar penduduk dunia. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2014, terdapat 285 juta orang di dunia yang mengalami hambatan visual, di mana 39 juta benar-benar buta dan 246 juta dianggap memiliki kepekaan visual yang rendah. Sekitar 65 % dari semua orang yang memiliki hambatan visual ini berusia 50 tahun ke atas. Serta, sekitar 19 juta anak-anak dengan hambatan visual dan 1,4 juta mengalami kebutaan seumur hidupnya.
7. Di Amerika, ada sistem peringatan bagi orang-orang dengan hambatan visual. Yakni 'Braille untuk kaki'. Tilco Vanguard mendesain 'braille untuk kaki' ini dan telah menjadi standar layanan publik sebagaimana diatur dalam The American Disability Act (ADA). Braille untuk kaki juga dikenal dengan nama 'truncated domes' yang merupakan 'garis strip kuning cerah' yang membantu pejalan mengidentifikasi daerah-daerah berisiko atau berbahaya dan saat tiba di ujung jalanan.
8. Negara-negara di seluruh dunia juga telah mengambil inisiatif untuk membantu pengguna Braille dalam berbagai moda pelayanan publik seperti layanan peta pengguna kereta, teknologi informasi, dan seterusnya[].

LITERASI

[9]

PUSTAK@BILITAS:

PERPUSTAKAAN YANG DIPERUNTUKKAN MENJADI ARSIP DISABILITAS INDONESIA.

March 17, 2017

Ingat petikan tulisan terkait Mimpi mendirikan Perpustakaan Difabilitas di Makassar?

Coba baca lagi tulisan ini di

https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2017/02/27/mimpi-mimpi-aksesibilitas-di-makassar/

INTINYA, SAAT INI, kami memberanikan diri mengajak teman-teman berkunjung membaca di Perpustakaan PerDIK "BibliAbilitas". Tempatnya masih sederhana, koleksinya masih terbatas, belum punya katalog dan pustakawan, tetapi kalau mau membaca beberapa buku 'kajian-disabilitas' sambil ngopi Toraja-Arabica, datanglah!

Bagi para penulis dan penggiat organisasi, yang bekerja khususnya dengan isu disabilitas, kami menerima "titipan" buku-buku atau aneka ragam tulisan (policy brief, artilkel lepas, jurnal, majalah, bulettin dll) dari tempat-tempat Anda dari manapun. Buku berkualitas dengan tema disabilitas dalam konteks Indonesia masih terbilang sedikit. Kami bersedia menerimanya, dan jika perlu kami siap menanggung ongkos kirimnya.

Kalau ada banyak orang menyimpan buku-buku dan semua jenis produk pengetahuannya terkait isu-isu disabilitas di sini, maka kelak kami akan mewujudkan 'Disability Archives of Indonesia' sebagaimana Leeds University di Inggris yang kini sudah menyediakan Arsip ini bagi secara online maupun offline.

Untuk keperluan mewujudkan niat ini, maka berikut alamat kami:

Sekretariat PerDIK
Jl. Pendidikan 1 Blok B5 No. 8
Makassar 90222
Hp. [08124106722]

08-13-20 08:16
DAERAH INKLUSIF
SABAR GORKY

LITERASI

[10]

RESUME DISKUSI AJI KOTA MAKASSAR – PERDIK SULSEL: DARI SOAL PERISTILAHAN DIFABEL – DISABILITAS SAMPAI CITA-CITA MEMBANGUN MASYARAKAT INKLUSI

February 10, 2017

DISKUSI BERTEMAKAN "Difabel dalam Bingkai Media Massa" di Rumah Independen dipenuhi peminat dari berbagai kalangan. Seluruh kursi seluruhnya terisi. Beberapa peserta bahkan memilih duduk di jok-jok motor yang diparkir di halaman waroeng kopi yang dikelola oleh Aliansi Jurnalis Independen Kota Makassar.

Haji Ibrahim Saleh, mantan kepala dinas Sosial kota Makassar, kini sekretaris Kota Makassar hadir sebagai salah satu pembicara. Kedatangannya tepat waktu pada pukul 14.00 membuat diskusi ini dilaksankan tepat waktu.

Diskusi dibuka oleh seorang dari AJI Kota Makassar dengan memperkenalkan diri para panelis dan menyilakan Ketua Aji Kota Makassar, Agam Qodri Sofyan memberikan kata sambutan sebagai tuan rumah.

Agam menyatakan bahwa diskusi ini merupakan kelanjutan dari diskusi-diskusi yang digelar AJI sebagai wujud

keberpihakan terhadap isu-isu kelompok marjinal, seperti perempuan, anak dan isu disabilitas. Agam juga menyatakan bahwa persiapan menuju diskusi sore ini merupakan hasil dari beberapa diskusi dan pertemuan kecil—khususnya dengan pengurus PERDIK SulSel terkait masih kurangnya ruang yang diperuntukkan bagi difabel dalam pemberitaannya. Dalam sambutannya, Agam sebagai ketua Aji Kota Makassar mengajak berbagai pihak untuk berjuang bersama-sama mengangkat harkat dan martabat difabel di Indonesia. Setelah itu, Kata sambutan juga disampaikan oleh Abd. Rahman selaku Direktur PERDIK Sulsel.

Moderator Diskusi ini dipandu oleh Arul Ramadhan, anggota AJI Kota Makassar dan jurnalis dari Makassar Terkini. Dalam sudut pandang media, tidak dapat dipungkiri saat ini ruang pemberitaan yang disediakan oleh media massa masih minim. Salah satu aspek yang penting yang jadi titik persoalan difabel adalah soal aksesibilitas. Bagaimana membuka ruang ini agar lebih terbuka bagi difabel diharapkan menjadi topik pembicaraan hari ini.

Seyogianya, hadir 5 narasumber pada siang ini, namun seorang narasumber dari Gerkatin sedang dalam perjalanan menuju lokasi diskusi. Lainnya tidak memberi konfirmasi ketidakhadirannya.

Pemaparan Narasumber

Haji Ibrahim Saleh, SE. MM. Sebagai birokrat senior yang lama berkecimpung dalam dunia disabilitas Kota Makassar, memaparkan sisi-sisi kemanusiaan dalam memandang disabilitas. Pengalamannya berinteraksi dengan sejumlah aktivis difabel di Kota Makassar menunjukkan bahwa difabel itu lebih senang jika ia dihargai martabatnya daripada menganggapnya sebagai orang yang harus selalu mau dibantu. Pendekatan

charity dalam pembangunan kota, khususnya kepada difabel tidak boleh digunakan. Perlakuan terhadap difabel harus dilakukan secara setara.

Dalam konteks pemerintah kota Makassar, keberpihakan terhadap kebutuhan difabel masih minim. Hal ini dapat dilihat dari segi pembiayaan dalam APBD kota dan partisipasi difabel dalam pembangunan. Sekretaris Kota Makassar memberikan contoh, bahwa Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya di mana terdapat sekitar 200-300 difabel itu anggarannya dibiayai oleh Departemen Sosial, atau APBN. Pertanyaannya, di mana peran Pemerintah Provinsi dan Kota Makassar?

Saat ini, walikota Makassar sudah memiliki keberpihakan namun perlu dikawal oleh semua elemen aktivis difabel guna memastikan kebijakan-kebijakan keberpihakan kepada difabel dikawal dan dimonitoring. Jika terjadi penyimpangan, jangan segan-segan untuk mengkritiknya.

Abd Rahman, S.Pd. Sebagai direktur PERDIK, lembaga yang konsern pada isu-isu disabilitas di Sulawesi Selatan memulai dengan memberikan perjalanan kebijakan terkait disabilitas di Indonesia. Mulai dari gambaran singkat di awal kemerdekaan sampai lahirnya UU No. 8 tahun 2016. Penggambaran ini menyinggung juga soal perjalanan peristilahan terkait disabilitas, mulai dari pengidap kecacatan, penderita cacat, penyandang cacat sampai kepada penyandang disabilitas. Termasuk salah satu istilah di mana PERDIK juga

menggunakannya adalah Difabel. Bagi Rahman, difabel merujuk kepada perbedaan kemampuan dan bukan pada ketidakmampuan sebagaimana dalam istilah disabilitas.

Perbedaan peristilahan ini berimplikasi kepada cara media menggunakannya. Pilihan penggunaan ragam kata disabilitas, apakah penyandang cacat, penyandang disabilitas atau difabel menunjukkan cara pandang seseorang. Dalam konteks media dan disabilitas, pemuatan berita masih bias permasalahan difabel namun tidak ada pendalaman. Misalnya, soal perkosaan anak perempuan bisu di pasar Terong yang memperoleh peliputan luas, namun setelah itu tidak ada lagi pemberitaan mengenai kelanjutan nasib anak yang mengalami pelecehan seksual. Dengan minimnya peliputan ini warga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses dan bagaimana difabel keluar dari masalahnya.

Sesi Diskusi

Sebagai pengelola RRI Kota Makassar dan penyiar senior, Ibu Meisye sudah sejak lama menyuarakan isu disabilitas. Menurutnya, ia senang dengan pertemuan ini, khususnya dengan semakin meluasnya dukungan terhadap perjuangan difabel di Indonesia. Ia berharap perjuangan mengangkat harkat dan martabat difabel harus lebih keras dan meluas.

Ostaf Al-Mustafa (Senior Korpala – Unhas), sedikit mempermasalahkan peristilahan baik penyandang disabilitas maupun difabel. menurut Ostaf kedua istilah ini masih mengandung diskriminasi. Ia menawarkan istilah lain yang menurutnya lebih tepat yakni Equality and Ability yang disingkatnya sebagai Enable.

Masitha, Yasmib. Disabilitas sebagai isu yang seksi perlu diangkat oleh media. Rendahnya pemuatan difabel dalam media massa karena isu ini tidak dianggap seksi. Padahal ada banyak

persoalan yang dihadapi difabel dan perlu diwartakan ke publik. Mengenai istilah, ia dan kawan-kawan di Yasmib menghargai kedua istilah ini karena memiliki sejarahnya masing-masing. Menggunakan istilah Penyandang Disabilitas karena hal ini memang sesuai dengan regulasi, namun juga menggunakan istilah difabel karena dipakai secara luas oleh aktivis difabel. Untuk pelibatan difabel dalam perencanaan anggaran porsi difabel masih minim. Ke depan harus diperjuangkan lagi agar lebih banyak difabel masuk ke ruang penting dalam pembahasan kebijakan di pemerintahan. Terakhir, Mashita menyampaikan bahwa temuan Yasmib di lapangan terkait difabel adalah tingkat penerimaan diri baik difabel itu sendiri terkait disabilitasnya maupun di rumah maupun lingkungan sosialnya. Masih banyak difabel yang belum bisa menerima dirinya menjadi difabel.

Rahman (Perdik), ia berterima kasih kepada RRI yang sudah sejak lama melibatkan Rahman dalam sejumlah siaran di RRI. Peran RRI untuk memperjuangkan sangat diapresiasi oleh Rahman. Bagi Rahman, penggunaan istilah menunjukkan paradigma berpikirnya. Hal ini bisa disandingkan dengan istilah kusta yang sudah digambarkan sebagai penyakit kutukan sehingga melahirkan stigma panjang. Jika stigma ini terus melekat maka tingkat penerimaan orang terhadap difabel eks-kusta tidak akan pernah hilang jika tidak disosialisasikan.

Untuk memperjuangkan aksesibilitas gedung publik seperti perhotelan, maka hal ini sebaiknya dilakukan sebelum pengembang membangunnya. Harus ada negosiasi terkait aksesibilitas gedungnya dan jika pengembang itu tidak mengindahkan maka harus diprotes dan dilaporkan ke pemerintah.

Pasal 98 – 102 dalam UU Penyandang Disabilitas sudah mengatur soal aksesibilitas gedung. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah kota untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Ishak (Perdik), turut mengangkat soal peristilahan. Ia menjelaskan panjang lebar soal asal usul peristilahan dan bagaimana kita mengambil sikap atas perbedaan peristilahan ini. Dua istilah ini baik disabilitas maupun difabel adalah dua istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Pun demikian sejumlah istilah yang lebih spesifik semisal Tuna Netra dan Tuna Rungu yang menurutnya berasal dari bahasa sansekerta. Mengapa kita tidak memakai bahasa Indonesia, Buta dan Tuli?

Istilah difabel adalah istilah tanding atas istilah penderita cacat dan penyandang cacat. Peristilahan ini merupakan bangunan pengetahuan yang diproduksi oleh negara. Sementara dari ranah gerakan muncul juga pengetahuan tanding, yakni konsep alternatif yang lebih bermartabat: difabel! Karena punya sejarahnya masing-masing, marilah kita membangun titik temu bukan pada peristilahan tetapi kepada fakta-fakta persoalan

yang dihadapi difabel dan memperjuangan penegakan hak-hak difabel.

Ada banyak istilah terkait disabilitas, bahkan terjadi juga disejumlah negara. Istilah difabel saat ini bukan lagi isitlah yang merujuk kepada orang yang memiliki disfungsi tubuh tetapi ini adalah identitas gerakan. Siapapun yang membela isu disabilitas maka dia adalah difabel atau aktivis difabel. Jadi, istilah ini sudah lebih 20 tahun dan maknanya berkembang sesuai eranya.

Terkait dengan kerjasama Perdik dan AJI ke depan membangun model jurnalisme solusi. Jurnalisme solusi adalah di mana pewarta fokus kepada "solusi' dan bukan sekadar fakta-fakata "masalah disabilitas". Semoga gagasan ini bisa berjalan.

Ratna (LBH Makassar), perlu ada sistem pendataan disabilitas yang bagus. Termasuk data soal tingkat kerentanan orang menjadi difabel. misalnya, betapa mudahnya warga kota menjadi difabel dari jalanan, baik oleh pengendara ugal-ugalan maupun penjambretan. Selanjutnya penting mengangkat soal difabel berhadapan dengan hukum, yakni soal difabel dianggap

‘tidak cakap hukum’. Kita perlu melakukan uji kelayakan atas kebijakan pemerintah kota untuk memastikan apakah sudah ada upaya menuju aksesibilitas atau tidak. Ibu Ratna juga menghimbau agar difabel tidak usah khawatir kepada pemaksaan menandatangani inform consent jika hendak naik pesawat, karena itu akan batal dari segi hukum. Tidak ada kontrak yang dibuat oleh hanya salah satu pihak saja.

Kandacong (Pertuni SulSel), saya masih lebih suka menggunakan istilah penyandang disabilitas. Betul bahwa kita tidak perlu terkungkung kepada mana istilah yang paling benar tetapi saya kira kita perlu menyamakan persepsi soal dibalik kedua istilah ini. Tetapi mari tetap mengedepankan soal substansi persoalan disabilitas yang kita hadapi untuk segera menyelesaikannya. Untuk pemerintah kota janganlah terlalu fokus kepada sekadar prestise tetapi tingkatkanlah prestasi membangun kota dunia yang akses bagi semua warga.

Alwi Fawzi (Trans TV), Bagaimana komitmen pemerintah kota dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Alwi memaparkan bahwa sudah ada regulasi mengenai ketentuan minimal 2% pegawai difabel di setiap kantor pemerintahan dan minimal 1 persen di perusahaan swasta. Alwi berpandangan seharusnya pemerintah kota harus serius dalam memenuhi kewajiban ini.

Haeruddin (i-News), Menurutnya, peristilahan disabilitas amat penting bagi orang media. Harus ada kejelasan terkait mana istilah yang paling benar dan terhormat untuk digunakan dalam setiap pemberitaan. Undink, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa subjektivitas seorang wartawan dapat dilihat dari pilihan kata yang dipilih dalam berita-beritanya. Jadi tetap istilah ini penting dibicarakan. Secara sekilas, Undink juga menyinggung bagaimana Al-Quran menggambarkan difabel. Perlu memperoleh porsi pembahasan bagaimana Islam

memandang aspek-aspek disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penyiar radio, selamat buat rahman. Difabel bukan istilah yang seksi dan kita perlu membuatnya lebih sering memuat isu ini dalam pemberitaan. Saya percaya, di tangan para jurnalis, isu difabel bisa jadi isu yang seksi.

DISKUSI YANG MENARIK ini tidak mengambil kesimpulan apa-apa. Tapi, banyak hal menjadi lebih terang dan dapat dilakukan bersama-sama. Banyak orang dari beragam lembaga telah bekerja untuk mengangkat harkat dan martabat warga difabel. Kerja-kerja kolaboratif tidak dapat tinggalkan. Jika ada perbedaan yang tidak prinsipil di tengah persamaan-persamaan substantif, maka tinggalkan perbedaan itu dan majulah dengan keyakinan bahwa persoalan demi persoalan yang dihadapi difabel (atau Penyandang Disabilitas) dapat diselesaikan[].

LITERASI

[11]

TELAH TERBIT JURNAL DIFABEL VOL. 3 BERTEMA PENDIDIKAN INKLUSI

January 19, 2017
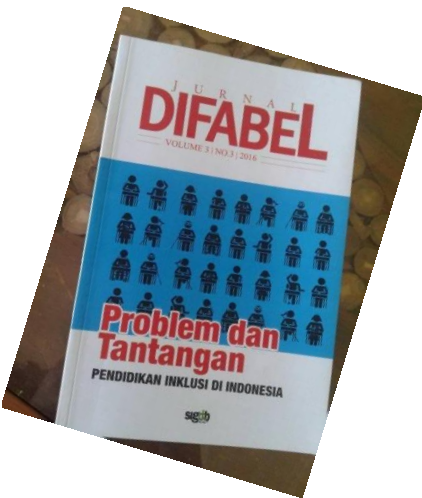
Kawan-kawan sekalian, Jurnal DIFABEL yang diterbitkan SIGAB secara berkala kini telah terbit untuk tahun 2016. Jurnal ini di review oleh Dr. Ro'fah sebagai ahli studi disabilitas dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagi Anda yang tertarik isu difabilitas, khususnya isu Pendidikan Inklusi, sila dipesan melalui PERDIK Sulsel, hubungi email perdiksulsel@gmail.com atau WA di 08124106722. Harganya Rp. 40.000 (diluar ongkos kirim).

Berikut kami tampilkan Review singkat dari Ibu Dr. Ro'fah. Selamat membaca.

INCLUSION IS…

Ro'fah, MA., Ph.D (Pendiri Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) dan Dosen Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Email: roma1399@yahoo.com)

A way of thinking

A way of being

And a way of making decision

About helping everyone belong

Kutipan sederhana diatas menggambarkan hal fundamental yang sering terlupakan dalam narasi pendidikan inklusif. Kebijakan, ruang-ruang seminar, dan halaman jurnal akademik tentang pendidikan inklusif, selama ini masih terlalu fokus pada isu perbedaan dan sumberdaya: guru pendamping khusus, *assessment*, modifikasi kurikulum untuk siswa dan mahasiswa yang berbeda. Adapun aspek yang sangat fundamental, yakni perspektif, cara pandang, dan cara berpikir tentang perbedaan dan inklusivitas, masih berada di pinggiran.

Inklusif adalah ideologi atau keyakinan bahwa semua dunia ini milik semua orang, dan karenanya semua orang tanpa kecuali, punya hak untuk menjadi bagian (*belong*). Bahwa pendidikan adalah milik semua individu –dan karenanya semua siswa dan mahasiswa, apapun kondisinya– perlu menjadi bagian dari pendidikan. Inklusi adalah ketika perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebuah fenomena alami dari kehidupan manusia. Perbedaan bukanlah alasan untuk "membedakan" *(othering),* apalagi sampai memisahkan.

Tentu saja pendapat tentang aspek fundamental dari pendidikan inklusif diatas tidak dimaksudkan untuk menafikan pentingnya bicara implementasi dan strategi. Melangkah dari "*why"* (mengapa inklusi penting) menuju *"how"* (bagaimana inklusi harus dilakukan) adalah agenda penting, karena dengan "*how"* itulah pendidikan inklusif menjadi realitas di ruang kelas, di ruang rapat, bahkan perbincangan ringan di gardu ronda. Namun upaya dan diskusi *"how"* tersebut harus dibangun

berdasarkan narasi inklusivitas, bukan narasi perbedaan. Mengutip Roger Slee, salah satu maha guru pendidikan inklusif. *"Perhaps the question now is not so much how do we move 'towards inclusion' but what do we do to disrupt the construction of centre from which exclusion derives"* (Slee: 2006).

Kata Slee, yang sekarang juga penting dilakukan bukan hanya bagaimana kita melangkah menuju inklusif, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk menginterupsi konstruksi dominan (tentang perbedaan dan pendidikan) yang menjadi sumber dari eklusivitas itu sendiri. Dengan kata lain, kita perlu menengok kembali secara kritis: bagaimana konsepsi kita tentang pendidikan dan sekolah? Apa yang kita harapkan dari pendidikan dan sekolah? Apakah menjadi tempat untuk semua, ataukah hanya untuk mereka yang "berduit", pinter, normal, dan mampu mengikuti norma sosial?

Tulisan Setya Adi Purwanta mengajak kita melihat pendidikan dari mazhab kritis. Mempertanyakan apa yang tadi sudah disebut Slee sebagai "*center*" atau paradigma dominan tentang pendidikan. Demikian juga tulisan mengenai aplikasi konsep pendidikan tertindasnya Paulo Freire dalam wacana pendidikan inklusif, yang mengatakan bahwa konsep Friere bisa dipinjam untuk bisa "memanusiakan" difabel dalam wacana pendidikan inklusif.

Ini menunjukan kita perlu menginklusifkan narasi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif harus menjadi bagian dari perbincangan semua hal dan semua pihak: lintas disiplin, lintas sektor. Ketika narasi perbedaan, spesial, dan khusus masih mendominasi wacana pendidikan inklusif, maka cerita penolakan anak difabel di sekolah masih akan terjadi. Maka seorang dosen di perguruan tinggi masih akan mengatakan bahwa bidang keilmuannya secara inheren tidak bisa dipelajari oleh mereka yang memiliki indra berbeda. Ketika narasi

perbedaan masih menjadi ukuran, maka label "anak inklusi" masih menjadi fenomena umum yang kita jumpai di sekolah, tanpa dipersoalkan bahwa label adalah pintu masuk bagi eksklusivitas.

Salam Inklusi!

lihat juga link berikut

https://www.sigab.or.id/id/content/jurnal-difabel-3-problem-dan-tantangan-pendidikan-inklusi-di-indonesia

LITERASI

[12]

PROF. CAROLINE: ABELISME, AKAR DISKRIMINASI ATAS DIFABEL

November 15, 2016

ISU DISABILITAS DIALAMI HAMPIR SEMUA NEGARA DI DUNIA. Untuk mengatasinya, pakar disabilitas dari Universitas Flinders Australia Caroline Ellison, mengatakan, masyarakat harus mulai menjauhi sikap diskriminasi dan tak sepantasnya memaksakan standar hidup mereka.

Bahkan bagi Caroline, penyandang disabilitas tak butuh belas kasihan.

Berdasarkan data yang dimiliki KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat untuk Pelayanan dan Kesejahteraan) Indonesia, sekitar 20 persen penduduk tiap negara adalah penyandang disabilitas.

Satu di antara lima warga miskin di dunia adalah mereka yang hidup dengan disabilitas.

Lalu, bagaimana cara untuk mendukung dan menyejahterakan kehidupan mereka?

Menurut Associate Profesor Caroline Ellison dari Universitas Flinders, Australia Selatan, masyarakat di berbagai

negara harus mulai menjauhi sikap diskriminasi yang disebutnya sebagai 'ableism' yaitu diskriminasi yang memihak orang-orang tanpa disabilitas.

"Masyarakat 'ableist' mematok gaya hidup orang tanpa disabilitas sebagai standar atau 'kenormalan' yang biasanya berimbas pada kebijakan, kondisi dan layanan di tempat publik dan pribadi lalu menyesuaikan standar 'kenormalan' itu, sehingga melalaikan penyandang disabilitas," jelasnya dalam kuliah umum di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Senin (7/11).

Caroline menyampaikan materi 'citizenhood' di Kementerian Sosial, Jakarta.

Ia lantas menjelaskan, manusia telah mencoba bertahun-tahun untuk mengubah penyandang disabilitas.

"Tapi itu tak berhasil. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita masih mencoba untuk mengubah masyarakat dan itu juga masih tak berhasil," sebut kepala unit inklusi disabilitas dan masyarakat di Universitas Flinders ini.

"Kita butuh untuk membantu mereka mengembangkan hubungan dengan orang yang bisa mengadvokasi, membimbing, dan menciptakan modal sosial, hubungan yang membawa nilai."

"Mengapa? Karena penyandang disabilitas ingin kualitas hidup yang baik," sambungnya.

Caroline lalu menuturkan, masyarakat seharusnya memiliki pola pikir inklusif.

Ia mengemukakan, masyarakat yang inklusif cenderung menciptakan fasilitas 'full' akses, desain universal dan kondisi saling ketergantungan antara orang dengan dan tanpa disabilitas.

“Tapi harus diingat, diterjunkan ke tengah masyarakat, bagi penyandang disabilitas itu belum cukup. Kuncinya adalah produktivitas.”

Peran yang bernilai disebut Caroline sebagai sesuatu yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

“Kita butuh memberi mereka identitas positif. Kita selalu berusaha untuk memutuskan sesuatu untuk mereka, seharusnya kita malah memberi mereka ruang untuk membuat keputusan sendiri karena tak banyak dari mereka tahu cara melakukannya,” terang akademisi perempuan berambut pendek ini.

“Bukan belas kasihan,” tegasnya.

Ia kemudian mencontohkan, setiap orang yang hidup tanpa disabilitas biasanya memiliki 150-250 jaringan pertemanan bebas atau hubungan dengan orang lain.

Di sisi lain, satu penyandang disabilitas rata-rata hanya memiliki 20 jaring pertemanan. Itulah mengapa, kata Caroline, belas kasihan tak akan membantu.

Caroline Ellison mengatakan, masyarakat tak seharusnya melatih penyandang disabilitas agar memiliki kemampuan yang sama dengan mereka.

“Saya pikir, kondisi (belas kasihan) itu hanya akan berubah jika orang dengan dan tanpa disabilitas mau menghabiskan waktu bersama, karena kita harus sadar bahwa disabilitas bukanlah tragedi.”

“Itu tidak tragis, memang susah menjadi orang buta, tidak mudah menjadi orang lumpuh, tapi itu bukan akhir dunia,” jelasnya kepada Nurina Savitri dari ABC Australia Plus Indonesia selepas memberi kuliah umum.

Caroline menyambung, “Ada banyak orang yang hidup dengan keterbatasan tapi mereka mampu meraih banyak hal.”

Hal lain yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan lebih banyak menampilkan penyandang disabilitas di ranah publik.

“Lebih banyak tampilkan penyandang disabilitas di televisi, sehingga mereka lebih sering terlihat. Tempatkan mereka di media, tak harus diberi program yang menginsipirasi tapi munculkan dengan porsi yang cukup setara.”

“Mengapa kita tak punya reporter TV dengan disabilitas? Penyiar dengan kursi roda? buat mereka makin terlihat, tak harus menakjubkan tapi benar-benar melakukan hal umum,” imbuhnya.

Diskriminasi dalam bentuk pola pikir ‘ableism’ (yang menguntungkan orang tanpa disabilitas) dinilai tak akan menyelesaikan masalah. Caroline menyebut ‘citizenhood’ atau kelayakan hidup sebagai manusia sebagai kondisi yang harus dicapai.

“Modal pribadi, modal pengetahuan, modal materi, dan modal sosial, adalah elemen dalam ‘citizenhood’. peran kita adalah untuk menghilangkan hambatan dan mendukung adanya akses terhadap sumber-sumber di atas. Hal itu bisa dicapai lewat pemberlakuan Undang-Undang, kebijakan dan praktek,” jelasnya.

Ketika ditanya tentang bagaimana ide itu bisa diterapkan di Indonesia, Caroline menjawab, “Kebijakan memang dibutuhkan tapi terlebih dahulu masyarakatnya harus sadar. Ini soal mengembangkan kesadaran di tengah masyarakat.”

Ia berujar, “Contoh paling mudah, jika anda membangun gedung, anda harus memikirkan bagaimana semua kalangan bisa mengakses tanpa terkecuali.”

“Jika anda melakukan penelitian tentang disabilitas, anda tak hanya menjadikan mereka obyek, tapi ajak pula mereka sebagai peneliti. Ajak penyandang disabilitas untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Siapa tahu mereka melihat data dengan sudut pandang yang berbeda.”[]

—–

sumber tulisan:

http://www.tribunnews.com/australia-plus/2016/11/11/penyandang-disabilitas-tak-butuh-belas-kasihan

BAGIAN 2

ADVOKASI

[1]

KEKERASAN SEKSUAL ANAK-GADIS DIFABEL DAN SEJUMLAH KEKHAWATIRAN YANG HARUS TERJAWAB!

March 25, 2017

Ishak Salim

PROVINSI SULAWESI SELATAN harus masuk sebagai daerah darurat pemerkosaan terhadap anak dan perempuan difabel. Bayangkan, tak sampai 3 bulan terakhir ada 3 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan difabel di Sulawesi Selatan, yakni Makassar, Soppeng dan Bulukumba mencuat di media. Tidak menutup kemungkinan, ada banyak kejadian serupa luput dari liputan media. Bahkan saat Anda membaca tulisan ini, juga tak menutup kemungkinan pelecehan seksual bagi difabel sedang terjadi.

Di awal tahun, Januari 2017, media massa baik cetak maupun online
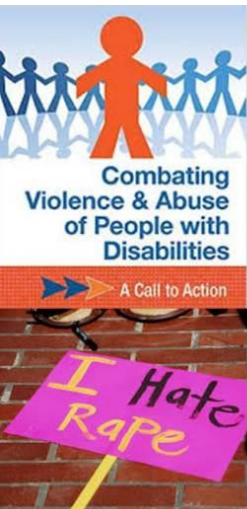
memberitakan peristiwa di mana seorang buruh pasar yang tertangkap basah sedang mencabuli seorang anak-gadis bisu-tuli di gedung Pasar Terong di Makassar. Pelaku yang tertangkap itu sempat babak belur baik oleh penangkapnya maupun entah siapa. Bagaimana cerita dampak pelecehan seksual terhadap korban dan nasib penganiayaan pelaku ini tak lagi dimuat oleh media di hari-hari selanjutnya.

Di awal Februari 2017, kasus kedua terjadi di Soppeng. Media massa mengangkat berita lahirnya seorang anak dari rahim anak difabel mental-intelektual (*tuna grahita*) dari hasil kekerasan seksual yang dilakukan terhadapnya. Pelakunya diduga adalah kepala SLB di mana korban bersekolah. Media massa di awal Februari santer memberitakan 'dugaan si pelaku' adalah kakak kandung dari seorang anggota DPR-RI yang tak lain adalah kepala SLB tersebut. Belakangan, berdasarkan hasil tes DNA terhadap anak yang lahir dari pelecehan ini tidak sesuai dengan dugaan yang diberitakan media massa. Hingga saat ini, media masih memberitakan, bahkan sang anggota DPR-RI yang merasa dipermalukan keluarga besarnya itu masih menjadi objek pemberitaan media massa di mana ia berjanji melaporkan pihak-pihak yang sudah mencoreng nama besar keluarganya, Samsu Niang (lihat di **http://www.klipnews.com/2017/03/01/hasil-tes-dna-polisi-tidak-identik-bayi-dilahirkan-bunga/**).

Kasus ketiga, dimulai dari pemberitaan media massa pada 19 Maret 2017 terjadi pemerkosaan terhadap anak-gadis bisu-tuli di Bulukumba. Dalam rententan hari yang sangat singkat, tak lebih dari 48 jam, kasus perkosaan anak-gadis bisu-tuli yang dilaporkan oleh ibunya di kepolisian justru merenggut nyawa ayah korban akibat penganiayaan di sel kepolisian. Berdasarkan pemberitaan awal, harian online di atas memberitakan kesaksian kepala desa di mana korban tinggal bahwa korban dengan

bahasa isyarat menunjuk foto sang ayah dan diyakini oleh kepala desa bahwa maksud penunjukan foto dan bahasa isyaratnya adalah sang ayah sebagai pelaku pelecehan. Berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian setempat segera menjemput 'si-terduga pelaku' di rumahnya dan menahannya di sel kantor kepolisian. Malang bagi sang ayah, di tempat di mana ia ditahan ia justru dianiaya oleh sejumlah orang sampai akhirnya mati.

Belakangan, setelah sang tertuduh mati teraniaya, justru media massa kembali memberitakan munculnya dugaan baru atau nama baru yang diduga pelaku sesungguhnya. Berita-berita terkait rentetan peristiwa yang kemudian bermunculan akibat kematian ayah korban menjadi semakin marak diberitakan media, bahkan audio-visual. Sayangnya, pangkal dari persoalan ini, yakni pelecehan dan kekerasan seksual anak-gadis bisu-tuli terkesan dilupakan oleh orang-orang yang terlampau marah kepada aparat kepolisian yang turut andil dalam matinya ayah korban akibat penganiayaan oleh entah siapa (lihat salah satu berita
terbaru **http://lintasterkini.com/24/03/2017/dituding-tahanan-tewas-dianiaya-kapolres-bulukumba-perintahkan-periksa-internalnya.html**).

Akar persoalan: Kerentanan Difabel

Jika kita mengikuti perkembangan ketiga peristiwa ini melalui media massa, maka satu hal yang pasti, korban selalu berada dipihak yang terlemah atau paling rentan. Sementara pelaku memiliki daya dan kuasa yang lebih kuat, bahkan jauh lebih kuat. Korban difabel sudah jelas kerentanannya. Korban sebagai anak-gadis yang secara fisik lebih lemah. Lalu sebagai anak yang bisu-tuli atau lambat belajar (akibat kondisi lemah intelegensianya) akan kesulitan mengakses beragam pengetahuan termasuk pendidikan soal seks dan reproduksi.

Apalagi jika keluarga korban merupakan keluarga dengan pendapatan ekonomi yang rendah akan turut menambah derajat kerentanannya di mana akan menghambatnya untuk melakukan sejumlah hal yang diperlukan dalam mengurusi soal hukum, persalinan, kesehatan anak, dan seterusnya.

Kerentanan inilah yang menyebabkan terjadinya bencana bagi difabel atau keluarga difabel. Kerentanan yang bertemu dengan ancaman (adanya orang jahat) akan menciptakan bencana sosial bagi keluarga-keluarga ini. Apalagi dari setiap bencana yang mereka hadapi, rasa malu dan putus asa berkepanjangan pascakejadian telah turut menambah jumlah kerentanan selanjutnya. Anak-anak yang lahir dari anak-gadis yang tak punya kesiapan mental-fisik dan pengetahuan yang cukup untuk merawat anak adalah dampak lain yang tak kalah sulitnya dilewati. Apalagi kemiskinan dapat membuat anak-anak maupun ibu—yang teramat muda usianya—kekurangan pangan bergizi yang bisa berdampak kepada ketahanan tubuh keduanya yang bisa membuatnya menjadi difabel.

Terkait peristiwa di Pasar Terong, saya tak memiliki informasi memadai tentang nasib anak-gadis bisu-tuli ini, selain membayangkan bahwa tentu masih ada efek trauma atas [percobaan] perkosaan yang harus ia tanggung. Di Soppeng, banyak media massa lebih memberitakan tindakan-tindakan ‘orang besar’ dari keluarga siterduga yang berupaya membuktikan bahwa anggota keluarganya tak bersalah. Bahkan bukti hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid* atau dalam Bahasa Indonesia sering juga disebut AND yang merupakan kependekan dari **Asam Deoksiribo Nukleat)** yang dirilis oleh pihak kepolisian (atau sekadar tes sampel golongan darah? ini perlu klarifikasi) juga ternyata tidak menunjukkan bahwa ada kecocokan antara gen anak dan gen ‘tertuduh’. Kita bisa saja mencurigai bahwa hasil tes DNA itu direkayasa (sekali lagi ini

tes DNA atau tes sampel darah?) sehingga tak terbukti. Apalagi, pada pemberitaan awal kasus ini sebagaimana diungkap oleh media, jelas menunjukkan bahwa korban menyebut nama pelaku yang tertuju kepada si tertuduh. Bahkan korban juga menyebutkan di mana pelecehan atau kekerasan seksual itu dilakukan. Jika ada inkonsistensi antara pernyataan korban dengan hasil tes DNA yang kabarnya dilakukan di Jakarta, maka tentu seharusnya hasil tes itu tidak lantas menghentikan penyelidikan APH lebih lanjut. Lagi pula, dalam sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap difabel mental-intelektual, korban tidak pernah berpretensi untuk memberi keterangan.

Dalam kasus ini, si 'orang besar' tidak berada dalam posisi lemah sebagai mana halnya sang korban. Sehingga, dengan posisi yang kuat ia akan bisa dengan mudah mengendalikan banyak hal, termasuk untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi tidaklah seperti apa yang dituduhkan.

Tetapi bagaimana dengan kasus di Bulukumba? Ini menarik untuk dicermati. Ayah korban yang oleh media massa juga diberitakan sebagai pelaku utama pemerkosaan terhadap anak-gadis bisu-tuli, tetapi ia justru mati sebelum ia bisa membela dirinya. Ia mati di tempat yang seharusnya orang-orang yang bertugas melindunginya dengan prinsisp 'asas praduga tak bersalah'. Ia dianiaya sampai mati dan bukti penganiayaan itu bisa dilihat dari tubuh korban yang lebam, memar, dan tersayat.

Posisi lemah atau kerentanan seseorang yang berlapis-lapis tidak memungkinkannya untuk bersuara, membela diri bahkan membalas perlakuan tak adil. Jika sang anggota DPR-RI, Syamsu Niang di Soppeng itu itu masih akan melanjutkan gugatan kepada pihak-pihak yang sedari awal 'menduga dengan kuat' anggota keluarga besarnya sebagai pelaku pemerkosaan,

maka apalah daya Syamsuddin orang desa, yang kini sudah berada di alam kubur.

Tetapi kematian Syamuddin yang dituduh memerkosa anaknya sendiri hingga saat ini menimbulkan gelombang kemarahan massa dan protes kepada lembaga kepolisian. Jika tak ada nama lain sebagai tertuduh pelaku kekerasan seksual muncul, boleh jadi peristiwa lanjutannya tak akan seramai ini. Sebuah nama baru sebagai pelaku muncul dan itu masih anggota kerabat dekat korban. Kemarahan massa terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian semoga berdampak positif terhadap perbaikan kinerja institusi ini. Tetapi di sisi lain, sepertinya orang-orang telah lupa pada pangkal persoalan, yakni nasib korban pelecehan, anak-gadis bisu-tuli ini.

Ketiga anak-gadis difabel ini adalah orang-orang rentan dan kini menjadi korban dari tindakan kejam lelaki yang berdaya-kuasa lebih tinggi dari dirinya, baik atas tubuh diri maupun tubuh sosialnya. Satu di antara mereka telah memiliki anak (di Soppeng) dan satu lainnya sedang hamil (di Bulukumba). Anak dari korban tentu akan kesulitan memiliki akta kelahiran jika tidak ada kejelasan mengenai siapa ayah dan bagaimana status kedua orang tuanya. Pengalaman saya mengurus akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga dan buku nikah serta keterangan siapa ayah dan siapa ibu dari anak bersangkutan selalu menjadi persyaratan yang tak boleh kosong dalam lembar pengajuan. Bahkan di dalam lembar akta kelahrian itu selalu tertera siapa ayah dan ibu dari anak bersangkutan. Dalam akta itulah, tertera Nomor Induk Kependudukan yang menunjukkan sianak sah sebagai warga negara. Tanpa NIK, maka segala macam pelayanan atau bantuan negara terhadap anak atau bayi ini akan terhambat sama sekali. (Tetapi, saat tulisan ini kubaca kembali, jam 12.30 wita seorang kawan, paralegal disabilitas yang baru

kembali dari mengunjungi keluarga korban, bahwa anak yang baru berusia 46 hari ini telah meninggal, 3 hari setelah sampel darah dari bayi ini diambil oleh [entah siapa?]).

INNALILLAHI WA INNA ILAIHI ROJI'UN!

Sebagai aktivis difabel yang aktif di PerDIK, maka bagi kami fokus kepada keadilan bagi korban—yang justru luput dari perhatian banyak pihak termasuk media. Saat ini, korban dan keluarga korban membutuhkan banyak bantuan akibat sejumlah kerentanan yang saya uraikan di atas. Jika kerentanan ini tidak diretas dan diatasi satu persatu, maka setiap hari ancaman itu akan selalu dengan mudah mengintai, menyergap dan mencelakai korban.

Pertanyaan demi pertanyaanpun menyergap saya:

1. Bagaimana dengan para difabel dan keluarga-keluarga difabel lainnya yang saat ini tak terpantau mata para pewarta dan pemerhati? apakah bencana yang mereka hadapi akan dihadapi oleh mereka sendiri?
2. Bagaimana kondisi kerentanan mereka berdampak pada kualitas hidupnya? Siapakah yang bisa membantu mengatasi seluruh aspek kerentanan itu?
3. Bagaimana pula para pengancam dan orang-orang yang berpotensi menjadi pengancam baru di tengah kerentanan orang lain yang semakin bertambah ini? Tak adakah cara lain negara atau kita bisa mengendalikan langkah-langkah kejinya?
4. Bagaimana pula difabel dan keluarga-keluarga difabel yang rentan ini berupaya membentengi diri mereka dan keluarga mereka sendiri di tengah ancaman para pengancam? Apakah kita, sebagai pemerhati cukup punya energi untuk mengupayakan berdirinya benteng-benteng itu?

5. Siapa pula yang bertanggung jawab menjaga sikap para pengancam agar sadar dan berhenti menjadi peneror bagi orang-orang rentan?

Kita tentu saja bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan bernada yang kekhawatiran. Kita pun bisa menemukan sekian banyak formula penyelesaian, tetapi persoalannya, kita seringkali hanya punya sedikit tenaga untuk bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan, baik itu pencegahan kerentanan, mengatasi kerentanan dan mengurangi dampak buruk kerentanan.

Saat ini, saya hanya bisa memikirkan beberapa hal:

Pertama, kita harus bahu-membahu menyiapkan diri untuk mencegah agar difabel dan keluarga-keluarga difabel tidak menjadi rentan.

Kedua, kita harus bersama-sama mengurangi kerentanan-demi-kerentanan difabel maupun keluarga difabel yang sudah terlanjur melekat dalam kehidupannya.

Ketiga, kita harus bersama-sama menemani difabel dan keluarga-keluarga difabel untuk bangkit melewati masa-masa sulit setelah bencana kemanusiaan menimpa mereka.

Bagi kami di PerDIK, mengurangi kerentanan berarti menambah kekuatan dan kekuuatan baru itu diperoleh dari orang-orang yang peduli. Siapakah mereka? Siapapun mereka, baik dari anggota-anggota keluarga korban, keluarga pelaku, atau keluarga-keluarga lain dan institusi-institusi yang peduli pada nasib ketidakadilan yang menimpa banyak manusia rentan. Ya, termasuk Anda dan anggota-anggota lain di keluarga Anda!

Makassar, 25 Maret 2017

Untuk informasi lebih lanjut, bisa lihat pada link berikut ini:

http://beritabulukumba.com/51885/pakai-bahasa-isyarat-gadis-bisu-bulukumba-mengaku-dihamili-bapak-kandung/amp

http://beritabulukumba.com/51910/bapak-yang-hamili-anaknya-di-bulukumba-tewas-diduga-bunuh-diri/amp

http://beritabulukumba.com/51914/korban-diduga-meninggal-tak-wajar-kapolres-kita-tunggu-hasil-visum/amp

http://www.suarahati.net/dapat-hukuman-hamili-anaknya-yang-bisu-pria-ini-dianiaya-dalam-sel-hingga-tewas/

https://www.suaralidik.com/sejumlah-keluarga-korban-tewas-di-dalam-sel-datangi-mapolres-bulukumba/

http://news.inikata.com/read/2017/03/23/18690/kapolres-bulukumba-diminta-bentuk-tim-investigasi-independen

http://m.beritakotaonline.com/37852/unjuk-rasa-kompak-ricuh-tuntut-polres-bulukumba-soalnya-tewasnya-tahanan/

http://m.beritakotaonline.com/37871/soal-kematian-syamsuddin-di-tahanan-lbh-pemuda-knpi-sulsel-minta-polda-bentuk-tim-khusus/

http://makassar.tribunnews.com/2017/03/22/massa-keluarga-pria-salah-tangkap-tewas-di-sel-bulukumba-boikot-jalan-bulukumba-sinjai

http://makassar.tribunnews.com/2017/03/22/video-ibu-rumah-tangga-asal-tibona-ikut-demo-polres-bulukumba-terkait-tahan-tewas

http://makassar.tribunnews.com/2017/03/21/kapolres-bulukumba-janji-usut-penganiaya-korban-salah-tangkap-di-selnya-hingga-tewas

http://makassar.tribunnews.com/2017/03/20/ngeri-begini-kondisi-mayat-pria-yang-tewas-di-sel-polres-bulukumba-padahal-salah-tangkap

http://fajaronline.com/2017/03/21/begini-kronologi-kematian-tahanan-versi-polres-bulukumba

http://pilarbaru.com/2017/03/20/depresi-terduga-pelaku-cabul-gadis-bisu-di-bulukumba-tewas/

http://pilarbaru.com/2017/03/20/kapolres-bulukumba-keluarga-almarhum-terduga-pencabulan-anak-kandung-menyerahkan-pemeriksaan-sepenuhnya-kepada-polisi/

http://lintasterkini.com/24/03/2017/dituding-tahanan-tewas-dianiaya-kapolres-bulukumba-perintahkan-periksa-internalnya.html

https://www.youtube.com/watch?v=Vfo2bmtEo5I

https://www.youtube.com/watch?v=HGhmdPqfb7Y

https://www.suaralidik.com/masih-kontroversi-komnas-ham-harus-bersikap-atas-meninggalnya-syamsuddin/

http://regional.liputan6.com/read/2872838/perjuangan-gadis-gangguan-mental-lahirkan-bayi-hasil-pemerkosaan

http://regional.liputan6.com/read/2895030/nasib-mengenaskan-pria-bulukumba-yang-dituduh-cabul

ADVOKASI
[2]

PANDANGAN PERDIK TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL ATAS ANAK PEREMPUAN DIFABEL DI PASAR TERONG

January 9, 2017

Press Releas, Makassar, 9 Januari 2017

SEJAK TERSIARNYA BERITA PEMERKOSAAN terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Pasar Terong, banyak pihak, khususnya dari media menghubungi PERDIK Sulsel. Pasalnya, korban adalah gadis dengan kondisi tuli dan bisu. Menurut Abd. Rahman, direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, korban kekerasan seksual, apalagi jika ia seorang Tuli harus mendapatkan perlakuan khusus (baca link **http://news.rakyatku.com/read/34307/2017/01/08/gadis-tuna-wicara-diperkosa-di-pasar-terong**).

"Ada beberapa hal mengapa perlakuan khusus perlu diberikan kepada korban. Pertama, karena ia Difabel Sensorik dalam hal ini tuli, maka ia seharusnya didampingi oleh seorang interpreter bahasa isyarat untuk memudahkannya menyampaikan keterangan. Kedua, kondisi korban kekerasan seksual seringkali mengalami shock dan trauma dan untuk itu korban harus mendapatkan dukungan dan perlindungan baik dari pihak keluarga, kerabat dan masyarakat di sekitarnya maupun dari berbagai elemen organisasi masyarakat sipil," demikian ujar Rahman malam tadi.

Semalam, Rahman berupaya mencari tahu apakah korban memahami bahasa isyarat formal seperti SIBI (Sistem Isyarat Indonesia) atau BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) atau justru tidak mengerti bahasa isyarat sama sekali. Hal ini penting untuk segera dipastikan mengingat korban sudah harus melalui sejumlah proses hukum yang menuntut adanya komunikasi dua arah secara setara.

"Semalam, beberapa menit setelah berita pertama berita kekerasan seksual itu disiarkan, kami segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Mulai dari memastikan kebenaran berita itu kepada tim media, pemerintah kota dalam hal ini walikota Makassar, sampai kepada Jaringan Organisasi peduli perempuan dan anak," kata Rahman di kantor PERDIK.

Berkat koordinasi itu, banyak pihak kemudian memberikan perhatian dan dukungan kepada korban dan berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan baik.

"Kami sangat berharap agar proses hukum berjalan baik, khususnya jika dalam kasus ini sang korban adalah difabel," ujar Rahman yang pagi ini akan menghimpun dukungan khususnya di lingkungan Pasar Terong sendiri di mana keluarga korban tinggal.

Berdasarkan informasi Abd. Rahman, PERDIK Sulsel memiliki informasi terkait pedoman pendampingan korban kekerasan seksual atas difabel, baik difabel sebagai korban, saksi maupun tersangka atau pelaku. Misalnya, korban harus segera didampingi oleh lembaga khusus, apalagi jika korban kekerasan seksual ini memenuhi beberapa kriteria kerentanan seperti masih berusia kanak-kanak, perempuan, Tuli, dan berasal dari keluarga tidak mampu. Kedua, memastikan pendamping korban memahami sejumlah prinsip dalam pendampingan korban

difabel. Beberapa prinsip itu misalnya pendamping tidak malah menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya, memastikan bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang harus bertanggungjawab dan baik masyarakat maupun pemerintah harus pula memberikan dukungan untuk terus melindungi korban. Selain itu, pendamping harus memastikan agar korban merasa nyaman dan bersedia mengikuti keseluruhan proses hukum dan di sisi lain memperlakukan korban secara setara dengan perspektif gender dan disabilitas yang tepat.

Dari penelusuran Rahman semalam, korban diketahui tidak mengikuti proses pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak. Dalam kondisi Tuli, anak difabel seharusnya bersekolah agar ia bisa belajar bahasa isyarat, baik SIBI maupun BISINDO. Mengapa? Karena bagi Tuli, bahasa isyarat adalah identitas atau hak berkomunikasi yang harus dimilikinya. Tanpa bahasa maka akan sulit baginya menerima dan menyerap serta memberikan informasi dan berkomunikasi secara dua arah.

Lebih lanjut Rahman menyatakan bahwa adanya kasus anak perempuan difabel mengalami tindak kekerasan seksual semakin menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait antara kondisi disabilitas seseorang dengan kemiskinan. Ini dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan. Jika anda miskin, maka anda akan rentan menjadi difabel. Begitu pula sebaliknya, jika anda difabel maka karena berbagai hambatan sosial yang menghadang dan berbagai stigma negatif maka difabel akan kesulitan mengakses pekerjaan atau sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Harapan kami, pemerintah maupun masyarakat memberikan dukungan dan mengawasi agar proses hukum berjalan. Pihak kepolisian yang sedang melakukan penyidikan dan penyelidikan kami berharap agar tetap berkomunikasi

dengan kawan-kawan dari berbagai organisasi yang peduli soal disabilitas dan ke depan, kami berharap agar pihak kepolisian dan lembaga peradilan lainnya memikirkan untuk mulai membuka Unit Layanan Disabilitas di kantornya masing-masing," ujar Rahman penuh harap[].

ADVOKASI
[3]

KERENTANAN DIFABEL BERHADAPAN DENGAN HUKUM & UPAYA PENDAMPINGAN TIM ADVOKASI HUKUM

February 7, 2017

Ishak Salim

TAK SAMPAI DUA BULAN terakhir ada dua kabar buruk diberitakan oleh Media Massa terkait difabel. Pertama adalah upaya pelecehan seksual kepada difabel komunikasi (bisu-tuli) oleh seorang pria separuh baya di Pasar Terong, Makassar dan pemerkosaan oleh seorang kepala SLB di Kab. Soppeng terhadap siswinya difabel mental-intelektual.

Kejadian ini merupakan peristiwa memilukan. Difabel sebagai warga negara yang memiliki sejumlah kerentanan menjadi korban kekerasan dari orang-orang yang memanfaatkan kelemahan difabel.

Sebenarnya, kerentanan difabel itu berlapis-lapis adanya. Misalnya, kedua korban di atas adalah termasuk kategori anak-anak atau setidaknya sedang beranjak remaja. Dalam konteks dia difabel mental – intelektual, usianya memiliki dua-tiga kategori: usia mental, usia kalender (bahkan usia biologis). Usia mental seorang difabel mental – intelektual tak lebih dari 9 atau 10 tahun. Jika usia kalendernya adalah 17 tahun, maka secara bilogis, fungsi-fungsi tubuhnya sudah siap bereproduksi. Tetapi, dalam konteks kehidupan sehari-harinya, seorang anak difabel

mental – intelektual belum tentu memiliki pemahaman yang memadai terkait tubuhnya.

Anak ini misalnya tidak memiliki kesiapan sebagai seorang gadis yang tumbuh memasuki usia remaja yang sanggup dengan mudah menerima pelajaran terkait seksualitasnya. Kebanyakan anak-anak ini tidak memahami sama sekali bagaimana memperlakukan tubuhnya sesuai standar norma sosial-susila sebagaimana pada gadis-gadis pada umumnya. Hal ini bisa karena tidak ada upaya mengajari mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya baik orang tua maupun guru gagal dalam memahami karakter dan pola belajar anak ini.

Misalnya saja, jika hasrat biologisnya datang atau meluap-luap, maka dia akan mengekspresikannya secara bebas tanpa mengindahkan norma atau ketentuan sosial yang dihadapi. Dia tidak mengetahui bagaimana menahan hasrat itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial. Hak atas pendidikan seksual terhambat untuk mereka akses. Apalagi, baik di rumah ataupun di sekolahnya belum tentu ada pendidikan khusus untuk itu. Ketidaktahuan orang tua dan ketidakpahaman guru adalah dua sebab utama mengapa mereka tidak terdidik soal seksualitas.

Dalam kondisi seperti itu, ada kisah terkait beberapa orang tua yang “menitipkan” anak difabelnya ke sekolah, dalam hal ini SLB, yang menyadari bahwa naluri seks anak difabel mental –

intelektual-nya itu bisa saja muncul disetiap waktu dan dengan mudah dimanfaatkan oleh orang berniat jahat dan untuk itu orang-orang tua ini yang dengan tega atau terpaksa memakaikan kontrasepsi kepada anaknya. Itu untuk menghindari kehamilan di luar nikah!

Dalam kasus di Soppeng, kabarnya anak ini telah digauli beberapa kali oleh pelaku dan menyebabkan kehamilan sampai kelahiran anak dari hasil hubungan seksual tersebut. Anak dari anak difabel mental – intelektual ini sudah berusia menjelang satu bulan. Kondisi pascaperkosaan tersebut tentu akan menambah kerentanan anak ini. Salah satu kerentanan itu jika ia harus melewati proses peradilan yang sewaktu-waktu bisa berakhir damai atau pelaku diputuskan tidak bersalah karena hakim memutuskan perkara sebagai "pergaulan suka-sama-suka".

Bagaimana tidak demikian, proses peradilan kita masih memungkinkan tindakan kejahatan atau pelanggaran HAM berakhir tanpa hukuman bagi pelaku. Tentu dengan berbagai alasan, mulai dari adanya proses menyuap atau menyogok dari pihak pelaku ke pihak-pihak tertentu, atau menghilangkan barang bukti dan seterusnya.

Apalagi dalam kasus difabel berhadapan dengan hukum sebenarnya masih banyak hal terkait proses peradilan, pidana maupun perdata itu bias "kenormalan". Kepentingan difabel sebagai subjek hukum, masih jauh dari pemenuhan hak-haknya. Misalnya, sistem hukum kita belum mengenal sistem "dua umur" ini: usia mental dan usia kalender. Sebagai contoh, bagaimana jika seorang difabel mental intelektual ditanya 'apakah ia suka perlakuan pelaku terhadap tubuhnya?' Lalu korban yang usia mental kanak-kanak ini menjawab 'suka', padahal di sisi lain, dia tidak punya kemampuan memahami

apalagi menganalisis—akibat pengetahuan yang amat terbatas—soal perilaku melecehkan seksualitas itu. Apakah proses peradilan ini keliru jika hakim menghentikan sidang karena menganggap keduanya suka sama suka melakukannya? Saya tidak perlu menjawabnya.

Memang amat disayangkan, ada banyak difabel tidak memiliki akses pendidikan hukum sejak dini, baik karena pendidikan semacam itu dianggap tidak penting, tidak punya kurikulum, tidak tahu bagaimana mengajarkan, serta tidak punya keinginan baik untuk memulai pendidikan hukum ini.

Pendeknya, untuk urusan kerentanan difabel dalam berhadapan dengan hukum, jumlah permasalahan yang harus diretas satu persatu itu masih teramat banyaknya. Dibutuhkan banyak orang yang mau bersama-sama membenahinya sedikit demi sedikit.

Untuk alasan kerentanan yang berlapis-lapis itulah, maka anak-anak yang mengalami kejahatan seksual seperti di atas membutuhkan perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung. Jika lembaga-lembaga bantuan hukum baik yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun pemerintah gagal memahami aspek disabilitas maka boleh jadi ia akan menemui kegagalan untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah. Untuk itu, siapapun paralegal atau pengacara yang mendampingi difabel khususnya difabel sebagai korban harus pandai-pandai menjaga diri, situasi maupun kondisi pendampingan serta komunikasi dengan berbagai pihak agar ia benar-benar bisa menuju ke kemenangan dalam perkara sampai ada keputusan bersalah terhadap pelaku dengan hukuman yang setimpal.

Bagaimana mengelola agar advokasi hukum bagi difabel berjalan baik?

Berangkat dari pengalaman Tim Advokasi SIGAB Yogyakarta, ada sejumlah aspek yang harus dimiliki oleh tim advokasi sehingga tangguh menghadapi perkara, yakni: Tim Advokasi harus Membangun Jaringan Gerakan Advokasi Hukum Difabel, selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan paralegal, mengembangkan model komunikasi antar berbagai pihak secara tepat, menjalankan proses pendampingan secara serius dan disiplin, membuat sistem perlindungan bagi paralegal mengingat pendamping difabel tidak kebal hukum, dan meningkatkan kapasitas teknologi pendampingan kasus hukum apakah difabel sebagai korban, saksi, terdakwa ataupun pelaku.

Membangun Jaringan

Tim Advokasi harus memiliki seluas mungkin jaringan atau mitra kerja. Jaringan pertama adalah kepada orang-orang yang bekerja di lembaga hukum semisal LBH, paralegal, pengacara (kuasa hukum), dan asosiasi masyarakat sipil lainnya terkait sektor hukum. Hal ini penting ketika paralegal atau pendamping membutuhkan sejumlah saran untuk mengatasi kebuntuan dalam proses peradilan: Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan; Tahap penuntutan; dan Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kedua, adalah para aparat penegak hukum. Bagaimanapun, aparat penegak hukum merupakan aktor penting yang dapat membantu memenangkan kasus yang sedang didampingi. Dalam konteks sistem hukum kita, jaksa adalah pembela korban, pengacara adalah wakil terdakwa dan hakim merupakan pihak yang melihat perkara dan memutuskan hasil sidang.

Ketiga, membangun mitra dengan kelompok-kelompok professional seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), jaringan Notaris, pihak pengelola dan tenaga medik sejumlah Rumah sakit serta akademisi kampus (yang dapat membantu dalam aspek ketersediaan saksi ahli) dan lain-lain.

Keempat adalah bermitra dengan institusi negara, semisal orang-orang penting di kementerian tertentu seperti Hukum dan HAM, P2TP2A, komisi-komisi nasional, dan seterusnya.

Peningkatan Kapasitas Paralegal

Sejumlah pengetahuan penting dan mendasar yang harus dimiliki difabel adalah pengetahuan terkait Hak Asasi Manusia dan memahami ketentuan-ketentuan legal-formal sehingga tindakan paralegal selalu benar secara prosedural. Berikutnya, paralegal wajib memahami ragam perspektif difabilitas serta sejumlah perangkat analisis kasus-kasus yang pernah dihadapi difabel. kemudian memahami bagaimana watak atau sistem hukum yang kita miliki, mengerti bagaimana hukum acara berlangsung sebagai arena pertarungan antara pihak korban dan pelaku, serta ketentuan-ketentuan hukum pidana dan perdata.

Peningkatan kapasitas ini harus selalu di *update* agar kualitas seorang paralegal terus terjaga dan bisa tampil percaya diri dan dihormati karena kecakapannya, baik oleh dampingannya maupun pihak lawan. Selain itu, tugas-tugas pendampingan lapangan harus tetap diberikan agar kemampuan organiknya semakin terjaga.

Mengembangkan model komunikasi antar berbagai pihak secara tepat

Komunikasi dengan pihak-pihak yang akan ditemui di keseluruhan proses pendampingan dan peradilan ini harus tetap

berjalan dengan baik, santun dan kalem. Walaupun paralegal jengkel setengah mati kepada aparat kepolisian misalnya yang mengganggu kelancaran proses penyidikan, maka paralegal harus tetap lunak. Jika memaksakan diri melontarkan amarah dari kekecewaan selama proses peradilan berlangsung, maka kerja pendampingan bisa menemui kegagalan total.

Pola komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi tatap muka mulai dari polisi, jaksa, pengacara, hakim dan lain-lain yang dapat berkontribusi dalam memberikan keputusan yang adil bagi korban.

Selain pola komunikasi di atas yang dilakukan sebaik mungkin, perlu juga ditempuh sejumlah strategi semisal melalui pengajuan surat permohonan yang ditembuskan ke berbagai pihak jika surat itu maksudnya adalah tekanan agar proses peradilan tetap berjalan sesuai relnya. Jika ada pihak kepolisian yang menghambat dan berniat menghentikan proses penyidikan, maka bisa saja paralegal mengajukan permohonan ke pihak lembaga yang lebih tinggi otoritasnya. Tentu saja, surat-surat seperti ini haruslah ditopang dengan lampiran-lampiran yang menguatkan argumentasi dalam surat, seperti landasan hukum dan petikan kronologis.

Menjalankan Proses Pendampingan secara Serius dan Disiplin

Kerja advokasi sesungguhnya adalah kerja dengan berbagai pihak. Paralegal tidak boleh bergerak sendiri. Sebisa mungkin bukalah kran untuk bekerjasama dengan pihak lain. Berbagai strategi bisa ditempuh, yakni negosiasi maupun mediasi. Satu hal terpenting untuk menjaga relasi adalah menjaga sikap sebaik mungkin namun tetap menunjukkan integritas sebagai paralegal yang jujur dan tegas dalam memutuskan sesuatu.

Ingat pula, bahwa kerja-kerja yang dilakukan paralegal dalam kasus tertentu adalah kerja berbahaya. Keselamatan pribadi dan tim perlu dijaga bersama. Jangan melakukan pendampingan seorang diri. Selalu lakukan minimal berdua jika sedang mendampingi kasus. Hal ini menghindari jika terjadi sesuatu yang tidak baik yang menimpa paralegal selalu ada saksi yang tersedia yang bisa memberi keterangan tentang apa yang sedang terjadi. Bisa saja pihak pelaku menyewa orang tertentu mencelakai paralegal atau berusaha menyembunyikan barang bukti yang ditemukan oleh paralegal selama pendampingan berlangsung. Apalagi dalam hal ini, paralegal itu tidaklah kebal hukum sehingga sewaktu-waktu keadaan bisa terbalik dan menyulitkan proses pendampingan.

Hal lainnya, sebagai paralegal atau pendamping, jangan pernah mengajukan diri sebagai pihak pelapor atas kasus yang menimpa difabel. Sebaiknya, bimbinglah korban atau keluarga korban untuk melaporkan segala tindak kejahatan yang dihadapi korban. Jika paralegal menjadi pelapor, maka bisa saja pelapor dituduh balik sedang melakukan tindakan pencemaran nama baik dan lain-lain. Jika sudah begitu, maka proses pendampingan jadi terhambat.

Membangun Sistem Pangkalan data dan Informasi Hukum bagi Paralegal, DIfabel dan Publik

Kerja pendampingan kasus hukum harus ditopang oleh teknologi sistem informasi hukum dan advokasi difabel. Sistem informasi ini harus kaya akan data dan untuk itu, selain paralegal, komponen tim advokasi juga harus ada yang melakukan kerja pengumpulan dan produksi pengetahuan. Tapi tim khusus ini, harus terus meningkatkan jumlah bacaaan dari berbagai sumber, khususnya akademik maupun pengalaman

lapangan dari para paralegal terkait advokasi hukum dan disabilitas.

Bagaimanapun, paralegal harus terupdate pengetahuannya. Jika ada aturan baru disahkan negara, maka sistem informasi dengan mudah dirujuk oleh paralegal maupun publik pada umumnya.

Untuk itu, sistem informasi hukum ini dapat juga menjadi media pendidikan hukum bagi difabel. Sistem ini harus memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi bagi seluruh tipe kemampuan difabel. Akses ke sistem informasi ini sebaiknya berbasis internet sehingga mudah dijangkau, dan jika sulit terjangkau oleh difabel di daerah, maka perlu membuatkan media lain yang lebih akses, semisal brosur atau bulletin.

ITULAH POIN-POIN atau pengetahuan penting dari difabel—dalam hal ini pengalaman Mbak Purwanti/Ipung yang merupakan penggagas Divisi Advokasi Hukum SIGAB ini, perlu menjadi pelajaran penting bagi paralegal manapun.

Mengapa informasi di atas penting saya sampaikan, hal itu karena mendampingi kasus difabel berhadapan dengan hukum adalah hal mulia dan harus berhasil dilakukan demi menciptakan keadilan bagi difabel.

Akhirnya, semoga kedua difabel yang dilecehkan seksualitasnya sebagaimana disinggung di awal tulisan ini dapat melewati masa-masa berat persidangan dan selanjutnya paralegal yang mendampinginya diberi kekuatan dan kemudahan dalam proses pendampingan[].

ADVOKASI

[4]
DIFABEL MASIH RENTAN DALAM PROSES HUKUM

December 21, 2017

Ishak Salim

catatan dialog akhir tahun 2017

MARIA UN, KETUA HWDI SULAWESI SELATAN memaparkan setidaknya 9 kasus yang dihadapi difabel berhadapan dengan hukum di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan di sepanjang 2017. Bersama dengan sejumlah paralegal disabilitas, ia mendampingi difabel maupun keluarga difabel yang menjadi korban dari beragam tindakan pelanggaran pidana. Dari interaksinya terkait dengan sejumlah kebijakan negara, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana peradilan serta budaya hukum baik di tingkat masyarakat maupun APH masih terdapat banyak hambatan dalam upaya memenuhi syarat penegakan hukum yang memanusiakan manusia: melindungi, menghargai dan memenuhi hak maupun kebutuhannya.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Dialog Akhir Tahun 2017 bertemakan Difabel Berhadapan dengan Hukum' yang diinisiasi oleh PerDIK, PSBD Wirajaya, Pusat Kajian Disabilitas dan Layanan Difabel – Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) serta sejumlah dukungan lainnya. Hadir pula saat itu adalah Kapolda Sulawesi Selatan (diwakili oleh Kanit PPA), Direktur LBH Makassar, Ketua AJI Makassar, Kabag Hukum Pemda Kota Makassar dan direktur PerDIK. Dialog reflektif ini dipandu oleh Ishak Salim yang juga adalah dosen Ilmu Politik UTS.

Kegiatan ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan merayakan Hari Difabel Internasional 2017. Tepat hari Difabel, tanggal 3 Desember lalu, tim PerDIK (10 atlet difabel) dengan didukung oleh sejumlah kelompok pencinta alam baik dari Kota Makassar maupun Kabupaten Enrekang berhasil memuncak di puncak Gunung Sesean dengan ketinggian 2100mdpl.

Hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian dalam menyidik maupun menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan difabel juga diakui oleh Kanit PPA Polda Sulawesi Selatan, Kompol Andriani Lilikay. Salah satunya misalnya terkait dengan kemampuan aparat kepolisian dalam berkomunikasi dengan difabel, seperti berbahasa isyarat dengan Tuli. Walaupun demikian, melalui Program "Promoter" yang dicanangkan oleh Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, saat ini kepolisian daerah Sulsel giat meningkatkan kompetensi SDM agar lebih profesional dalam bekerja, melakukan modernisasi berbagai layanan publik kepolisian, serta menjalankan aksi reformasi internal agar polisi lebih bersih dan bebas KKN.

Aspek lain yang menjadi pembahasan dalam dialog ini adalah sejauhmana peran media berkontribusi dalam membela kepentingan difabel saat berhadapan dengan hukum. Menurut Qodriansyah Agam Sofyan, sudah seharusnya kaum jurnalis membangun keberpihakan dalam menyuarakan kepentingan difabel. Selama ini, kecenderungan jurnalis di Makassar untuk fokus pada pemberitaan politik membuat porsi pemberitaan difabel ini menjadi kecil. Melalui AJI, ia berharap para jurnalis bisa kreatif dalam mengemas berita politik agar tetap memiliki kaitan dengan isu-isu disabilitas.

Pembicara lain dalam dialog ini adalah Direktur LBH Makassar. Menurut Haswandy atau Wawan pihak LBH Kota Makassar kini sudah memiliki kepedulian untuk membantu difabel yang memiliki kasus-kasus pidana. Sementara itu, kabag Hukum Pemda Kota Makassar juga mengemukakan bahwa pemerintah kota melalui program walikota selama ini sudah menyiapkan sejumlah perangkat aturan yang bertujuan melindungi hak-hak maupun kebutuhan difabel. Di bidang infrastruktur area publik di kota, pemerintah juga sudah

berupaya maksimal membuatnya lebih akses. Namun, terkait anggaran bantuan hukum bagi difabel, kabag hukum Umar SH mengakui bahwa belum ada anggaran khusus untuk difabel misalnya untuk memenuhi ketersedian penerjemah bahasa isyarat dalam keseluruhan proses penyidikan sampai persidangan.

Abd. Rahman, direktur PerDIK dalam kesempatan ini menyarankan agar dalam pemberitaan kasus-kasus hukum difabel, sebaiknya saling berkoordinasi. Menurutnya, ada kalanya proses penyidikan yang berjalan tidak perlu dibesar-besarkan oleh media karena justru bisa menghambat penyidikan. Selain itu, pemberitaan juga bisa membuat pihak keluarga korban semakin malu dan berpikir mencabut surat pengaduannya. Rahman menawarkan agar dalam penanganan kasus-kasus difabel ekemen-elemen baik dari organisasi difabel maupun APH dan pemerintah terkait harus membangun koalisi[].

***Info lebih lengkap dari tim media PerDIK, sebagaimana berikut:**
Ini Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Penuntasan Kasus Hukum

KEPOLISIAN POLISI DAERAH (POLDA) Sulawesi Selatan mengaku sudah bekerja secara profesional dalam menghadapi kasus-kasus yang menimpa penyandang disabilitas atau difabel di wilayah hukumnya. Meski demikian, mereka mengakui masih lemah dalam penanganan. Apa soalnya?

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sulsel, Komisaris Polisi (Kompol) Andriani Lilikay mengatakan kendala dan hambatan dalam menangani kasus-kasus yang

mendudukkan orang yang berkebutuhan khusus itu masih banyak.

“Utamanya pihak penyidik yang memang tidak mengetahui adanya Undang-undang Tentang Penyandang Disabiilitas nomor 8 tahun 2016, mereka langsung menggunakan KHUP, tidak mengindahkan hak-hak difabel dalam Undang-undang, ” jelas Kompol Andriani dalam kegiatan Dialog publik: Refleksi Akhir Tahun Difabel Berhadapan dengan Hukum” di Aula Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Wirajaya, Makassar, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu 20 Desember 2017.

Hal itu diakuinya pada penanganan kasus pemerkosaan terhadap gadis berinisial BG (17 tahun), difabel bisu atau difabel komunikasi yang belum tuntas hingga sekarang. Padahal kasus ini terjadi pada awal 2017.

Korban adalah siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Ma’innong, Kecamatan Donri- Donri, Soppeng. Mirisnya, pelaku adalah kepada sekolah SLB ini.

Andriani menceritakan kasus ini awalnya ditangani oleh Kepolisan Sektor (Polsek) Ma’innoing meski penyidik mereka tidak punya unit PPA, tapi mengaku mampu menangani, tapi ternyata tesendat-sendat kemudian dilimpahkan ke Polres Soppeng.

“Kasus itu awalnya ditangani Polsek, walau penyidiknya tidak punya PPA, tapi mereka mengaku bisa menangani, tapi kandas. Dilimpahkan lagi ke Polres Soppeng. Sekarang kasus ini berproses di Polda, ” kata dia.

Dia menyebutkan pihaknya juga selalu berkomunikasi dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulsel dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan

Indonesia untuk Keadilan (Apik) Sulsel untuk penuntasan kasus ini, hingga kepolisian menggunakan juga UU Penyandang Disabilitas dalam menjerat pelaku.

"Untuk kasus Soppeng, sekarang dalam proses di Polda, untuk mengetahui seperti apa kendalanya. Sudah beberapa kali dilakukan tes DNA (kepada pelaku dan korban), yang hasilnya negatif. Mungkin Minggu depan dilanjutkan kasusnya, karena bukan hanya Soppeng ditangani (di Polda), " kata dia.

Kesulitan lain dalam pengungkapan kasus difabel, kata dia, dukungan keluarga korban kerap tidak memadai bahkan menghalang-halangi. Seperti kasus di pemerkosaan gadis difabel komunikasi di Soppeng ini. Orang tua korban, kata dia, justru seolah-olah menghalang-halangi kasus ini.

"Dari keterangan saksi-saksi tidak ada satu pun yang mendukung. Ada saksi yang dihadirkan, salah satunya ibunya sendiri namun menghalangi-halangi kalau ada saksi-saksi yang menguatkan. Jadi itu kita terkendala, " bebernya.

Andriani juga membeberkan bila saat ini pihaknya sudah punya petunjuk dari Mabes Polri, dalam penuntasan kasus khusus difabel. Selain itu harus berkoordinasi pihak terkait, seperti Kejaksaan dan kehakiman.

"Jadi jika ada kegiatan berikutnya, setidaknya ada perwakilan kejaksaan dan kehakiman, bagaimana menyatukan persepsi. karena kita di kepolisian ada ranahnya, " ujar perempuan berhijab ini.

Dia menegaskan bila institusinya memang mengalami banyak kendala, terutama di jajaran penyidik. Namun, kata Andriani bukan menjadi halangan bagi penyidik di PPA.

"Kami menyadari mereka semua punya hambatan dan sumber daya manusia (SDA). Bagaimana penyidik disekolahkan,

mendapat ilmu dan pengalaman untuk menangani kasus disibilitas." tegas ibu berpangkat satu bunga ini.

Sementara Ketua HWDI Sulawesi Selatan Maria UN, memaparkan setidaknya ada sembilan kasus kekerasan terhadap difabel di Sulawesi Selatan sepanjang 2017, terutama kekerasan seksual yang berusia anak.

Dia memaparkan dari jumlah kasus yang terjadi Januari hingga Agustus, terjadi di lima kabupaten/kota, seperti di Kabupaten Bone dengan dua kasus, Makassar ada tiga kasus, di Takalar ada satu kasus, di Gowa terjadi dua kasus dan satu kasus di Bulukumba.

Dari dari ragam disabilitas, kata dia, gangguan intelektual hambatan komunikasi paling rentan mengalami kekerasan.

Salah satunya adalah kasus pemerkosaan gadis Tuli di Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Makassar, pada 8 Januari 2017, lalu.

"Kasus ini sudah divonis di Pengadilan Makassar, " kata Maria UN dalam diskusi yang diinisiasi oleh PerDIK, PSBD Wirajaya, Pusat Kajian Disabilitas dan Layanan Difabel Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) serta sejumlah dukungan lainnya.

Sama halnya dengan pemerkosaan gadis difabel intelektual (sindroma-down) di Takalar. Pelakunya adalah seorang PNS dan juga sudah divonis.

Maria juga memaparkan seperti apa kendala dalam mendampingi para difabel yang diperhadapkan dengan hukum. Seperti hambatan komunikasi atau difabel komunikasi (bisu) ketika kasus berproses di kepolisian.

“Menjadi masalah bila korban tidak pernah bersekolah (di SLB) karena tidak mampu berbahasa isyarat. Meski didampingi oleh komunitas rungu, namun persoalannya tidak semua komunitas rungu memahami bahasa isyarat. Karena tidak bersekolah formal, ” ujarnya.

Seperti yang terjadi pada kasus di Bone. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Bone harus dikembalikan dua kali karena korban tidak mampu mengungkapkan waktu kejadian.

Karena itulah, kata Maria, pihaknya memberikan pemahaman kepada penyidik kepolisian agar memperbolehkan si korban/pelaku/saksi didampingi oleh orang-orang terdekat. “Karena mereka (difabel) hanya mengerti bahasa ibu, “

Persoalan, lanjutnya, ketika keluarga korban tidak percaya diri kasusnya bisa dilaporkan di kepolisian. “Ada juga keluarga mencabut BAP, dengan alasan malu, atau ada intervensi keluarga (pelaku),” ujarnya.

Bagi Maria, pihak kepolisian memilik perpekstif cukup baik terhadap kasus-kasus disabilitas, hanya saja harus tetap dikawal oleh lembaga perwakilan difabel dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Ketua LBH Makassar Haswandi Andy Mas juga mengungkapkan sejumlah hambatan dalam mengawal penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Bila Ketua HDWI memaparkan hambatan yang dialami oleh korban, Haswadi menceritakan sejumlah kendala yang dihadapi difabel yang didudukan sebagai saksi atas kejadian oleh penyidik kepolisian.

Dia mengilustrasikan pada kasus penembakan yang terjadi saat balapan liar di Jalan Veteran Makassar, pada 2009 lalu. Saat itu, saksi kuncinya adalah difabel tuli. Namun saat didatangkan

guru SLB sebagai penerjemah atau interpreternya, ternyata tidak nyambung.

"Saksi ini hanya dua tahun mengeyam sekolah SLB. Saat itu usianya sudah lebih 30 tahun, artinya dia meninggalkan sekolah sudah 20 tahun lebih, " ujar Haswandi didalam diskusi.

Jadi, kata dia, solusinya bila difabel tuli putus sekolah dan tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, satu-satunya penerjemah adalah orang tuanya atau orang terdekatnya.

Ia juga menyinggung penerjemah menjaga kenetralan dalam men-translate bahasa isyarat. Sebab, dia pernah menemukan kasus dimana penerjemah korban justru orang tua dari pelaku.

"Penerjemah juga harus netral dalam menerjemahkan bahasa isyarat, karena bisa saja tidak demikian yang diungkapkan korban yang difabel, " ujarnya.

Ditambahkan Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Abdul Rahman, pihaknya sebenarnya sudah menyampaikan berbagai persoalan ini kepada Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Umar Septono.

Rahman mengaku mendapat tanggapan positif dari Kapolda Sulsel yang menjabat tiga pekan lalu itu. Ia pun berharap dari banyaknya kasus-kasus yang mandek di Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) yang tidak hanya difabel, tapi juga perempuan dan anak, Polda Sulsel bisa menjadikan unit PPA menjadi Satuan PPA di setiap jajarannya.

"Berharap Polda bisa berjalan pada 2018 ini, karena banyak persoalan mandek di Reskrim utamanya difabel, sehingga kami minta unit PPA menjadi satuan tersendiri nantinya, " ujarnya[].

ADVOKASI

[5]

PERDIK MINTA PEMUTAKHIRAN DPT SESUAI UU PENYANDANG DISABILITAS DAN PKPU

December 27, 2017

Rilis PerDIK, 19 Desember 2017

#Pemuktahiran DPT Difabel Masih Terkendala, PerDIK Siap Kawal KPU

MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Makassar memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atau difabel saat pelaksanaan pencoblosan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di Makassar 2018 mendatang.

"KPU Kota Makassar akan berusaha semaksimal mungkin memastikan pelaksanaan Pemilihan Walikota akses bagi pemilih difabel," kata Rahmah Saiyed, anggota komisioner KPU Makassar, pada Rakor terpadu KPU Kota Makassar bersama stakeholder dalam rangka persiapan pendataan dan pemutakhiran daftar pemilih pilgub Sulawesi

Selatan dan Pemilihan Walikota Makassar 2018, di Quality Plaza Hotel, Seni, 18 Desember 2017.

Rahmah mengatakan upaya melaksanakan Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar yang akses dan inklusif merupakan tantangan besar bagi semua perangkat KPU Kota. Menurutnya, ada sejumlah kendala teknis yang akan ditemui dan harus diselesaikan secara taktis.

Dia mencontohkan form A-KWK atau formulir pendataan pemilih hanya memuat lima jenis disabilitas, padahal dalam aturan baru terdapat 23 jenis disabilitas.

"Masalahnya adalah kami perlu mengubah form pendataan itu berikut master input-nya. Sementara form dan master input itu adalah desain KPU Pusat. Jika kami ingin memiliki data pemilih difabel beserta jenis kebutuhannya, maka form pendataan itu harus diubah," ujarnya.

Meski demikian, Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Ishak Salim, mengimbau kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan pendataan pemilih difabel berdasarkan aturan yang baru terkait Penyandang Disabilitas.

"Saat ini sudah ada UU Penyandang Disabilitas dan aturan KPU RI yang berpihak kepada difabel. Untuk itu, kami berharap pihak KPU bisa bekerjasama dengan organisasi difabel di Makassar untuk melakukan pengawalan pendataan pemilih," ujar Ishak.

Ia juga menyatakan bahwa Pemilu itu bukan sekadar urusan pencoblosan, tetapi merupakan rangkaian yang memiliki tahapan yang panjang. Untuk itu, pendataan pemilih difabel jangan hanya fokus kepada jenis disabilitas seseorang,

melainkan termasuk jenis kebutuhannya di seluruh tahapan pemilukada.

Ia mencontohkan, dengan adanya data terkait jenis kebutuhan difabel, maka KPU dalam mendesain model sosialisasi dan kampanye ataupun debat kandidat akan mempertimbangkan ketersediaan aksesibilitas bagi pemilih difabel, seperti media braille dan audio maupun penerjemah bahasa isyarat.

"Kami ingin KPU kota melibatkan organisasi difabel saat proses perekrutan anggota PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) dan saat pendataan berlangsung. Kami ingin memastikan bahwa KPU Kota dan perangkatnya serta PPDP memahami betul perspektif disabilitas dan bagaimana melakukan pendataan," lanjut Ishak yang juga adalah Kandidat doktor Ilmu Politik Universitas Teknologi Sulawesi ini.

Sementara Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulsel, Maria UN yang juga hadir dalam kegiatan ini memuji upaya serius KPU Kota mengakomodasi kepentingan pemilih difabel dan Orang Dengan gangguan Kejiwaan.

Ia berharap dalam proses mengawal kinerja KPU Kota menyiapkan perhelatan demokrasi yang inklusif ini, ia mengusulkan agar seluruh organisasi penyandang disabilitas kota Makassar membentuk koalisi pemilu akses untuk membantu KPU.

Ditambahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nielma Palamba. Dia mengatakan saat ini setidaknya masih terdapat kurang lebih 333.990 warga kota yang belum melakukan perekaman data penduduk.

Jumlah penduduk kota Makassar wajib KTP atau usia pemilih (17 tahun) sebesar 1.218.380 jiwa. Menurut Nielma, jumlah warga yang belum merekam datanya ini masih tergolong besar sehingga Disdukcapil dan seluruh kecamatan berupaya keras mengimbau agar warga yang belum melakukan perekaman untuk segera ke kantor dukcapil maupun kantor kecamatan.

Press Release PerDIK;
Konfirmasi
Direktur PerDIK, Abd. Rahman : 085396584550
KPU Makassar, Rahmah Saiyed : 081340466622

ADVOKASI

[6]

PENDAMPINGAN DIFABEL BERHADAPAN DENGAN HUKUM: KASUS PENGANIAYAAN ANDI TAKDIR KETUA PPDI BONE OLEH 5 ANGGOTA SATPOL PP BONE

December 25, 2017

ADVOKASI

Rilis PerDik [1]

Oknum Satpol PP Aniaya Ketua PPDI Bone, PerDIK Minta Polisi Profesional Tuntaskan Kasus Itu – # PerDIK Kecam Oknum Satpol PP Bone yang Diduga Aniaya Difabel Didepan Anaknya – # Arogan Terhadap Difabel, PerDIK Minta Kasatpol PP Evaluasi Intenalnya

MAKASSAR – Pengurus Pusat Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) meminta pihak kepolisian untuk profesional dalam menangani kasus dugaan penganiayaan salah satu penyandang disabilitas daksa kinetik, Andi Takdir, 30 tahun, oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone di Lapangan Merdeka Watampone, pada Sabtu (23/12/2017) malam.

Direktur Eksekutif PerDIK, Abdul Rahman mengatakan pihaknya mengecam tindakan arogansi oknum Satpol PP kepada Takdir yang juga Ketua Persatuan Penyandang

Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone. Mirisnya, kata dia, aksi pemukulan itu disaksikan langsung oleh anak korban yang masih dibawah umur.

"Kasus ini harus dibawah ke ranah hukum. Apa lagi pemukulan Takdir terjadi dihadapan anaknya yang masih dibawah umur. Ada anaknya baru diperlakukan begitu, bagaimana itu Satpol PP, " kata Gusdur, sapaan Abdul Rahman ini dalam siaran persnya, Senin, 25 Desember 2017.

Gusdur juga menampik anggapan oknum Satpol PP yang mengatakan bahwa korban dalam keadaan mabuk saat berbicara dengan satuan pamong praja itu. Menurutnya itu tidak benar untuk seorang Ketua PPDI.

"Mana mungkin seorang Takdir meminum minuman keras dan dalam keadaan mabuk membawa anaknya jalan-jalan di lapangan Merdeka, " tegas Gusdur, difabel penglihatan ini.

Gusdur juga meminta kepada Kepala Satpol PP Bone untuk melakukan evaluasi di internal satuannya itu. "Pihak kepolisian harus profesional dalam menangani kasus ini, karena Takdir sudah melaporkan penganiayaan itu kepada pihak polisi setempat, " ujarnya.

Dilansir sejumlah media online di Sulsel, video kasus dugaan penganiayaan itu terhadap Takdir beredar di salah satu

grup chatting, Telegram wartawan Bone. Dalam video itu oknum anggota Satpol PP memukul bagian kepala korban.

Kejadian ini bermula sekira pukul 22.15 Wita setelah Ketua PPDI Bone itu protes tindakan sejumlah anggota Satpol PP yang hendak membubarkan aktivitas menari yang dilakukan salah satu komunitas di Lapangan Merdeka Watampone.

Takdir yang kebetulan melihat aksi pengusiran itu, ikut membela. "Satpol PP melarang mereka karena dianggap merusak dan menganggu keamanan," kata Takdir, kepada wartawan.

"Kemudian saya bilang bahwa apa yang mereka rusak? dan siapa yang mereka ganggu?, justru penonton merasa terhibur," ceritanya.

Namun sejumlah oknum Satpol PP datang mengerumuni dan menendang bahkan memukuli bagian kepala Takdir.

Pasca kejadian, Takdir, langsung bergegas ke rumah sakit guna melakukan visum untuk kepentingan pelaporan ke pihak berwajib atas peristiwa yang dialaminya.

Rilis Perdik [2]

Korban Kekerasan Satpol PP Bone Resmi Mendapat Perlindungan LBH Makassar # Oknum Satpol PP Langgar Perda Bone Tentang Penyandang Disabilitas

MAKASSAR – Andi Takdir, penyandang disabilitas atau difabel kategori daksa kinetik yang menjadi korban penganiayaan oknum Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) Bone, resmi

mendapat perlindungan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Takdir yang juga Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone ini datang ke kantor LBH yang berada di Jalan Pelita Raya 6 Makassar ini bersama sejumlah pengurus lembaga Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulsel pada Kamis, 28 Desember 2017.

Direktur LBH Haswandi Andy Mas yang menerima langsung Takdir mengatakan, laporan penganiayaan oleh sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone tersebut kemudian akan segera ditindak lanjuti demi

kepentingan dan kepastian perlindungan hukum terhadap korban.

“Yang pertama yang kita lakukan adalah angkat kuasa untuk mendampingi korban, apa lagi kasus ini sudah masuk dan resmi dilaporkan dan ditangani kepolisian,” ujar Wawan, sapaannya usai menerima laporan Takdir di Kantornya.

Wawan mengatakan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mendampingi Takdir hingga proses ini bergulir dan vonis di Pengadilan Negeri Bone.

Wawan menilai dengan adanya kasus ini, mesti menjadi bahan perhatian dan evaluasi pemerintah selaku perpanjangan tangan dari oknum Satpol PP itu. Bahkan, kata dia, kemungkinan kasus ini bisa menjadi pemantik rentetan catatan panjang sikap yang represif dan arogan yang dilakukan oknum Satpol PP.

“Bukan hanya kepada para difabel bahkan kalau yang seperti ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan hukum maka akan menjadi tradisi yang terus menerus langgeng. Ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah,” ucapnya.

Selanjutnya, LBH akan berkoodinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) untuk mendampingi maksimal proses hukum yang sementara ini berjalan.

Sementara Direktur Eksekutif PerDIK, Abdul Rahman mengatakan turut mengawal kasus ini hingga tuntas di pengadilan.

“Kita akan selalu bersama-sama dengan LBH Makassar untuk mengawal kasus yang menimpa Andi Takdir, ” kata Gusdur sapaanya di kantor LBH Makassar.

Selain itu, kata Gusdur, mengatakan oknum Satpol PP itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

"Kami juga akan melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM agar timnya turun ke Bone, " ujarnya.

Rilis Perdik [3]

Adili Penganiaya Ketua PPDI Bone
#SiaranPers – #AksiKamisanMakassar – #AksiKamisan – #UntukDisebarkan

AKSI KAMISAN MAKASSAR

KabarMakassar.com — Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, Andi Takdir (30), telah dianiaya sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone.

Yang sungguh memiriskan, pemukulan terhadap Takdir itu terjadi didepan anaknya yang masih berusia 4 tahun. Peristiwa pemukulan itu terjadi di Lapangan Merdeka Watampone, Sabtu 23 Desember 2017 malam lalu.

Mengutip rilis Pengurus Pusat Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDIK) bertanggal 25 Desember 2017, pemukulan tersebut bermula saat Takdir memprotes tindakan sejumlah anggota Satpol PP Bone yang hendak membubarkan aktivitas menari yang dilakukan salah satu komunitas di Lapangan Merdeka Watampone.

Takdir yang kebetulan melihat aksi pengusiran itu, ikut membela. Namun sejumlah oknum Satpol PP datang mengerumuni Takdir. Lalu menendang dan memukuli bagian kepala Takdir.

Berdasarkan hal itulah kami dari Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) bersama Amnesty Internasional Indonesia dan sejumlah elemen perjuangan HAM di Sulawesi Selatan kembali akan menggelar Aksi Kamisan atau Aksi Payung Hitam.

Tempat : Depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Waktu : Kamis, 28 Desember 2017

Pukul : 15.00-17.00 Wita

Pada Aksi Kamisan keempat ini, kami menyatakan sikap :

1. Mengecam keras tindakan arogansi oknum Satpol PP Bone kepada Andi Takdir yang merupakan penyandang disabilitas daksa kinetik.
2. Meminta Polres Bone memproses para pelaku hingga berkas dan pelaku dilimpahkan ke Kejari Bone untuk diteruskan ke pengadilan setempat.
3. Meminta Bupati Bone untuk mengevaluasi Satpol PP Bone dan memberi sanksi tegas kepada para penganiaya Andi Takdir.
4. Mendesak Satpol PP Bone bertindak profesional dan mengedepankan langkah-langkah yang menghargai HAM dalam penegakan hukum.
5. Stop kekerasan dan diskriminasi terhadap para difabel di manapun.
6. Kami yang tergabung dalam Aksi Kamisan Makassar akan mengawal proses hukum kasus ini hingga para pelaku divonis di pengadilan dan korban mendapatkan keadilan.

Salam
Makassar, 28 Desember 2017 An Aksi Kamisan Makassar
Korlap Aksi : Humaerah Jaju
Penanggungjawab Aksi : Hajriana Ashadi

Catatan :

Pada aksi ini kami akan mengenakan PAYUNG HITAM yang merupakan maskot Aksi Kamisan.

Payung merupakan simbol perlindunganWarna hitam melambangkan keteguhan iman para pejuang HAM dan pencari keadilan dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan Ilahi[]

Rilis Perdik [4]

Korban Penganiayaan Satpol PP Bone Diintimidasi Atas Nama Pejabat
Diteror dan Diintimidasi, Ketua PPDI Bone Kukuh Lanjutkan Kasusnya
Teror dan Intimidasi Kepada Korban Penganiayaan Satpol PP Bone Makin Massif
Ketua PPDI Terus Mendapat Teror dan Intimidasi, LBH Akan Berkoordinasi LPSK

MAKASSAR – Korban penganiayaan sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone, Andi Takdir mengaku mendapat intimidasi dari sejumlah orang dengan mengatasnamakan pejabat di pemerintah kabupaten itu. Takdir diminta mencabut laporan polisinya disertai ancaman.

"Saya lagi dilobi beberapa pejabat Kabupaten Bone untuk meminta perdamaian, saya disuruh mencabut laporan. Tapi saya tetap bertahan, menolak tawaran mereka, " kata Takdir yang juga ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone ini, Rabu, 3 Januari 2018.

Selain itu, dirinya diminta untuk menemui Bupati Bone Andi Fashar Padjalangi. Namun Takdir mengaku kukuh pada pendirian untuk tetap melanjutkan kasus penganiayaan terhadap dirinya hingga di pengadilan.

"Saya juga mau dipertemukan bupati. Tapi saya tidak mau karena pasti jawaban saya akan menolak tawaran yang ditawarkan ke saya, " tegasnya.

Tawaran damai dengan sejumlah uang pun kerap terdengar dari mulut oknum itu. "Ada puluhan juta, " kata Takdir.

Sebenarnya tindakan intimidasi verbal itu sudah dialaminya sejak laporan penganiayaan ini bergulir di meja penyidik Polisi Resort (Polres) Bone atau sehari setelah peristiwa yang terjadi pada 24 Desember 2017.

Menurutnya teror dan intimidasi itu makin menjadi-jadi setelah polisi menetapkan lima tersangka dari oknum yang melakukan kekerasan itu. Penetapan tersangka oleh polisi ini dikeluarkan pada 28 Desember.

Seperti yang dialaminya pada Senin, 1 Januari 2018, malam lalu. Takdir menceritakan dua orang preman mendatangi rumahnya untuk mencabut laporan itu dan mengancam keselamatan jiwanya.

“Ada dua preman datang ke rumah untuk membujuk saya dan bernada tinggi sampe mengatakan bahwa, “kau tidak akan

tenang tinggal di kampung ini kalo persoalan ini tidak selesai sampai disini", " kata Takdir menirukan ucapan preman itu.

Tak hanya malam itu, sejumlah orang mendatangi lagi dan Takdir saat itu malah merekam video dan menyiarkannya secara langsung di media sosial Facebook, melalui akun pribadinya. Namun, Takdir menghapus rekaman itu karena orang itu menyebut sejumlah nama penjabat di Bone.

"Ada lagi, saya sempat siaran langsung, tapi saya hapus karena orang itu menyebut nama-nama penjabat bone, saya hapus siaran langsung itu karena menyebut nama-nama pejabat-pejabat Bone, makanya saya tidak sebarluaskan ancaman tadi, "

Menurutnya, apa pun bentuk lobi dan intimidasi yang datang padanya, ia bersikeras pada pendiriannya untuk melanjutkan kasus itu ke pengadilan. "Saya tidak akan berhenti disini. Saya tidak akan damai sebelum pelakunya diadili di pengadilan. " tegasnya.

Selain itu, Takdir sudah mendapat perlindungan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan pengawalan beberapa perwakilan organisasi difabel, seperti Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Selatan untuk menuntaskan kasus ini.

Ketua LBH Makassar Haswandy Andy Mas mengaku akan mengawal kasus penganiayaan ini hingga tuntas di pengadilan.

Ia pun berencana untuk mendatangi Penyidik Polres Bone untuk berkomunikasi langsung pihak Reskrim terkait bagaimana kelanjutan proses penyidikan kasus tersebut, apalagi terdengar isu bahwa tersangka akan mendapatkan penangguhan penahanan, padahal kasus ini menjadi perhatian publik dan

diduga Korban kerap mendapat berbagai macam bentuk intimidasi sehingga Tersangka sepatutnya harus tetap ditahan.

"Kami akan mendatangi Polres untuk berkomunikasi dengan Satreskrim untuk mengetahui kelanjutannya proses hukum kasus tersebut. Jangan sampai Tersangka ditangguhkan penahanannya dan sebaiknya kasus ini dipercepat saja untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga dapat segera disidangkan" kata Wawan, sapaan Haswandy.

Menurutnya selain mendorong percepatan proses hukum, pihak LBH Makassar juga akan melakukan upaya bagi keamanan koran. Mengingat begitu banyak bentuk-bentuk teror dan intimidasi yang muncul belakangan ini.

Karena itu LBH Makassar juga sementara mempersiapkan surat pengaduan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Sebelumnya, Takdir dianiaya sejumlah oknum Satpol PP Bone di Lapangan Merdeka Watampone, pada Sabtu 23 Desember 2017. Kejadian ini bermula saat Satpol PP hendak membubarkan sebuah latihan breakdance yang dilakukan salah satu komunitas pemuda di Bone.

Takdir yang bersama dengan anaknya berusia 4 tahun itu meminta agar petugas Satpol PP Bone tidak semena-mena membubarkan kegiatan tersebut, apa lagi kegiatan itu dilakukan di area publik, hingga terjadilah kekerasan fisik yang dilakukan Satpol PP kepada Takdir.

Kemudian video kasus dugaan penganiayaan itu beredar di grup chatting wartawan Bone, hingga di media sosial Facebook dan Youtube. Dalam video itu terlihat oknum anggota Satpol PP memiting leher dan memukul bagian kepala korban.

Akibat pemukulan itu, Takdir mengalami luka memar di bagian kepala dan langsung melapor ke Polres Bone.

"Saya sudah lapor, gara-gara kejadian itu anak saya mengalami trauma, saya berharap pihak kepolisian segera bertindak, oknum seperti mereka harus diberi efek jera agar tidak seenaknya pada masyarakat kecil seperti kami, " kata Takdir.

Sementara kronologis kejadian yang dikeluarkan Satpol PP, Takdir dituduh memprovokasi pemuda yang sedang breakdance itu untuk melanjutkan ekspersinya di pelataran dekat kolam air mancur Lapangan Merdeka Bone. Takdir dianggap mengganggu jalannya operasi Satpol PP ini dan memancing emosi petugas.

Alasan Satpol PP melarang aktivitas di sekitar pelataran kolam yang ramai dikunjungi warga ini, dianggap berbahaya karena memiliki listrik tegangan tinggi[].

Rilis Perdik [5]

Rilis perkembangan kasus penganiayaan difabel di Bone (4/1/2018)

Korban Sebut Satpol PP Bikin Laporan Kronologis Tidak Obyektif
Laporan Kronologi Satpol PP Bone Dianggap Tidak Obyektif

MAKASSAR – Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, Andi Takdir mengaku keberatan dengan Laporan Kronologi peristiwa penganiayaan terhadap dirinya yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone. Sabab laporan itu tidak objektif dalam menjabarkan kronologis.

Sebelumnya, Takdir dianiaya sejumlah oknum Satpol PP Bone di Lapangan Merdeka Watampone, pada Sabtu malam, 23 Desember 2017. Kejadian ini bermula saat Satpol PP hendak membubarkan sebuah latihan breakdance yang dilakukan salah satu komunitas pemuda di Bone.

Takdir mengatakan laporan kronologi yang dikeluarkan Satpol PP per tanggal 24 Desember 2017 itu tidak objektif, malah ada yang tidak benar. Terutama tidak menjabarkan urutan kejadian saat anggota Satpol PP melakukan penganiayaan terhadap dirinya, setelah petugas itu menegur sekelompok pemuda yang berlatih breakdance di sudut pelataran air mancur Lapangan Merdeka.

Takdir yang juga penyandang disabilitas atau difabel daksa kinetik ini mengakui bila sejumlah Satpol PP menegur aktivitas pemuda itu sebanyak dua kali. Teguran pertama, komunitas breakdance itu menghentikan aktivitasnya. Tak cukup 5 menit, aksi mereka kembali dilanjutkan.

"Saya suruh lagi lanjutkan, karena anggapan saya tidak ada aturan yang mengatur kalau dilarang latihan disitu, " kata Takdir, Kamis (4/1/2018).

Menurutnya tidak ada larangan untuk melakukan aktivitas di Lapangan Merdeka, sebab, kata dia, itu adalah wilayah publik. Artinya warga berhak untuk berada di dalam Lapangan Merdeka.

"Saya sempat tanya kepada mereka pada malam itu, mana aturan soal larang melakukan aktivitas di sini. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan, " jelasnya.

Takdir juga keberatan dengan anggapan bahwa dirinya mengeluarkan kata-kata tak sepantasnya. Ia pun mempertanyakan seperti apa ucapannya yang dimaksudkan oleh Satpol PP sebagai kata-kata tak sepantasnya.

"Saya juga bingung yang mana yang mereka maksud kata-kata yang tidak sepantasnya. Karena sedikitpun tidak ada kata-kata, maaf, kata kotor saya lontarkan, hanya intonasi bahasaku yang mungkin agak tinggi waktu itu, saya mengatakan: ahh lanjutkan saja, "

Yang paling disayangkan, kata dia, dalam kronologi disebut Komandan Operasi, yakni
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib), Andi Baharuddin mengingatkan kepada anggotanya untuk tidak terpancing, namun justru Andi Baharuddin yang memulai

penganiayaan kepada Takdir hingga petugas lainnya ada yang memiting lehernya.

"Ada juga statement mereka yang mengatakan kalau pimpinannya menyampaikan agar anggotanya tidak terpancing. Padahal jelas-jelas dalam video kalau pimpinannyalah yang memulai penganiayaan kepadaku, " tegasnya.

Ketidak objektifan selanjutnya dalam laporan itu, bahwa pada saat Takdir dikepung Satpol PP, dirinya dianggap tidak bersama dengan anaknya yang masih berusia empat tahun.

"Ada statemennya mengatakan saya tidak bersama anak saya, padahal jelas-jelas anak saya ada di samping saya, " bebernya.

Menurutnya, sebelum Satpol PP mengerumuni, Takdir sedang memeluk anaknya. Saat makin terdesak karena petugas maju mendekatinya, anaknya terlepas dari pelukannya. "Waktu awal mereka datang anak saya peluk. Setelah mereka merapat anak saya menghindar ke samping saya, "

Saat itulah terjadi insiden pemukulan yang tidak dijabarkan dalam kronoligi Satpol PP. "Saat saya dipukul anak saya ada di belakang saya. Itu terekam dalam video yang banyak tersebar, " kata dia.

Diketahui kasus ini sudah bergulir di Polres Bone dan polisi sudah menetapkan lima tersangka, masing masing, Andi Baharuddin (Kasi Trantib), Andi Saharifuddin (Kasi Pengawasan Penegakan Perda), Andi Ahmad Aminuddin (honorer), Andi Adhar (honorer) dan Faisal (honorer).

Meski sudah ditetapkan tersangka, Takdir mendapat berbagai teror dan intimidasi dari berbagai oknum untuk

meminta kasus itu dihentikan. Namun dirinya bersikeras melanjutkan kasus itu hingga ada vonis di pengadilan.

Berikut Laporan Kronologis Satpol PP yang berhasil didapatkan wartawan:

Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 pukul 20.36 bertempat di lapangan Merdeka kami melaksanakan tugas Pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru sekaligus melakukan Pengendalian terhadap gangguan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan PERDA Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Keterbitan Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pada Waktu kami melakukan monitoring/pemantauan di Lapangan Merdeka. Kami menemukan kegiatan melanggar PERDA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Keterbitan Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu sebagai berikut:

Ada sekelompok pemuda melakukan kegiatan breakdance di Pelataran Air Mancur dimana lokasi ini tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan seperti ini dan memang masyarakat dilarang berda didalam pelatan air mancur ini karena sangat berbahaya disebabkan memiliki tegangan listrik yang sangat tinggi disamping itu kegiatan seperti ini bisa saja merusak fasilitas yang ada didalamnya seperti Lampu Sorot Air Mancur. Hal ini merupakan Palanggaran terhadap PERDA Nomor 13 Tahun 2016 pasal 12 point (a) yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang memasuki atau berada dijalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas.

Selanjutnya point (b) menyatakan bahwa Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak dan

mengotori jalur hijau, taman dan tempat umum beserta kelengkapannya.

Demikian pula dengan melakukan kegiatan breakdance di lokasi air mancur ini maka kenyamanan masyarakat untuk menikmati keindahan air mancur menjadi terganggu. Hal ini yang membuat kami harus menegur kepada sekelompok pemuda ini untuk menghentikan kegiatannya dan mengarahkan kepada mereka untuk melakukan kegiatan tersebut ditengah lapangan karena lokasi itu lebih layak untuk melakukan kegiatan tersebut karena tidak menimbulkan gangguan kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas di lapangan merdeka.

Setelah kami tegur, sekelompok pemuda ini berhenti melaksanakan aktifitasnya. Berselang 10 menit kemudian, mereka melakukan aktifitasnya kembali kamipun harus menegur untuk kedua kalinya. Pada saat kami menegur, tiba-tiba da seseorang di lokasi tersebut yang bernama ANDI TAKDIR memprovokasi pemuda tersebut untuk tetap melanjutkan aktifitasnya.

Kamipun menegur Andi Takdir kerena sudah mengganggu jalannya operasi kami tetapi bukannya menerima malah semakin memancing emosi aparat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya.

Komandan Operasi mengingatkan untuk tidak terpancing melakukan tindakan yang berdampak hukum. Tapi semakin lama semakin banyak bicaranya dan semakin kurang ajar dalam berkata-kata. Melihat masyarakat yang semakin berkerumun di lokasi kehadian maka saya mengambil inisiatif untuk mengamankan Andi Takdir ini ke POS POLISI yang ada di Lapangan Merdeka.

Dari sinilah kemudian anggota saling dorong untuk membawa Andi takdir karena bersikeras tidak mau diamankan. Pada saat diamankan dia berteriak untuk mencarikan anaknya karena tidak bersama dengan anaknya pada saat kejadian itu.

Setelah anak itu ditemukan kemudian diserahkan kepada Andi Takdir. Dia pun keluar dari area air manur dan selanjutnya pergi dari lapangan merdeka dan situasi pun kembali kondusif.

Tidak berselang lama Bapak Kabag OPS POLRES BONE dan KAPOLSEKTA KOTA datang ke lokasi mempertanyakan kejadian yang terjadi. Dan Setelah dijelaskan oleh Kabid Trantib Satpol PP, beliaupun meninggalkan lokasi kejadian sambil bepesan untuk tetap menjaga situasi dan kondisi keamanan di lapangan merdeka ini.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya sesuai apa yang saya liat dan alami sebagai penanggung jawaban serta mengingat sumpah dan jabatan yang ada.

Watampone 24 Desember 2017

Komandan Tim Operasi : Kasi Trantib, Andi Baharuddin
Pelapor: Kasi Pengawasan, Saharifuddin

Rilis PerDIK [6]

Rumah Ketua PPDI Bone Dilempari Batu oleh OTK

Pasca Pemukulan, Rumah Ketua PPDI Bone Diteror Batu

BONE - Korban penganiayaan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone, Andi Takdir kembali mendatangi Markas Besar (Mabes) Polisi Resort (Polres) Bone guna

melaporkan insiden pelemparan di rumahnya oleh orang tak dikenal (OTK). Peristiwa diperkirakan sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, Jumat, 5 Januari 2018,

Takdir yang juga Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone mendatangi kantor Polres Bone yang berada di Jalan Yos Sudarso, Tipojong, Kecamatan Tanete Riattang, pada Jumat pagi bersama pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Takdir yang juga penyandang disabilitas atau difabel ini menceritakan, hari paginya dikagetkan dengan batu yang ukurannya lebih besar dari kepalang tangan orang dewasa di lantai rumahnya disertai serpihan kaca. Ternyata kaca jendela rumahnya pecah akibat batu.

"Tadi pagi sekitar pukul 06.00 saya kaget lihat ada batu dalam rumah disertai pecahan kaca di lantai. Saya menduga ada orang yang melempar. Karena tidak mungkin batu itu terbang sendiri masuk dalam rumah, walaupun tadi malam hujan deras disertai angin yang cukup kencang, " kata Takdir, usai laporan itu.

Ia pun menanyakan hal ini kepada saudaranya tapi juga tidak mendengar ada kegaduhan malam tadi. Tapi iparnya angkat bicara. Menurut Takdir iparnya itu sempat mendengar suara seperti piring jatuh.

"Istri kakak saya mendengar ada suara seperti piring jatuh. "Saya kira kucing yang menjatuhkan piring dari meja makan jadi saya tidak peduli, " kata Takdir menirukan ucapan iparnya itu.

Meski demikian dirinya tidak ingin menduga-duga, bila pelemparan itu ada sangkut puatnya dengan kasus penganiyaan oknum Satpol PP yang kini menjadi tersangka polisi. "Jadi saya

tidak bisa pastikan apakah ini ada hubungan dengan kasus saya atau tidak, " ujarnya.

Tapi, menurutnya pada malam Selasa lalu (2 Januari 2018) ada satu orang mendatangi rumahnya dan membentaknya untuk meminta damai dan mencabut laporannya di Polres. Begitu juga pada keesokan harinya orang itu mendatangi lagi rumahnya.

"Jujur saya tidak bisa menduga apakah ada hubungan dengan kasus saya atau tidak, karena saya tidak melihat siapa yang melempar karena jam 2 malam, " tegasnya.

Bukti batu dan serpihan kaca jendela yang ditemukan dalam rumah Takdir itu kini sudah berada di Polres Bone.

Kapolres Bone, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kadarislam yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari Takdir dan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah korban.

"Iya tadi kami sudah menerima laporan Takdir dan laporan ini akan kami satukan dengan laporan sebelumnya (penganiayaan oknum Satpol PP), " ujarnya dikonfirmasi wartawan, Jumat sore.

Diketahui, Takdir dianiaya sejumlah oknum Satpol PP Bone di Lapangan Merdeka Watampone, pada Sabtu malam, 23 Desember 2017. Kejadian ini bermula saat Satpol PP membubarkan sebuah latihan breakdance yang dilakukan salah satu komunitas pemuda di Bone.

Akibatnya Takdir mengalami luka pada bagian kepada. Tidak hanya itu, anaknya yang berada di tempat kejadian mengalami trauma akibat ikut menyaksikan pemukulan dan aksinya kekerasan lainnya.

Polres Bone juga sudah menetapkan lima oknum Satpol PP yang diduga melakukan penganiayaan kepada Takdir.

Namun sejak laporan itu masuk di kepolisian, berbagai ancaman, teror dan intimidasi bersifat verbal dialami Takdir[].

Rilis PerDIK [7]

Korban Persekusi Satpol PP Bone Diancam Diculik # Minta Kasus Dicabut, Ketua PPDI Bone Diancam Akan Diculik # Preman Teriak Akan Menculik Korban Penganiayaan Satpol PP Bone

MAKASSAR - Andi Takdir, difabel daksa kinetik yang merupakan korban penganiayaan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone kembali menerima teror.

Jika dini hari Jumat, 5 Januari 2018 lalu, orang tak dikenal (OTK) melakukan pengrusakan di rumahnya. Kali ini ancaman penculikan.

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone itu menuturkan soal teror yang baru dialaminya, Minggu, 7 Januari 2017 pagi tadi.

"Tadi pagi ada orang yang berteriak dekat rumah. Itu preman yang pernah datang ke rumah. Dia bilang 'hati-hati nanti ada yang culik'," kata Takdir menirukan teror preman tersebut.

Menurutnya orang berteriak-teriak dan meninggalkan rumah Takdir. "Dia lewat-lewat saja di samping rumah, " tambah dia.

Pria 30 tahun ini menduga kuat, jika orang tersebut adalah preman yang juga pernah datang ke rumahnya sebelumnya. Ancaman itu diduga sebagai upaya untuk mengendorkan semangat Takdir dalam penuntasan kasus yang minimpahnya pada 23 Desember 2017 lalu.

Apalagi sebelumnya, ia juga sempat menerima teror dalam bentuk pelemparan batu atau pengrusakan fasilitas, hingga kaca jendela rumahnya pecah. Takdir juga mengaku telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Belum ada yang ditahu pelakunya. Namun saya curigai preman yang pernah datang di rumah," kata Takdir.

Kendati begitu ia tetap mempercayakan kasus ini bisa dituntaskan kepolisian. Menurutnya, ini merupakan kali kedua ia harus menerima ancaman dalam bentuk tekanan mental.

"Sudah saya laporkan lagi, kata polisi sudah ditahap penyelidikan untuk dicari pelakunya," kata Takdir lagi.

Tim pendamping hukum Andi Takdir, Ridwan Rido mengatakan, pihaknya juga telah melayangkan laporan ke Polres Bone untuk mengungkap upaya teror ini. Sejauh ini kata Rido, pihaknya sangat dirugikan dengan tindakan teror tersebut.

"Apa lagi kasus penganiayaannya ini masih sementara berproses jadi kita harap bisa diungkap lagi apa motif lainnya," kata Rido.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Hardjoko mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya penyelidikan soal pelaku pelemparan dan teror terhadap Andi Takdir. "Siap masih dalam proses penyelidikan," singkat Hardjoko.

Rilis PerDIK [8]

AKSI KAMISAN MAKASSAR

Menolak Lupa Kekekerasan Terhadap Ketua PPDI Bone

Derita yang dialami Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, Andi Takdir (30), rupanya belum usai. Usai mengikuti Aksi Kamisan di Makassar, Takdir kembali diteror.

Rumahnya di Bone dilempari batu pada Jumat (5/1/2018) dini hari lalu. Akibatnya, jendela rumahnya pecah. Korban menemukan batu yang ukurannya lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa di lantai rumahnya disertai serpihan kaca.

Tiga hari kemudian, Takdir kembali diteror. Ada orang yang berteriak di dekat rumahnya sembari mengucapkan "hati-hati nanti ada yang culik".

Takdir mencurigai ada pihak yang sengaja ingin menerornya. Pelaku belum dikenal. Namun ancaman itu dicurigai sebagai upaya untuk mengendorkan semangat Takdir yang sedang berjuang meminta penegakan hukum atas penganiayaan yang dialaminya, Sabtu malam, 23 Desember 2017 lalu.

Saat itu, Takdir dianiaya sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone di Lapangan Merdeka Watampone. Yang sungguh memiriskan, pemukulan terhadap Takdir itu terjadi di depan anaknya yang masih berusia 4 tahun.

Pemukulan tersebut bermula saat Takdir memprotes tindakan sejumlah anggota Satpol PP Bone yang hendak membubarkan aktivitas menari yang dilakukan salah satu komunitas di Lapangan Merdeka Watampone.

Takdir yang kebetulan melihat aksi pengusiran itu, ikut membela. Namun sejumlah oknum Satpol PP datang mengerumuni Takdir. Lalu menendang dan memukuli bagian kepala Takdir yang merupakan penyandang disabilitas daksa kinetik.

Berdasarkan hal itulah kami dari Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) bersama Amnesty Internasional Indonesia dan sejumlah elemen perjuangan HAM di Sulawesi Selatan kembali akan menggelar Aksi Kamisan Makassar atau Aksi Payung Hitam.

Tempat: depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Waktu: Kamis, 11 Januari 2018

Pukul: 15.00 - 17.00 wita.

Pada Aksi Kamisan keenam ini, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1) Kami turut prihatin atas upaya-upaya menekan atau teror yang menimpa Andi Takdir
2) Mengecam keras tindakan oknum pelaku maupun otak di balik kasus pelemparan rumah Andi Takdir. Termasuk terhadap pelaku yang berteriak mengancam akan menculik Takdir beberapa hari lalu.
3) Kami mendesak Polres Bone segera mengungkap pelaku dan otak yang memerintahkan pelemparan rumah Andi Takdir, termasuk yang mengancam akan menculik korban.
4) Mendesak Polres Bone serius melanjutkan proses hukum oknum Satpol PP Bone yang telah ditetapkan sebagai tersangka penganiaya Andi Takdir hingga berkas dan

tersangkanya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan setempat.

5) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan ikut bertindak dengan melindungi Andi Takdir.
6) Meminta Polres Bone tidak memberikan penangguhan penahanan kepada oknum Satpol PP yang telah menganiaya Andi Takdir.
7) Meminta Bupati Bone menunjukkan keseriusannya mengevaluasi dan memberi sanksi oknum Satpol PP Bone yang telah menganiaya Andi Takdir.
8) Mendesak Satpol PP Bone bertindak profesional dan mengedepankan langkah-langkah yang menghargai HAM dalam penegakan aturan.
9) Stop kekerasan dan diskriminasi terhadap para difabel di manapun.

Kami yang tergabung dalam Aksi Kamisan Makassar akan mengawal proses hukum kasus ini hingga para pelaku divonis di pengadilan dan korban mendapatkan keadilan.

An Aksi Kamisan Makassar

Korlap aksi: Humaerah Jaju

Penanggungjawab aksi: Hajriana Ashadi

ADVOKASI

[7]

DIFABEL HARUS MERDEKA SEPENUHNYA: SEGERA SUSUN 15 RPP PENGHORMATAN HAK DISABILITAS!

August 14, 2017

H. Bakri

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Di tengah keramaian car freeday, pegiat difabel berkumpul untuk menyuarakan aspirasi menolak PP Sapujagat di depan Hotel Aryaduta, Pantai Losari (13/8/2017). Sebelumnya aksi penolakan PP sapujagat telah lebih dulu dilakukan di tiga kota: Jakarta, Jogja dan Bandung. Aksi penolakan PP sapujagat di Makassar adalah aksi bersama pegiat-pegiat difabel, yang terhimpun dalam Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDik Sulsel), Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin Sulsel), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI Sulsel) dan beberapa pegiat difabel diluar Sulsel juga ikut bergabung. Aksi ini

dilakukan sebagai bentuk protes ke pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sepakat hanya membuat 1 rancangan peraturan pemerintah. Seyogianya pemerintah harus membuat setidaknya 7 PP yang tercakup 15 ketentuan PP. PP Sapujagat dinilai menyimpang dari komitmen Presiden Joko Widodo dalam Piagam Soeharso**[1]**.

Salah satu komitmen Jokowi adalah "menjadi bagian dalam perjuangan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Saya akan berjuang untuk lahirnya undang-undang yang memberikan kepastian bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak ekonomi, sosial, politik, pekerjaan, kebudayaan, jaminan pendidikan dan jaminan sosial, yang sesuai dengan UUD 1945 dan konevsi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas" Pegiat difabel yang dimotori oleh

PerDik meminta dukungan masyarakat yang singgah untuk menandatangi kertas putih sebagai bentuk dukungan menolak PP sapujagat yang nanti akan diserahkan ke DPRD Sulsel dan akan diteruskan ke DPR RI.

Aksi penolakan PP sapujagat juga diisi dengan kegiatan membaca gratis, buku-buku koleksi PerDik dijejer di atas tikar semisal Disability and Proverty, Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Difabel Merebut Bilik Suara, dan Hidup Dalam Kerentanan. Minat masyarakat Makassar terhadap buku-buku koleksi PerDik terlihat dengan banyaknya pertanyaan senada "apakah buku-buku ini dijual?". Bagi Masyarakat yang singgah juga disediakan segelas kopi secara gratis.

Difabel adalah kepanjangan dari Different Abilities People memiliki makna orang-orang yang berkebutuhan khusus/berbeda. Istilah difabel pertama kali digagas oleh Mansour Fakih (Aktivis gerakan sosial di Indonesia yang juga pendiri INSIST) dan Setya Adi Purwanta (seorang difabel netra) bukanlah serta-merta merupakan pengganti dari istilah penyandang cacat. Gagasan atas ditawarkannya pengistilahan ini adalah lebih merupakan ide atas perubahan konstruksi sosial memahami disabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecatatan atau penyandang cacat. Ishak Salim (Perdik) mengenakan kaos hitam bertuliskan "Equal Rights Now!" dan berlogo difabel mengatakan bahwa "istilah penderita cacat tidak dipakai, tidak ada yang cacat, cacat itu hanya pada barang, manusia adalah makhluk sempurna, yang cacat adalah lingkungan yang membuat teman-teman difabel tidak mampu".

Lelaki dengan identitas "isangkilang" ini memang konsen memperjuangkan hak-hak difabel, disertasinya juga terkait difabel. Aspek akseptabilitas harus diutamakan. Ishak Salim juga mencontohkan lebarnya troatoar yang diperuntukan bagi

pengguna kursi roda. Kebanyakan fasilitas publik belum ramah bagi difabel. Hal inilah yang menjadi kendala jika difabel beraktifitas di luar rumah. Seperti yang terjadi pada saat selesai aksi penolakan PP sapujagat, pemesan "taxi online" agak sulit mendapat mobil yang dapat memuat kursi roda.

Keterbatasan organ tubuh sebenarnya tidak memiliki korelasi langsung terhadap ketidakmampuan aktifitas dan partisipasi sosial difabel di lingkungan masyarakat. Justru ketidakmampuan terjadi oleh karena kesalahan lingkungan dan negara dalam memahami difabel dan cenderung mendiskriminasi mereka. "Difabel jangan dikurung, tidak boleh dipasung, difabel harus merdeka sepenuhnya, begitulah imbauan Ishak Salim. Kebanyakan yang terjadi, para orang tua yang anaknya difabel merasa kurang percaya diri karena kondisi yang dialami anaknya, mereka membatasi pergaulan anaknya dengan lingkungan sekitar. Stigma yang melekat di masyarakat selama ini juga ikut memperburuk citra difabel. Realitas sosial inilah yang harus diluruskan. Para artis sinetron yang melakonkan difabel di televisi dinilai keliru dalam memainkan perannya sebagai difabel. Difabel dikonsepkan sebagai orang cacat yang tidak berguna, misalnya saja saat artis sinetron memainkan peran difabel netra, akting si artis terlalu berlebihan, saat berjalan di sekitaran rumah (meraba-raba benda disekitar, berjalan tersandung meja), nyatanya difabel netra jika berjalan di sekitaran rumah yang sudah dihafal tata letak dan bentuknya, mereka berjalan seperti orang pada umumnya. Ketika disabilitas dipelajari dan dibahas secara teoritis, seringkali dengan cara yang ofensif karena banyak peneliti melihat seorang difabel hanya dalam kondisi biologis dan menyimpulkannya sebagai orang yang membutuhkan bantuan.**[2]**

Kita sebagai orang-orang yang peduli terhadap difabel,

Direktur PerDIK
Abd Rahman Gusdur

Ketua Gerkatin Makassar dan penerjemah isyarat Bisindo
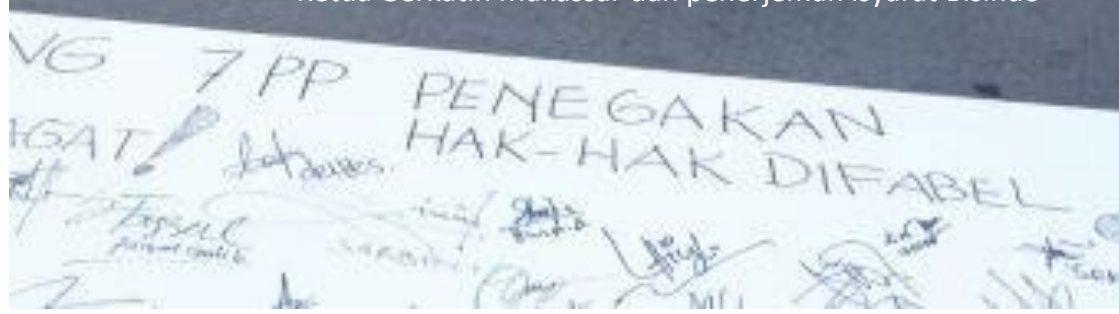
jangan menjadikan mereka seperti orang yang tidak berguna dan selalu bergantung dengan orang lain. Mereka pun bisa mandiri. Kita harus memperlakukan difabel secara manusiawi. Hanya saja kita perlu mengetahui etika difabel. Jika kita mengambil barangnya difabel netra, kita wajib menaruhnya ditempat semula. Jika difabel netra kesandung meja, dan sebelumnya kita tidak memberitau bahwa disana ada meja, kitalah yang salah bukan difabel netra. Begitupun difabel rungu, jika kita berbicara dengan mereka tidak perlu dengan suara keras. Kita seringkali berupaya untuk mengkonsepkan kata-kata agar tidak menyinggung kawan-kawan difabel. Padahal, jika mereka dipanggil buta dan dipanggil tuli, kawan-kawan difabel merasa biasa saja. Kekeliruan terhadap difabel harus segera diubah. Segera. !

Orator aksi tidak hanya Ishak Salim saja, pegiat-pegiat difabel seperti Rahman Gusdur, Kak Uchi, Nur Syarif Ramadhan, dan kawan-kawan difabel (netra, Tuli, Kinetik) secara bergantian berorasi menuangkan keresahan-keresahan mereka terkait difabel yang masih dipandang sebelah mata oleh negara. Hal menarik dan menggugah hati nurani saat Ade Saputra memegang toa speaker dan berpuisi "hak asasi manusia terpangkas, kesempatan terhalang,… inikah Indonesia merdeka? inikah Indonesia berdemokrasi?" Salah seorang Tuli dalam berorator dibantu oleh seorang penerjemah bahasa isyarat. Pesan yang disampaikan adalah Kota Makassar masih kekurangan penerjemah bagi difabel runggu untuk berkomunikasi. Saat ini di Makassar hanya tersedia 4 orang, sementara yang dibutuhkan di seluruh sektor penghidupan setidaknya 100 orang.

Kak Uci bercerita Rahmat adalah siswa cerdas dan pengurus OSIS di SMA Negeri 17 Makassar. Di tahun 2011 Rahmat mengalami kecelakaan di depan fly over Makassar

sehingga membuatnya tidak bisa jalan dan berbicara. Pihak SMA Negeri 17 Makassar memutuskan untuk mengeluarkan Rahman dari Sekolah. Dengan nada kesal kak uchi melampiaskan unek-uneknya. Sekolah sebagai institusi pendidikan, yang katanya pemegang kunci dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan seseorang, sekolah sebagai tempat mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berfungsi memanusiakan manusia, justru berlaku tidak adil. Memperlakukan manusia bukan seperti manusia. Institusi pendidikanlah yang cacat, regulasi sekolahnya yang cacat. Sekolah malah melakukan tindakan diskriminasi dengan memisahkan difabel dan tidak difabel. Sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa membeda-bedakan. Orang tua yang anaknya difabel yang ingin memasukan anaknya sekolah seringkali diarahkan untuk memasukan anak difabel di Sekolah Luar Biasa (SLB). Seharusnya baik difabel dan bukan difabel dapat belajar dalam ruang kelas yang sama.

Aksi penolakan PP sapujagat diakhiri dengan sesi foto bersama sambil memegang kertas putih yang telah ditandatangi sebagai bentuk penolakan. Pegiat-pegiat difabel juga membersihkan sisa-sisa sampah di sekitaran area kegiatan. "Lisa, Lisa liat sampah ambil," begitu teriakan Rahman Gusdur, dan pegiat-pegiat difabel pun memungut sampah yang berserakan. Sebagai warga kota yang baik kita wajib menjaga kebersihan kota. Apalagi Makassar baru saja untuk ketiga kalinya secara beruntun meraih piala Adipura. Difabel harus merdeka. Tolak PP sapujagat, kawal![]

[1] Piagam Perjuangan Prof.Suharso yang ditandatangani oleh Jokowi pad a 5 Juli 2014 komitmen terhadap penyanisabilitas

[2] Ishak Salim (ed).*Difabel Merebut Bilik Suara* (Sigab: Yogyakarta, 2015). l 21

ADVOKASI

[8]

DIFABEL MENOLAK PP “SAPU JAGAD”

july 28, 2017

PEMERINTAH MEMUTUSKAN UNTUK MENGGABUNGKAN 15 ketentuan pembentukan PP yang diamanatkan untuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) menjadi 1 PP saja (PP “sapu jagat”). Keputusan itu untuk pertama kalinya disampaikan kepada publik dalam kegiatan Konsultasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan, di Yogyakarta, 25-28 Juli 2017. Namun begitu, masyarakat penyandang disabilitas

(atau difabel, red) yang berasal dari berbagai organisasi penyandang disabilitas dan organisasi lain yang aktif melakukan advokasi dalam isu difabilitas menyatakan penolakannya.

Dalam kegiatan Konsultasi Nasional yang didukung oleh GIZ tersebut, Pemerintah menyampaikan ada tiga alasan yang mendasari keputusannya, yaitu kebijakan simplifikasi regulasi yang sedang digariskan oleh Presiden, ketiadaan anggaran yang disediakan oleh Kemeterian/Lembaga (K/L) untuk pembentukan PP selain dari Kementerian Sosial, dan percepatan proses pembentukan PP sehingga target pengesahan pada 2018 dapat tercapai.

Menanggapi hal itu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, memberikan tanggapannya bahwa keputusan Pemerintah untuk menggambungkan 15 ketentuan PP menjadi 1 PP adalah bentuk dari penyederhanaan isu disabilitas, dan hal itu melanggar UU Penyandang Disabilitas sekaligus prinsip dalam *Convention on the Rights with People with Disabilities* (CRPD).

Lebih lanjut Fajri menyampaikan bahwa seharusnya UU Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dalam minimal 14 PP turunannya, karena 14 ketentuan PP diatur dalam UU Penyandang Disabilitas menggunakan frasa "diatur dengan", sedangkan 1 ketentuan PP lain menggunakan frasa "diatur dalam". Dalam teori perundang-undangan, ketentuan delegasi dengan frasa "diatur dengan" berarti harus dituangkan dalam 1 PP tersendiri, sedangkan untuk frasa "diatur dalam" diperbolehkan untuk digabungkan dengan PP yang lain. Oleh karena itu, patut dipertanyakan bagaimana justifikasi Pemerintah dalam memandang frasa "diatur dengan" dalam pengambilan keputusan pembentukan PP "sapu jagat" ini.

Selain itu, Fajri juga menambahkan bahwa yang jadi permasalahan bukanlah tidak tersedianya anggaran, tetapi tidak adanya keinginan politik atau *political will* dari Pemerintah untuk menindaklanjuti amanat dari UU Penyandang Disabilitas, yaitu menjadikan disabilitas sebagai isu multisektor yang berbasis pada Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk pertimbangan waktu pembentukan, PP "sapu jagat" ini tidak akan mempercepat proses, karena apa yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah utama, yaitu tidak adanya kepemimpinan yang kuat dalam mengawal implementasi dari UU Penyandang Disabilitas di internal Pemerintahan. Pendapat Fajri itu kemudian diperkuat oleh peserta lainnya yang juga ikut mempertanyakan sampai akhirnya menolak keputusan Pemerintah untuk menggabungkan 15 ketentuan PP menjadi 1 PP "sapu jagat".

Kegiatan Konsultasi Nasional tersebut dilanjutkan dengan diskusi kelompok membahas substansi dari masing-masing

ketentuan delegasi PP yang diamanatkan oleh UU Penyandang Disabilitas. Diskusi kelompok itu berhasil mengumpulkan masukan dari berbagai peserta yang hadir, sehingga dapat menjadi materi awal untuk membahas keseluruhan PP yang diamanatkan secara terpisah. Besar harapan dari masyarakat difabel agar Pemerintah merevisi keputusannya, dan melanjutkan proses pembentukan PP secara terpisah di masing-masing K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya[].

ADVOKASI

[9]

MENINJAU KEMBALI PP "SAPU JAGAD" IMPLEMENTASI UU PENYANDANG DISABILITAS

August 7, 2017

Fajri Nursyamsi*

Kebijakan 1 PP "sapu jagat" justru akan semakin memangkas kesempatan untuk menumbuhkan pemahaman dan keberpihakan masing-masing K/L terkait terhadap isu disabilitas.

PEMERINTAH BERENCANA MEMBENTUK SATU PERATURAN PEMERINTAH (PP) "sapu jagat" untuk melaksanakan 15 ketentuan PP yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Keputusan Pemerintah itu mendapat penolakan dari masyarakat penyandang disabilitas yang berasal dari berbagai organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi lain yang aktif dalam advokasi isu disabilitas.

Penolakan itu didasarkan kepada argumentasi bahwa PP "sapu jagat" merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Penyandang Disabilitas dan prinsip dalam Konvensi Hak-Hak

Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of People with Disabilities* – CRPD); lemahnya kepemimpinan dalam Pemerintah untuk mengimplementasikan UU Penyandang Disabilitas; serta bentuk penyimpangan dari komitmen implementasi UU Penyandang Disabilitas.

Perwakilan Pemerintah dalam kegiatan Konsultasi Nasional yang diselenggarakan di Jogjakarta pada 25-27 Juli 2017, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (KemenkoPMK), menyampaikan bahwa keputusan PP "sapu jagat" didasari oleh tiga alasan utama, yaitu *Pertama,* kebijakan deregulasi yang sedang digariskan oleh Presiden Joko Widodo; *Kedua,* ketiadaan anggaran yang disediakan oleh Kemeterian/Lembaga (K/L) untuk pembentukan PP selain dari Kementerian Sosial; dan *Ketiga,* percepatan proses pembentukan PP sehingga target pengesahan pada 2018 dapat tercapai.

Ketiga argumentasi ini menggambarkan pemahaman dan keberpihakan yang lemah dari Pemerintah terhadap implementasi UU Penyandang Disabilitas. Pemerintah hanya fokus bagaimana menggugurkan kewajiban yang diberikan UU, yaitu memenuhi amanat pembentukan peraturan pelaksanaan paling lambat 3 tahun setelah UU disahkan, yang jatuh pada April 2018. Dalam kondisi itu, Pemerintah seakan lupa terhadap komitmen yang sudah dibangun pasca pengesahan UU Penyandang Disabilitas, yaitu meletakan disabilitas sebagai isu multisektor dan menempatkannya sebagai isu Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan perubahan cara pandang terhadap disabilitas menjadi isu HAM adalah komitmen Presiden Joko Widodo yang digagas sejak masa kampanye 2014.

Perubahan Cara Pandang diBalik Pembentukan PP yang Beragam

Dalam pelaksanaannya, kebijakan deregulasi peraturan perundang-undangan seharusnya melihat juga pada materi muatan dan tujuan dari pengaturannya, tidak sekadar pada jumlah peraturan yang harus dibatasi. Dalam UU Penyandang Disabilitas ada 15 ketentuan pembentukan PP sebagai peraturan pelaksanaan. Rumusan norma yang mengatur pembentukan 15 PP ini seluruhnya menggunakan frasa "diatur dengan", kecuali satu ketentuan dalam Pasal 96 yang menggunakan frasa "diatur dalam".

Berdasarkan kajian bahasa peraturan perundang-undangan, frasa "diatur dengan" bermakna bahwa ketentuan harus diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri. Sedangkan untuk frasa "diatur dalam" pengaturannya dapat digabung dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemisahan pembentukan PP menjadi lebih dari satu peraturan juga bukan tanpa tujuan. Ketentuan itu erat kaitannya dengan perubahan cara pandang terhadap isu disabilitas yang dibangun dalam UU Penyandang Disabilitas, dan hal itulah yang menjadi inti dari pembentukan UU Penyandang Disabilitas. 15 ketentuan PP yang diamantkan UU Penyandang Disabilitas mencakup 7 sektor pemerintahan yang berebeda-beda, dan masing-masing sektor berkaitan dengan tugas dan fungsi K/L yang berbeda pula.

Adapun 7 sektor atau tugas dan fungsi K/L yang terkait, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk pengaturan tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; Kementerian Pendidikan untuk pengaturan pendidikan inklusif; Kementerian Sosial untuk pengaturan rehabilitas sosial; Kementerian Hukum dan HAM untuk pengaturan akses penyandang disabilitas dalam penegakan hukum; Kemeneterian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk

pengaturan pelayanan publik bagi disabilitas; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pengaturan pemenuhan hak atas pekerjaan dan insentif bagi pemberi kerja bagi disabilitas; dan Kementerian Keuangan untuk pengaturan konsesi dan insentif bagi pemberi konsesi.

Penyederahaan 15 ketentuan PP menjadi 1 PP "sapu jagat" menunjukan bahwa Pemerintah masih memandang disabilitas hanya sebagai isu rehabilitasi sosial semata, yang dalam implementasinya hanya ditangani oleh Kementerian Sosial. Hal itu jelas tidak selaras dengan semangat pembentukan UU Penyandang Disabilitas yang dengan tegas dalam pengaturannya sudah memasukan berbagai sektor pemerintahan. Selain itu, cara pandang Pemerintah itu bertentangan dengan janji Presiden pada masa kampanye lalu, yang kemudian dituangkan dalam Piagam Soeharso yang ditandatangan diatas materai oleh Joko Widodo sendiri.

Bukan Tidak Ada Anggaran Tetapi Tidak Ada Keberpihakan

Ketidakadaan alokasi anggaran pada K/L untuk membentuk PP implementasi UU Penyandang Disabilitas menjadi salah satu alasan yang digunakan Pemerintah untuk menggagas PP "sapu jagat". Dalam hal ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa alokasi anggaran yang dimiliki oleh K/L adalah usulan dari K/L itu sendiri. Hal ini menunjukan bahwa ketiadaan anggaran tidak bisa dipandang sebagai aspek administratif belaka, tetapi juga tidak adanya keberpihakan atau bahkan *political will* Pemerintah terhadap isu disabilitas. Padahal pembentukan PP ini adalah amanat UU Penyandang Disabilitas kepada masing-masing K/L terkait.

Perubahan cara pandang terhadap disabilitas, dari sektor tunggal menjadi multi sektor, ini yang masih menjadi masalah

besar dalam birokrasi di Indonesia saat ini. Pasca satu tahun UU Penyandang Disabilitas disahkan tidak terlihat kemajuan dalam perubahan cara pandang ini. Disabilitas masih tetap menjadi isu sektor sosial yang menjadi domain Kementerian Sosial, dan apabila ada kontribusi K/L lain adalah dalam lingkup isu kemiskinan. Padahal disabilitas bukan hanya sekadar isu kemiskinan, tetapi sudah masuk dalam isu pemenuhan HAM warga negara yang implementasinya perlu dilakukan lintas K/L.

Kondisi tersebut terlihat dari berbagai Rapat Koordinasi atau forum-forum lainnya yang diselenggarakan oleh Kemensos atau KemenkoPMK terkait dengan isu disabilitas, yang hadir dalam kegiatan itu terbatas yang memiliki keterkaitan dengan isu kemiskinan. Selain itu, pihak yang hadir bukanlah pemegang kebijakan. Kondisi semakin rumit ketika di Kemensos struktur yang fokus memegang isu disabilitas berada pada level Direktorat, dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Disinilah struktur yang selalu diandalkan oleh K/L untuk mengatasi permasalahan disabilitas yang sangat beragam dan lintas sektor.

Patut untuk direnungkan bersama bahwa menjadikan disabilitas sebagai isu lintas sektor, sehingga perlu dilakukan pengarusutamaan di semua K/L bukanlah berlebihan. Dalam hal kasus konkret, apakah sesuai dengan tugas dan fungsinya Kemensos untuk memenuhi kebutuhan akan lantai pemandu (*guiding block*) pada fasilitas umum trotoar.

Tentu hal itu adalah tugas dan fungsi dari Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Pemerintah Daerah. Lalu bagaimana dengan kasus suatu maskapai penerbangan yang memakasa seorang pengguna kursi roda untuk keluar dari pesawat dengan alasan kedisabilitasannya, tentu bukanlah tugas dan fungsi Kemensos untuk melakukan

tindak lanjut. Hal itu menjadi lingkup kerja dari Kementerian Perhubungan.

Pasca pengesahan UU Penyandang Disabilitas sudut pandang Pemerintah harus berubah, dari pendekatan belas kasih, menjadi pendekatan pemenuhan hak warga negara secara umum. Pemerintah harus melihat penyandang disabilitas sebagai warga negara pada umumnya, yang pemenuhan haknya dijamin dalam konstitusi. Tidak selalu memasukan disabilitas dalam program kemiskinan, karena yang dibutuhkan adalah terbukanya kesempatan yang sama dan akeseibilitas, terutama dalam pelayanan dan fasilitas umum.

PP "Sapu Jagat" Tidak Akan Mempercepat Pembentukan

UU Penyandang Disabilitas mengatur bahwa seluruh peraturan pelaksanaan harus dibentuk paling lambat tiga tahun setelah UU ini disahkan, yang berarti batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan itu adalah pada April 2018. Dengan kata lain, Pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk membentuk 15 ketentuan PP yang diamanatkan dalam UU Penyandang Disabilitas. Hal inilah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran Pemerintah paling besar saat ini, sehingga kemudian berdampak kepada rencana pembentukan PP "sapu jagat".

Pembentukan PP "sapu jagat" dianggap akan mampu mempercepat proses pembentukannya, dibanding apabila harus membentuk 15 PP terpisah. Apabila dilihat hanya dengan angka, logika yang digunakan benar adanya. Namun permasalahan dibalik pembentukan PP implementasi UU Penyandang Disabilitas ini lebih kompleks dari itu. Ada satu variabel lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu belum adanya

keberpihakan dan pemahaman K/L terkait terhadap isu disabilitas.

Pembentukan 1 atau 15 PP tetap akan melibatkan beragam K/L yang tugas dan fungsinya terkait dengan isu disabilitas. Seperti telah dijabarkan sebelumnya bahwa paling sedikit ada 7 K/L yang perlu dilibatkan, sehingga apabila urgensi dan keberpihakan terhadap isu disabilitas belum berhasil dibangun, maka PP yang akan dihasilkan bisa dipastikan tidak utuh. Bahkan sangat berpotensi hanya didominasi oleh K/L tertentu yang tidak paham isu dari sektor lainnya.

Kebijakan 1 PP "sapu jagat" justru akan semakin memangkas kesempatan untuk menumbuhkan pemahaman dan keberpihakan masing-masing K/L terkait terhadap isu disabilitas. Dengan disatukan dalam 1 PP, maka akan hanya ada 1 K/L sebagai inisiator pula. Pada saat itulah pengabaian dan ketidakpedulian K/L lain terhadap isu disabilitas akan semakin kuat. Berbeda apabila PP dibentuk secara terpisah, sehingga inisiator dari pembentukan PP itu akan juga tersebar di berbagai K/L yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan materi muatan PP yang akan dibentuk. Dengan metode pembentukan yang paralel, maka waktu pembentukan 1 atau lebih PP akan sama saja.

Kuncinya Ada Pada Pelibatan Kelompok Masyarakat Disabilitas

Kehadiran UU Penyandang Disabilitas adalah bentuk komitmen negara untuk ikut hadir dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak orang dengan disabilitas. Dalam komitmen itu, Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas untuk memastikannya berjalan sesuai amanat UU. Peran Pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada dukungan dari masyarakat,

terutama dari masyarakat penyandang disabilitas yang kesehariannya bergelut dengan hambatan-hambatan dalam beraktivitas yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan kekhawatiran Pemerintah dalam pembentukan PP sebagai implementasi dari UU Penyandang Disabilitas.

Penolakan masyarakat penyandang disabilitas atas kebijakan PP "sapu jagat" ini sangat dipengaruhi oleh tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan kebijakan. Bahkan tidak ada sosialisasi, melainkan langsung dihadapkan kepada proses pembentukan PP tersebut. Proses pembentukan kebijakan ini jelas hanya menempatkan masyarakat penyandang disabilitas sebagai obyek, dan minim pelibatan. Padahal dalam proses pembentukan kebijakan sebelumnya, seperti pembentukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas atau Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kartu Penyandang Disabilitas, masyarakat dilibatkan dan secara sukarela melibatkan diri serta berusaha maksimal berkontribusi dalam setiap kesempatan, bahkan sampai berkolaborasi dalam pembentukan draft peraturan terkait.

Pelibatan kelompok masyarakat disabilitas ini juga dapat menjadi kunci percepatan pembentukan PP. Minimnya pemahaman substansi mengenai isu disabilitas pada K/L dapat didukung oleh pengetahuan dan pengalaman kelompok penyandang disabilitas. Bahkan, di berbagai kesempatan dalam berkolaborasi dengan Pemerintah atau pemerintah daerah, pelibatan kelompok masyarakat disabilitas juga mampu mendukung pendanaan yang dibutuhkan. Dengan kolaborasi yang baik antara masyarakat penyandang disabilitas dan Pemerintah/pemerintah daerah maka diharapkan mampu menghasilkan berbagai PP yang tepat guna.

Terkait dengan pembentukan PP implementasi UU Penyandang Disabilitas, masyarakat penyandang disabilitas mengharapkan Pemerintah untuk meninjau ulang keputusannya untuk menyusun PP "sapu jagat" dan terus mengupayakan agar PP dibentuk secara terpisah, serta dibentuk oleh masing-masing K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal pembentukannya, masyarakat penyandang disabilitas siap untuk berkolaborasi dengan Pemerintah, terutama untuk memberikan pemahaman atau urgensi dari masing-masing PP, sampai berkontribusi dalam penyusunan draft rancangan PP atau kajian-kajian yang mendukung.

***)Fajri Nursyamsi, SH,.MH. adalah Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Anggota Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas.**

Catatan dari redaktur **http://www.ekspedisidifabel.wordpress.com**: Tulisan ini dikutip dari media hukumonline dengan tujuan penyebarluasan gagasan Mas Fajri dan teman-teman gerakan difabel guna memastikan RPP sesuai amanah UU Disabilitas bisa disusun dan bukan pada hanya satu PP saja.

ADVOKASI

[10]

TEGAKKAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS, DIFABEL HARUS MERDEKA SEPENUHNYA!

August 12, 2017

UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS (UUPD) yang diterbitkan pemerintah pada April 2016 lalu hingga saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Lalu, bagaimana pemerintah memiliki acuan menerapkan UUPD dan memenuhi hak-hak difabel di Indonesia? Tentu saja pemerintah akan kesulitan menghormati hak-hak tersebut.

Lihat saja peristiwa baru-baru ini, bagaimana Kementerian Hukum dan HAM hanya menyiapkan 1 formasi CPNS untuk difabel, padahal jumlah yang akan diterima melebihi angka 19 ribu pegawai. UUPD pada pasal 53 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Itu berarti, seharusnya ada 384 formasi khusus yang harus disediakan bagi difabel. Apa artinya ini? Artinya pada tingkat kementerian sekalipun kepedulian memenuhi aturan Penghormatan Hak Difabel masih dengan mudah diacuhkan. Inilah salah satu akibat dari ketiadaan aturan pelaksanaan setingkat PP (Peraturan Pemerintah).

Pada awal Agustus 2017, Kementerian Sosial menginisiasi pertemuan dengan sejumlah organisasi penyandang disabilitas

dan aktivis difabel di Yogyakarta. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Bambang Sugeng menyampaikan keinginan kementerian sosial menyatukan saja 15 PP sebagaimana diamanatkan UUPD menjadi cukup 1 PP saja. Kontan saja, seluruh peserta dari perwakilan Organisasi Disabilitas dan Organisasi yang *consern* pada isu-isu Disabilitas menyampaikan protes yang berujung penolakan mereka atas rencana simplifikasi itu.

Protes tersebut sampai sekarang masih berlangsung. Kemarin, 11 Agustus 2017, atas inisiatif sejumlah aktivis difabel dan dukungan dari Bappenas terjadi pertemuan. Sebelumnya, gerakan menolak PP Sapujagat sudah memutuskan agar gerakan ini menyiapkan 7 draft RPP sebagaimana diinginkan berdiri sendiri (tidak disatukan). Berdasarkan 7 draft RPP itulah, maka gerakan penolakan PP Sapujagat ini kemudian berhasil meyakinkan pihak Bappenas untuk mendorong kementerian/lembaga terkait menyiapkan draft RPP dan menolak hanya satu PP saja.

Namun, walaupun Bappenas sudah memberi dukungan, belum tentu kementerian sosial yang selama ini merasa diri sebagai "pemimpin sektor disabilitas" akan menyerahkan atau bahkan mempercayakan kementerian lainnya untuk mengurusi urusan disabilitas. Pun demikian dengan kementerian/lembaga lain selain kemensos belum tentu merasa siap untuk memikul tanggung jawab yang selama ini diemban [secara berlebihan] oleh kemensos. Jadi, dukungan Bappenas—walaupun kita bersyukur akan dukungan tersebut—belumlah cukup kuat untuk membuat gerakan disabilitas ini merasa puas dan Kita Harus Tetap Mendorong agar 7 PP ini disiapkan dan disahkan.

Untuk itu, sebagaimana gerakan disabilitas menolak PP Sapujagat ini telah bergulir, maka kami penggerak gerakan

disabilitas di Sulawesi turut serta dalam aksi tersebut dan berjanji akan mengawal proses ini hingga pemerintah memenuhi amanat UU Penyandang Disabilitas demi penghormatan kepada Difabel seadil-adilnya. Mari Jaga dan Lanjutkan Perjuangan Penegakan Hak-Hak Difabel!!!

Pantai Losari Makassar, 13 Agustus 2017

KAMI YANG MENOLAK "RPP SAPU JAGAT PENYANDANG DISABILITAS"

1. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK SulSel) 08124106722
2. Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Selatan (+62 813-4398-3772)
3. Gerakan Mandiri Difabel Mamuju (Gema Difabel Mamuju) Sulawesi Barat (082 344 717 055)
4. Ikatan Alumni Ilmu Politik Unhas (+62 811-460-600)
5. Ikatan Alumni PSBD Wirajaya (+81354886540)
6. Active Society Institute, AcSI (+62 852-5516-4723)
7. DPD PPDI SulSel
8. DPD HWDI Sulawesi Selatan (+62 853-4188-3630)
9. DPD Pertuni Sulawesi Selatan (+62 852-5543-2646)
10. DPC Pertuni Kota Makassar (+62 853-9658-4550)
11. PerDIK Bulukumba (+62 852-9986-8893)
12. PerDIK Enrekang (+85398815678)
13. DPD Pertuni Sulawesi Barat (+62 851-4510-1606)
14. Aksara Bantaeng (+62 811-4611-799)
15. Yasmib Sulsel
16. Aliansi Pemuda Peduli Kemanusiaan Sulawesi Barat, APPK SULBAR (+6285-241-714-198)
17. Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) Kupang – Nusa Tenggara Timur.

ADVOKASI
[11]

KETIKA KEMENKUMHAM MEMBATASI HAM DIFABEL

August 7, 2017

Nur Syarif Ramadhan

SELAIN TENTU SAJA HUT KEMERDEKAAN RI, hal yang paling banyak dinanti-nanti oleh sebagian besar pemuda-pemudi di Indonesia di Agustus ini adalah dibukanya pendaftaran CPNS oleh pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham). Tak tanggung-tanggung, pemerintah membuka formasi sebanyak 19.210 yang terbagi menjadi 1.864 PNS untuk Mahkamah Agung, 17.962 kursi CPNS untuk kementerian hukum dan HAM, plus jatah Papua sebanyak 301 CPNS. Hal yang membuat kantor polisi belakangan disesaki oleh antrian pemuda-pemudi yang sebelum bertarung di meja ujian, harus berkompetisi terlebih dahulu mengurus SKCK.

Nah, dari belasan ribu formasi CPNS yang disediakan oleh pemerintah, hanya ada 1 formasi khusus bagi difabel. Ini tentu saja menyalahi ketentuan yang ada. Dalam Undang-Undang

Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 53 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Mengacu dari pasal tersebut, seharusnya ada 384 formasi khusus yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas. Tapi, pada kenyataannya mereka hanya menyediakan 1 formasi. Formasi itupun dikHususkan lagi hanya bagi difabel kinetik (daksa). Jadi untuk difabel lain (tuli, netra dan sebagainya), sama sekali tidak mendapatkan kesempatan. Protes pun berdatangan dari berbagai LSM, organisasi maupun komunitas yang fokus berjuang di ranah difabel. Sayangnya, tak ada respon yang ditampilkan pemerintah menyikapi masalah ini. Hingga kini, proses pendaftaran CPNS itu tengah berlangsung, dan tak ada tanda-tanda jika formasi khusus bagi difabel akan bertambah. Ya, itulah kado kemerdekaan HUT RI yang pemerintah berika ke difabel tahun ini.

Difabel Menyikapi Perlakuan Tak Adil

Nah, lantas harus bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Tentu saja tidak boleh didiamkan. Saya sendiri berpikir, bagi teman-teman difabel yang merasa memenuhi kualifikasi yang menjadi prasyarat untuk mendaftar dan juga memiliki ketertarikan dalam bidang pekerjaan yang mereka sediakan, mari mendaftar. Itulah bentuk perlawanan selanjutnya yang harus dilakukan. Kalaupun kemudian kita dihalang-halangi, ataupun dalam proses pendaftaran teman-teman difabel mendapat perlakuan yang diskriminatif, barulah kita melakukan advokasi.

Toh dulu banyak teman-teman difabel yang mencoba peruntungan saat pemerintah membuka perekrutan CPNS yang

sama sekali tidak menyediakan formasi khusus bagi difabel. Anton misal, tunanetra total yang menjadi PNS dalam perekrutan CPNS tanpa jalur khusus bisa membuktikan bahwa meskipun ia buta, ia berhasil melulusi semua tahapan yang disyaratkan pemerintah. Dan saya rasa banyak sosok difabel seperti Anton yang melakukan itu. Saat ini Anton bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah dasar regular (non-SLB) di kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, saya pikir, kita, para difabel, maupun LSM, Organisasi maupun Komunitas yang selama ini fokus berjuang dalam ranah kesetaraan bagi difabel, perlu melakukan introspeksi diri, atau mungkin perlu merenungkan beberapa hal.

Tahun 2014, pemerintah melalui kementerian sosial pernah membuka penerimaan CPNS formasi khusus disabilitas sebanyak 300 formasi. Pada kenyataannya, difabel yang

mendaftar dan memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, jumlahnya bahkan tak menyentuh angka 150 ataupun setengah dari kuota yang disediakan. Lebih miris lagi ketika melihat hasil tes tertulis, hanya ada 31 difabel ataupun kurang lebih 10 % (sepuluh persen) yang dinyatakan lulus dan kemudian diangkat menjadi PNS.

Dari 31 difabel yang diangkat menjadi PNS tersebut, 19 difabel bekerja pada lingkungan kementerian sosial, dan 11 lainnya disebar ke kementerian lain sebagaimana bidang kemampuannya masing-masing. Saya khawatir, jangan sampai kita terlalu asyik berkoar-koar meneriaki pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi difabel, tetapi kita lupa jika kualitas teman-teman kita juga masih jauh di bawah standar yang seharusnya.

Alangkah jauh lebih baik jika kita juga fokus membenahi mentalitas difabel tertentu seperti ini. Para difabel yang katanya besar keinginannya untuk mengakses lapangan pekerjaan, tapi tak berani membuka diri semisal bergaul dengan masyarakat pada umumnya, ataupun mengakses pendidikan di sekolah regular (non-SLB). Untuk itu, mari keluar dari kungkungan mentalitas inferior itu dan bersama-sama turut memperjuangkan hak-hak difabel. Bagaimanapun, jalan keluar terbaik mengatasi ketimpangan peran difabel di ranah public adalah dengan keluar dari kungkungan pikiran sempit semacam itu. Mari kita terima identitas kedifabilitasan (disabilitas) tersebut dan berbuat yang terbaik untuk Republik yang semakin menua ini[].

[12]

KONTROVERSI KEPUTUSAN KPU TERKAIT "MAMPU" JASMANI DAN ROHANI

January 17, 2018

Rilis PerDIK 17 Januari 2018.
KPU Angkat Bicara. # Statemennya Dianggap Melukai Difabel, ini Penjelasan KPU # Ini Klarifikasi Misna Atas Protes Penyandang Disabilitas # Soal Disabilitas Medik, Misna Menyadari Ada Kesalahan

Makassar – Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna Attas mengklarifikasi statemennya yang dianggap mendiskreditkan penyandang disabilitas atau difabel dengan statementnya menyebut "disabilitas medik" di sejumlah media.

Pernyataan itu dikeluarkan Misna usai pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 Januari 2018, di Private Care Centre (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Kalau ada kandidat yang mengalami disabilitas medik dan menurut kesimpulan tim pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi persyaratan maka itu bisa dilakukan pergantian,".

Pada kalimat lain, Misna menguatkan statemennya dengan kalimat: "Berpatokan pada aturan pemilihan, bila ada pasangan calon yang diketahui disabilitas (cacat medis), maka bersangkutan bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat," kata Misna yang dikutip dari sejumlah media online di Makassar.

Pernyataan Misna ini, sontak mendapat respon dari beberapa organisasi perwakilan difabel di Makassar.

Akhirnya pada Senin 15 Januari 2018, pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulsel dan Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) Sulsel mendatangi kantor KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani untuk meminta klarifikasi atas pernyataan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Misna mengatakan apa yang ia sampaikan tersebut berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) dari KPU pusat yang dikeluarkan pada Desember 2017.

"Yang saya katakan itu berdasarkan Juknis KPU nomor 231 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pilgub/Pilbup/Pilwali ," tegas Misna.

Misna melanjutkan, dalam perumusan peraturan tersebut, KPU RI bekerja sama dengan ikatan dokter indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan badan narkotika nasional (BNN) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para bakal calon kepala daerah sebelum dinyatakan resmi sebagai calon.

"Saya juga baru menyadari bahwa ada yang salah dengan aturan ini ketika ada awak media yang menanyakan tentang apa itu disabilitas medik," jelas Misna.

Karena itu dirinya berjanji akan mengkonfirmasi Juknis tersebut ke KPU Pusat tentang aturan tersebut. Misna juga berjanji akan bekerjasama dengan organisasi disabilitas agar aturan tersebut bisa direvisi.

Sementara sekertaris PPDI Sulsel, Hamzah Yamin yang juga hadir di kantor KPU berterimakasih karena Misna telah menyampaikan aturan tersebut.

"Andai ibu Misna tidak menyampaikan ini, mungkin kami tidak tahu kalau ada aturan KPU (juknis) yang mendiskriminasi penyandang disabilitas, " ungkap Hamzah, Rabu, 17 Januari 2018.

Akademisi Universitas Teknologi Sulawesi, Ishak Salim menyatakan selain soal peristilahan 'Disabilitas Medik' tersebut, salah satu yang perlu diperhatikan dalam SK juknis KPU ini adalah soal konsep 'Kemampuan' yang digunakan KPU.

"Makna kalimat 'mampu Jasmani dan Rohani' ini seharusnya dilihat tidak bisa dari sekadar pendekatan medik saja, apalagi jika terkait dengan warga difabel, " kata Ishak.

Ishak, yang juga merupakan kandidat doktor Ilmu Politik UGM mencontohkan, Difabel dengan beragam jenis kemampuannya memiliki alat-alat bantu yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Jika dia difabel netra, maka ia akan membutuhkan 'tongkat putih' untuk berjalan, magnifier untuk membaca teks, aplikasi pembaca layar pada HP atau laptopnya.

Jika difabel kinetik, kata Ishak, maka ia membutuhkan tongkat, atau kursi roda, atau kruk maupun protese. Jika ia Tuli maka ia akan menngunakan alat bantu mendengar dan kemampuan berbahasa isyarat.

“Warga-warga difabel ini bersama dengan alat-alat bantu itu merupakan satu kesatuan dari identitasnya sebagai difabel dan membentuk ‘kadar kemampuannya’. Dengan begitu, jika kita menyadari bahwa alat bantu tersebut menjadi bagian dari diri difabel, maka pemungsian kemampuan atau kapabilitas tadi harus berkesesuaian dengan kondisi di mana ia akan bekerja. kesesuaian titian, tangga maupun toilet dan ruang-ruang kerja dengan kemampuan seseorang yang bergerak menggunakan kursi roda.” ungkap Ishak yang juga Ketua Pegerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) ini.

Demikian juga ketersediaan perangkat kerja akses bagi difabel netra baik terkait teknologi dijital (komputer) maupun informasi berbasis cetak braille maupun berbasis audio. “Hal ini yang disebut sebagai ketersediaan akomodasi yang layak di tempat-tempat kerja di mana difabel akan bekerja, semisal kantor gubernur, kantor bupati maupun kantor walikota. ” lanjut Ishak.

Terkait dengan tim pemeriksa. yakni dokter-dokter ahli dari IDI, masih menurut Ishak, jika dokter-dokter ini tidak memiliki sensitivitas atau kepekaan perspektif disabilitas maka ia tidak akan paham seberapa besar kadar kemampuan difabel itu.

“Kalau mereka menilai seseorang hanya pada aspek kondisi tubuh, intelektual, atau mental seseorang tanpa mengaitkannya dengan aspek desain sosial yang akan mendukung potensi kemampuan seseorang maka penilaiannya terhadap kemampuan jasmani seorang difabel akan tidak memadai.”

Sementara itu, dilansir dari blog pergerakan difabel indonesia untuk kesetaraan (PerDIK), juknis nomor 231 tahun 2017 yang mengatur sejumlah hal terkait aspek medik ada sejumlah kategori yang dianggap sebagai tidak sehat, seperti

Gangguan Penglihatan (Buta), Gangguan Pendengaran (Tuli) maupun gangguan motorik (polio berkursi roda [?]) dan gangguan jenis lainnya seperti terkait mental dan intelektual.

Dalam blog itu disebutkan bila aturan ini jelas berpotensi menghilangkan Hak Politik Difabel. Aturan ini berisi Panduan bagi institusi-institusi seperti IDI, HIMPSI, BNN yang akan menentukan seseorang apakah memenuhi kriteria Sehat Jasmani dan Rohani serta bebas Narkoba?. Ada kesimpulan dalam aturan ini, yakni, jika Tim Medis melihat ada salah satu unsur "disabilitas medik" dalam aturan ini (seperti buta, tuli, disabilitas intelektual, dan kategori lainnya) maka tim akan memutuskan: Jika bakal calon ditemukan salah satu disabilitas medik tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini ditemukan disabilitas-medik yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

[13]

KPU + (IDI + HIMPSI + BNN) = DIFABEL TANPA HAK POLITIK

January 15, 2018

Berhati-hatilah,
KPU mengeluarkan Keputusan yang bisa mengancam Hilangnya HAK POLITIK DIFABEL dalam PEMILU Jaman Now di Republik ini. Benarkah?

Ya, Keputusan KPU RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pilgub/Pilbup/Pilwali memberi kewenangan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia (HIMPSI) dan Badan Narkotika Nasional untuk memeriksa dan memutuskan setiap Bakal calon Gubernur/Bupati?Walikota berikut para wakilnya sebagai 'Sehat Jasmani maupun Rohaninya serta bebas dari Narkotika'.

Isu ini pertamakali mengemuka di Makassar. Dalam group WA 'Jurnalis Support Difabel', Ishak Salim sebagai ketua badan pengurus PerDIK mempertanyakan dua berita terkait pernyataan seorang komisioner KPU Sulsel, yakni Misna Attas.

Begini petikannya:
"Temans, ini ada dua link berita:
https://kabar.news/kpu-kandidat-bisa-diganti-jika-alami-disabilitas-medik

https://www.sulselsatu.com/2018/01/13/politik/kpu-bisa-anulir-pencalonan-kandidat-yang-cacat-medis.html

Adakah yang bisa menceritakan bagaimana konteks pernyataan komisioner KPU Sulsel ini menyatakan kalimat:

"Kalau ada kandidat yang mengalami disabilitas medik dan menurut kesimpulan tim pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi persyaratan maka itu bisa dilakukan pergantian," ujar Misna Attas, Komisioner Devisi Teknis KPU Provinsi Sulsel di Private Care Centre RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sabtu (13/1/2018).
atau dalam penggal kalimat yang lain:

"Berpatokan pada aturan pemilihan, bila ada pasangan calon yang diketahui disabilitas (cacat medis), maka bersangkutan bisa

dikategorikan tidak memenuhi syarat," kata Komisioner KPU Sulsel, Misna M Attas, Sabtu (13/1/2018).

Pernyataan Komisioner KPU Sulsel di atas menarik untuk direspon oleh PerDIK atau organisasi disabilitas lainnya di SulSel. Tetapi terlebih dahulu tentu dibutuhkan mengenai konteks kalimat itu diucapkan.

Pertama, Pernyataan itu bisa disamakan dengan "Komisioner menolak warga dengan disabilitas (difabel) menjadi calon kepala daerah" dan itu artinya KPU melanggar Hak Politik Difabel untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana diatur dalam UU. No 19 tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua, Komisioner memaknai disabilitas sebagai 'orang sakit' dan tidak cakap. Hal ini merupakan 'prasangka' terhadap difabel/penyandang disabilitas yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang pejabat publik (komisioner).

Ketiga, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjamin hak-hak difabel (Pasal 5: Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu). Artinya UU Pemilu ini menjamin hak penyandang disabilitas ketika memenuhi syarat, artinya bukan karena ia menyandang disabilitas lantas dianggap tidak memenuhi syarat dan dapat diganti, sebagaimana diucapkan ibu Misna."

Berawal dari pertanyaan dan pernyataan di atas, PerDIK melalui divisi media menyusun Press Release dan kemudian banyak dikutip oleh media massa. Beberapa bisa di cek di link berikut ini:

https://www.kabarmakassar.com/sotta-komisioner-kpu-ini-diprotes-komunitas-difabel/

https://radaronline.id/2018/01/15/kpu-sulsel-pakai-istilah-disabilitas-medic-komunitas-difabel-protes/

http://www.inikata.com/kpu-sulsel-pakai-istilah-disabilitas-medic-komunitas-difabel-protes/

Bagi Difabel, Keputusan KPU di atas, yang mengatur sejumlah hal terkait aspek medik ada sejumlah kategori yang dianggap sebagai tidak sehat, seperti Gangguan Penglihatan (Buta), Gangguan Pendengaran (Tuli) maupun gangguan motorik (polio berkursi roda [?]) dan gangguan jenis lainnya seperti terkait mental dan intelektual.

Aturan ini jelas berpotensi menghilangkan Hak Politik Difabel. Aturan berisi Panduan bagi institusi-institusi di atas (IDI, HIMPSI, BNN) yang akan menentukan seseorang apakah memenuhi kriteria Sehat Jasmani dan Rohani serta bebas Narkoba.

Ada kesimpulan dalam aturan ini, yakni, jika Tim Medis melihat ada salah satu unsur "disabilitas medik" dalam aturan ini (seperti buta, tuli, disabilitas intelektual, dan kategori lainnya) maka tim akan memutuskan:

"Jika bakal calon ditemukan salah satu disabilitas medik tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini ditemukan disabilitas-medik yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota".

Jadi kalau Jonna Aman Damanik atau Joni Yulianto, Tolhas Damanik atau Rahman Gusdur–para aktivis buta–sebagai bakal calon gubernur, bupati atau walikota, lalu diperiksa dan dia ternyata ketiganya buta (low vision yang masuk dalam kategori disabilitas medik versi WHO–sebagaimana diatur dalam keputusan ini), maka mereka jelas akan dianggap berdasarkan

peraturan ini “dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pun demikian dapat menimpa Dwi Ariyani, Risnawati Utami, Juniati Effendi, M Ismail, Mia Un, Surya Sahetapy, Bahrul Fuad, Faisal Rusdi, Cucu Saidah, Nuning Suryatiningsih, dan kawan-kawan aktivis difabel yang lain.

Kalian setuju kalau kita nyatakan bahwa KPU adalah Pelanggar Hak Politik DIfabel?

ADVOKASI

[14]

GAGASAN MENUJU WISATA SULAWESI SELATAN AKSES BAGI SEMUA!

January 17, 2017

Press Release PERDIK SULSEL

Bagi kebanyakan orang yang mengetahui indahnya alam Tana Toraja dan kekayaan budaya yang dimilikinya, dapat mengunjunginya dengan mudah adalah impian yang menyenangkan. Bagi kita yang tinggal di kota Makassar, walaupun jaraknya lebih 200 km, tetaplah jauh lebih mudah

dibandingkan dengan orang dari luar pulau Sulawesi. Berwisata menikmati keindahan alam dan keragaman budaya manusia merupakan suatu hal yang perlu dilakukan setiap orang. Apalagi orang-orang yang kota dengan kesibukan sehari-hari yang melelahkan. Berwisata sejenak selama dua tiga hari di saat *weekend*adalah jalan keluar menyiapkan semangat prima di esok harinya.

Pendeknya, Berwisata adalah peristiwa yang menyenangkan setiap orang.

Tetapi, apakah di setiap tempat wisata memang dapat menyenangkan semua pengunjungnya? Tentu saja jawabannya bergantung kepada pengunjung itu sendiri. Lalu siapakah pengunjung yang saat ini paling kesulitan untuk menikmati berbagai arena dan kegiatan wisata? Kita bisa menguraikan beberapa tipe pengunjung. Tetapi dua di antara pengunjung yang dapat menemui kesulitan dalam menikmati wisata adalah para lansia dan difabel.

Mengapa difabel akan menghadapi kesulitan dalam berwisata dan bagaimana mengatasi kesulitan itu?

Dua pertanyaan inilah yang menjadi bahan diskusi di kantor Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetraan, Perdik Sulsel pada 10 Januari 2017 yang lalu. Perwakilan dari **Accessible Indonesia** datang berkunjung khusus mendiskusikan mengenai peluang membangun wisata akses bagi semua di Sulawesi Selatan (lihat di **http://accessibleindonesia.org**).

Direktur Perdik SulSel, Abd Rahman menerima kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa gagasan memperbaiki

aksesibilitas wisata bagi difabel adalah hal yang sangat diperlukan.

"Kalau Tana Toraja dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan akses bagi difabel, baik itu dari aspek transportasi, hotel dan penginapan, dan ketersediaan informasi yang akses bagi difabel, maka berwisata bukan lagi menjadi konsumsi orang-orang yang secara fisik maupun mental tidak terkendala," ujar Rahman. Ia mencontohkan beberapa rekan difabel yang memakai kursi roda, kruk, atau buta maupun tuli yang kesulitan menikmati daerah-daerah wisata.

"Bukan pada kondisi fisik kami yang membuat kami tidak dapat menikmati wisata sebagaimana pengunjung pada umumnya, tetapi desain area wisata dan kebijakan turismelah yang membuat kami tidak dapat menikmati berwisata," katanya mengkritisi desain wisata yang tidak akses yang ada saat ini.

"Makanya kami sangat merespon baik rencana *Accessible Indonesia* untuk memulai memikirkan dan mencoba agar area-area wisata di Sulawesi Selatan bisa akses dan memudahkan siapapun," lanjut Rahman merespon gagasan tim dari Accessible Indonesia dan Vifa Holiday.

Dari diskusi 'aksesibilitas wisata untuk semua' yang dihadiri oleh sejumlah pengurus PERDIK dan pihak Accessible Indonesia ini kemudian menyepakati beberapa hal untuk ditindaklanjuti. *Pertama*, pihak Accessible Indonesia, dalam hal ini Ibu Kerstin akan menyiapkan TOR yang akan diajukan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang wisata untuk mendanai upaya wisata difabel sekaligus membuat penilaian seberapa akses area wisata itu bagi difabel. *Kedua*, dari hasil kunjungan itu, setiap difabel akan menyampaikan opininya berupa masukan atau saran perbaikan. Pada poin kedua ini,

PERDIK Sulsel bersedia melanjutkan upaya advokasi kebijakan baik kepada pemerintah kota/kabupaten setempat maupun kepada setiap pengelola wisata baik perusahaan perhotelan, transportasi dan lain-lain.

"Tanpa advokasi maka proses menuju turisme yang akses bagi semua akan lama dan tidak terjamin ada perubahan," ujar Ishak Salim pengurus Board PERDIK SulSel. "Jadi, bagi PERDIK, riset dan advokasi adalah dua sisi dari mata uang. Hasil riset akan jadi bahan advokasi untuk mengubah kebijakan," demikian ujar Ishak yang saat ini sedang menyelesaikan riset doktoralnya yang berjudul 'Politik Pencacatan di Indonesia'.

Sore itu, Kerstin memaparkan sejumlah rencana berwisata ini. Selain menyiapkan tim, wilayah lokasi wisata yang akan dikunjungi selama sekian hari juga didiskusikan. Rencananya, aksi berwisata ini akan dilakukan pada akhir Februari 2017.

Hari pertama, para turis difabel dan sejumlah pendamping akan berangkat tepat pukul 8 pagi menuju area wisata Leang-Leang Maros. Lalu, selama satu sampai dua jam menikmati Taman Batu purba di sana. Dari Leang-leang kami akan bergerak menuju kota Sengkang melalui jalur Camba yang memiliki panorama indah. Di Sengkang, kami akan mengunjungi usaha kain sutra dan ke danau Tempe. Kami akan bermalam di Sengkang dan melajutkan perjalanan esok harinya.

Hari Kedua, pagi pukul 8 kami sudah menuju Tana Toraja dan singgah di Rumah makan Bukit Indah di kota Pare-pare dan lanjut ke Gunung Nona melihat pemandangan gunung yang unik. Tiba di Rantepao kami akan langsung beristirahat dan makan malam di penginapan.

Hari Ketiga, kami akan menuju area wisata Suaya, Kambira dan menikmati desa wisata di sana, lalu ke Lemo dan Londa.

Hari keempat, kami akan ke Batutumonga lalu ke Lokomata. Siang atau sore kami lanjutkan ke Kete Kesu.

Hari kelima, kami sudah kembali ke Makassar dan setelah itu sambil setiap peserta membuat penilaian aksesibilitasnya kami mengagendakan briefing untuk berbagi pengalaman sebagai bahan menyiapkan konsep Turisme AKses Bagi Semua di Sulawesi Selatan[].

ADVOKASI

[15]

MAKASSAR BARRIER FREE TOURISM, BISA?

January 29, 2017

DI JAKARTA, TEMAN-TEMAN seperti Mbak Cucu dan suaminya, Kang Faisal Rusdi (keduanya kini sedang studi di Australia) menjalankan sebuah program bernama Jakarta Barrier Free Tourism (JBFT). Acaranya sederhana. Setiap hari libur, hari Minggu, bersama belasan sampai puluhan partisipan pergi bertamasya di beberapa tempat wisata di Jakarta. Selain untuk membiasakan orang-orang Jakarta melihat dan berinteraksi dengan difabel, rombongan JBFT ini juga menilai seberapa akses tempat-tempat publik itu bagi difabel.

Dari video beberapa kegiatan yang disiarkan teman JBFT di Youtube, tampak kegiatan itu dilakukan dengan riang gembira. Ya, seharusnya piknik memang identik keceriaan dan kegemberiaan. Walaupun keceriaan itu kadang sirna karena beberapa hambatan yang ditemui difabel akibat desain fisik area yang tidak sesuai dengan mereka. Misalnya jika jalan tidak akses, maka mereka menjadi harus bergantung kepada bantuan seseorang. Tetapi dalam konteks ini, gagalnya sebuah desain tempat publik memenuhi hak pengguna jalan maupun gedung merupakan sebentuk 'kritik langsung' yang mengena telak ke dada para pemberi layanan publik, plus para desainer yang kurang kreatif dan kurang luas pengetahuannya soal manusia.

Aktivitas JBFT yang positif itu patut ditiru. Kami di PERDIK berpikir untuk melakukan hal yang secara substansial sama namun dengan cara berbeda. Misalnya, kampanye

mainstreaming isu disabilitas di Pantai Losari. Mengapa Pantai Losari?

Setiap Minggu pagi di Pantai Losari berlaku ketentuan 'Car Free Day' atau jalan raya tanpa mesin dan deru kendaraan. Orang-orang baik sendiri, berkelompok maupun yang berkeluarga datang menikmati hari pagi dengan berjalan kaki. Ada banyak hal yang bisa menghibur diri kita sebagai orang kota. Keramaian adalah salah satunya.

Saat ini trotoar di sepanjang pantai Losari bisa dibilang bagus dan akses bagi difabel netra. Guiding blocknya tersedia. Eh, tapi tak semua orang rupanya tahu apa itu guiding blocl di trotoar. Kebanyakan mungkin hanya mengira ubin kuning bergaris itu hanya hiasan lantai belaka. Tidak sosodara, itu adalah panduan rabaan tongkat atau tapak kaki difabel netra.

Ketidaktahuan sejumlah orang akan fungsi-fungsi aksesibilitas itu sebenarnya bisa dipahami. Salah satunya adalah kurangnya difabel netra yang menggunakannya dan memperlihatkan kepada orang-orang, baik sebagai pemilik toko, tukang parker atau pedagang jalanan yang biasanya dengan sewenang-wenang menutup guiding block itu.

Nah, untuk kepentingan berkampanye isu disabilitas itu, mengapa tidak kami manfaatkan saja momen Car Free Day itu untuk memberikan pelajaran penting ke warga kota?

PERDIK bisa mengorganisir untuk melakukan kampanye itu. Dan kami percaya ada begitu banyak kelompok atau komunitas warga di kota ini yang bisa diajak bekerja bersama. Bukankah partisipan JBFT juga sesungguhnya berasal dari beragam organisasi dan bukan hanya diikuti oleh difabel saja. Lagi pula, sebagaimana PERDIK pernah utarakan dalam

postingan lain, ada lembaga bernama Accesseible Indonesia yang konsern kepada isu 'Tourism for All' dan lembaga ini bisa saja membantu atau bermitra untuk berkampanye.

Sebutlah misalnya pada minggu pertama, kita hanya mengusung isu soal Difabel Netra. Pertama kita bisa buat lokasi nongkrong di sana dan membawa sejumlah alat-alat pendidikan, alat-alat bantu difabel netra, serta beberapa contoh alat bantu kesehatan dan memperlihatkan ke pejalan kaki tentang semua hal terkait isu difabel netra ini. Lalu, bisa pula beberapa difabel netra mempraktikkan atau mencoba trotoar akses tadi serta menilai apakah sudah memenuhi standar aksesibilitas atau tidak. Jika benar-benar ada pengguna yang sewenang-wenang merampas sejumlah ubin kotak kuning sebagai guiding block itu menjadi area berjualan, papan reklame atau lainnya maka kita bisa langsung memberinya teguran bahwa tidak semestinya mereka menutup jalan bagi difabel itu.

Jika kegiatan masih berlanjut, maka kunjungan minggu kedua isu kampanye bisa diubah dengan peserta berbeda. Misalnya, temanya adalah Budaya Tuli. Baik sekali memperlihatkan bahwa Tuli bisa berkomunikasi satu sama lain. Persoalannya hanya pada kita yang tidak paham berbahasa isyarat itu.

Pendeknya ada banya cara dan kegiatan kreatif bisa dilakukan. Sisa bentuk tim, buat rencana, cari dan kumpul simpatisan atau relawan, lalu pergi piknik sambil berkampanye!

Tertarik ikut? AYO Gabung!!!

Makassar, 30 Januari 2017

ADVOKASI

[16]

DR. ANDI TENRI SOMPA, CALON KOMISIONER KPU – RI BERJANJI MEMBANGUN SISTEM PEMILU AKSES!

January 18, 2017

Press Release PERDIK SULSEL, Makassar, 18 Januari 2017

Perhelatan pemilihan komisioner KPU dan BAWASLU RI masih berlangsung. Pada akhir Desember 2016 lalu, Tim Seleksi Calon telah mengumumkan hasil seleksi tahap kedua. Dari laporan tersebut, terdapat 58 dari 517 orang yang lolos tes tahap kedua. Dari jumlah tersebut sebanyak 36 orang calon anggota komisioner KPU dan 22 calon anggota Bawaslu.

Salah satu calon tersebut adalah Dr. Andi Tenri Sompa asal Kota Makassar yang berprofesi sebagai dosen Ilmu Politik di Fisip Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Menurut Direktur PERDIK SulSel, Abd Rahman, komitmen Ibu Andi Tenri Sompa untuk membuat praktik pemilu lebih akses dan inklusi patut

diapresiasi. Dalam diskusi beberapa waktu lalu bersama Pengurus Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK Sulsel) di Makassar di akhir tahun 2016, ibu kelahiran Makassar 21 Mei 1976 ini meminta masukan terkait bagaimana membangun kekuatan politik difabel, bukan hanya pada saat pemilu berlangsung namun juga ruang-ruang partisipasi politik lainnya.

Dalam diskusi itu, PERDIK menyerahkan dua buku terkait pemilih difabel. Kedua buku itu masing-masing berjudul "Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel" dan "Difabel Merebut Bilik Suara". Kedua buku ini merupakan pengalaman mendorong Pemilu dan Pilpres lebih akses bagi difabel oleh sejumlah elemen gerakan difabel di lima provinsi yang diorganisir oleh SIGAB Yogyakarta. Menurut Andi Tenri Sompa, buku ini menjadi penting mengingat ada dua hal mendasar jika mengaitkan antara pemilu dan pemilih difabel, yakni soal perspektif difabel terkait pemilu dan sejumlah langkah-langkah praktis menuju implementasi Pemilu yang inklusif yang mepertimbangkan karakteristik pemilih difabel.

"Kedua buku ini sangat berguna bagi praktisi Pemilu seperti anggota KPU atau Bawaslu. Itulah mengapa, salah satu yang ingin saya perjuangkan dalam Pemilu mendatang jika saya terpilih sebagai anggota KPU RI adalah mempraktikkan prinsip-prinsip Pemilu Akses, khususnya bagi pemilih difabel. Kemudian memastikan bahwa keseluruhan proses Pemilu atau Pemilihan Presiden, pemilih difabel memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh. Mulai dari dasar sampai tingkat advance," ujar Andi Tenri Sompa.

Abd Rahman, sebagai direktur PERDIK meyakinkan ibu Andi Tenri Sompa bahwa dirinya maupun organisasi PERDIK mendukungnya dan menaruh kepercayaan kepadanya untuk

menjadi Komisioner KPU-RI. Ke depan, jika terpilih, Andi Tenri Sompa bersama-sama kami dari elemen penggerak 'Gerakan Difabel' baik di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi akan berjuang menegakkan Pemilu Akses bagi semua!

"Saya dan Perdik mendukung Ibu Andi Tenri Sompa sebagai komisioner KPU RI dan kami telah mengirimkan surat dukungan itu ke tim Seleksi Calon Anggota KPU," tandas Rahman memastikan dukungannya[].

*silakan Kirim dukungan Anda ke tim seleksi balon komisioner KPU/Bawaslu RI via settimsel.2016@gmail.com

[17]

WAJAH BARU KOMISIONER KPID SULSEL DAN HARAPAN AKSESIBILITAS INFORMASI BAGI DIFABEL

January 7, 2017

–Press Release PERDIK–

KEMARIN DPRD SULSEL MENGUMUMKAN 7 anggota komisioner terpilih. Mereka adalah Herwanita, Riswansyah Muchsin, Muhammad Hasrul Hasan, Waspada Santing, Andi Muhammad Irwan, Arie Andyka, dan Mattewakkan. Apakah ketujuh komisioner ini kelak dapat mengubah sistem penyiaran di Sulewesi Selatan yang lebih bermanfaat bagi warga Sulsel, khususnya difabel? berikut pemaparan Direktur PERDIK Sulsel Abd Rahman.

"Pertama-tama, saya secara pribadi dan kelembagaan PERDIK mengucapkan selamat kepada komisioner KPID Sulsel. Saya berharap semoga wajah penyiaran dari berbagai lembaga penyiaran baik milik pemerintah maupun swasta melalui KPID dapat mengubah beberapa praktiknya yang selama ini merugikan difabel," ujarnya.

Abd. Rahman mencontohkan masih banyaknya siaran, khususnya televisi yang menggambarkan kehidupan difabel secara negatif. Tidak jarang, difabel di televisi baik sinetron maupun *reality show* menempatkan difabel sebagai objek rasa kasihan, objek tertawaan, dan dianggap insan sakit.

"Terus terang, siaran-siaran semacam itu hanya memperpanjang stigma negatif di tengah masyarakat. Padahal kami berharap, lembaga-lembaga penyiaran ini justru memberikan gambaran yang lebih positif terhadap difabel dan membangun kesadaran kritis di masyarakat bahwa difabel adalah insan yang bermartabat," harap Rahman kepada KPID Sulsel dan lembaga penyiaran.

Di tempat terpisah, Arifin mantan ketua PERTUNI Sulsel menyampaikan harapan kepada komisioner KPID Sulsel.

"Saat ini, negara kita sudah memiliki UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU itu, salah satu hak difabel adalah Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Untuk memenuhi hak tersebut, komisi penyiaran punya peran besar untuk membantu mewujudkannya. Misalnya, KPID dapat mendorong lembaga penyiaran agar mempertimbangkan aspek aksesibilitas bagi difabel dalam menyerap informasi yang dibutuhkan," ujarnya di sela-sela kesibukannya yang saat ini sedang mempersiapkan diri melanjutkan studi master di Flinders University.

"Sebagai contoh, buat kawan-kawan Tuli, sudah saatnya mereka memperoleh kemudahan dalam menikmati siaran-siaran yang bermanfaat dan memiliki rating yang tinggi. Jadi, KPID seharusnya memastikan agar setiap lembaga penyiaran menyiapkan penterjemah bahasa isyarat baik pada siaran berita maupun diskusi-diskusi publik," tambahnya.

Selain soal aksesibilitas dalam siaran, baik Abd Rahman maupun Arifin mengusulkan agar pemilik media ini mempertimbangkan mempekerjakan difabel dalam perusahaannya. Minimal 1 persen ada difabel yang bekerja, baik sebagai jurnalis atau pun tenaga manajerial dan teknis lainnya. Jika difabel menjadi pekerja, maka

perspektif disabilitas bisa dengan mudah menghiasi informasi-informasi yang disajikan dalam siaran.

“Harapan lainnya adalah para komisioner terpilih mulai meredesain gedung komisioner agar lebih aksesibel bagi difabel di saat ada difabel berkunjung untuk audiensi atau diskusi. Dalam ketentuan aturan soal aksesibilitas, setiap tahun gedung-gedung publik yang tidak akses harus diredesain 10persen. Harapannya, dalam 10 tahun gedung KPID bisa 100% akses bagi difabel. Bukan hanya itu, KPID Sulsel juga bisa mengawali adanya Unit Layanan Disabilitas dalam struktur KPID agar selalu tersedia gagasan, pemikiran ataupun saran-saran terkait isu disabilitas dalam penyiaran[].

H. Darma Pakilaran

PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA UNTUK KESETARAAN

BAGIAN 3

TOKOH

[1]

HIKAYAT SEORANG PEMBACA AL-QUR'AN BRAILLE PERTAMA DI INDONESIA

July 18, 2017

Nur Syarif Ramadhan

DARMA PAKILARAN, SEPERTINYA, tak banyak generasi 'milenial' difabel Netra di Makassar yang familiar dengan nama itu. Apalagi bagi mereka yang baru menjadi warga binaan YAPTI (Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia) medio 2007 – sekarang. Ah, kita memang tak pernah diajar merawat kenangan, terlebih buat orang-orang yang amat penting untuk dikenang. Mungkin begitulah memang bangsa

kita, tak terlalu pandai 'menghargai', orang-orang sepuh yang di masa mudanya gigih dan gagah berjuang, menginisiasi sesuatu yang teramat berharga bagi kemaslahatan orang banyak.

Itu pulalah yang diperoleh oleh Haji Darma Pakilaran, seorang lelaki sederhana yang di masa mudanya diberi hidayah dari Allah SWT, dan turut pula menginisiasi berdirinya dua lembaga pendidikan yang saat ini cukup popular bagi difabel di Indonesia. YAPTI misalnya, yayasan yang disebut-sebut sebagai lembaga pendidikan terbaik di Indonesia Timur bagi difabel netra, merupakan buah karyanya. Ia pun terlibat dalam pendirian sebuah lembaga pendidikan bagi difabel netra di Jogjakarta: Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (YAKETUNIS).

Lelaki Toraja yang memeluk Islam saat masih duduk di bangku SMP itu pulalah yang berhasil untuk pertama kalinya membaca al-qur'an braille pertama yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1950-an. Bersama seorang kawan sesama mahasiswa saat berkuliah di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Fuadi Aziz, mereka membantu seorang difabel netra asal jogja yakni Supardi Abdu Shomad, dalam mempelajari huruf dalam al-qur'an braille arab yang kala itu telah berbilang tahun hadir di Indonesia, namun belum ada satu orang pun yang mampu menguasainya.

Beberapa waktu yang lalu, terdorong rasa ingin tahu perihal perjuangan Pak Darma Pakilaran di masa mudanya, saya bersama Ishak Salim (Ketua PerDIK), dan Hamzah Yamin (seorang aktivis difabel netra), bersilahturahmi ke rumah beliau yang terletak di kompleks Bukit Baruga Antang. Hal lain yang mendorong kami ingin menemui beliau adalah, kami ingin berusaha mendokumentasikan perjalanan hidupnya di masa mudanya, terutama peristiwa-peristiwa penting yang memotivasi

beliau saat mendirikan beberapa lembaga pendidikan yang sunggu sangat terasa hasilnya saat ini.

Apalagi, sangat minim teks-teks dokumen berupa tulisan yang mengabadikan perjuangan beliau. Saya pernah mencoba mengetikkan nama beliau di mesin pencarian sekaliber *google*, tapi hanya satu blog yang saya temukan menuliskan namanya. Saat mengubah *keyword* pencarian menjadi “sejarah al-qur’an braille di Indonesia”, barulah bermunculan beberapa artikel maupun jurnal yang ada nama Darma Pakilaran di dalamnya. Saat saya membaca lebih lanjut, semua artikel maupun jurnal tersebut hanya menuliskan namanya sebanyak satu kali, di mana ia digambarkan sebagai sosok mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta yang membantu Supardi Abdu Shomad dalam mempelajari al-qur’an braille yang pertama di Indonesia. Ah, bahkan *google*pun tak begitu telatan merawat namanya!

Sayangnya, di usia Pak Darma Pakilaran yang telah melewati angka 75 tahun (2017), ia telah mulai pikun. Telah banyak peristiwa penting yang tak mampu ia ceritakan. Saat bercerita pun, Ia Nampak berusaha keras mengingat-ingat, nama orang-orang penting, nama jalan beberapa lokasi di Jogja, yang turut andil dalam rentetan peristiwa penting di masa mudanya. Hal itu membuat saya harus membaca beberapa tulisan-tulisan penting terkait sejarah al-qur’an braille di Indonesia, sejarah pendirian YAKETUNIS Jogja, serta awal mula berdirinya YAPTI Makassar, guna menunjang tulisan ini. Sayangnya, tak satu artikel pun yang saya temukan yang menerangkan tentang sejarah YAPTI Makassar. Padahal, YAPTI merupakan salah satu tempat belajar tunanetra paling tua di Indonesia timur, yang telah menghasilkan puluhan alumni yang telah bergelar sarjana, yang tersebar di Indonesia.

***

Pagi itu, kami tiba di rumah pak darma sekitar pukul 11:00 siang. Sebuah sepeda listrik berdiri anggun di depan rumahnya, menyambut kami. Ini kali pertama saya berkunjung ke rumah Pak Darma. Sebenarnya, saat saya menjadi warga binaan YAPTI, saya masih sempat mendapati Pak Darma tinggal bersama dengan kami (para tunanetra yang menjadi warga binaan). Awal saya menjadi penghuni YAPTI yakni pada pertengahan 2006. Saat itu Pak Darma sedang menyelesaikan tahun terakhirnya sebagai kepala panti guna YAPTI. Setahun kemudian, posisi beliau digantikan oleh Bapak Subuh B S.Pd yang menjabat sebagai kepala panti guna YAPTI sejak 2007-sekarang. Sejak saat itu juga, Pak Darma sudah tidak tinggal di asrama YAPTI.

Seorang anak-anak yang kutaksir berusia sembilan tahun membukakan pintu.

"Ada Pak Darma?" saya dan Hamzah iseng bertanya. Pertanyaan yang tentu saja kami tahu jawabannya. Sebelum menuju rumah itu, Hamzah telah berulang-kali menelpon Pak Darma, mengonfirmasi. Hingga akhirnya lelaki bersahaja itu muncul dan menyongsong kami di ruang tamu. Di antara kami bertiga, Pak Darma hanya mengenal kak Hamzah. Saya? Meski pernah tinggal bersama kurang lebih setahun, sepertinya Pak Darma tak bisa menemukan saya dalam ingatannya. Maklumlah, awal saya menjadi warga binaan YAPTI, saya masih anak ingusan (begitu kata penghuni lama YAPTI kala itu), yang masih sedang belajar mengurus diri sendiri. Sementara Ishak, ini menjadi pertemuan pertama buat mereka.

Awal Mengenal Tunanetra

Masa muda Darma Pakilaran dihiasi dengan petualangan-petualangan yang seru. Lahir di Toraja, tetapi ia banyak berpindah-pindah guna meraup pengetahuan. Saat

menyelesaikan pendidikannya di bangku SMP (1951), ia diberi hidayah oleh Allah. Disitulah ia pertama mengenal Islam dan lantas memeluk agama Islam. Dari Bantaeng, Darma Pakilaran kembali ke Tana Toraja, melanjutkan sekolah di sana. Hingga pecahlah konflik militer—berbalut agama dan etnis antara pasukan Kapten Andi Sose (pimpinan battalion 720—Islam) dengan pasukan Letnan Frans Karangan (yang memilih keluar dari Batalion 720—Kristen). Perselisihan itu membuat banyak orang Toraja harus mengungsi, mengamankan diri dari konflik (lihat Bigalke, 1981). Saat itulah Darma Pakilaran bertemu dengan pasukan DI/TII (Darul Islam Tentara Islam Indonesia). Pada merekalah Darma menyampaikan keinginannya mengenal Islam. Hingga akhirnya pasukan tersebut mengajak Darma untuk mengikuti jejak mereka ke dalam hutan, bergerilya.

Setahun lebih Darma mengikuti pasukan itu, belajar islam di dalam hutan. Hingga akhirnya terbetik kabar jika konflik Toraja mereda, dengan Letnan Frans Karangan yang berhasil mengusir pasukan Andi Sose. Saat itu Darma kembali ke kampungnya, dengan tujuan ingin mengumpulkan orang-orang yang telah memeluk Islam di Rantepao, yang kemudian ia ingin bawa mereka untuk ke dalam hutan, memperdalam Islam di sana. Tapi tak ada satu orang pun yang berminat dengan tawaran itu. Setelah berpikir matang-matang, Darma memutuskan untuk tidak lagi ke dalam hutan. ia ingin melanjutkan sekolahnya yang sempat terhenti. Sayangnya, sekolah tempat ia belajar dulu sudah tak mau lagi menerimanya—mungkin karena telah menjadi Islam. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di Palopo. Di sana Darma menamatkan pendidikan SMA-nya.

Awal perjumpaannya dengan seorang tunanetra terjadi saat Darma melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta (1961-1967). Saat itu ia ke Jogja dengan tujuan berkuliah di Fakultas Sosial

Politik (sospol) Universitas Gadjah Mada. Tetapi setibanya di Jogja, semangatnya belajar Islam tumbuh kembali kala mengetahui jika ada kampus IAIN Sunan kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga). Ia pun mendaftar juga di sana. Menariknya, ia melulusi kedua kampus tersebut, dan mengikuti masa perpeloncoan di kedua kampus itu.

Saat beraktifitas di Jogja itulah Darma bertemu dengan seorang tunanetra yang menurut ceritanya saat itu mengajar sebagai guru honorer ekstrakurikuler musik di sebuah SMP umum di jogja. Ya. Tunanetra itulah yang kemudian dikenal sebagai Supardi Abdu Shomad, tunanetra yang meminta Darma untuk mempelajari Al Qur'an braille dan mengajarkan kepadanya. Darma dan Supardi dieratkan oleh hobi yang sama: bermain catur.

"Setiap malam, kami suka main catur. Kadang saya menang, dia juga," kenang Haji Darma memulai menceritakan masa di mana ia melihat Al Qur'an Braille pertama kalinya.

"Suatu malam, Supardi membawakan saya al-qur'an Braille," kenangnya. Susah payah ia mengingat detail peristiwa itu. Ia mengangkat kedua kakinya di atas sofa dan duduk bersila seolah ia sedang melantai.

"Adek Darma, tolong pelajari Al-qur'an ini, lalu ajarkan pada saya," lanjut Haji Darma.

"Saat itu, saya memperhatikan isi kitab buku itu dan takjub melihat tulisan timbul di dalamnya," ujar Pak Darma kepada kami bertiga yang dengan tabah mendengar kisahnya.
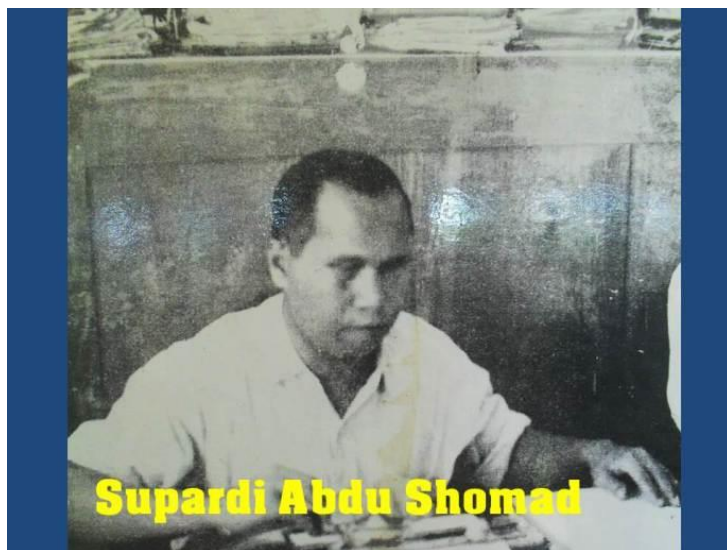
Cerita pertemuan Darma Pakilaran dan Supardi Abdu Shomad cukup berbeda dengan versi di atas jika kita membaca catatan pada blog-blog maupun beberapa jurnal yang ada di internet yang menerangkan tentang sejarah al-qur'an Braille di Indonesia. Pada blog YAKETUNIS misalnya, Darma dan Supardi dikatakan baru bertemu ketika Supardi membawa sebuah mesin ketik braille dan al-qur'an braille ke perpustakaan Jogja yang beralamat di jalan Pangeran Mangkubumi Nomor 38.

Berikut kutipan dari blog YAKETUNIS (**http://yaketunis64.blogspot.co.id/2014/01/yaketunis-dalam-lintasan-sejarah.html**):

"*Dengan membawa Alqur'an tersebut dan mesin ketik Braille beliau (Supardi Abdu Shomad) datang ke Perpustakaan Islam jalan Pangeran Mangkubumi Nomor 38. Bapak H. Muqodas Kepala Perpustakaan Islam mengetahui ada seorang tunanetra yang datang dan beliau memerintahkan kepada stafnya Bapak H. Moch. Sholichin, BA agar memberikan uang kepada Bapak Supardi Abdu Shomad. Keesokan*

harinya, Bapak Supardi Abdu Shomad datang kembali dan diberi uang lagi. Pada hari ketiga beliau datang dan sewaktu akan diberi uang beliau menjelaskan bahwa kedatanganya untuk minta bantuan membacakan Alqur'an Braille yang dibawanya. Hal itu mendapat sambutan baik dari Perpustakaan Islam dan Kepala Perpustakaan menugaskan Bapak H. Machdum dan Bapak H. Moch Solichin, B.A. untuk membantu memahami Alqur'an Braille tersebut. Dalam Alqur'an Braille terbitan Yordania tahun 1952 di halaman pembuka tercantum abjad Braille Al-Kitabah al-Arobiyah An Nafiroh lengkap dengan syakal dan tanda bacanya disahkan oleh UNESCO tahun 1951 dalam tulisan cetak biasa (dengan tinta/bukan Braille). Dari situlah diketahui bentuk-bentuk tulisan Arab Braille. Meskipun di halaman ini ada panduan membaca Alqur'an Braille tersebut, namun kedua staf perpustakaan ini masih menemui kesulitan dalam membaca isi Alqur'an Braille tersebut. Sampai suatu ketika ada dua orang mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga yaitu Fuadi Aziz dan Darma Pakilaran yang kebetulan berada di perpustakaan tersebut tertarik untuk ikut mempelajari dan membantu Bapak Supardi Abdu Shomad. Mereka bersama-sama kemudian meneliti huruf demi huruf, syakal demi syakal kemudian terbaca kata demi kata dan akhirnya terbaca ayat demi ayat dalam alqur'an Braille tersebut.

Perbedaan pandangan juga saya temukan pada cetakan al-qur'an braille tersebut. Menurut Pak Darma Pakilaran, Al-qur'an Braille yang dulu ia pelajari merupakan al-qur'an cetakan Beirut-Libanon tahun 1951. Sedang dalam kutipan di atas menyebutkan bahwa al-qur'an yang dibawa Pak Supardi merupakan Al-qur'an cetakan Yordan tahun 1952. Setelah saya melakukan penelusuran lebih lanjut, Uniformisasi simbol-simbol Braille Arab *(Arabic Braille Codes)* dicapai setelah Unesco mengadakan konferensi regional pada 12-17 Pebruari 1951 di Beirut, Libanon. Lihat: UNESCO/MC/Conf. 9/15. Asumsi saya, Sepertinya al-qur'an cetakan Yordan tahun 1952 tersebut

merupakan hasil dari Uniformisasi yang dilakukan tahun sebelumnya di Beirut. Sehingga di mushaf tersebut tertulis kota Beirut dan tahun 1951.

***

Menariknya, saat mempelajari huruf Arab braille pada petunjuk halaman pembuka Al-qur'an braille terbitan Yordan tersebut, Darma Pakilaran belum lancar betul membaca Al-qur'an versi umum (awas). Ia juga masih baru belajar membaca huruf-huruf Hija'iyah. Tetapi berkat kesungguhan beliau, dan juga terbantu hafalan Surah Yasin dari Supardi Abdu Shomad, akhirnya mereka berhasil menguasai dan memecahkan simbol-simbol braille yang terdapat dalam Al-qur'an tersebut. Dari sinilah kemudian ditemukan kaidah penulisan Arab Braille yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk membaca dan menulis Alqur'an Braille.

Supardi Abdu Shomad kemudian berpikir bahwa akan jauh lebih baik jika ada yang mewadahi anak-anak tunanetra di Jogja, berbentuk sebuah lembaga yang dapat menyatukan mereka, dan menjadi lokasi tempat belajar yang dikhususkan bagi tunanetra, yang saat itu masih sangat kurang jumlahnya di jogja. Lagi-lagi bersama Darma Pakilaran, Supardi mengajak beberapa tokoh muslim di Yogyakarta antara lain Bapak H. Muqodas (Kepala Perpustakaan Islam), Bapak H. Moch Sholichin (Staf Perpustakaan Islam), Bapak Drs. H. M. Margono Puspo Suwarno (Guru PAI SMPLB-A Gunajaya Yogyakarta), H.M Hadjid Busyairi (Guru PAI SLB-A Citajaya Yogyakarta), Bapak H. Haiban Hadjid (Tokoh Muslim Kauman Yogyakarta), Bapak DR. Chumaidi (Dosen IKIP Negeri Yogyakarta), Bapak Dr. Ahmad Zaidun Ruslan (Guru SGA Muhammadiyah Yogyakarta), Bapak Moch. Ghowi, Bapak H. Farid Ma'ruf (Staf Urusan Haji Kementerian Agama RI), Bapak Prof. Drs. Fathur Rahman (Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Fuadi Aziz

(Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga), Bapak Machdum (Staf Perpustakaan Islam), Ibu Hj. Wajid Hamidi (tokoh masyarakat), Ibu Hj. Yasin (tokoh masyarakat), dll untuk mendirikan Yayasan Muslim yang menyantuni penyandang tunanetra dan akhirnya berdirilah Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam pada tanggal 1 Muharram 1383 H/ 13 Mei 1964 dengan ketua Bapak Supardi Abdu Shomad dan wakilnya Bapak H. Moch Sholichin, BA. Bapak Supardi Abdu Shomad dan Bapak Moch Sholichin juga memprakarsai berdirinya Pendidikan Guru Agama Luar Biasa Negeri Bagian Tunanetra di Yogyakarta tahun 1967 atas rekomendasi dari Departemen Agama RI. Beliau pulalah yang menjadi Kepala Sekolah tersebut. Pada tahun 1975 Bapak Supardi Abdu Shomad sakit dan beliau wafat tahun 1979 di Krapyak lor Yogyakarta dan dimakamkan di sana (lihat lebih lanjut
di **http://yaketunis64.blogspot.co.id/** diunduh 15 Juli 2017).

Bukan Riglet Biasa

Periode 1964-1967, Bapak Darma Pakilaran banyak mengabdikan diri di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) yang sebelumnya ia bantu pendiriannya. Di sana, ia mengajar para tunanetra membaca Al-qur'an Braille dan menjadi juru ketik dalam pembuatan Al-qur'an Braille yang dilengkapi terjemahan. Hingga akhirnya beliau dipanggil kembali ke Makassar oleh rektor IAIN Alauddin Makassar saat itu, dan ditawarkan untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Kota Anging Mammiri.

Saat itulah, saat ingin pulang ke kota daeng (1967), Bapak Darma diberikan sebuah Riglet (alat tulis Braille), oleh bapak Supardi. Sepertinya Bapak Supardi sadar betul jika saat itu masih banyak tunanetra yang tersebar di Indonesia yang belum tersentuh pendidikan apalagi mampu membaca Al-Qur'an. Ujung Pandang (sebutan kota Makassar kala itu) bisa menjadi

percontohan bagi kota-kota lain khususnya untuk kawasan Indonesia timur.

"Adek Darma, ini saya berikan kenang-kenangan," Supardi memulai kalimat perpisahannya kala itu. Boleh jadi, itu akan menjadi pertemuannya yang terakhir dengan orang yang telah banyak membantunya. Sambil menyerahkan sebuah riglet, Pak Supardi melanjutkan kalimatnya, "Nanti, jika adik Darma sudah tiba di Makassar, tolong dirikan yayasan yang membina anak-anak tunanetra di Makassar, ya. Ajari mereka membaca Al-qur'an sebagaimana yang telah kita lakukan di sini," Pak Darma mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan itu dengan tenang dan wajah yang semringah. Pesan itu teramat membekas di hati Darma Pakilaran. Ia bahkan benar-benar mewujudkan permintaan sahabatnya itu di kota Daeng.

*

Cukup sulit bagi Bapak Darma Pakilaran untuk langsung menjalankan cita-citanya setiba di Makassar. Pertama, karena ia tak begitu tahu bagaimana kondisi kehidupan tunanetra di Makassar kala itu. Ia pun tak memiliki kenalan seorang buta yang ia bisa ajari membaca Al-qur'an Braille. Akhirnya, kala itu, selain fokus menyelesaikan studinya di IAIN Alauddin Makassar, ia berupaya menemukan seorang tunanetra yang ingin ia ajari mengaji. Sampai takdir mempertemukannya dengan Bapak Habib Giring, seorang tunanetra total yang tak sengaja ia jumpai di sebuah Masjid. Habib inilah yang menjadi murid pertama Bapak Darma Pakilaran dan menjadi orang pertama yang menjadi binaan YAPTI (Yayasan Pendidikan Tunanetra Islam) yang Pak Darma Pakilaran dirikan tahun 1969.

Dalam proses mengajari Habib mengaji, setiap sore, Darma Pakilaran berkunjung ke rumah Habib, meyakinkannya dan keluarganya jika seorang buta itu bisa mengaji. Memang, untuk

memulai sesuatu yang baik, pasti ada beberapa jalan terjal yang mesti terlebih dahulu dilewati. Pun jika kita ingin menemukan cahaya, terlebih dahulu kita harus melewati kegelapan. Itulah yang dilakukan Bapak Darma saat itu. Ia harus berusaha meyakinkan Habib dan keluarganya, agar Habib diperbolehkan bersekolah. Tunanetra bersekolah pada saat itu merupakan hal yang tak lazim. Begitu kira-kira pikiran sebahagian masyarakat ketika itu.

Perjuangan Pak Darma tak sia-sia. Habib berhasil ia pengaruhi, dan bersama beberapa tokoh islam di Makassar seperti: Muhammad Ahmad (mantan pimpinan Pesantren IMMIM), Almarhum Muhammad Naim (Mantan Imam Besar masjid Al-markas Al-islami), Hasmul Kusumoh, dan lain-lain, tahun 1969 berdirilah Yayasan Pendidikan Tunanetra Islam yang kemudian lebih dikenal dengan nama YAPTI.

Awal berdirinya, belum ada lokasi tetap yang bisa menjadi tempat belajar bagi tunanetra yang kala itu telah menjadi warga binaan YAPTI. Saat belajar, Pak Darma dan binaannya harus berpindah-pindah lokasi, mencari tempat yang sekiranya nyaman dan aman untuk belajar. Kadang mereka belajar di masjid, tetapi sering pula di kolong rumah. Hingga pada tahun 1971, pemerintah kota mewakafkan sebidang tanah yang sampai saat ini menjadi lokasi tetap yayasan ini di jalan Kapiten Piere Tendean Blog M No.7 Makassar. Sejak 1969-sekarang, yayasan ini telah mengalami beberapa kali pergantian nama. Awal berdirinya, yayasan ini bernama Yayasan Pendidikan Tunanetra Islam dan yang menjadi ketua yayasan pada saat itu adalah Muhammad Ahmad. Setahun kemudian, Muhammad Ahmad ditugaskan mengajar di Kendari, membuatnya harus meninggalkan Makassar dan secara otomatis melepaskan jabatannya sebagai ketua Yayasan. Selanjutnya ditunjuklah Hasmul Kusumoh sebagai ketua yayasan. perubahan nama

kembali terjadi saat Muhammad Naim ditampuk sebagai ketua yayasan menjadi Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia. Hingga di akhir kepemimpinan Naim (2016), pada musyawarah besar YAPTI, diputuskan untuk kembali mengubah nama yayasan dari Yayasan Pendidikan Tunanetra Indonesia menjadi Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia dan terpilih sebagai ketua yayasan, yakni Saiful Saleh yang menjabat hingga sekarang.

Pembaca mungkin bertanya, mengapa Pak Darma Pakilaran tidak pernah disebut-sebut dalam struktur pimpinan yayasan? Itulah yang wajib diteladani dari beliau. Setelah beliau berhasil menginisiasi pendirian YAPTI, beliau tak terlalu bernafsu mengejar jabatan. Yang ia lakukan hanya mengajar dan mengajar, membuat orang buta tidak buta membaca al-qur'an. Ia pun tak terlalu memusingkan ketika beberapa dokumentasi tulisan yang menerangkan tentang sejarah berdirinya Yaketunis dan sejarah Al-qur'an Braille di Indonesia, kurang mencatat namanya. Pak Darma Pakilaran hanya pernah menjadi kepala Panti Guna YAPTI sejak dipaksa oleh binaan YAPTI tahun 1998.

Saat itu, Demonstrasi sedang marak di mana-mana. Mungkin, pada saat itu memang sedang banyak-banyaknya pimpinan yang bersikap otoriter. Panti Guna Yapti saat itu dipimpin oleh seorang wanita bertangan dingin (Ibu Rahmatia) selama 25 tahun. Terinspirasi dari demonstrasi besar-besaran mahasiswa di seluruh Indonesia, warga binaan YAPTI saat itu juga melakukan demonstrasi di DPRD Propinsi, menuntut agar Kepala Panti Guna YAPTI diganti. Demonstrasi itu berhasil menggulingkan wanita bertangan dingin itu, dan ditunjuklah Pak Darma sebagai penggantinya (1998-2006).

Sejak berhenti menjadi kepala panti, Pak Darma Pakilaran sudah tidak banyak dilibatkan di YAPTI. Memang, namanya

masih tercantum dalam SK kepengurusan yayasan, tetapi dalam berbagai permasalahan yang belakangan dihadapi yayasan, ia sudah tidak pernah dilibatkan. Pelan-pelan "rezim penguasa" YAPTI sekarang membuatnya terlupakan. Pada momen idul fitri dan Idul Adha misal, rumahnya bukan menjadi tempat yang masuk daftar untuk dikunjungi. Jika kelak para siswa maupun para alumni YAPTI tidak tahu dan melupakan Haji Darma Pakilaran, maka salah satu sebabnya adalah terputusnya tali silaturahmi itu.

Saat saya masih menjadi warga binaan YAPTI (2006-2012), kami hanya sesekali mengingat namanya disebut-sebut. Hanya pada *event* cerdas-cermat antar binaan yang kala itu rutin diadakan setiap tahun. Salah satu pertanyaan soal cerdas-cermat itu berbunyi begini: "Di dalam proses pengenalan dan pengembangan Al-Qur'an Braille di Indonesia, seorang tunanetra dan seorang dari kalangan awas memberikan kontribusi dan dedikasi yang sangat besar, Siapakah nama kalangan awas tersebut yang juga ketika kembali di Makassar memprakarsai berdirinya Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia?"

Tak elok rasanya memperlakukan Pak Darma Pakilaran seperti itu. Beliau memang tak pernah merisaukan perlakuan seperti ini. Toh apa yang ia cita-citakan bersama Bapak Supardi Abdu Shomad (Alm) sudah terwujud. Lihatlah fakta yang terjadi, memang wajar jika Yapti dijuluki sebagai sekolah terbaik bagi difabel netra di kawasan Indonesia Timur. Sampai saat ini, YAPTI telah memiliki alumni yang berhasil menjadi sarjana sebanyak 24 orang, dan ada pula yang masih sedang dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan berikutnya. Semoga angka-angka ini terus bertambah. Menutup tulisan ini, mari kita mendoakan agar Pak Darma Pakilaran tetap sehat dan dirahmati oleh Allah SWT atas kerja kerasnya di masa lalu[].

TOKOH [2]

KISAH SEORANG BIDAN MELAWAN STIGMA

July 30, 2017

Agung Prabowo (Peneliti INSIST)

TIDAK BANYAK ORANG TUA SEPERTI ibu Triana. Dia bersemangat menceritakan pengalamannya membesarkan Fafa, buah hatinya yang lahir lima tahun silam. Di tengah kesibukannya sebagai bidan di Desa Proppo, perhatian senantiasa tercurah ke anak laki-lakinya itu. Tidak jarang, ketika suaminya harus dinas di jam yang sama dengan jam kerjanya, anak mereka ikut serta. Saat bertemu dengannya, Aku sedang melakukan sebuah penelitian bertemakan 'kesehatan'. Ia adalah salah satu informan kunci dalam penelitian ini. Entah karena

penasaran atau sekadar basa-basi, aku meminta kepadanya untuk memperkenalkan anaknya.

Tidak ada keraguan sedikitpun yang tampak di wajah ibu satu anak ini. Setelah mengiyakan, dia pun bergegas menuju kamar yang tak jauh dari sofa ini. Beberapa saat kemudian, dia keluar menggendong anaknya yang terkulai. Ada senyum ceria di wajah bocah itu, layaknya anak usia lima tahun ketika bertemu ibu yang dirindukan. Senyum yang sama pun hadir di wajah ibunya.

Triana tampak kesulitan ketika akan meletakkan Fafa di pangkuannya. Pandangan mata Fafa liar dengan bola mata terus bergerak mengarah ke atas. Aku memerhatikannya dengan seksama. Kaki dan lengan Fafa mengaku seperti kayu. Pemandangan ini membuatku menegang, gamang dan bermaksud membantu Bu Triana. Tapi ibu ini jauh lebih sigap dari niatku yang hendak membantu.

Dengan berupaya menguasai perasaanku sendiri, aku memintanya untuk melanjutkan sejumlah pertanyaan yang tersisa.

Dalam pangkuan Triana, Fafa tidak bicara. Sesekali hanya terdengar dengung suaranya. Juga disertai gerak mata dan tubuh yang tidak beraturan. Sebagai ibu ,ia bisa mengerti semua isyarat itu. Aku sama sekali tak mengetahui apa yang digumamkan Fafa. Aku pun menjadi canggung dengan ketidakmengertian ini.

Sejak berkenalan langsung dengan Fafa, aku mulai berhati-hati saat akan berucap maupun bersikap. Sembari mendengar cerita ibunya, dalam pikiranku, aku berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan anak ini. Apakah ini penyakit atau bukan? Apa istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisinya? Sebagai peneliti, bagaimana harusnya bersikap dengan dia dan keluarganya? Pastinya, aku merasa bodoh tidak mencari tahu

sebelumnya karena memang tidak menduga sama sekali akan bertemu dia.

*

SESAMPAI DI KAMAR PENGINAPAN, aku putar kembali rekaman wawancaraku bersama Triana dan Fafa. Sambil mendengarkan, aku membuka laptop dan berselancar dari domain satu ke domain yang lain untuk mencari tahu apa yang Fafa alami. Selang beberapa menit, kursor terhenti di sebuah artikel yang menjelaskan kondisi Fafa.

Benar apa yang Triana katakan, anaknya bukan orang sakit. Fafa sejak lahir mengalami gangguan fungsi otak sehingga mempengaruhi syaraf dan tulang belakangnya. Secara medik, Fafa yang kerap mengalami kejang dan kesulitan mengontrol anggota tubuhnya disebabkan adanya gangguan fungsi saraf.

Umumnya kondisi seperti ini disebut dengan CP, akronim dari *Cerebral Palcy*. Paling tidak artikel yang aku baca sedikit menjawab pertenyaanku-pertanyaanku saat wawancara tadi. Aku tidak mau terjebak dipenjelasan lebih jauh ke hal medis atau sejarah CP. Selain membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya, penelitian yang aku lakukan bukan untuk menjawab kondisi medik kelompok difabel. Aku pun beralih untuk mendengarkan rekaman wawancara.

Pendekatan Medis Yang Tidak Berbuah Hasil

Awalnya, Triana menduga anaknya mengalami CP karena adanya indikasi kesalahan penanganan saat persalinan. Saat dia akan melakukan persalinan, usia kandungannya sudah lebih bulan. Oleh dokter yang membantu persalinan itu, dia mendapat tindakan induksi dengan maksud memancing kontraksi sehingga bayi bisa keluar dengan mudah. Sialnya, induksi yang dokter berikan bukannya berhasil membuat Triana kontraksi, tapi justru mengenai janin. Tindakan tersebut berujung pada gawat janin dan memaksa dokter melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan ibu dan bayi.

Tapi ada pendapat lain dari rekan kerjanya yang juga seorang bidan. Menurut rekan Triana, penyebab kerusakan syaraf Fafa bukan karena kesalahan tindakan dokter saat memberikan induksi. Baginya, kerusakan syaraf di Fafa terjadi karenakan faktor usia kandungan yang sudah lebih bulan.

Setelah persalinan itu, Fafa sering menangis sebagaimana anak seusianya. Tapi semakin bertambah usia, intensitas tangisannya terus berkurang. Bahkan dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk memulai komunikasi dengan orangtuanya.

“Ngak bisa ngomong kan pak, cuman isyarat saja. Yah begitu, biasanya sampai keringatan sendiri di tempat tidur.” ungkap Triana dengan dialek Maduranya.

Triana mengaku cukup kesulitan untuk memahami kebutuhan sehari-hari Fafa. Tidak ada tanda seperti tangisan, teriakan apalagi perkataan untuk meminta sesuatu. Seiring waktu, dia mulai mempelajari isyarat yang anaknya berikan. Mempelajari tiap tanda yang hadir lewat gerak tubuh dan mulai menerjemahkannya.

Fafa juga kerap mengalami kesulitan bernafas dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Triana sengaja memasang alat bantu karena khawatir dengan kondisi anaknya. Dari pelajaran semasa kuliahnya, dia mendapat informasi bahwa ketika otak anak kurang mendapat oksigen, maka akan semakin buruk kondisi syaraf anak. Tapi tidak begitu lama alat bantu pernafasan dia gunakan karena setelah kondisi anaknya mulai membaik, dia melepaskannya.

Ada beragam upaya Triana lakukan untuk menyembuhkan anaknya. Mengetahui anak laki-lakinya tidak dapat mengontrol gerakan tubuh, dia segera menemui dokter spesialis syaraf di Kota Surabaya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan anaknya CP. Sebagaimana petunjuk dokter, dia kemudian secara rutin memberikan suntikan hormon ACTH. Suntikan yang dia gunakan untuk mengatasi kejang-kejang yang kerap datang menghampiri anaknya.

Dari pengamatan Triana, memang benar suntikan hormon memiliki efek mengurangi kejang, hanya saja tidak benar-benar menyembuhkan. Kunjungan berikutnya, dokter menambah dosis hormon ACHT. Dosis yang diberikan pun sudah di ambang batas, sementara kejang tidak kunjung redam. Dia pun menghentikan treatment hormon anaknya.

Triana melanjutkannya usahanya dengan obat-obatan. Sekali lagi, hasilnya pun nihil. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kesembuhan. Dokter syaraf kemudian menyarankan pemeriksaan lanjutan menggunakan MRI untuk memastikan syaraf bagian mana yang mengalami gangguan. Dokter juga menyarankan pilihan perawatan medis, salah satunya operasi. Dengan tegas suami Triana menolak pilihan tersebut.

CP dalam Stigma dan Konstruksi Sosial

Menjadi orangtua bagi anak difabel bukanlah perkara mudah, apalagi di lingkungan yang belum pernah mengenal CP. Tetangga-tetangganya memiliki anggapan kuat, anak Triana mengalami kondisi yang mereka sebut sebagai *sawan*. Ibu-ibu di sekitar rumahnya menyakini *sawan* itu terjadi karena kesalahan orangtua. Jika ibu semasa hamil sakit dan tidak mendapat penanganan tukang pijat, maka ketika anaknya lahir akan mengalami *sawan*. Fafa inilah salah satu anak yang mereka percaya 'kena sawan'.

"Ada pandangan umum masyarakat di Madura soal difabel pak, mereka istilahkan dengan 'Sawan'. Masyarakat percaya ketika anak sakit dan tidak dipijat, maka anak yang dikandung nantinya akan 'sawan'," Triana menceritakan.

Tidak ada penjelasan lebih jauh soal 'sawan'. Bagi Triana, masyarakat Desa Proppo menggunakan istilah *sawan* untuk merujuk kondisi anaknya yang mengalami CP—dan juga untuk anak difabel jenis lainnya. Istilah itu sebenarnya berkonotasi negatif, sama halnya dengan kondisi terkutuk karena mengabaikan ritual dan kepercayaan masyarakat setempat. Istilah '*sawan'* juga diasosiasikan sebagai karma bagi orangtua yang melakukan kesalahan di masa lalu. Sebagai contoh, orang

yang mengabaikan kepercayaan masyarakat setempat, berhubungan suami istri ketika sedang datang bulan, bisa berakibat fatal di anak yang mereka lahirkan nantinya.

Sejak gangguan syaraf Fafa mulai tampak secara kasat mata, aneka label negatif maupun ungkapan stereotip orang-orang mulai bermunculan. Walaupun Triana dikenal masyarakat sebagai seorang bidan, ia tidak lantas luput dari hujatan stigmatik sebagai ibu dari anak '*sawan*'. Status bidan desa yang Triana sandang pun mulai dipertanyakan. Tidak jarang warga yang hamil berusaha menghindari persalinan di kliniknya. Walaupun sudah mendapat maklumat dari Kepala Desa, masih ada saja warga yang menolak datang ke klinik Triana untuk bersalin.

Karena *sawan* menjadi wacana dominan di warga—akibat minimnya informasi tentang CP, masyarakat pun terjebak dalam dugaan-dugaan (prasangka—stereotip) dan kebingungan. Dugaan dan kebingungan yang mengakar kemudian berujung pada pemisahan (*segregating*) dan tindakan diskriminatif (*dicriminating*) terhadap hak-hak anak difabel. Salah satu bentuk pemisahan dan tindakan diskriminatif yang Triana sebutkan adalah hak anak difabel mendapat pendidikan yang bermutu . Anak difabel, dikarenakan label dan stereotif yang telah dilekatkan kepadanya kemudian mengalami pemisahan saat hendak bersekolah, yakni masuk di Sekolah Luar Biasa. Jika pun ada orang tua berupaya menyekolahkan anaknya di sekolah umum, maka pihak sekolah—yang tidak paham dengan kondisi disabilitas seseorang—dengan ringan mengatakan bahwa anak itu sebaiknya bersekolah di SLB saja. Ituah bentuk diskriminasi yang akan dihadapi difabel. Keseluruhan proses labelisasi (sebagai anak *sawan*), lalu upaya stereotip (menyangka anak sawan anak tidak mampu, ibu yang membawa karma), lalu pemisahan dan kemudian diskriminasi itulah yang disebut

sebagai stigma. Tidak sedikit orangtua maupun anak tertekan dengan stigma seperti itu. Ujungnya, mereka bisa merasa malu dan dalam keadaan terdesak, orang tua bisa menyembunyikan anaknya di balik tembok kamar yang sunyi.

Di tengah keputusasaan Triana memperbaiki kondisi fisik anaknya, dia pun harus berhadapan pula dengan stigma negatif yang lingkungan sosial lekatkan pada anaknya. Hingga akhirnya dia mulai menggunakan media sosial *facebook* untuk bertukar pengalaman dengan sesama orangtua difabel CP dan mengusahakan desain sosial baru untuk anaknya.

Keluar Kotak, Mengusahakan Lingkungan Inklusif

PERKENALAN TRIANA DENGAN ORANGTUA anak CP melalui *facebook* tidak hanya di lingkup Kabupaten Pamekasan saja, tapi juga kota-kota besar lain seperti Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Bandung. Mulanya, dia mencari group dengan kata kunci 'orangtua CP'. Dari situlah dia mulai berinteraksi dengan *user* lain di dalam group. Demikian seterusnya hingga ada sejumlah akun yang dia ajak berkenalan dan saling berbagi pengalaman.

Menurut Triana, ketika dia bertemu orangtua CP yang lain di media sosial, sikap paling dominan yang dia rasakan adalah saling mendukung satu sama lain. Orang-orang saling berbagi pengalaman dan bertukar informasi mengenai ruang-ruang publik asik yang mereka nilai aksesibel dan inklusif.

Setelah mendengar cerita-cerita dari kota lain, Triana sadar bahwa di Kabupatennya belum ada perhimpunan orangtua anak difabel yang bisa dia manfaatkan sebagai wadah belajar. Berbeda dengan Yogyakarta dan Bandung yang baginya kedua kota ini sudah lebih maju dengan memanfaatkan organisasi sebagai tempat berkumpul dan belajar satu sama lain. Bahkan menurutnya, Pemerintah Daerah di kedua tempat tersebut

susdah lebih serius dibandingkan Pamekasan dalam memperhatikan kelompok difabel.

“Di Surabaya ada teman saya anaknya juga CP. Di Yogyakarta juga ada CP. Di Bandung bahkan lebih bagus lagi. Ridwan Kamil (walikota Bandung) kayaknya bagus, jadi dia itu kan ada Taman Inklusi khusus difabel. Aduh, saya *ngiri* pak!”, kata Triana.

Triana sadar dirinya bukan Ridwan Kamil. Tapi dirinya tetap memperjuangkan linkungan yang inklusif untuk anaknya. Berbekal semangat belajar dan informasi yang dia dapat dari diskusi-diskusi dalam group, dia mulai membentuk pemahaman orang-orang di sekitarnya.

Triana memulainya dari lingkungan rumah dan lingkungan kerja. Di lingkungan rumah, dia membiasakan diri membuat tetangga-tetangganya berinteraksi langsung dengan anaknya. Menyertakan anaknya ke dalam lingkar obrolan ibu-ibu atau hanya sekadar berkunjung ke rumah sebelah. Dalam interaksi itu, dia juga terus menyisipkan informasi tentang CP dan dengan tegas menyatakan bahwa: Fafa tidak sakit! Fafa sama dengan anak lainnya! Fafa baik-baik saja dan tidak perlu khawatir melihat fisiknya!

Ketika harus menjalani jam dinasnya di Puskesmas, Triana dan suaminya pun kerap membawa Fafa. Dengan sengaja dia menitipkan anaknya itu di teman-temannya. Miminta rekan bidan lain untuk mengajak anaknya bermain, berbincang atau jalan-jalan di sekitar puskesmas. Dia sebisa mungkin membuat lingkungan kerjanya terbiasa dengan keberadaan anaknya. Dengan demikian, anaknya tidak harus terasing di dalam kamar. Triana pun bisa bekerja tanpa harus khawatir anaknya berada di luar pengawasan.

Kedua cara Triana tersebut terbukti ampuh dan berdampak positif di anaknya maupun di lingkungan sosial mereka. Anaknya kini sudah mulai menunjukkan perkembangan dalam berkomunikasi—walaupun masih dominan bahasa tubuh yang digunakan. Demikian pula dengan lingkungan sosialnya, lingkungan rumah dan tempat kerja, yang mulai bersikap biasa dengan keberadaan anaknya.

*

MEMANG TIDAK MUDAH KELUAR dari dominasi pendekatan medis ketika berinteraksi dengan kelompok difabel. Selama ini pendekatan medis kerap menegasikan difabel sebagai satu kondisi individu yang abnormal atau sakit. Ketika ada salah satu bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, dokter dan masyarakat umumnya menimpali individu tersebut dalam kondisi sakit. Dominasi ini pun berimplikasi pada hilangnya paradigma sosial ketika coba menggali lebih dalam akar masalah diskriminasi di anak-anak difabel.

Bukan hanya di masyarakat saja, tapi pendekatan medis pun begitu kuat memengaruhi hingga ke kalangan akademisi, lini kebijakan dan birokrasi pemerintahan, khususnya lembaga pemerintahan yang mendapatkan mandat menangani isu tersebut. Hal ini bisa kita lihat misalnya pada kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus yang bersifat eksklusif seperti membangun pusat-pusat rehabilitasi difabel berdasarkan jenis gangguan medisnya, lahirnya sekolah-sekolah khusus difabel (Sekolah Luar Biasa—SLB), membuat kelas khusus bagi difabel di sekolah inklusi dan sebagainya. Bahkan yang lebih memprihatinkan, lahirnya program bantuan yang berkedok pemberdayaan—yang sebenarnya menciptakan ketergantungan pada kelompok difabel karena hanya mengandalkan rasa kasihan (*charity*). Sementara masih sedikit program yang coba

menyelesaikan permasalahan kelompok difabel dengan menggunakan pendekatan kritis dan emansipatoris.

Kebijakan yang tidak emansipatoris sudah seharusnya dihentikan. Pengalaman Triana di atas sudah sepatutnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah di dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait hak-hak anak difabel.

Di akhir pertemuanku dengan Triana, dia sempat menceritakan sejumlah rencana untuk anaknya. Mereka sudah mempersiapkan rencana pendidikan untuk anaknya. Bukannya SLB yang mereka tuju, sekolah Islam Terpadu tanpa embel-embel eksklusif dan cukup populer di Ibu Kota Kabupaten Pamekasan. Bagi mereka, Fafa pantas mendapatkan pendidikan terbaik seperti anak-anak lainnya.[]

TOKOH
[3]

ROMANSA SEORANG IBU MELAWAN DISKRIMINASI DISABILITAS

August 1, 2017

Nur Syarif Ramadhan

SELAIN PERTAMA KALINYA MENGIKUTI DISKUSI pembahasan peraturan perundang-undangan terkait isu pemenuhan hak-hak difabel di Jogjakarta, saya juga beruntung bisa bertemu dan berdiskusi dengan seorang tokoh difabel yang telah sepuh. Sejak muda ia sudah berjuang untuk mengangkat harkat, martabat dan kesetaraan hidup bagi difabel.

Sebenarnya, saya sudah menemukan namanya dalam daftar peserta yang dikirimkan panitia sehari sebelum acara berlangsung. Saya menduga dia lah orangnya, tetapi saya belum yakin betul, apakah nama itu memang dirinya, atau sosok lain. Ternyata, dugaan itu benar. Dialah Ariani Soekanwo, yang dalam beberapa catatan sejarah lebih sering disebut Ariani Muin. Banyak aktivis difabel—tua maupun muda—mengenalnya sebagai aktivis yang membela hak-hak difabel—ibu Ariani lebih suka menyebut istilah Penyandang Disabilitas.

Ia mendirikan sejumlah organisasi difabel, diantaranya adalah PERTUNI atau Persatuan Tunanetra Indonesia pada 1966, Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWCI) 1997 yang belakangan berganti nama menjadi Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia, Pusat Pemilihan

Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) 2007, dan yang Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN).

Di usianya yang telah senja (71 tahun), tak ada gurat lelah yang ia tampakkan. Suaranya masih lantang dan tegas melebihi aktivis difabel muda dalam menyuarakan hak-hak difabel. Saat diskusi penyusunan substansi Peraturan Pemerintah yang diamanhkan UU Penyandang Disabilitas, saya menyaksikan betapa bersemangatnya dia mengkritisi perwakilan kementerian sosial dan Kementerian Koordinator PMK yang ingin menyederhanakan jumlah PP yang harus dibuat. Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 ini, pemerintah setidaknya perlu menyiapkan 15 PP—atau sekurang-kurangnya 7 atau 8 PP. Kenyataannya, Kemensos sebagai pihak yang diminta Presiden menyiapkan sejumlah PP ini hendak menggabungnya menjadi 1 PP saja.

"Bagaimanapun, permasalahan disabilitas merupakan permasalahan yang harus menjadi tanggungjawab multisektoral. Persoalan disabilitas bukan hanya tanggungjawab kementerian sosial!" tandasnya lugas sore itu. Ibu Ariani tidak menginginkan kejadian masa lalu terulang, di mana isu-isu disabilitas hanya menjadi fokus dari kementerian sosial saja dan isu disabilitas selalu diidentikkan sebagai depsos atau dinsos.

Sayangnya, orang-orang kementerian yang hadir dalam pertemuan itu tak begitu pandai merangkai alasan selain alibi

basi yang telah berulang-kali mereka dengungkan: keterbatasan dana dan kementerian lain tidak peduli.

*

SAYA BERSEPAKAT DENGAN Ishak Salim untuk mengajak berdiskusi ibu Ariani. Lalu, persekongkolan itu kami jalankan di suatu malam di hotel Melia Purasani—tempat konsultasi nasional ini berlangsung. Kami ingin belajar kepada ibu Ariani, terutama motivasinya mendirikan banyak organisasi difabel dan apa trik serta tips sehingga organisasi itu bisa tetap eksis hingga sekarang.

Hal lain yang kami kagumi dari beliau, ia begitu pandai menjaga semangatnya. Hingga di usianya sekarang, ia masih begitu enerjik, seperti tak pernah merasa kelelahan bergerak, memperjuangkan terciptanya kehidupan yang inklusif untuk generasi muda difabel. Sesuai waktu yang kami sepakati, akhirnya kami berhasil "menculik" ibu Ariani dari kesibukannya, kami pun membawanya ke sebuah sudut ruangan yang masih menjadi bagian restaurant hotel dan berdiskusi di sana. Pendampingnya, Mbak Wiwik tampak senang dan pamit kepada ibu Ariani untuk jalan-jalan ke Malioboro bersama beberapa peserta.

Dari penuturannya, Ariani Soekanwo lahir di kota istimewa Yogyakarta, 30 Desember 1945. Sejak lahir, anak kedua dari empat bersaudara ini telah mendapati keanehan pada penglihatannya, yakni menurunnya fungsi pada penglihatannya (*low vision*). Tapi jangan salah. Itu tidak menghalangi Ariani muda bersekolah dengan giat. Sejak SD hingga SMA, ia bersekolah di sekolah regular (bukan di SLB). Bahkan, saat berkuliah, ia pun berhasil masuk ke kampus yang saat ini digelari sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia: di Jurusan Antropologi UGM (Universitas Gadjah Mada).

“Sewaktu kuliah, saya masih bisa menggunakan sepeda bahkan sepeda motor,” kenang Ibu Ariani. Karena penurunan fungsi penglihatan itu, ia selalu berharap, ada kawan yang bisa ia ikuti. Ia membutuhkan ‘pemandu’ di tempat tertentu seperti saat persimpangan Idi mana ia akan melintasi lampu lalu lintas. Bagi seorang *low vision*, hal ini biasa terjadi. Saya pun sering menggunakan teknik ini ketika ingin menyeberang jalan. Jadi, dengan sisa penglihatan yang saya miliki saya gunakan untuk minimal menyejajari langkah seseorang yang awas ketika akan menyeberang. Tentu saja si awas ini tidak mengetahui bahwa orang yang mengikutinya seorang tunanetra.

Saat kami memikirkan pertanyaan untuk memulai diskusi, malah ibu Ariani yang mendahului kami bertanya.

“Mas Ishak ini kok tertarik menulis soal disabilitas dan membantu teman-teman Penyandang Disabilitas?” tanyanya.

Ibu Soekanwo berbagi pengalaman: Nur Syarif Ramadhan, Ariani Soekanwo, Nor Yasin, Ishak Salim

“Pada dasarnya, saya memang suka menulis, bu. Saya juga sedang mendalami sejarah difabel,” ujar Ishak. Saat mendengar kata difabel, Ibu Ariani sempat mempertanyakan kenapa

menggunakan kata difabel dan kami sejenak berdiskusi soal perbedaan dan argumentasi di balik istilah difabel itu.

Ishak melanjutkan menjawab pertanyaan Bu Ariani.

"Pada saat ini juga, saya sedang mengambil S3 di UGM, jurusan Ilmu Politik. Disertasi saya berjudul "Politik Pencacatan di Indonesia". Menurut saya, proses pencacatan merupakan tindakan politik yang dilakukan negara maupun non-negara. Label 'cacat' itu dimunculkan oleh negara ataupun masyarakat. Namun, label 'kecacatan' itu bagi sebagian orang—khususnya aktivis difabel merupakan istilah yang kurang tepat disematkan kepada difabel. Karena itulah mereka menolak labelisasi [negative] itu," panjang lebar Ishak menjelaskan.

Kata Ishak, salah satu wujud perlawanan atas label itu adalah memperkenalkan istilah baru yang dianggap lebih bermakna positif, yakni difabel—dirumuskan di Yogyakarta pada 1996. Proses ini merupakan bentuk kontestasi gagasan yang saling memengaruhi penggunanya. Istilah difabel kini sudah luas dipakai di berbagai daerah. Itulah mengapa ia memberi judul [naskah/drafth] disertasinya 'Politik pencacatan atau dalam Bahasa Inggris disebut *The politic of disablement in Indonesia*.

" Jadi, yang cacat sebenarnya bukan orangnya, tapi kebijakanlah yang telah mencacatkan orang dengan labelisasi, kemudian menyematkan prasangka, memisahkannya dan mendiskriminasikan difabel dari lingkungannya," katanya lebih lanjut.

Dari tempat duduknya, Ibu Ariani terlihat menyimak. Sesekali ia menyela dengan gumaman. Ishak kemudian menjelaskan beberapa hal yang masih terkait dengan disertasinya, di mana ia mengawali dengan menelusuri sejarah disabilitas di Indonesia, yang dimulai dari masa kolonial,

kemudian saat wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat sepuluh yang mendasari dibentuknya Departemen Sosial Republik Indonesia untuk pertama kalinya.

Tapi, bukan soal disertasi itu yang ingin kami diskusikan dengan Ibu Ariani. Ishak kemudian mengingatkan bahwa diskusi malam ini adalah soal ketauladanan Ibu Ariani dalam kerja panjangnya di isu disabilitas. Jadi mending kita bernostalgia, mengingat kembali perjuangan ibu Ariani di masa mudanya, bagaimana perjuangan beliau dalam menghimpun teman-teman sehingga berdirilah organisasi yang hingga saat ini selalu berada di garda terdepan, memperjuangkan hak-hak disabilitas.

Awal Mendirikan Pertuni

SAAT ITU USIA ARIANI masih 20 tahun. Ia sedang berada di masa awal berkuliah di UGM. Selain aktif sebagai mahasiswa Antropologi UGM, Ariani juga melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial, mengajar para tunanetra. Ia membantu mengajar di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (YAKETUNIS), Yogyakarta. Dari sini kita bisa melihat bahwa jiwa sosial dalam diri Ariani sudah mulai tumbuh bahkan saat usianya masih muda.

Di asrama YAKETUNIS itulah, ia dipertemukan dengan Zaki Mubaraq (Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang kemudian pindah ke Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan Sastra Inggris). Zaki Mubaraq kemudian yang menghubungkan Ariani dengan Ali Parto Koesomo (Semarang), dan Frans Harsana sastraningrat (Dosen IKIP Yogyakarta). Keempat tokoh tunanetra inilah yang kemudian bersepakat mendirikan organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) tepat pada 26 Februari 1966. Di awal berdirinya, program awal PERTUNI adalah menghimpun

tunanetra dan mengupayakan agar mereka memperoleh pendidikan yang baik.

“Kami saat itu mendirikan PERTUNI karena kami memiliki keinginan besar untuk mendirikan organisasi tunanetra yang menasional,” kenang Ibu Ariani.

“Sebenarnya pada saat itu sudah ada beberapa organisasi penyandang cacat di Bandung, tetapi organisasi-organisasi tersebut hanya bergerak di wilayahnya. Mereka tidak berskala nasional,” katanya lebih lanjut.

Kalau mendengar penuturan Ariani, kredit lebih harus disematkan pada bapak Zaki Mubaraq, karena dialah yang berinisiatif untuk mengumpulkan ketiga tokoh lain, dan boleh jadi ide pendirian PERTUNI merupakan buah pikirannya.

“Bagaimana kemudian organisasi PERTUNI ini bisa menasional?” saya mengajukan pertanyaan.

“Kenapa kita bisa menjadi menasional, mungkin karena kami ini bukan anak panti, dan yang kedua, kami ini berasal dari kota yang berbeda,” ujar Ariani penuh reflektif.

Bagi saya, penjelesan Ibu Ariani ini cukup menarik untuk direnungkan. Saat saya mendengar alasannya, saya lantas teringat kota di mana saya tinggal, Makassar. Boleh jadi, organisasi Pertuni di Sulawesi Selatan saat ini tak memiliki perkembangan yang dapat dibanggakan , diakibattkan karena lokasi kantornya berada dalam lingkungan Panti Guna Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia (YAPTI), dan hampir sebagian pengurusnya juga masih menggantungkan hidupnya pada yayasan tersebut.

Dari penjelasan Ariani, salah satu factor keberhasilan mendirikan organisasi Pertuni adalah adalah kuatnya dukungan keluarga. Keluarga keempat tokoh pendiri PERTUNI ini sangat

mendukung mereka. Dalam perkembangannya, pada 1971, Pertuni berpindah kedudukan ke Ibukota Republik Indonesia, dan pucuk pimpinan beralih ke Ali Parto Koesomo. Beruntung, saat itu dukungan pemerintah terhadap aktivitas Pertuni disokong penuh, khususnya oleh orang kepercayaan Presiden Soeharto saat itu, yakni Ali Moertopo.

Menurut Ariani, di sinilah kemudian awal pengembangan PERTUNI hingga ke daerah-daerah di mana berdiri sejumlah cabang Pertuni di beberapa provinsi hingga ke kabupaten/kota. Kini, PERTUNI telah hadir di 34 profinsi, dan memiliki cabang di ratusan kabupaten/kota.

*

SAAT SEKRETARIAT PERTUNI PINDAH ke Jakarta, Ariani tidak bisa seaktif sebelumnya. Apalagi saat itu, Ia tengah berupaya menyelesaikan studinya di UGM. Selama beberapa tahun ia absen dalam kegiatan Pertuni. Tetapi, ia tetap memilih aktif mengikuti kegiatan maupun gerakan-gerakan sosial di kampus. Lewat aktivitas sosial itulah, Ariani dipertemukan dengan Abdul Muin, mahasiswa Jurusan Farmasi yang kemudian menjadi suaminya. Keduanya menikah di tahun 1972. Dari perkawinan itu, mereka dikaruniai tiga orang puteri—kini semuanya telah berkeluarga dan Ariani memiliki 6 cucu.

Nama Muin di belakang nama Ariani—yang banyak ditemukan dalam catatan-catatan sejarah PERTUNI—diambil dari nama belakang suaminya. Setelah menikah, Ariani banyak berpindah-pindah, mengikuti tempat suaminya bekerja. Ia juga sempat tinggal lama di Makassar, yakni antara tahun 1986 sampai 1991. Ia mulai aktif kembali di Pertuni saat keluarga Ariani pindah ke Jakarta pada 1992.

*

Medio 1995, ada keresahan tersendiri yang dirasakan Ariani. Ia merasa perlu menghimpun semua teman-teman disabilitas lain, untuk sama-sama berjuang. Saat itu PERTUNI sudah semakin berkembang di bawah pimpinan Bapak H. Soerodjo. Masalahnya, PERTUNI merupakan organisasi masyarakat yang ranah perjuangannya hanya melibatkan tunanetra. Maka dari itu, bersama Mimi Mariani (tunanetra), Yuniati Efendi (tuli), Maulani Rutinsulu, dan Yuniati Astuti mereka menggagas pendirian Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia yang secara resmi berdiri juni 1997. Setelah beberapa tahun berdiri, organisasi tersebut mendapat dukungan anggaran dari Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), dan kantor pertama HWPCI juga di markas DNIKS di sekitar wilayah Tanah Abang.

Selanjutnya, HWPCI juga mengembangkan diri hingga memiliki struktur kepengurusan ke berbagai daerah. Menurut Ariani, keberadaan PPCI (persatuan penyandang cacat Indonesia) sebagai organisasi lintas disabilitas di berbagai daerah juga berandil besar dalam proses pembentukan HWPCI di berbagai daerah.

Pada 2006, HWPCI menyelenggarakan musyawarah nasional untuk pertama kalinya. Saat itu, Ariani kembali terpilih untuk menahkodai HWPCI hingga 2011. Pada munas 2011, barulah HWPCI dipimpin oleh Maulani A. Rotinsulu. Saat aktif di HWPCI itulah Ariani juga menginisiasi berdirinya Pusat Pemilu Akses bagi Penyandang Cacat (PPUA – PENCA), dan Gerakan Aksesibilitas umum Nasional (GAUN)—sejak tahun 2000 dan kini mulai digiatkan lagi. Saat ini, Ariani sedang fokus mengembangkan GAUN. Besar keinginan beliau untuk mengembangkan GAUN hingga ke seluruh Indonesia.

Malam semakin larut, nyaris tiga jam kami berbincang malam itu. Sepertinya, Ibu Ariani terbiasa berdiskusi panjang

bahkan hingga larut malam. Daya tahan tubuhnya masih cukup prima. Untuk urusan disabilitas, ia seperti tak tahu mengenal masa pensiun. Itulah mengapa ia masih tetap berani bermimpi dan terus berupaya mengejar impiannya itu. Impian untuk kehormatan penyandang disabilitas di Indonesia[].

*Penulis adalah aktivis PerDIK Sulsel

TOKOH
[4]

BAHRUL FUAD, AKTIVIS GERAKAN SOSIAL YANG MEMPERJUANGKAN HAK-HAK DIFABEL

May 7, 2017

Ishak Salim

Salam, Cak Fu atau **Bahrul Fuad** dan **FX Rudi Gunawan**, Dua kawan seperjuangan kita dalam upaya memenuhi hak-hak difabel di seluruh Indonesia, terpilih sebagai kandidat Anggota/komisioner Komnas HAM Republik Indonesia.

Saya tidak begitu mengenali Bung Rudi Gunawan selain melalui sejumlah tulisannya di Majalah **Diffa** yang ia pimpin. Tetapi, saya mengenal Cak Fu dan pernah berinteraksi dalam sejumlah kegiatan terkait isu HAM dan spesifik hak difabel. Saya dan Cak Fu juga sama-sama pernah belajar di negeri Holland walau kampus yang berbeda.

Saya ingin bilang, ia adalah satu-satunya aktivis difabel yang lolos mewakili difabel dan tentu saja paling memahami banyak aspek terkait dengan difabel maupun isu-isu difabilitas lainnya. Ia telah menapaki pengembaraan intelektual yang panjang. Ia telah berbincang dengan banyak orang terkait beragam isu kemanusiaan, khususnya soal pandangan abelisme yang telah menempatkan mayoritas difabel dalam stigma dan keterpinggiran tiada tara. Ia bahkan melewati masa yang panjang hidup dalam masyarakat yang kebanyakan anggota masyarakat atau komunitasnya masih memandang difabel sebagai kaum sakit, tidak mampu dan objek amal.

Dalam salah satu diskusi di Yogyakarta yang mempertemukan banyak elemen Organisasi Gerakan Difabel di seluruh Indonesia, Cak Fu menyampaikan kritik terhadap beberapa pasal dari UU Penyandang Disabilitas. Ia menyatakan bahwa sebagai difabel, kita harus tahu sejarah lahirnya UU

Penyandang Disabilitas ini dan konteks yang melatarinya. Menurutnya, persoalan teman-teman difabel yang utama adalah soal stigma, perlakuan eksklusivisme, dan komitmen rendah dari negara atau pemerintah dalam memenuhi hak-hak difabel. Di UU ini ada soal Konsesi, Kartu Tanda Disabilitas, dan Komisi Nasional Disabilitas. Baginya, ketiga hal itu justru akan semakin menguatkan anggapan dan praktik stigmatisasi disabilitas sebagaimana selama ini sudah terjadi.

Ia melontarkan pemikirannya soal apakah telah atau akan ada kontribusi negara ketika konsesi itu dibebankan kepada berbagai perusahaan baik lokal maupun internasional. Lalu, apakah mekanisme pelaksanaannya sudah disiapkan? Ia memisalkan, Cak Fu masuk ke gerai minimarket berjejaring, begitu penjaganya melihat dirinya, nah akan dikira 'Cak Fu' yang difabel ini lagi 'kepengen' diskon. Wah itu susah! Begitu pula terkait Kartu Tanda Disabilitas yang hanya akan memperpanjang pelabelan disabilitas. Bahkan nanti bukan hanya di ranah sosial label itu ada, tetapi bahkan sudah di ranah legal-formal sekalipun sudah eksis. Padahal, ada kelompok masyarakat lain mau melepaskan label itu, eh undang-undang baru ini malah ingin melanggengkan pelabelan disabilitas yang kita anggap negatif itu.

Kata Cakfu, spirit gerakan difabel kita adalah menghapus stigma di masyarakat. Ada dua macam stigma, stigma sosial dan stigma diri sendiri. Ini persoalan yang harus kita buka dan perlu didiskusikan. Praktik stigma erat kaitannya dengan pengetahuan yang benar dari masyarakat. Jelas UU tidak bisa mengatasi soal stigma walau sudah ada aturannya. Stigma hanya bisa dihapus melalui pendidikan dan pengorganisasian melalui kerja-kerja kolaboratif.

Ia juga mengkritik keberadaan Komisi Nasional Disabilitas. Menurutnya, Indonesia sudah punya Komnas HAM, Komnas

Perempuan, Komnas Anak, nah kalau buat lagi Komnas Disabilitas, kapan komnas-komnas yang sudah ada ini belajar perspektif disabilitas? Nanti kalau ada pelanggaran hak difabel, akan saling lempar tanggung jawab karena tidak paham perspektif disabilitas!

Saya pikir, karena cara pandang itulah kemudian Cak Fu mengajukan diri sebagai kandidat Komisioner HAM dan semoga ia bisa melewati fase seleksi ini, diterima dan kemudian bekerja dengan baik.

Bagi saya, Cak Fu adalah salah satu pemimpin dalam gerakan difabel di antara sejumlah komandan lapangan yang juga berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat difabel di seluruh pelosok Indonesia. Kita semua, orang-orang yang menyandang hak-hak sebagai manusia membutuhkan orang-orang seperti Cak-Fu menduduki posisi sebagai komisioner HAM, bukan karena dia teman, tetapi karena ia punya kapasitas keilmuan, pengalaman yang panjang, dan jaringan aliansi yang luas di dalam maupun luar negeri. Untuk itu, ia punya kemampuan memilih keputusan yang tepat terkait bagaimana agar Hak-hak Asasi yang sudah melekat di dalam diri ini dapat dipenuhi kebermaknaannya oleh negara.

Selain serius memperjuangkan isu-isu difabilitas, Cak Fu itu punya selera humor. Suatu hari, saat sama-sama hendak shalat Jumat di Masjid Raya Medan, saya berjalan dengannya. Saat hendak memasuki Masjid, seseorang memasukkan selembar uang ke kantong kemeja Cak Fu. Awalnya mungkin ia hendak marah atau protes, tetapi ia malah tersenyum ke orang itu. Sepulangnya dari masjid ia menceritakannya kembali dengan nuansa humor dan kami (saat itu ada pertemuan alumni dan pelatihan menulis dan pengelolaan majalah Social Justice) tertawa-tawa dibuatnya. Bisa saja ia menceritakannya dengan nuansa kemarahan karena sikap menyumbang seperti yang

dilakukan orang tadi adalah akibat dari cara berpikirnya yang menganggap difabel sebagai objek amal bagi orang lain menuju surga. Tapi dia tidak melakukan protes saat itu di tengah keramaian orang hendak beribadah. Menurutku, ia punya peluang lain untuk menggoyang atau mendekonstruksi cara berpikir itu. Boleh jadi juga ia menganggap pemberian itu sebagai bonus atau bahkan ia teruskan kepada yang lebih berhak.

Demikian, Mari dukung Cak Fu menjadi anggota Komisoner Komnas HAM RI 2017 – 2022!

Salam, Ishak Salim (Ketua PerDIK)

https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/5/6/323/pengumuman-seleksi-tahap-ii-calon-anggota-komnas-ham-2017-2022.html

salah satu tulisan Cak Fu yang pernah dimuat Harian Kompas saat pembahasan RUU Penyandang Disabilitas.

http://doa-bagirajatega.blogspot.co.id/2015/09/legalisasi-stigma-bahrul-fuad.html

salah satu tulisan dari wartawan senior Harian Kompas, Maria Hartiningsih

http://sutarko.blogspot.co.id/2013/04/cak-fu-menerjang-keterbatasan.html

TOKOH

[5]

SETELAH EMPAT BELAS TAHUN MELAWAN PRAKTIK POLITIK PENCACATAN

May 24, 2017

Ishak Salim

SIGAB, YANG MEMILIKI KEPANJANGAN Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel baru saja memperingati hari berdirinya. Kini usianya memasuki angka ke-14. Usia yang masih muda sebagai sebuah organisasi pergerakan. Kata 'Sasana' menarik perhatian saya. Entah mengapa kata ini mereka pakai. Saya belum menanyakan kepada para pendirinya. Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Sasana memiliki dua arti. Pertama, sasana adalah 'pelajaran', 'petunjuk' atau 'nasihat'. Kedua, sasana merupakan 'tempat berlatih' atau 'gelanggang'.

Nah, dalam lebih satu dekade ini, bagaimana para penggiat Sigab menggerakkan organisasi ini jika merujuk kepada makna 'sasana' tadi. Pelajaran-pelajaran apa saja yang sudah mereka hasilkan dan sejauh mana pelajaran ini dapat memenuhi mandat organisasi mereka, yakni menghapus praktik diskriminasi difabel dan mewujudkan Indonesia Inklusi. Lalu, jika sasana adalah gelanggang, maka 'pelatihan' apa saja yang sudah diberikan oleh para pengorganisir difabel di Sigab dan siapa saja yang berlatih dan menjadi pelatih selama di sana serta metode pelatihan seperti apa yang dikembangkan di Sigab?

10 Tahun sebelum Sigab berdiri

Setya Adi Purwanta, seorang aktivis difabel netra asal Yogyakarta melangkah memasuki kantor OXFAM Jakarta pada tahun 1993. Ia baru saja tiba dari Kuala Lumpur mengikuti seminar tentang Teknologi Komputer bagi Tunanetra. Lembaganya yang bernama Dria Manunggal di Yogyakarta (berdiri 1991) menjadi tempat difabel netra belajar mengoperasikan komputer. Ia memperoleh beberapa pengetahuan baru soal aksesibilitas bagi difabel netra sebagai pengguna komputer. Direktur Oxfam-Inggris saat itu adalah Dr. Mansour Fakih. Mereka berbincang panjang lebar, khususnya soal kondisi 'penyandang cacat' (istilah saat itu) di Yogyakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya. Setelah pertemuan perdana itu, mereka memiliki banyak

pertemuan-pertemuan lanjutan, khususnya ketika kantor Oxfam pindah ke Yogyakarta dan Mansour mendirikan INSIST pada 1996.

Persahabatan Mansour dan Setya Adi saat itu semakin erat. Saat itu, pemerintah sedang menyiapkan regulasi baru terkait pemenuhan hak-hak penyandang cacat. Mereka pun bekerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jogja untuk menyiapkan pokok-pokok pikiran dan tentu saja RUU terkait penyandang cacat. Mereka lalu melakukan *road show* ke beberapa kampus di Yogyakarta. Saat itu, konsep alternative dalam memahami realitas kecacatan sudah diperkenalkan oleh Mansour. Ia memperkenalkan istilah baru yang disebut Difabel, pengganti istilah penyandang cacat. Pendeknya, baik Mansour maupun Setya Adi Purwanta menentang konsep kecacatan yang berangkat dari konsepsi 'kenormalan' manusia berbasis kesempurnaan tubuh dan mental seseorang. Dengan konsepsi itu, terbangun aliansi sejumlah ornop yang bersepakat menyusun naskah akademik dan draft regulasi tandingan, RUU Difabel.

Orang-orang pro dan kontra atas konsep baru itu. Orang-orang kampus, khususnya dari Fakultas Hukum mencibir istilah

itu sebagai istilah yang tak layak menjadi istilah hukum. Pemerintahpun demikian, tak bisa menerima konsep baru yang diajukan itu. Selain istilah itu asing bagi telinga Indonesia, khususnya orang Jawa, gagasan di dalamnya dapat mengubah sejumlah pendekatan yang melekat di kepala birokrat dan akademisi terkait memperlakukan penyandang cacat: seperti pendekatan karitatif dengan menganggap penyandang kecacatan sebagai penderita dan orang tidak mampu. Singkatnya, konsepsi baru itu ditolak mentah-mentah dan Presiden Soeharto saat itu menandatangani UU Penyandang cacat pada tahun 1997 setelah mayoritas anggota parlemen menyetujuinya.

Apakah ‘kekalahan’ di arena legislatif lantas membuat konsepsi tanding ini dibuang? Tidak! Cara pandang atau sejumlah perspektif di balik istilah ‘difabel’ jauh lebih menarik

dari pada nama baru itu. Banyak aktivis muda mengadopsi gagasan tersebut ke dalam organisasi mereka, apakah dalam pemberian nama organisasi dengan memasukkan kata 'difabel' atau memasukkan kerangka berpikir anti-kenormalan itu ke dalam visi dan misi organisasi.

Beruntung Mansour menulis dua artikel yang cukup penting bagi pembaca yang ingin mengetahui apa itu difabel dan gagasan apa yang ditawarkan untuk melawan praktik diskriminasi, subordinasi, pelabelan negatif dan stereotipikal, dan pemiskinan difabel. Kedua artikel itu adalah 'Akses ruang yang adil: Meletakkan Dasar Keadilan Sosial Bagi Kaum Difabel' (1999) dan 'Panggil saja kami kaum difabel' (2002). Lalu, salah satu organisasi yang mengadopsi nama dan gagasan yang terkandung di dalamnya adalah Sigab. Pada 5 Mei 2003, kurang lebih setahun sebelum Mansour Fakih meninggal di Yogyakarta pada Februari 2004 organisasi ini berdiri.

Anak-anak muda ini berduka. Mereka pernah mendiskusikan gagasan pendirian ini kepada Mansour Fakih dan memintanya untuk membantu mereka dalam memperjuangkan kepentingan difabel. Mansour berjanji akan menemani mereka jika Sigab berdiri. Tapi hal itu tidak kesampaian. 100 hari sejak kepergian Mansour, anak-anak muda ini mengajak sejumlah organisasi lain menggagas diskusi mengenang pemikiran Mansour dan hasil diskusi itu disusun sedemikian rupa dan terbit sebagai buku berjudul "Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan.

POKOK-POKOK PIKIRAN
Dr. Mansour Fakih
Refleksi Kawan Seperjuangan

Penggagas berdirinya Sigab adalah Haris Munandar, Suharto (Difabel netra), Ananto Sulistyo, Wahyu Triwibowo (Tuli), Nur Widya dan M. Joni Yulianto (difabel netra, aktivis ITMI Yogyakarta (Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia). Saat itu, Joni baru saja lulus strata satu di Universitas Negeri Yogyakarta.

Sigab dan upaya memproduksi kader-kader aktivis difabel

Pada September 2013, Sigab mengundang puluhan aktivis difabel dari 4 daerah. Mereka berasal dari beragam organisasi, baik organisasi berbasis difabel maupun organisasi inklusif. Selama 5 atau 6 hari mereka bersama-sama belajar dan saling berbagi pengalaman terkait pengorganisasian difabel di daerahnya masing-masing.

Pertukaran pengetahuan tidak terhindarkan dari setiap partisipan dengan latar pengalaman dan pengetahuannya masing-masing. Para pemandu tak kalah serunya membagi ilmu baik dari bangku kampus maupun pergulatannya di tengah-tengah masyarakat. Mereka membedah konsep-konsep politik dan praktiknya, menguliti sejumlah teks-teks kebijakan terkait pemilu mulai dari konvensi internasional sampai peraturan KPU.

Usai pelatihan, mereka puas dan senang karena selain pengetahuan bertambah, relasi perkawanan sesama aktivis anti diskriminasi difabel juga bertambah. Tetapi usainya pelatihan bukanlah akhir dari pembelajaran ini. Mereka sudah menyusun sejumlah rencana tindak lanjut untuk mengawal keberlangsungan pemilu di daerahnya masing-masing. Rahman, Nurdayati dan dua kawannya akan kembali ke Makassar, sementara Luluk dan 3 rekannya kembali ke Situbondo. Kawan-kawannya yang lain kembali ke Kalimantan dan yang di Jogja menyebar ke kabupaten-kabupaten sekitar.

Di daerah, pergulatan yang sesungguhnya terjadi dengan sengit. Bekal pelatihan bernilai guna dalam membongkar sejumlah pemikiran dan kondisi lingkungan yang

menidakmampukan difabel selama ini. Mulai dari desain kantor yang tidak akses bagi difabel sampai isi kepala orang-orang yang bersemayam stigma kepada difabel. Sasaran mereka adalah para pelanggar hak difabel yang melakukan dan melanggengkan 'pencacatan' difabel sampai kepada para difabel sendiri yang hingga saat itu [masih] belum menyadari hak-hak politiknya terlanggar di sepanjang usianya sebagai difabel.

Inilah momen pesta demokrasi di mana kontestasi pengetahuan difabel dan pengetahuan orang-orang yang mendiskreditkan difabel selama ini bertemu dan mendialogkan jalan keluar yang lebih adil. Mereka bisa saling menegasikan atau sebaliknya—bila mujur, bisa bekerjasama melakukan perubahan praktik-praktik politik yang menjunjung hak-hak difabel sebagai warga negara. Kontrak politik dengan calon anggota legislatif, pengawasan di hari pencoblosan, penyediaan alat bantu mencoblos di setiap TPS, kampanye publik dengan penterjemah bahasa isyarat bagi Tuli dan seterusnya merupakan proses kontestasi itu.

Serangkaian perlawanan yang dilakukan Sigab bukan lagi bertumpu kepada "kecacatan tubuh" sebagaimana diusung oleh para petarung sebelumnya yang berdiri sebagai organisasi penyandang cacat (DPOs). Saat itu sampai saat sekarang ini, Sigab sudah memiliki kerangka berpikir baru yang lebih segar dan lebih kontekstual dalam memahami fakta-fakta difabilitas dibandingkan yang pernah ditanamkan oleh Mansour. Dulu di awal berdirinya Sigab 2003-2004 pengaruh cara berpikir Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanta memegang peranan penting. Mansour meminjam cara pandang kritis-nya Gramsci soal 'hegemoni' dan kritik atas perspektif 'modernisme' yang telah meminggirkan peran difabel akibat watak ketidakadilan yang melekat pada [neo]liberalisme-kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang dipakai pemerintah. Tapi dalam satu dekade

terakhir, khususnya sepulang Joni dari belajar kajian difabilitas di Leeds University, Inggris pada 2007, Joni dkk sudah memperkuat perspektif gerakan perlawanan ini dengan perspektif difabilitas atau yang dikenal sebagai *the social model of disability* yang lebih mengena dalam membaca realitas difabel.

Kerangka pemikiran inilah yang kemudian membentuk karakter para petarung Sigab yang datang belakangan berlatih di Sasana pergerakan difabel ini. Dengan kerangka berpikir tersebut, kejernihan dalam membaca permasalahan difabel di setiap level dan sektor penghidupan menuntun pada ketepatan jalan keluar yang dirumuskan. Praktisnya, setelah akar-akar penyebab diskriminasi difabel terbaca, maka saat itulah didesain cara-cara bertarung seperti apa yang dibutuhkan, alat-alat apa yang digunakan, strategi macam apa yang diterapkan, kapan dan sampai kapan harus melawan, apakah membutuhkan kerjasama, berapa dana harus dibutuhkan dan seterusnya dan seterusnya yang bertujuan meraih kemenangan dengan menghilangkan semua akar-akar terjadinya diskriminasi difabel. Siapapun petarung itu, maka di dalam pikiran maupun hatinya harus tetap bersemayam spirit menuju kebaikan bersama, yang hingga saat ini mereka/kami definisikan sebagai tatanan inklusi.

Lalu, apakah berhenti sampai disitu?

Belum. Para kader tadi masih harus berkumpul kembali dan mendiskusikan pembelajaran-pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman perlawanan tadi. Evaluasi atau refleksi atas pergerakan harus dilakukan dan hasilnya bisa menjadai bahan baku untuk pembelajaran kepada pihak lain dan

tentu saja bahan baku menyusun langkah-langkah perlawanan selanjutnya.

Mengapa perlawanan masih harus dilanjutkan? Karena lingkungan sosial yang menidakmampukan difabel tak akan
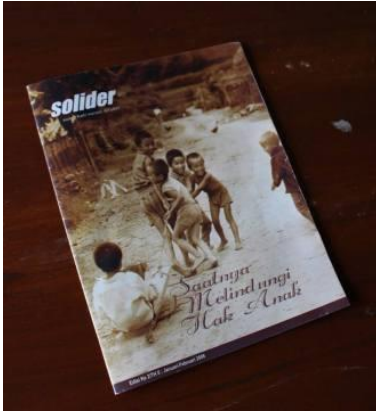
sirna begitu saja. Watak pencacatan ini sudah menyatu dalam tubuh banyak orang dan mengalami pelembagaan serta menjadi rezim kebenaran (*the regime of truth*) yang tak mudah ditaklukkan. Perlawanan sehari-hari tak boleh dihentikan dan gelanggang harus tetap terbuka untuk memberi ruang bagi pelatih maupun petarung untuk meningkatkan kemampuan.
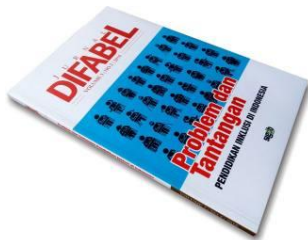
Dalam sebuah gerakan sosial yang senantiasa berlangsung akibat relasi kekuasaan yang terus-menerus berkontestasi, maka siapapun tidak punya pilihan lain untuk berhenti melawan karena berhenti melawan berarti memilih menjadi kawan bagi orang-orang yang tak sadar dan terus mereproduksi lingkungan yang merentankan dan meminggirkan difabel. Untuk itulah mengapa pengetahuan perlawanan harus selalu meningkat, itu karena pengetahuan penindasan juga berkembang dan mengalami pelembagaan dengan caranya sendiri.

Sigab sudah melayani para petarung selama 14 tahun. Itu bukan waktu yang pendek bagi siapapun yang hingga kini masih bertahan menjaga Sasana, walaupun di sisi lain belum cukup lama untuk sebuah perlawanan yang baru memetik kemenangan-kemenangan kecil yang berharga. Sigab sudah melakukan banyak pelatihan dan ratusan kader sudah lahir dan berada di daerahnya mengambil arena pertarungannya masing-masing. Dari beragam kader itu, ada yang menjadi aktivis politik, menjadi paralegal, jurnalis, intelektual kampus, atlet berprestasi, peneliti, penulis, kader-kader desa, aktivis ornop baik lokal, nasional bahkan internasional dan lain-lain. Dengan kader-kader yang terus bertumbuh dan berdaya seperti itu, bisa dibayangkan berapa banyak perubahan mereka bisa capai hingga saat ini.

Sasaran perlawanan Sigab

Dalam menelusuri perjalanan Sigab lebih dari satu dekade ini, setidaknya ada 4 sasaran besar yang menjadi target

perlawanan Sigab untuk di atasi, yakni [1] kuasa dominasi pengetahuan medik, [2] praktik pelabelan kecacatan, [3] infrastruktur penidakmampuan, dan [4] beragam praktik eksklusi sosial.

Kita bisa mengurai dari setiap sasaran itu soal apa saja yang harus dilakukan untuk mereduksi atau bahkan menghilangkannya dari kehidupan keseharian kita, baik pada skala makro (pengetahuan dan kebijakan) maupun mikro (diri difabel dan keluarganya). Pada sasaran pertama, Sigab telah mempersiapkan kerangka analisis dalam memahami difabilitas sebagaimana dipaparkan di atas. Untuk memahami misalnya apa itu pendekatan model sosial difabilitas (*social model of disability*) dan sejumlah pendekatan lainnya semisal *human rights*, Sigab menjalankan program diskusi rutin membahas kajian-kajian difabilitas, menulis artikel ilmiah maupun popular, meneliti soal difabilitas secara bersama-sama dengan aktor lain dan Sigab memberi dukungan kepada siapa saja untuk belajar dan meneliti.

Pada sasaran kedua yakni 'Melawan Praktik Pelabelan Kecacatan', Sigab membongkar kekeliruan pemahaman-pemahaman yang berkontribusi pada praktik merentankan difabel. Adapun hal-hal yang sudah dan masih sedang dilakukan adalah diskusi dengan sesama aktivis difabel namun dengan tema-tema umum dari berbagai organisasi, melakukan konsultasi atau tukar pendapat/pengalaman spesifik, pelatihan berjenjang bagi aktivis difabel, *Talkshow* di sejumlah media massa bahkan memproduksi sendiri informasi dan beritanya melalui **www.solider.or.id**, melakukan pengorganisasian difabel, dan diskusi setara (*peer-discussions*) antar difabel, khususnya difabel baru agar bisa menerima identitas barunya sebagai difabel yang bermartabat.

Sasaran ketiga yaitu 'Melawan infrastruktur penidakmampuan', Sigab mendorong upaya desain atau redesain sarana-sarana fisik untuk publik yang tidak akses dan menidakmampuan difabel. Sigab menggelar diskusi dan dialog dengan aparat pelayanan publik terkait aneka model desain universal bagi difabel. Sigab juga tidak segan-segan memeriksa langsung bagaimana bentuk atau model fasilitas layanan publik. Jika fasilitas tersebut tidak akses, maka Sigab menawarkan desain alternatif melalui kerjasama dengan lembagai desainer terkait. Sudah banyak contoh dari pencapaian ini, mulai dari kampus, kantor daerah dan desa, puskesmas, sampai masjid.

Terakhir, sasaran perlawanan Sigab adalah 'Melawan praktik eksklusi sosial'. Sigab mendampingi difabel secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut keadilan, advokasi pendidikan, kesehatan, transportasi publik dan tentu

saja advokasi difabel berhadapan hukum menjadi aktivitas rutin kader-kader Sigab.

Dengan begitu luasnya arena perlawanan tersebut melalui gambaran 4 sasaran perlawanan di atas, maka 'ruang berlatih' sudah seharusnya selalu terbuka bagi siapapun untuk terus menerus datang dan belajar. Untuk itulah, Sigab yang hingga saat ini masih setia memproduksi pemikiran, petarung, dan beragam resep jalan keluar yang bisa dipakai oleh pemerintah pusat, daerah maupun sektor swasta, masih harus terus membuka pintu Sasana selebar-lebarnya.

Nah, apakah Anda bersedia menjadi petarung yang melawan politik pencacatan mengikuti jejak-jejak para petarung kemanusiaan?

Datanglah Ke Sigab!

Sendangtirto, Hari Kebangkitan Nasional 2017

isangkilang@gmail.com

STIGMA

PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA UNTUK KESETARAAN

BAGIAN 4

STIGMA

[1]

DIFABEL, KAUM ABLEIST DAN PERUNDUNGAN DALAM KAMPUS

July 16, 2017

Ishak Salim

KALAU MENDENGAR KATA RUNDUNG ATAU PERUNDUNGAN, barangkali belum banyak orang memahami artinya. Tapi kalau disebutkan kata *bullying,* maka sudah dipastikan banyak orang bisa memahami maknanya. Ya, *bullying* atau perundungan itu artinya perlakuan yang mengganggu, mengusik terus-menerus dan juga menyusahkan.

Pagi ini (16 Juli 2017) beredar video soal perundungan terhadap seorang mahasiswa autisme oleh sejumlah mahasiswa lainnya di Universitas Gunadarma, Depok. Dalam video yang diberi judul 'L[e]mparan Tong Sampah Maut' dan beredar luas di dunia maya itu tampak korban perundungan merasa kesal kepada dua mahasiswa yang mengganggu langkahnya dengan

cara menarik tas punggungnya. Sejumlah mahasiswa/i turut menyoraki kedua mahasiswa yang merisak difabel itu. Video ini kemudian mendapat respon dari berbagai pihak yang nyaris seluruhnya berisi kemarahan atau caci maki kepada mahasiswa yang melakukan perundungan.

Menurut Olweus (1997) dalam "*Bully/victim problems in school: Facts and intervention*" disebutkan *bullying* merupakan tindakan negatif yang mencakup [1] mengatakan hal yang tak menyenangkan ataupun memanggil seseorang dengan julukan yang buruk; [2] mengabaikan atau mengucilkan seseorang dari suatu kelompok karena sebuah tujuan; [3] memukul, menendang, menjegal atau menyakiti orang lain secara fisik; [4] mengatakan kebohongan atau rumor yang tidak benar mengenai seseorang atau membuat orang lain tidak menyukai seseorang dan hal-hal semacamnya.

Dalam konteks kajian ilmu politik, perilaku orang yang melakukan perundungan kepada korban menunjukkan adanya 'relasi kuasa' antara orang yang merasa diri dominan kepada diri yang merasa inferior atau merasa tak berdaya. Praktik kekuasaan tidak selalu terjadi atas dasar relasi berdasarkan aspek legal-formal semisal tinggi rendahnya jabatan dalam suatu organisasi atau besar kecilnya kepemilikan modal dalam perusahaan. Relasi kuasa juga bisa berbasis relasi pengetahuan di mana pengetahuan yang satu tampil lebih dominan dan menegasikan pengetahuan yang lain yang berbeda. Kasus perundungan difabel di Universitas Gunadarma dapat disebut sebagai praktik *disability abuse* yang bersandar pada relasi kuasa/pengetahuan.

kesalahan cara pandang kenormalan dan kaum *ableist*

Berdasarkan aturan pendidikan maupun perguruan tinggi—baik mencakup hak dan kewajiban mahasiswa serta larangan maupun sanksi bagi mahasiswa, posisi mahasiswa adalah setara satu sama lain. Namun, di balik posisi sebagai mahasiswa, ada sistem lain yang bekerja yang secara sosial [telah] menempatkan orang pada posisi tertentu. Misalnya pembedaan 'normal' dan 'tidak normal'nya seseorang berdasarkan kategori kesempurnaan jasmani dan rohaninya. Dalam hal ini, 'mahasiswa autisme' dianggap sebagai mahasiswa yang "abnormal" dan karena itu berbeda dari kebanyakan mahasiswa lainnya yang menganggap diri sebagai "normal". Begitu pula bagi mahasiswa difabel lainnya juga dianggap sebagai "abnormal" karena perbedaan struktur dan fungsi tubuh maupun mentalnya. "Keabnormalan" ini bisa juga dilihat dari bentuk pelabelan siswa/mahasiswa difabel seperti adanya label sebagai 'mahasiswa luar biasa', 'mahasiswa berkebutuhan khusus', atau label yang paling kasar disebut 'mahasiswa cacat'. Merasa diri 'normal' adalah satu bentuk superioritas yang berimplikasi kepada sikap merendahkan mereka yang dikategorikan sebagai 'abnormal'. Dalam relasi superioritas – inferioritas inilah praktik perundungan terjadi.

Dalam kajian disabilitas, corak berpikir seperti ini disebut oleh Fiona Kumari Campbell dalam 'Contours of Ableism: The Production of Disability and Abledness (2009) sebagai cara berpikir ableism. Ableism adalah cara pandang yang bersandar kepada kemampuan seseorang berdasarkan kesempurnaan bentuk maupun fungsi tubuhnya. Cara pandang ini, kemudian memengaruhi watak kebijakan dan program-program sosial pemerintah yang hanya menguntungkan para non-difabel dan sebaliknya merugikan difabel.

Dengan model 'desain sosial'—semisal sekolah atau kampus, masjid, pasar, kantor, bus, kereta, dll—yang [lebih]

memudahkan semua orang "normal" tadi, telah membuat posisi mereka lebih dominan (dan lebih percaya diri) dibandingkan dengan difabel yang mengalami hambatan demi hambatan dalam bergerak maupun beraktivitas. Hambatan-hambatan yang tak pernah diselesaikan oleh para pemnagku kepentingan terkait ini—karena dianggap sebagai kenormalan—dapat menimbulkan rasa frustrasi bagi difabel yang membawa pada sikap 'rendah diri' pasrah, dan *nrimo.*

Bagai kaum *ableist,* semua orang bertindak atau bergerak dengan kedua kakinya, meraih dengan kedua lengan dan jemarinya, melihat dengan kedua bola matanya, mendengar dengan kedua gendang telinganya dan bercakap-cakap dengan mulutnya. Hasilnya, mereka mendesain kampus berikut sistem pembelajarannya yang berkesesuaian dengan kondisi fisik dan kemampuan mereka, seperti tangga [tanpa rampa], lantai [tanpa *guiding block*], perpustakaan penuh buku [tanpa buku braille dan 'buku bicara'], dosen mengajar [tanpa penerjemah bahasa isyarat], ruang kelas [tanpa pintu lebar bagi kursi roda], dan bangunan kampus [tanpa *reasonable accommodation*], serta layanan kebutuhan mahasiswa [tanpa layanan disabilitas beretika disabilitas].

Dengan desain sosial yang tidak akses bagi difabel telah menyebabkan difabel selalu kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (*disabling condition*). Di satu sisi, kaum *ableist* ini gagal membaca kesulitan-demi-kesulitan difabel tersebut sebagai kegagalan cara pandang, desain maupun model sosial yang telah eksis sekian lama. Sebaliknya, mereka menganggap kesulitan difabel ini dikarenakan akibat 'kondisi tubuhnya' yang dianggap "cacat', "tidak normal" dan karena itu mereka pun berpikir mengasihani atau—dalam kondisi kebodohan paling ekstrim—justru melakukan perundungan kepada difabel, baik perundungan verbal, fisik, maupun sosial.

Cara berpikir yang menganggap difabel ‘penderita’, ‘sakit’, ‘cacat’, ‘tuna’ dan ‘abnormal’ merupakan buah dari dominasi cara berpikir medik dalam masyarakat. Saat ini, perspektif medik atau individual begitu mendominasi diskursus sosial kita. Misalnya, orang berkursi roda dianggapnya sebagai orang sakit, orang buta yang menggunakan tongkat saat berjalan dianggap sebagai tidak sehat jasmani, orang Tuli yang pandai berbahasa isyarat dianggapnya orang cacat, dan seterusnya. Kebanyakan orang termasuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah menerima “warisan” cara berpikir ‘individual-medik’ dan abai pada aspek sosial inilah yang kemudian mengalami kegagalan ketika berhadapan dengan difabel atau mahasiswa difabel.

Dengan demikian, dalam konteks *bullying* di Kampus Universitas Gunadarma, terjadinya perundungan itu jelas tidak bisa dilihat hanya dari aspek para mahasiswa perundung yang melakukan ‘*disability abuse*’ saja, melainkan hal ini juga terkait langsung dengan beragam ketentuan atau kebijakan internal universitas dan segala bentuk implementasi program kerja rektorat yang memungkinkan tindakan peundungan berlangsung—bahkan berkali-kali.

Jika praktik perundungan yang merendahkan sisi kemanusiaan kita ini telah berlangsung lama maka sudah seharusnya pihak rektorat bertindak menghukum pelaku dan mengupayakan perbaikan internal agar hal tersebut tidak terjadi lagi—entah melalui kebijakan ataupun pengarusutamaan isu dan perspektif disabilitas dalam kampus. Dalam hal ini, kampus yang tidak memiliki kebijakan terkait *mainstreaming* isu-isu disabilitas di saat di kampusnya sendiri terdapat beragam difabel, maka jelas kampus itu telah melakukan suatu kekeliruan atau keteledoran luar biasa. Mengapa? Karena isu disabilitas, bukan saja sudah lama diatur dalam sistem hukum kita baik pascaratifikasi UNCRPD pada 2012 dan pengesahaan UU No.

8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, namun secara sosial juga sudah lama menjadi perbincangan publik yang layak diperhatikan dalam hubungan antar manusia.

Jika kampus tidak memperhatikan perkembangan regulasi disabilitas, pengakuan hak-hak disabilitas, dan dorongan kemanusiaan untuk saling menghormati sesama manusia bagaimanapun kondisi dirinya, maka kampus ini bisa disebut terlambat dalam merespon laju perubahan sosial. Artinya, kampus yang mengalami ketertinggalan itu bisa disebut sebagai kampus yang sedang mengalami stagnasi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya terkait isu penting seperti isu penghormatan berdasarkan disabilitas dan respek kepada difabel.

Oleh karena itu, salah satu tawaran untuk menghentikan budaya perundungan terhadap difabel di kampus, pihak rektorat wajib membuka Pusat Layanan dan Kajian Disabilitas/Difabel. Pusat Layanan dan Kajian ini tentu tidak sekadar melayani civitas akademika difabel dalam menghadapi kesulitan proses belajar mengajar tetapi juga menjadi ruang untuk bertanya dan belajar bagi siapapun terkait tema disabilitas.

Bagaimana memulainya, **pertama**, pihak rektorat atau akademikus membuka ruang partisipasi setara bagi difabel dalam penyusunan rencana pengembangan aksesibilitas kampus dan langkah-langkah implementasinya. Tanpa keterlibatan difabel, khususnya difabel yang telah memiliki kesadaran kritis dan terorganisir melalui sejumlah organisasi difabel maupun yang konsern pada isu difabel, maka dapat dipastikan kegagalan membangun kesetaraan seluruh akademikus dapat terjadi. **Kedua**, pihak rektorat membuka kerjasama dengan universitas lain yang sudah memiliki Pusat layanan dan Kajian Disabilitas dan berpengalaman dalam merencanakan maupun

melakukan perubahan-demi-perubahan menuju aksesibilitas penuh di kampus—baik aksesibilitas fisik, intelektual maupun sosial. **Ketiga**, di tingkat mahasiswa pun sudah harus memasukkan perspektif disabilitas dalam konsep-konsep pengkaderan di berbagai level serta dalam statuta organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra-kampus.

Dengan langkah-langkah tersebut, semoga di setiap kampus tidak lagi terjadi perundungan kepada difabel yang melukai rasa kemanusiaan kita sebagai sesama makhluk Tuhan[]

Penulis adalah **Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan**

STIGMA
[2]

DIFABEL DAN STIGMA KECACATAN

July 13, 2017

Ishak Salim

BANYAK DI ANTARA KITA yang pernah mendengar kata 'stigma'. Jika dikaitkan dengan isu disabilitas, maka kata stigma seringkali disematkan kepada difabel. Apa sebenarnya makna dari stigma? Untuk mengetahuinya, marilah kita membayangkan suatu kisah yang dihadapi oleh salah satu keluarga di suatu kampung, sebutlah di Sulawesi Selatan.

Di dalam sebuah keluarga kecil, seorang ibu baru memeriksakan mata anaknya di sebuah rumah sakit mata. Setelah pemeriksaan, dokter spesialis mata ini memberitahukan dengan sangat hati-hati kabar buruk mengenai mata anaknya. Sebuah virus berbahaya, *cytomegalovirus* (CMV) telah menyerang mata anak lelaki yang baru berusia 5 tahun ini. Kebutaan menjadi ancaman yang nyaris akan terjadi simpul dokter tadi.

Mendengar kabar menakutkan ini, membuat seluruh anggota keluarga merasakan kesedihan yang sangat. Anak mereka akan menjadi buta total. Sang ibu yang merasa bersalah karena terlambat memeriksakan anaknya ke dokter akibat kekurangan uang semakin bersedih. Ia membayangkan masa depan anaknya menjadi suram tanpa pekerjaan yang memadai untuk mewujudkan kesejahteraannya. Ia membayangkan anak lelakinya akan menjadi tukang pijat sebagaimana banyak orang buta berprofesi sebagai pemijat.

Kesedihan yang terekspresikan akibat kebutaan di atas dari cerita tersebut masih bisa dikatakan sesuatu yang wajar. Namun ketika kebutaan seseorang kemudian diasosiasikan dengan profesi sebagai tukang pijat, maka itu pertanda bahwa 'virus' stigma sedang bekerja dalam pikiran orang-orang, terutama kepada sang ibu.

Untuk sampai kepada kesimpulan adanya korelasi antara kebutaan seseorang dengan jenis pekerjaannya, misalnya anak buta dengan masa depan menjadi tukang pijat, terdapat proses interaksi sosial yang panjang. Dengan label sebagai 'anak buta', anak ini selanjutnya dapat mengalami tindakan *stereotyping* di mana orang-orang sekelilingnya akan membangun prasangka ia anak tidak mampu—misalnya karena ia tidak mampu membaca sebagaimana anak-anak pada umumnya. Dalam konteks di atas, kita lalu mengenal apa yang disebut sebagai labelisasi dan stereotifikasi. Buta, tuli, bisu, cacat, sakit, pengkor dll adalah label-label yang disematkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendefinisikan siapa diri orang itu.

Labelisasi di satu sisi adalah sebentuk praktik kekuasaan dari sebuah relasi kuasa yang sedang berkontestasi dalam masyarakat. Ada orang yang gemar melabeli sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami tentangnya. Orang-orang ini bisa saja adalah peneliti, dokter atau professor. Bisa juga ia merupakan pejabat pemerintahan yang punya kuasa

menyematkan label kepada pihak tertentu dan menentukan watak kebijakan publiknya. Selain disematkan, label bisa pula lahir dari diri sendiri untuk menjelaskan siapa diri kita sebenarnya. Kata 'difabel' atau frase 'penyandang disabilitas' misalnya adalah dua kata yang merupakan label yang diproduksi oleh orang-orang dengan beragam profesi di atas.

Label seringkali bersinggungan dengan prasangka (stereotip). Misalnya orang buta dan pekerjaan sebagai pemijat, pengguna kursi roda atau kruk dan profesi penjahit, kusta dan pengemis, penyandang cacat sebagai orang sakit, dll.

Di masyarakat kita, ada banyak ungkapan stereotipikal bagi orang-orang tertentu. Stereotipifikasi (*stereotypification*) adalah proses panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai aspek dalam diri manusia. Apakah itu pemikiran, pengalaman, maupun keyakinan kepada ajaran tertentu. Terkadang, orang-orang tertentu hanya memercayai apa yang sudah menjadi praduga kebanyakan orang, semisal bahwa jika bertemu dengan orang buta dalam perjalanan, maka orang itu bisa menuai sial. Orang-orang membangun prasangka dengan mengaitkannya dengan kebutaan.

Dalam konteks lain, anak buta juga dapat mengalami pemisahan (*the othering, separating*) berdasarkan kondisi kebutaannya. Dalam hal ketersediaan layanan sosial dari pemerintah bagi masyarakat luas, di mana untuk pelayanan pendidikan, negara memisahkan antara siswa difabel dengan non-difabel—melalui pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB). Akibatnya, 'anak yang buta' tadi tidak lagi bisa bermain dan belajar dengan teman-teman masa kecilnya sebagaimana di saat mereka belum bersekolah—beberapa kawan buta saya bercerita bahwa masa kecil dengan kebutaan tak membatasi mereka bermain dengan teman-teman kecilnya. Bisa dikatakan, proses

pemisahan (*separating*) secara kelembagaan mulai terjadi saat anak-anak memasuki usia sekolah. Anak-anak buta maupun anak-anak 'awas' mulai terbawa arus pemisahan yang diakibatkan oleh bekerjanya struktur sosial dalam 'sistem pendidikan segregatif' yang diterapkan oleh pemerintah atau lingkungan sosialnya.

Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Umum menjadikan anak-anak ini terpisah satu sama lain dan mereka mulai meyakini bahwa antara anak yang satu dengan anak yang lainnya memang memiliki perbedaan. Adanya perbedaan perlakuan oleh pihak sekolah terhadap anak-anak didik antara sekolah satu dengan sekolah lainnya turut membentuk karakter kedua kelompok ini. Dalam kebanyakan kasus, kualitas pendidikan 'sekolah luar biasa' tidak berkembang maju sepesat perkembangan sekolah umum/regular. Ukurannya bisa merentang mulai dari kualitas guru atau tenaga-tenaga pendidik kedua sekolah, sistem pembelajaran yang diterapkan, sampai kepada desain-desain infrastruktur sekolah terkait aksesibilitas dan ketersediaan akomodasi yang layak—di mana kualitas anak didik di Sekolah Luar Biasa pada umumnya di bawah standar 'pendidikan yang baik'. Akibatnya, anak didik keluaran SLB di semua tingkatan akan kesulitan mengikuti ujian nasional untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sudah banyak keluhan muncul terkait ketidakmampuan anak didik SMA-LB saat mengikuti Ujian Nasional untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Buktinya, pada ujian SBMPTN 2017, hanya 226 pendaftar, 38 lulus ujian dan tak ada satupun difabel dari SMA-LB yang lulus masuk di perguruan tinggi negeri. Ironis!

Hal sama ketika anak-anak difabel akan memasuki dunia kerja yang memiliki standar professional tertentu. Apa yang terjadi kemudian adalah difabel saat memasuki usia produktif akan terlempar ke sektor-sektor informal yang dalam kondisi tertentu—semisal tidak ada dukungan memadai dari pemerintah atau pihak lain—menempati posisi paling bawah sebagai angkatan kerja. Jadi, anak buta dengan masa depan menjadi tukang pijat sebenarnya bukan konsekuensi dari kebutaannya melainkan dari kualitas pendidikan yang ia terima dan perlakuan dari orang-orang yang mengembangkan sistem pendidikan segregatif tersebut.

Selain desain sistem pendidikan yang memisahkan orang-orang buta dan difabel lainnya juga berlaku desain-desain yang berpotensi bahkan telah memisahkan dan bahkan sudah taraf mendiskriminasikan difabel. Ada banyak ruang dan tempat publik yang tidak dapat didatangi dengan mudah oleh difabel akibat desain sosial dan perilaku yang menidakmampukan (*disabling*) dan membedakan (*discriminating*) difabel. Contohnya, sistem transportasi publik yang tidak akses membuat difabel kesulitan keluar rumah (berpindah tempat). Jikapun difabel tertentu [karena adanya dukungan keluarga] bisa sampai di tempat publik, dia tetap memiliki kesulitan beraktivitas akibat

ketiadaan standar aksesibilitas dalam tempat publik tersebut. Standar ini meliputi keleluasaan bergerak, ketersediaan informasi memadai, sampai kepada bentuk perlakuan yang menghargai identitas difabel—yang merujuk kepada nilai-nilai etika disabilitas. Beberapa contohnya meliputi ketersediaan *guiding block*, rampa, toilet akses, tempat parkir khusus, petunjuk maupun tanda-tanda tertentu, dan sebagainya. Tanpa ketersediaan seluruh elemen sebagaimana disebutkan di atas itulah yang kemudian menambah lapisan-lapisan diskriminasi bagi difabel yang kemudian berdampak pada menurunnya kualitas hidup mereka.

Jadi, keseluruhan proses di atas, meliputi pelabelan, stereotifikasi, pemisahan, dan diskriminasi adalah dimensi-dimensi yang membentuk stigma disabilitas yang membuat difabel berada dalam kerentanan hidup secara berkepanjangan. Hal ini merujuk kepada pandangan Goffman (1963) yang mendefinisikan stigma sebagai sebuah atribut yang secara terus-menerus merusak pencitraan diri seseorang, termasuk terkait dengan tindakan atau sifat-sifat apa saja [dari orang lain] yang mempunyai pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang yang membuatnya tidak mampu berperilaku sebagai mana seharusnya—sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dengan demikian, stigma [dalam realitas difabilitas] merupakan hasil dari proses sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat yang meliputi sejumlah tindakan berupa pelabelan (*labeling*), stereotip (*stereotyping*), memisahkan (*separating*), dan mendiskriminasi (*discriminating*) (Link Phelan dalam Scheid & Brown, 2010).

Dalam hal ini, jika anak buta tadi terus tumbuh dalam putaran produksi dan reproduksi stigma, maka ia [dan orang-orang di sekitarnya] lama kelamaan akan menerima stigma itu sebagai kebenaran. Mereka lalu larut dalam gerak pelanggengan

stigma yang sudah mengalami pelembagaan (*institutionalizing*) itu dan dirinya akhirnya benar-benar akan menjadi tukang pijat. Proses penerimaan stigma ini oleh Taylor dkk disebut sebagai *self esteem*. Self esteem adalah sikap tentang diri dan berhubungan dengan keyakinan pribadi tentang keterampilan, kemampuan, hubungan sosial dan masa depan (Taylor, Peplau & Seers, 2009).

Jadi, jika gerakan difabilitas di Indonesia hendak menghapus stigma bagi difabel, maka destigmatisasi seharusnya juga menyasar kerja-kerja menghapuskan label 'kecacatan' atau sebagai orang sakit dan menghentikan laju labelisasi yang bernuansa negative. Kemudian melenyapkan prasangka-prasangka ketidakmampuan difabel atau kemiskinan difabel. Lalu melawan metode pemisahan anak didik dalam pendidikan maupun sektor-sektor mendasar warga negara lainnya seperti Balai Latihan Kerja (Panti). Terakhir, perjuangan menghapuskan stigma ini akan berujung kepada peruntuhan benteng-benteng diskriminasi yang selama ini sudah terbangun mapan: diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi sebagai warga negara, dll.

Untuk melakukan destigmatisasi disabilitas, tak bisa hanya menunggu negara dan pihak-pihak lainnya yang suka melabeli dan melanggengkan label tersebut untuk bertindak. Difabel melalui mesin gerakan sosialnya harus mengorganisir difabel, mengembangkan sistem pendidikan kritis, dan mengubah kebijakan publik. Jadi, perjalanan masih panjang, terjal dan berliku menuju tatanan baru[].

STIGMA
[3]

UJIAN, LULUS, DAN BERJUANG LEBIH GIAT LAGI

June 27, 2017

SEBULAN PENUH ATAU selama bulan Ramadhan, kita ditempa dalam ujian puasa: Menahan lapar, menahan haus, menahan hasrat seksual dan tentu saja amarah. Di sisi lain, kita juga diminta olehNya agar terus meningkatkan derma, mulai dari berbuat amal yang paling rendah nilainya yakni menyumbang sejumlah uang sampai kepada mendedikasikan diri untuk memperjuangkan hak-hak kaum dhuafa dan mustad'afin yang tentu saja tak selesai hanya dengan kerja dua tiga jam saja. Untuk keberhasilan kalian, kami, jajaran PerDIK mengucapkan selamat atas keberhasilannya, sukses meraih poin tertingginya masing-masing.

Tentu, keberhasilan itu pula telah mengantar rekan-rekan ke posisi Muttaqin yang lebih tinggi kualitasnya dari sekadar Mukmin. Apa artinya? Itu artinya bahwa kualitas Anda untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial di sekeliling Anda atau pekerjaan-pekerjaan terkait diri pribadi dan keluarga Anda pun turut meningkat level kesulitan atau hambatannya. Anda atau kita semua, tentu harus bisa menerima tugas-tugas baru yang lebih menantang atau setidaknya capaian-capaian yang lebih jauh dan punya dampak meluas bagi membaiknya kondisi kemanusian.

Difabel, dengan berbagai stigma yang melekat di dalam dirinya tentu tetap akan berjuang untuk mengatasi sejumlah hal yang membangun stigma itu: [di]label[i] sebagai cacat, stereotif sebagai tidak mampu, segregasi atau pemisahan dari publik

akibat label dan stereotif tadi serta diskriminasi yang berlapis-lapis di berbagai sektor penghidupan difabel adalah pekerjaan berat untuk segera diatasi. Menghapus label kecacatan maupun menepis stereotif ketidakmampuan adalah pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dan pengorganisasian yang berlapis-lapis: mulai dari difabel, lingkaran keluarga, lingkaran komunitas, sampai lingkaran masyarakat, bangsa dan negara. Pun demikian, difabel sudah harus keluar dari keterkungkungan bilik atau ruang-ruang yang sengaja dibuat untuk melanggengkan pemisahan dari publik juga sudah harus terjadi. Masuklah ke sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi, masuklah ke perusahaan-perusahaan publik, pergilah ke pasar-pasar, dan isilah ruang-ruang politik yang selama ini tertutup bagi kita atau kalian karena berbagai bentuk penidakmampuan baik secara infrastruktur maupun cara berpikir 'keliru' yang menyebabkan terjadinya diskriminasi berkepanjangan.

Bangkitlah kita, Berjuanglah lebih giat lagi, bekerja kolektiflah sekali lagi dan lebih luas cakupannya, lawanlah stigma, bangunlah inklusivitas!

Kita bisa melakukan itu, kawan, bersama-sama!

Selamat Berjuang sekali lagi!

Salam hangat
Teman PerDIK

Makassar, 27 Juni 2017

BAGIAN 5

[1]

MIMPI-MIMPI AKSESIBILITAS DI MAKASSAR

February 27, 2017

Ishak Salim

SAYA PUNYA SEKIAN MIMPI yang ingin saya wujudkan. Tetapi mimpi-mimpi ini sepertinya cukup banyak. Saya tentu saja kesulitan untuk mewujudkan semuanya. Bahkan jika pun ada beberapa kerabat atau kawan-kawan baik bersedia membantu, pastilah hal itu tidak akan terwujudkan seluruhnya dalam beberapa tahun ke depan.

Apa mimpi-mimpi itu? Mimpi-mimpi ini semuanya terkait soal aksesibilitas difabel di Kota Makassar ini.

Rumah Akses

Mimpi yang pertama kusimpan di rumah kami dan aku ingin sekali kelak mewujudkannya. Ini soal desain rumah. Saya

bermimpi memiliki rumah yang 100 persen akses bagi kawan-kawan dengan beragam kemampuan. Saya punya banyak teman yang memiliki kemampuan berbeda satu sama lain. Beberapa kawan saya adalah buta dan tuli. Jika mereka ke rumah untuk bertamu atau berdiskusi, tentulah orang-orang di rumah saya harus tahu bagaimana berinteraksi dengannya. Anak-anak mesti bersikap sopan dan bersalaman dengan paman atau bibi mereka, kawan-kawanku itu. Kedua anakku tentu sudah tahu bagaimana jika harus bersalaman dengan Mas Joni misalnya. Anak pertamaku, Arrayyan berusia 10 tahun sudah tahu kalau ia harus menyentuh jemari paman Joni jika hendak menyalaminya.

Tetapi bagaimana kalau Hajjah Ramlah datang bersama kawan-kawan Gerkatin (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia SulSel) datang dan membawa sekotak donat ke rumah kami. Anak-anak tentu senang, tetapi anak-anakku, istriku bahkan diriku belum tahu bagaimana mengucapkan terima kasih dengan menggunakan bahasa isyarat, baik Bisindo maupun SIBI. Lalu bagaimana kami bisa mengobrol. Tentu saja bisa dengan cara lain. Biasanya Hajjah Ramlah selalu membawa penerjemah bahasa isyarat jika mengunjungi suatu tempat yang ia ketahui tidak ada yang paham bahasa isyarat.

Tetapi kunjungan bukan sekadar obrolan bukan? Kunjungan harus dimulai dengan salam dan mesti melewati pagar dan halaman rumah. Nah, saya bermimpi membuat halaman rumahku aksesisbel bagi Paman Joni atau paman Nasrafuddin dan istrinya yang sesekali menggunakan tongkat. Tentu lantaiku haruslah menggunakan guiding block. Tetapi biasanya hal itu hanya dibutuhkan untuk kunjungan pertama kalinya. Selebihnya setelah orientasi dan monitoring, ruang halamanku akan segera dihapal oleh kawan-kawan ini. Lalu bagaimana kalau Mbak Risnah dari Yogyakarta dan suaminya David datang ke rumah. Mbak Risna menggunakan kursi roda dan dalam kondisi

tertentu mengenakan kedua kruknya. Ia mengalami polio sejak usia 4 tahun dan sejak itu mengandalkan kursi roda sebagai kakinya.

Jadi, kalau begitu, selain memiliki guiding block bagi kawan-kawan yang menggunakan tongkatnya, saya perlu juga mendesain halaman rumah kami tanpa undakan yang menyulitkan mbak Risna. Halaman datar atau dengan rampa adalah syarat utama agar rumah kami akses sampai ke ruang tamu. Karena punya beberapa kawan dengan alat bantu mobilitas yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka seluruh ruang dan perangkatnya haruslah menyesuaikan dengan kawan-kawan dan tetamu yang akan bertandang. Lebar pintu adalah salah satu yang harus kuperhatikan. Bukan hanya pintu depan, tetapi juga seluruh pintu di dalam rumah, termasuk kamar mandi, ruang kerja dan ruang bermain anak-anak.

Lalu bagaimana pula dengan kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan meja makan? Apakah ada desain khusus yang memudahkan tamu-tamuku nanti? Ya, tentu saja! Misalnya Kamar mandi, kamar ini identik dengan lantai yang basah. Jika kawan-kawan yang menggunakan kursi roda, kruk atau kaki palsu masuk tentu akan mengganggu. Apalagi jika taka da pegangan di dinding-dinding kamar mandi, pasti akan jauh kesulitan lagi. Orang bisa dengan mudah terpelesat. Toilet di rumah pun harus segera saya ganti, tak boleh memakai toilet jongkok karena itu akan menyulitkan teman-teman untuk buang air. Bahkan menyulitkan nenek yang sudah renta dan melemah. Jadi sebaiknya kamar mandi dan toilet juga harus kuredesain nanti.

Sebaiknya aku harus segera membeli sebuah buku tentang desain rumah yang akses bagi kawan-kawan difabel. Lagi pula, tentu bukan hanya kawan-kawanku saja ada yang difabel, keluarga dekat maupun kerabat pastilah ada juga yang difabel,

bahkan salah satu dari kami di rumahpun berpotensi menjadi difabel, apakah karena renta, bencana, atau sebab lain entah apa. Mungkin Kalian juga begitu, memiliki kawan-kawan, tetangga, dan keluarga yang difabel. Tapi karena rumah kita tidak akses, maka mereka memilih tidak datang bertamu. Mereka tidak mau kesulitan atau menyulitkan kita. Kalau sudah begitu, tertutup sudah pintu silaturahmi.

Kalian mau punya rumah yang seperti itu? Sebaiknya mulailah memikirkan hal itu. Jika ada sedang mendesain rumah, beritaulah arsitek Anda untuk memasukkan aspek-aspek aksesibilitas itu. Saya percaya, biaya membangun rumah akses akan jauh lebih murah ketimbang meredesain yang sudah terlanjur berdiri dan tak akses di sana-sini.

Mimpi Kantor PERDIK akses dan Perpustakaan Disabilitas

PERDIK adalah organisasi pergerakan yang baru-baru saja kami dirikan. Kepanjangannya adalah Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Sebenarnya PERDIK masih berkantor di rumah yang tidak akses itu, di rumah kami, tepatnya rumah mama. Tapi sudah ada keinginan untuk meredisain rumah ini menjadi rumah kerja untuk isu difablitas.

Saya membayangkan seperti ini.

Ruang depan rumah kami akan menjadi etalase PERDIK. Ruang tamu akan disulap menjadi perpustakaan Akses bagi difabel sensorik maupun kinetik. Juga harus ada sudut khusus untuk anak-anak yang akses bagi anak difabel. Kebetulan ada cukup banyak buku yang cukup mengundang pembaca datang. Nanti saya akan membeli sebuah komputer yang sudah terpasang program pembaca layar (*screen reader*) yang bisa bisa

diaktifkan jika anda pembaca netra datang berkunjung dan ingin menikmati perpustakaan dijital kami.

Halaman depan kantor ini, akan menjadi ruang membaca bagi pengguna kursi roda atau kawan-kawan lain yang enggan untuk ke lantai dua. Ya, betul, saya berpikir untuk mengecor sebagian atap dan membuat ruang terbuka di atas untuk bekerja, berdiskusi dan membaca.

Mungkin akan butuh sekian belas juta untuk mengecornya. Kami tentu bisa menabung untuk itu. Saat ini, kawan-kawan PERDIK belum membudayakan diri untuk datang dan bekerja di salah satu ruang paviliun yang kami sulap jadi tempat kerja. Mungkin mereka memang belum terbiasa datang berkantor. Kebanyakan belum melihat pekerjaan pengorganisasian dan mengadvokasi isu-isu difabel ini mesti dikelola serius dan bukan asal kongkow-kongkow di café entah di mana.

Pagi sampai sore adalah waktu untuk bekerja. Jika malam tiba, silakan kalau mau ngopi di café. Tetapi janganlah sampai subuh atau pagi. Kalian toh harus berjuang lagi dan bertemu kawan-kawan di luar sana yang sudah ke jalan di awal pagi. Lihat saja kawan-kawan eks-pengidap kusta yang sudah sembuh. Mereka sudah berada di sejumlah titik di jalan utama Makassar. Siapa peduli dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Mengemis adalah pekerjaan yang bisa membuat mereka makan siang dan makan malam serta memberi anak-anak jajan setiap pagi. Apakah tak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat hidupnya lebih bermartabat? Pasti ada caranya. Tapi harus berjuang kawan-kawan!

Kelak, saya membayangkan, PERDIK akan berisi sejumlah aktivis difabel baik oleh mereka yang merasa diri sebagai penyandang disabilitas atau tanpa disabilitas dan kami melebur diri menjadi aktivis difabel. Di sana ada banyak kegiatan untuk

meningkatkan kapasitas diri aktivis. Belajar sejumlah hal penting dan teknis dalam mendukung gerakan ini. Aktivis difabel harus diproduksi terus menerus sampai tersedia banyak pasukan untuk bekerja dan memenangkan perjuangan ini.

Ya, memproduksi Aktivis Difabel. Dua puluh tahun lalu, kata 'difabel' memang merupakan kata atau konsep tanding melawan istilah penderita dan penyandang cacat. Cacat itu berarti rusak, masa manusia disamakan dengan barang. Tetapi kini difabel bukan lagi sekadar istilah tetapi ia sudah merupakan 'identitas gerakan' yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, khususnya mereka yang memiliki perbedaan kemampuan. Banyak sudah orang dan lembaga pakai kata ini. Tentu tak perlu alergi dengan istilah ini bukan. Paling penting dari sekadar kata ini adalah mari berjuang bersama-sama untuk kepentingan orang banyak dan orang tertindas.

Kalau nanti aktivis difabel yang tergabung dalam PERDIK ada Tuli, Pengguna kursi roda, kaki palsu, CP, Paraplegia, Sindroma Down, dan sebagainya pasti kantor ini akan ramai dan aksesibilitasnya harus terjamin. Pokoknya, kantor PERDIK harus menjamin seluruh pekerja nyaman bekerja dan merasa setara. Untuk itu segala bentuk akomodasi yang sesuai atau *reasonable accommodation* dengan aktivis ini harus disediakan oleh pengelola PERDIK. Apalagi kalau kelak PERDIK mulai membangun jaringan gerakan difabel Indonesia dengan cakupan organisasi yang lebih luas tentu kami harus segera pindah ke kantor lain yang lebih luas. Untuk itu, PERDIK harus memiliki unit usaha mandiri agar PERDIK mengelola keuangannya secara mandiri dan bisa kelak membeli tanah dan membangun kantornya sendiri. Banyak pilihan untuk berusaha, misalnya mendirikan Bengkel Disabilitas, Koperasi atau bisnis alat-alat bantu kesehatan dan sebagainya.

Tetapi harus diingat, semakin kuat PERDIK maka seharusnya semakin bertambah meluas cakupan aksesibilitas di kota Makassar dan sekitarnya.

Sekolah Akses

Kedua anakku sekolah di SD Unggulan Pemda Makassar, yaitu Arrayyan dan Mutiara. Sejak setahun terakhir aku mengantarnya ke sekolah, aku tidak pernah melihat anak anak difabel berkursi roda, menggunakan tongkat, dan berbahasa isyarat, kesulitan berkonsentrasi, sindroma down dan banyak tipe murid di sekolah ini. Mungkinkah anak-anak difabel ini memang tidak diperbolehkan bersekolah di sini? Mungkin saja.

Ada kepercayaan dan kebijakan yang mengharuskan anak difabel bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB. Menurutku inilah sebentuk praktik Eksklusi bagi anak-anak dalam pendidikan.

Mengapa pemerintah dan para guru harus memisahkan sekolah mereka? Mengapa mereka tidak membiarkan anak-anak bersekolah bersama dan membiasakan bermain dan belajar bersama-sama? Bukankah kita orang-orang dewasa saat ini gamang ketika bertemu orang buta, tuli, orang dengan berkursi roda, kawan-kawan Cerebral palsy dan paraplegia, atau orang dewasa tetapi dengan usia mental kanak-kanak? Ya, itu karena orang-orang tua kita, pemerintah kita, ulama kita dan guru-guru kita memang tidak membiarkan kita hidup bersama dalam keragaman kondisi kemampuan.

Butuh berapa pertanyaan yang harus saya ajukan agar Anda turut menyetujui pendapat saya bahwa sistem Sekolah Luar Biasa itu tidak sepantasnya ada di tanah Republik ini. Seharusnya setiap sekolah menerapkan sistem pendidikan

inklusi. Setiap pendidik menempatkan persoalan kepada [penyesuaian] sistem pendidikan dan tidak menimpakan kesalahan atau persoalan kepada anak-anak dan kondisi dirinya.

Cara atau corak berpikir pendidik yang memusatkan anak didik sebagai sumber persoalan gagalnya anak dalam belajar adalah pendidik yang kurang pengetahuan dan pengalaman. Kita seharusnya selalu menunjuk kesalahan kepada sistem pendidikan yang kita bangun ketika ada anak-anak didik yang selalu tinggal kelas—bahkan selama bertahun-tahun. Kita, para pendidik seharusnya menyalahkan isi kepala kita yang kekurangan nutrisi pengetahuan ketika anak-anak didik gagal pandai membaca secepat yang kita rencanakan. Bahkan pendidik kita seharusnya tidak pernah menolak orang-orang tua yang membawa anaknya ke sekolah regular apalagi unggulan hanya karena anak itu mengenakan kursi roda dan jemari dan kakinya kaku akibat Cerebral Palsy. Kita seharusnya menerima semua ragam anak didik itu dan mulai mencari cara bagaimana membuat sejumlah penyesuaian atau Reasonable Accommodation di sekolah disediakan sedikit demi sedikit.

Nah itu mimpi saya untuk beberapa atau bahkan semua sekolah di kota Makassar. Sekolah-sekolah yang menerima difabel baik sebagai anak didik maupun guru atau tenaga administratif lainnya. Lalu bagaimana saya bisa mewujudkan mimpi itu?

Bersama PERDIK, di mana ada beberapa kawan lulusan Jurusan Pendidikan Luar Biasa UNM kami yang bersemangat untuk bekerja bersama. Saya berpikir di setiap sekolah diupayakan berdiri satu unit khusus untuk membantu proses membawa sekolah menjadi lebih inklusi. Namanya adalah unit layanan disabilitas.

Unit ini berkoordinasi langsung dengan walikota melalui kepala dinas pendidikan, sejumlah perguruan tinggi, kepala sekolah dan guru-guru setempat untuk menyiapkan seluruh kebutuhan sekolah agar anak-anak difabel memperoleh hak belajar yang setara dengan anak didik yang lain. Berbagai jenis akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan anak didik, guru, maupun staf sekolah harus mulai diupayakan dan ditargetkan setidaknya secara fisik, intelektual, maupun pola pelayanan ada peningkatan kualitas 10 persen setiap tahunnya. Misalnya, tahun ini mulai menerima 2-3 anak didik difabel, mulai membangun rampa dan meredesain kelas, ruang guru, ruang olah raga, toilet dll. Jika perbaikan dan pemenuhan ini dilakukan, maka dalam 10 tahun sekolah ini sudah bisa inklusi keseluruhannya. Secara fisik, sekolah ini sudah akses, perpustakaan sudah akses, jumlah guru pendukung sudah memadai, kapasitas guru meningkat melalui sejumlah training, dan seterusnya.

Sebenarnya sulit meraih mimpi ini, tetapi bukankah memang tak ada mimpi yang dengan mudah bisa diwujudkan? Jalani saja. Bukankah ada pepatah menyebutkan "perjalanan yang bermil-mil jauhnya selalu dimulaui dengan satu *tarikan putaran kursi roda*?" Nah demikian pula mimpi ini.

Bengkel Difabel!

Ini sebenarnya mimpi seorang teman, namanya Eko Peruge. Dia ingin sekali mendirikan sebuah bengkel Kapal. Ya kapal, alias Kaki Palsu. Karena dia sudah cerita kepada saya, maka ini sudah jadi mimpi saya juga. Saya hanya berharap bahwa kita bisa bersama-sama mewujudkannya.

Kenapa dia mau bikin bengkel Kapal di kota Makassar, karena harga kapal yang diproduksi oleh kota ini harganya mencekik keluarga yang memiliki anak yang diamputasi kakinya.

Harganya bisa belasan juta dengan kualitas jauh di bawah standar Jawa yang lebih maju teknologinya. Eko beruntung karena sudah belajar di beberapa tempat untuk membuatnya. Dia pernah ke Solo belajar Photografi dan pembuatan kaki palsu dan terakhir dapat ilmu dari para ahli desain dan pembuat kapal professional dari Banyumas.

Tetapi saya juga bermimpi lebih dari sekadar bengkel kaki palsu. Saya memimpikan kami juga mendirikan bengkel kursi roda dan menjual sejumlah alat bantu aktifitas sehari-hari sampai alat bantu terkait upaya menjaga kesehatan difabel. Ya, kenapa tidak. Saya punya sahabat namanya Risnawati, Ia direktur Perhimpunan OHANA dan suaminya David dari Amerikan sangat jago membuat kursi roda. Suatu saat saya kan mengajaknya ke Makassar dan menyampaikan soal gagasan ini. Saya yakin, pasti dia mau mengajar aktivis PERDIK dan teman-teman lain di luar PERDIK dari berbagai lemabaga manapun untuk turut belajar. Jika berdiri, artinya difabel bisa bekerja guna menopang biaya hidup dan keluarganya.

Soal mendirikan bengkelnya pasti ada jalan. Masa orang Makassar tidak mau berdonasi untuk memenuhinya. Kalaupun orang-orang Makassar malas berdonasi ya, terpaksa melobi kakek Jusuf Kalla. Siapa tau dia tertarik. Kami siap kok mencetak di setiap kursi roda itu tulisan "Kursi Roda untuk Indonesia, terima kasih Pak JK!

Tapi kalaupun tidak mau, kembali ke prinsip hidupku, "Adaji itu nanti!"

LBH Disabilitas

Tak lama setelah PERDIK berdiri sudah ada dua kasus pemerkosaan terhadap anak-anak perempuan difabel. satu

terjadi di Pasar Terong, satu lagi terjadi di salah satu SLB di kab. Soppeng. Satu pelakunya adalah buruh bangunan di pasar, satu lagi adalah kepala sekolah SLB tersebut. Nah, Ironis sekali. Orang-orang dengan kerentanan karena kondisi tubuhnya ini menjadi korban kejahatan seksual lelaki jahat. Padahal, seharusnya anak-anak ini dilindungi dan diperlakukan secara bermartabat oleh siapapun, terutama oleh negara. Apalagi kerentanan mereka berlapis-lapis: difabel, perempuan, anak-anak, keluarga miskin, dan tinggal di tempat yang rawan. Kalau di Pasar katanya banyak preman sementara kalau di SLB adalah tempat yang jarang diakses oleh publik luas.

Saya tahu kedua kasus ini dari media massa, dan memang media suka memberitakan saat kejadian terjadi. Sayangnya, biasanya kabar bagaimana proses hukumnya berjalan ini yang suka tidak muncul di Koran. Tapi saya bisa memaklumi. Salah satu yang paling positif yang saya pikirkan adalah kerja paralegal yang mendampingi difabel berhadapan dengan hukum ini memang sebaiknya tidak diberitakan. Ada kekhawatiran kalau-kalau pelaku melarikan diri jika tahu kalau sedang diproses. Jadi bergerak dalam kesunyian memang dibutuhkan oleh paralegal. Apalagi kalau pelakunya dari keluarga terpandang.

Tetapi media memang kurang memberi informasi lebih lengkap di akhir proses ini. Ada baiknya, media melakukan kerja-kerja investigative dan membantu paralegal memproses tindakan jahat ini di jalur hukum.

Bayangan paling buruk adalah, kasus-kasus ini tidak dikelola dengan serius oleh para pelaku adokasi dari berbagai institusi bantuan hukum. Untuk itulah kalau memang ini soal kinerja yang buruk dari paralegal, maka saya pun mengimpikan suatu saat akan mendirikan LBH Disabilitas untuk khusus mengurusi isu-isu difabel berhadapan dengan hukum di SulSel. Tapi kalau sudah ada, berarti bagus, saya nanti tinggal bantu-bantu yang

bisa saya bantu. Kalau LBH Disabilitas mau dibantu. Kalau tidak, ya kayaknya lebih baik bikin sendiri juga! Lebih dari satu LBH tidak apa-apakan?

Media Solusi Inklusi.

Nah kalau mimpi ini awalnya hasil diskusi sama M. Aan Mansyur. Iya, si huruf kecil. Saat itu di kata kerja, saya datang dan meminjam beberapa buku terkait media. Dia tanya mau buat apa? Saya bilang kami akan ada diskusi soal media dan disabilitas bersama dengan kawan-kawan jurnalis AJI Kota Makassar. Dia lalu bilang kalau saat ini ada yang namanya *Solutions Journalism*. Apa itu?

Dia memperlihatkan website dan berselancar ke sejumlah laman. Saat itu saya belum paham benar karena waktu mengobrol kami singkat saja.

Saat saya sedang mengedit sebuah buku yang akan diterbitkan oleh SIGAB terkait Perilaku Media dan Isu Disabilitas, saya teringat dengan perbincangan dengan Aan. Saya pun mulai mencari tahu dan mengunjungi beberapa link berita yang dipublikasikan oleh para jurnalis Solusi Jurnalisme ini. Lalu muncullah mimpi itu. Seharusnya, dalam isu disabilitas, media seperti ini juga perlu ada.

Dalam buku SIGAB ini, banyak penulis difabel mengkritik media yang menampilkan difabel secara keliru. Salah satunya Jonna Damanik. Dia bilang dalam tulisannya kalau pola pemberitaan disabilitas yang ditampilkan kebanyakan media mainstream saat ini masih bersifat bombastik, penuh rasa kasihan, identik dengan sakit, visualisasi tidak tepat, serta berkaitan dengan keanehan dan keterbelakangan. Berbeda dengan cara media mainstream yang fokus kepada

permasalahan yang dihadapi difabel, baik berupa kemuraman hidup dan masa depan ataupun ketidakberdayaan, maka Jurnalisme Solusi ini fokus kepada upaya-upaya orang, kelompok, institusi atau siapapun terkait menyelesaikan sejumlah permasalah orang-orang.

Bagaimana mewujudkan mimpi ini? Gampang! Ajak wartawan-wartawan berkumpul, sampaikan gagasan ini, kalau bersepakat buat kesepakatan menjadi jurnalis solusi maka bangunlah komitmen bersama, lalu rekrut juga beberapa jurnalis difabel yang muda dan mau belajar, latih mereka dan bekerjalah sebagai jurnalis yang mengabarkan jalan-jalan keluar yang sudah berjalan.

Bayangkan kalau banyak jurnalis dari berbagai negeri di pelosok Indonesia mau bergabung, maka akan ada banyak cerita difabel terkait jalan keluar dari permasalahan difabel dari berbagai negeri. Orang-orang akan mengadopsinya dan membuat di tempatnya masing-masing.

Nah, saat ini saya sudah beli domain dan hosting untuk itu. Namanya masih saya rahasiakan dulu. Jadi *pi* baru kami launching di PERDIK.

Makassar Bebas Hambatan bagi Difabel

Di Jakarta, teman-teman seperti Mbak Cucu dan suaminya, Kang Faisal Rusdi (keduanya kini sedang studi di Australia) menjalankan sebuah program bernama Jakarta Barrier Free Tourism (JBFT). Acaranya sederhana. Setiap hari libur, hari Minggu, bersama belasan sampai puluhan partisipan pergi bertamasya di beberapa tempat wisata di Jakarta. Selain untuk membiasakan orang-orang Jakarta melihat dan berinteraksi

dengan difabel, rombongan JBFT ini juga menilai seberapa akses tempat-tempat publik itu bagi difabel.

Dari video beberapa kegiatan yang disiarkan teman JBFT di Youtube, tampak kegiatan itu dilakukan dengan riang gembira. Ya, seharusnya piknik memang identik keceriaan dan kegemberiaan. Walaupun keceriaan itu kadang sirna karena beberapa hambatan yang ditemui difabel akibat desain fisik area yang tidak sesuai dengan mereka. Misalnya jika jalan tidak akses, maka mereka menjadi harus bergantung kepada bantuan seseorang. Tetapi dalam konteks ini, gagalnya sebuah desain tempat publik dalam memenuhi hak pengguna jalan maupun gedung merupakan sebentuk 'kritik langsung' yang mengena telak ke dada para pemberi layanan publik, plus para desainer yang kurang kreatif dan kurang luas pengetahuannya soal manusia.

Aktivitas JBFT yang positif itu patut ditiru. Saya pun lalu bermimpi bisa buat hal sama bersama kawan-kawan PERDIK dan mitranya dengan cara berbeda. Misalnya, kampanye *mainstreaming* aksesibilitas di Pantai Losari. Mengapa Pantai Losari?

Setiap Minggu pagi di Pantai Losari berlaku ketentuan 'Car Free Day' atau jalan raya tanpa mesin dan deru kendaraan. Orang-orang baik sendiri, berkelompok maupun yang berkeluarga datang menikmati hari pagi dengan berjalan kaki dan berkursi roda tentu saja. Ada banyak hal yang bisa menghibur diri kita sebagai orang kota. Keramaian adalah salah satunya.

Saat ini trotoar di sepanjang pantai Losari bisa dibilang bagus dan akses bagi difabel netra. *Guiding block*nya tersedia. Eh, tapi tak semua orang rupanya tahu apa itu *guiding block* di trotoar. Kebanyakan mungkin hanya mengira ubin kuning bergaris itu

hanya hiasan lantai belaka. Tidak sosodara, itu adalah panduan rabaan tongkat atau tapak kaki difabel netra.

Ketidaktahuan sejumlah orang akan fungsi-fungsi aksesibilitas itu sebenarnya bisa dipahami. Salah satunya adalah kurangnya difabel netra yang menggunakannya dan memperlihatkan kepada orang-orang, baik sebagai pemilik toko, tukang parkir atau pedagang jalanan yang biasanya dengan sewenang-wenang menutup *guiding block* itu.

Nah, untuk kepentingan berkampanye isu disabilitas itu, mengapa tidak kami manfaatkan saja momen Car Free Day itu untuk memberikan pelajaran penting ke warga kota?

PERDIK bisa mengorganisir untuk melakukan kampanye itu. Dan kami percaya ada begitu banyak kelompok atau komunitas warga di kota ini yang bisa diajak bekerja bersama. Bukankah partisipan JBFT juga sesungguhnya berasal dari beragam organisasi dan bukan hanya diikuti oleh difabel saja. Lagi pula, ada juga lembaga bernama Accesseible Indonesia yang fokus kepada isu 'Tourism for All' dan lembaga ini bisa saja membantu atau bermitra untuk berkampanye.

Sebutlah misalnya pada minggu pertama, kita hanya mengusung isu soal Difabel Netra. Pertama kita bisa buat lokasi nongkrong di sana dan membawa sejumlah alat-alat pendidikan, alat-alat bantu difabel netra, serta beberapa contoh alat bantu kesehatan dan memperlihatkan ke pejalan kaki tentang semua hal terkait isu difabel netra ini. Lalu, bisa pula beberapa difabel netra mempraktikkan atau mencoba trotoar akses tadi serta menilai apakah sudah memenuhi standar aksesibilitas atau tidak. Jika benar-benar ada pengguna yang sewenang-wenang merampas sejumlah ubin kotak kuning sebagai *guiding block* itu menjadi area berjualan, papan reklame atau lainnya maka kita

bisa langsung memberinya teguran bahwa tidak semestinya mereka menutup jalan bagi difabel itu.

Jika kegiatan masih berlanjut, maka kunjungan minggu kedua dan seterusnya isu kampanye bisa diubah dengan peserta berbeda. Misalnya, temanya adalah Budaya Tuli. Baik sekali memperlihatkan bahwa Tuli bisa berkomunikasi satu sama lain. Persoalannya hanya pada kita yang tidak paham berbahasa isyarat itu. Sebenarnya teman-teman Gerkatin juga sudah punya acara seperti ini, tetapi semakin banyak titik kegiatan akan semakin baik.

Intinya, jika difabel keluar rumah dan bergabung dengan warga kota di pusat keramaian seperti Pantai Losari, maka orang-orang akan mulai belajar bagaimana berinteraksi dengan difabel dan menghargai hak-haknya. Hal sama berlaku bagi difabel yang larut ke dalam dunia publik, di mana mereka bisa membiasakan diri dengan keberagaman dan dunia luar.

Tertarik ikut? AYO Gabung!!!

Sejarah Difabel dan DifabelPedia

Informasi soal bagaimana difabel mengahadapi kehidupan sehari-harinya yang penuh dengan stigma, pengabaian, peminggiran bahkan pemiskinan atau hal-hal yang menyenangkan di setiap momen hidupnya merupakan hal yang sulit ditemukan. Ada banyak kisah, tetapi kisah-kisah itu tidak tertuliskan. Tetapi kita bisa mengumpulkan cerita itu sepanjang kita mau menanyai difabel satu persatu dan menuliskannya.

Tentu akan banyak cerita ditemukan di banyak tempat dari banyak informan. Untuk itu tentu butuh lebih banyak orang untuk menuliskannya. Saya bermimpi bisa mengumpulkan sejumlah difabel muda yang punya talenta untuk menulis

dengan baik. Saya punya banyak teman penulis, peneliti dan tentu saja jaringan organisasi di sejumlah daerah. Ada baiknya membuat pelatihan menulis, *live in* di rumah informan, dan larut dalam kehidupan sehari-harinya. Bukankah salah satu syarat tulisan yang baik adalah ketika kita benar-benar hidup bersama informan kita dan merasakan denyut kehidupannya?

Kalau banyak difabel dibiasakan membaca, diberikan bahan bacaan berkualitas lalu meneliti dan menulis, maka ke depan akan tersedia banyak stok penulis. Para penulis dfabel ini malah akan bisa menuliskan kehidupan mereka sendiri atau keluarga kecil mereka—*autoetnography*.

Jika tulisan ini sudah terkumpul, maka jadilah ia bahan buku terkait difabel.

Saya juga bermimpi untuk membuat sebuah buku yang menyediakan sebanyak-banyaknya informasi soal difabilitas, organisasinya, kerangka kerjanya dan program-programnya, kehidupannya, alat-alat penopang aktivitasnya, dan seterusnya dan sterusnya. Sebutlah buku itu dengan nama DifabelPedia. Mungkin awalnya tidak harus tebal, tetapi infromasi-informasi tambahan bisa terhimpun dari waktu ke waktu.

Lebih serius lagi, mimpi membuat DifabelPedia ini seharusnya tampil bukan hanya dalam buku tetapi juga di dalam website. Setiap laman pada website itu harus akses dan memungkinkan difabel Netra dan teman Tuli bisa mengaksesnya. Bahasanya mudah dicerna dan harus ada laman khusus informasi dengan bahasa isyarat. Pokoknya, DifabelPedia ini bisa jadi semacam arsip difabilitas bagi setiap orang yang mau tahu soal difabilitas sebagai pengantar.

Nah, dari sekian mimpi itu, yang mana ya yang bisa diwujudkan dulu. Hm.

GAGASAN
[2]

JANGAN PAKAI KATA DIFABEL JIKA ANDA DI MAKASSAR!

October 24, 2016

Ishak Salim

SEORANG AKTIVIS PENYANDANG DISABILITAS yang sudah sepuh dan saya hormati bertanya kepada saya soal mengapa judul proposal disertasi saya memakai kata difabel ketimbang 'penyandang disabilitas'. Judul itu adalah "Politik Pencacatan di Indonesia: Praktik Governmentality dalam Kebijakan dan Program Perlindungan Sosial difabel". Pertanyaan itu ia ajukan saat kami chating di fesbuk tadi malam.

Beliau mengatakan, "Kenapa masih pakai istilah difable padahal seluruh peraturan hukum di Indonesia termasuk UU No 8 tahun 2016 [tentang Penyandang Disabilitas]? Tidak ada istilah difabel itu. Istilah resmi yangt dipakai PBB dan juga di formalkan oleh hukum positif Indonesia adalah penyandang disabilitas," ujarnya datar.

Ia seorang buta. Saya agak ragu ia mengetik sendiri kalimat itu. Sejak dulu, ia memiliki orang-orang yang siap membantunya jika hendak meraup informasi dari berbagai media. Ia memiliki pembaca dan tentu saja juru tulis atau juru ketik jika ia punya gagasan untuk ditulisnya. Lagi pula, di saat teknologi informasi berkembang pesat, saya belum pernah melihatnya mengetik dengan menggunakan laptop dengan atau tanpa layar dan *headseat* yang menempel di telinganya. Untuk penulis buta, layar tak dibutuhkan. Fungsi lain yang akses untuk menopang penuangan gagasan itu sudah lama ada, yakni program *screen*

reader yang dapat membaca teks 'kata demi kata' yang terpampang di layar dan program 'Jaws' atau 'damayanti' yang mengubah hasil pembacaan teks itu menjadi suara.

Atau boleh jadi kini beliau sudah bisa menggunakan ragam teknologi akses terbaru itu. Mungkin hanya karena saya tidak tahu saja.

Kembali ke pertanyaannya, sebenarnya saya tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Bukan satu dua kali orang bertanya kepada saya soal istilah itu. Bahkan beberapa waktu lalu, saya berbincang panjang dengan seorang aktivis muda penyandang disabilitas di sebuah café di Kota Makassar. O iya, saya menggunakan kata 'penyandang disabilitas' untuk menghormatinya yang lebih suka menggunakan itu ketimbang kata 'difbel'. Dia adalah mantan Ketua Pertuni Sulawesi Selatan. Kami berdiskusi banyak hal, termasuk istilah difabel yang rasanya bagi orang Makassar, khususnya aktivis penyandang disabilitas di kota ini wajib menyinggungnya. Terkadang sampai pada taraf mematahkan argumentasi dibalik penggunaan istilah itu. Tetapi saya punya argumentasi dan data yang cukup memadai untuk menjawab sejumlah sanggahan.

Saya memahami mengapa sebagian aktivis atau pegiat isu disabilitas di Makassar lebih cocok memakai istilah penyandang disabilitas, ketimbang difabel. Lagi pula, bukankah sejak dulu, sebelum Pemerintah meratifikasi UN-CRPD (UN *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) banyak orang sudah memakai istilah Penyandang Cacat dan mengamini 'kecacatan' itu sebagai persoalan pada tubuhnya. Negara mengamini peristilahan berbasis medik ini dan pemerintah menuangkannya ke dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Istilah ini, sebagai bentuk pelabelan kemudian diterima sebagai cara untuk mengategorisasikan, mendiagnosis dan kemudian merumuskan

sejumlah resep kebijakan dan bantuan sosial guna mengatasi masalah-masalah disabilitas.

Sebetulnya, saya malas mengurusi perbedaan itu. Saya lebih senang kalau para aktivis yang sedang berjuang mengurangi praktik eksklusi, marjinalisasi, dan pemiskinan terhadap penyandang disabilitas atau difabel (apapun istilah yang dipilihnya) memilih bersatu ketimbang mengurusi soal-soal peristilahan. Pekerjaan rumah terlalu banyak dan berderet panjang buat diretas dan diselesaikan satu demi satu. Tapi sayangnya, isitlah difabel ini bagi sebagian aktivis disabilitas bak 'laksana duri dalam daging' atau setidaknya laksana sisa makanan yang mendekam dalam rongga gigi yang berlubang, mengganggu kenyamanan.

Itulah mengapa saya tetap saja tertarik kalau orang-orang mau berdiskusi dalam kerangka mencari pengetahuan baru yang lebih mencerahkan, namun saya mau tidak begitu getol mengandalkan urat leher untuk berdebat.

Akhirnya dengan sedikit bersemangat saya menghargai pertanyaan sang sepuh dengan menjawabnya berapi-api berharap beliau bisa sedikit lebih serius menanggapinya.

"Difabel itu faktual ada om, dari segi konsep ada banyak buku merujuk kepada istilah itu. Dari segi historis juga segaris dengan gerakan "*person with different ability*" di luar
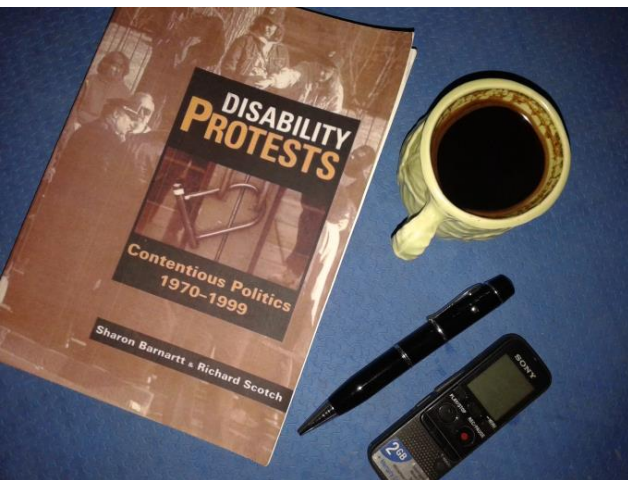
sana. Bahkan, secara *de jure* juga ada, karena banyak Organisasi Masyarakat Sipil pakai istilah ini dan memiliki legalitas hukum melalui notaris. Apakah om tidak menerima konsep difabel hanya karena secara hukum tidak dipakai nama itu dalam undang-undang?" begitu saya menjawabnya.

Tapi saya belum puas. Saya benar-benar ingin memancingnya berdiskusi lebih serius. Apalagi saya menyadari kalau beliau punya pengalaman panjang dibandingkan saya yang baru seujung kuku pengalamannya bergelut dengan isu disabilitas. Sebuah jabatan publik penting skala nasional pernah ia pegang selama beberapa tahun.

"Kalau dalam Kajian Disabilitas Kritis, apa yang terjadi saat ini disebut sebagai 'Kolonisasi Disabilitas'. Bentuknya adalah dengan melakukan internasionalisasi perisitilahan disabilitas. Penyeragaman peristilahan, baik dilakukan oleh PBB kepada seluruh negara—contohnya UNCRPD maupun pemerintah Indonesia—melalui UU Penyandang Disabilitas yang tidak mengakomodasi eksistensi dari istilah lain dari berbagai daerah dan institusi adalah bentuk kolonisasi baru berbasis pengetahuan," tulisku sambil sesekali melirik namanya di boks chating.

"Menurut saya, negara bahkan tidak fair dengan hanya mengakomodasi satu istilah saja padahal dalam kenyataannya ada beberapa model praktik yang terjadi. UU Desa menurut saya lebih maju, mengingat mengakomodir dengan nama lain, jadi kita tetap bisa pakai istilah *wanua* atau *parasangang*, atau *kampung* jika kita mau ketimbang pakai istilah Jawa yakni Desa. Perda Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Yogyakarta juga mengakomodasi istilah lain dengan bunyi 'Penyandang Disabilitas atau dengan nama lain'," saya merasa bertambah bersemangat dan berharap beliau mau

menyanggah atau membagi apa-apa yang menjadi butir-butir pengetahuannya.

Saya pun melanjutkan tulisan. Lingkaran hijau di depan namanya lenyap, tanda sinyal melesap. Saya berasumsi 'sang juru ketik' yang membantunya mungkin sedang tak bersamanya. Tapi saya tetap memilih menulis dan berharap ia akan menjawab di kemudian menit atau jam.

"Lagi pula, bukankah difabel atau penyandang disabilitas juga punya keberagaman? dan apakah kita harus mengingkari keberagaman itu? dan apakah dengan mengingkari keberagaman itu bukan berarti kita sedang menindas eksistensi lain yang seharusnya dihargai sebagai hak setiap orang untuk berekspresi?" begitu saya menutup kalimat dan memilih berhenti. Semangatku mulai mengendur. Lingkaran hijau tak jua muncul.

Saya lalu chating dengan seorang kawan yang baik hati yang sedang kuliah di Philipina. Katanya, kakinya bengkak karena keseleo. Perjalanan ke kedutaan Indonesia di Manila dan kantor kedutaan yang tidak akses bagi dia yang kecil. "Bahkan orang-orangnya sekalipun juga 'tidak akses'," katanya. Aku menangkap ucapannya itu dengan asumsi orang kedutaan yang tak mengetahui bagaimana beretika dengan perempuan kecil.

"Manila kotanya mirip jakarta, panas dan berdebu, dan sempat ada *thyphoon*," ujarnya mengalihkan obrolan soal kakinya.

"Orang-orangnya mayoritas tinggi hati dan mengira Indonesia negara terbelakang!" ada nada kejengkelan dalam kalimat itu.

Tapi perbincangan kami kemudian tak berlanjut soal kedutaan dan orang Manila. Tapi ke hal lain yang lebih ringan. Tentang "bunga yang sedang layu".

Saya melirik ke boks chatting di sisi kiri. Sang sepuh memberi jawaban pendek.

"Penulisan ilmiah dalam studi hukum penggunaan terminologi hanya boleh berdasarkan istilah resmi dalam hukum positif . Istilah lain yang mempunyai padanan arti, hanya berfungsi sebagai pembanding. Tapi saya tidak tahu kalau studi non hukum seperti politik,"

Aku menemukan kerendahan hati seorang akademisi. Ia memang seorang dosen dan saat ini sibuk mengajar di salah satu kampus di Jawa.

Saya masih menunggu jawaban lebih panjang. Tapi tidak ada lagi kalimat baru mencuat.

Saya pun memilih membalasnya.

"Iya, om," Saya memilih memanggilnya om karena alasan tertentu.

"Dalam studi hukum tak apa, karena memang sesuai kaidahnya. Studi saya kebetulan soal politik, jadi cara pandang saya tentu dipengaruhi oleh cara pandang saya sebagai ilmuwan dan aktivis politik," tulisku.

Saya tertarik melanjutkan perbincangan, walaupun tak yakin beliau akan membalasnya di malam yang telah larut ini. Di Pakem, di pendopo "Mansour Fakih" di mana saya sedang mengetik, hawa semakin terasa dingin. Suara air yang menderas sisa hujan beberapa jam lalu masih meluncur entah kemana. Tadi saya melihat satu ruas pematang sawah runtuh dihempas derasnya air yang mengalir di sela-sela rumpun padi yang masih muda. O iya, Mansour Fakih adalah pencetus istilah difabel pada tahun 1996 bersama dengan aktivis disabilitas Setyo Adi Purwanta yang segenerasi dengan 'sang sepuh' ini. Setelah istilah baru itu digulirkan melalui sebuah tulisan Mas Mansour 'Panggil

saja kami Kaum Difabel', istilah ini kemudian menjadi wacana tanding atas istilah penyandang cacat dan terus bergulir sampai dua dekade saat ini.

"Saya menemukan di Makassar, persoalan perbedaan peristilahan itu seringkali dibesar-besarkan oleh aktivis disabilitas di sana. Saya berharap saya bisa berjuang dengan teman-teman di Makassar untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi oleh difabel atau penyandang disabilitas.

Tetapi saya tahu, saya pasti menemukan kendala keberterimaan jika saya lebih suka memakai kata difabel. Menurut saya, sikap banyak senior aktivis penyandang disabilitas di Makassar dapat menghambat perkembangan pengetahuan terkait disabilitas jika terus menerus menutup pintu-pintu perbedaan," tulisku lagi.

Tapi tak ada respon sama sekali.

Tapi sesungguhnya bukan soal pintu perbedaan itu yang saya khawatirkan di Makassar. Saya lebih khawatir kalau pintu-pintu perubahan itu terlalu lama tertutup bagi kaum muda di sana. Pada sejumlah Organisasi Penyandang Disabilitas di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, para aktivis lanjut usia tak jua menyerahkan tongkat estafet. Saya tahu benar, orang-orang muda Makassar selalu punya gagasan segar dan energi bergelora demi mewujudkan perubahan yang besar.

Seperti beberapa waktu yang lalu. Beberapa orang muda aktivis disabilitas di Makassar berkumpul di Pusat Rehabilitasi Daksa di jalan Pettarani. Obrolan mereka yang serius dan kegelisahan-kegelisahan lain membuat mereka memilih menciptakan ruangnya sendiri. Mereka mendirikan sebuah organisasi gerakan: PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA untuk KESETARAAN disingkat oleh mereka PERDIK!

Apakah penggunaan nama itu menunjukkan suatu bentuk perlawanan orang muda atas kontrol yang sudah semakin berkarat ini? Mungkin saja, tinggal tunggu gebrakan mereka. Tentu saja, saya memilih bergabung dengan mereka.

Bagaimana dengan Anda?

Lereng Merapi, 12 Oktober 16.

GAGASAN
[3]

DIFABEL HARUS BELAJAR DI SEKOLAH UMUM, TITIK!

March 30, 2017

SEORANG KAWAN, AKTIVIS ATAU paralegal difabel, Purwanti alias mbak Ipung pernah berujar, "Difabel seharusnya belajar di sekolah umum agar pertumbuhan mentalnya berkembang baik. Tetapi, jika negara masih terus mengijinkan berdirinya Sekolah Luar Biasa, maka pamor sekolah umum di mata orang tua dari anak difabel akan selalu dikalahkan oleh SLB dan mereka akan lebih memilih menyekolahkan anaknya di SLB. Begitupun negara yang terus mengucurkan dana bantuan ke SLB dan bukan ke sekolah umum akan membuat perkembangan sekolah umum menjadi sekolah inklusi menjadi terhambat!"

Sudah banyak kritik dilontarkan oleh aktivis difabel dan keluarga difabel terkait SLB. Salah satu misalnya, SLB—termasuk dalam hal ini Panti rehabilitasi dan sejenisnya—melanggengkan praktik ekslusi difabel dalam pendidikan—dan dunia kerja. Anak difabel yang sekolah di SLB akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan keberagaman warga negara dan sebaliknya warga negara pada umumnya terhambat untuk memahami lebih jauh difabel dengan segala keberagamannya. Ketiadaan interaksi intesif ini menimbulkan ketidaktahuan atau kesalahpahaman berkepanjangan dari banyak orang mulai di tingkat rumah tangga sampai di kantor kepresidenan sehingga difabel mengalami hambatan demi hambatan dalam menjalani hidupnya.

Diskusi yang digelar oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Unhas—bekerjasama dengan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) merupakan upaya meretas persoalan-persoalan itu. Semakin difabel masuk ke dalam ruang-ruang publik seperti kampus, taman dan lain-lain, semakin terbuka peluang saling belajar antar sesama dan bisa terbangun saling memahami dan bekerjasama dalam berbuat hal-hal positif untuk kemanusiaan.

Diskusi ini berlangsung di Taman Sospol UNHAS. Pesertanya adalah mahasiswa dan sejumlah pengurus lembaga kemahasiswaan di Unhas. Untuk tujuang saling berbagi buat mahasiswa dan warganet lainnya, maka kami menyempatkan diri untuk berbagi sejumlah catatan dalam diskusi ini.

Berikut catatan dari Nur Syarif Ramadhan:

Diskusi dimulai sekitar pukul 15:15 WITA, dengan dipandu oleh seorang mahasiswa unhas. Hadir dalam diskusi tersebut, adalah mahasiswa yang termasuk dalam HMJ sospol unhas, serta beberapa mahasiswa yang berasal dari jurusan lain. Hadir pula seorang wartawan Harian Rakyat Sulsel. Sedangkan PerDIK diwakili oleh Abd. Rahman (direktur) dan Nur Syarif Ramadhan (Aktivis PerDIK).

Diskusi diawali dengan pemaparan dari Abd Rahman.

Rahman banyak bercerita tentang awal mulai penggunaan istilah difabel dipakai, sebab musabab digantinya istilah 'penyandang cacat' menjadi 'difabel'. Tak lupa ia mengkritisi istilah yang masih banyak dipakai orang seperti 'penderita cacat' dan 'penderita difabel'. Rahman menjelaskan bahwa istilah penderita cacat mulai dikenal sejak zaman soekarno, yang kemudian lebih akrap di telinga masyarakat, hingga kemudian masyarakat lebih sering menggunakannya.

Selanjutnya, ia menjelaskan awal munculnya istilah difabel, kenapa kemudian istilah penderita cacat harus diganti dengan istilah yang lebih terhormat: disabilitas/difabel.

Rahman juga menjelaskan berbagai regulasi yang menjamin pemenuhan hak dasar bagi difabel khususnya dalam hal pendidikan, lahirnnya undang-undang nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat, sejarah sehingga indonesia ikut menandatangani UN-CRPD (Konvensi Hak-hak Difabel – PBB), hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda Propinsi Sul-Sel Nomor 5/2016, serta Perda Kota Makassar No. 6/2013.

Rahman menutup pemaparannya dengan mengkritisi berbagai perlakuan dari masyarakat terhadap difabel, seperti:

difabel masih dianggap jembatan menuju surga, orang yang harus dikasihani, karena dianggap masih kurang mampu dalam beraktifitas sehari-hari dan beragam stigma lainnya. Tak lupa ia juga menambahkan penjelasannya dengan mengkritisi beberapa kampus di Kota Makassar yang masih kurang ramah bagi difabel.

Selanjutnya moderator mempersilahkan Syarif untuk menyampaikan materinya.

Syarif mengawali dengan menjelaskan apa itu difabel, klasifikasi difabel menurut perspektif pendidikan dan olahraga. Dalam pendidikan (khususnya pendidikan luar biasa), klasifikasi difabel digolongkan ke dalam beberapa macam, yang sering dijumpai dalam SLB. misalnya pada SLB kita sering menjumpai guru dengan spesialis A, khusus menangani difabel netra, guru spesialis B khusus menangani difabel Rungu/tuli, guru spesialis C khusus menangani Difabel Grahita, dan guru spesialis D khusus menangani difabel daksa.

Sedangkan dalam dunia olahraga, klasifikasi difabel lebih beragam lagi. Misalnya untuk difabel netra sendiri dibagi kedalam tiga ketegori, yakni difabel netra total sering disebut TF11, difabel Netra *lowvision* yang jarak pandangnya kurang dari 5 m sering disebut TF 12, dan difabel netra yang jarak pandangnya lebih dari 5 m sering disebut TF 13. Hal yang sama juga berlaku pada difabel komunikasi (Tuli), mental-intelektual (grahita), dan kinetik (daksa). Ada klasifikasi berbeda yang berlaku dalam dunia olahraga yang berbeda dengan klasifikasi yang digunakan pada Pendidikan Luar Biasa.

Selanjutnya syarif menjelaskan bagaimana pendidikan yang diperoleh difabel. Pada awalnya, difabel diarahkan untuk bersekolah di SLB, yang disesuaikan dengan derajat Ke-difabilitas-nya. SLB-SLB yang lahir di kota-kota besar maupun

di kabupaten, menerima semua difabel yang ingin menempuh pendidikan. Mereka baru melakukan pengklasifikasian, ketika difabel tersebut sudah berada di lingkungan SLB. Maka kemudian kita menemukan di SLB ada satu ruangan, yang dikususkan untuk satu jenis difabel.

Syarif mencontohkan ketika bersekolah di SDLB Negeri Somba Opu. Selama enam tahun bersekolah di SLB tersebut, syarif tidak pernah berpindah-pindah ruangan, hanya kelasnya yang tiap tahun bertambah. Saat syarif bersekolah di SLB tersebut, ada kurang lebih 4 orang difabel netra lain yang juga belajar di ruangan itu, tetapi guru yang mengajar mereka dan kelas mereka berbeda. Belakangan mulai bermunculan SLB-SLB yang mengkhususkan pada satu jenis disabilitas.

Banyaknya kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam sistem SLB selanjutnya memunculkan ide baru yang kemudian disebut dengan pendidikan inklusif. Akan tetapi, jauh sebelum, pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pendidikan inklusif, beberapa difabel, khususnya di Kota Makassar, telah mencoba untuk tidak melanjutkan pendidikannya di sekolah SLB. Pada dekade 1990-an, beberapa difabel netra mencoba melanjutkan pendidikannya di sekolah umum, meskipun baru pada sekolah sWasta. Memasukki 2000-an, difabel netra telah ada yang berhasil melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri, yakni SMA Negeri 6 Makassar, yang kemudian menyusul SMA Negeri 16 dan SMK Negeri 7 Makassar. Pada 2014, SMA Negeri 1 Makassar pun mulai bersedia menerima siswa difabel.

Selanjutnya syarif menjelaskan sejarah pendidikan inklusif, apa itu pendidikan inklusif, berbagai macam regulasi yang mengatur tentang pendidikan inklusif, faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pendidikan inklusif di setiap tingkatan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar, hingga ke Perguruan Tinggi. Ia juga menceritakan beberapa kasus

penolakan yang pernah dialami difabel ketika ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah reguler maupun di perguruan tinggi.

Usai tanya jawab sesi pertama, hujan pun turun, membuat diskusi harus dihentikan.

Tetapi, sebelum diskusi bubar, kedua narasumber memberikan rekomendasi kepada panitia diskusi, agar diskusi seperti ini senantiasa dibudayakan. Syukur-syukur jika mereka bisa melakukan advokasi terkhusus kepada pimpinan Universitas Hasannuddin, agar kedepannya mereka bisa menciptakan lingkungan yang ramah bagi difabel, baik itu aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas dalam pembelajaran. Narasumber menyampaikan, bahwa saat ini PerDIK juga sedang mendorong salah satu universitas di Makassar yakni UTS untuk bekerjasama mendirikan Pusat Studi Difabilitas dan Layanan Aksesibilitas di kampus.

Demikian, terima kasih telah membaca, mohon disebarkan dan salam inklusi[].

GAGASAN

[4]

PERBINCANGAN SOAL TULI DAN GERAKAN DIFABEL

April 12, 2017

Ishak Salim

SEORANG MAHASISWI PASCASARJANA UGM asal Bali bertanya beberapa hal terkait tuli kepada saya. Ia memperkenalkan diri sebagai Ketut Ari dan meminta saya berdiskusi jika berkenan. Saya mengusulkan diskusi via online karena saya sedang di Makassar. Ia setuju.

Kami lalu mengatur jadwal besok malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat.

Esoknya, pukul 21.44 saya membuka pesan di telepon selular saat perjalanan menuju rumah.

"Saya sering bingung kalau mendengar apa itu Hak Tuli dan kesetaraan, menurut pandangan kakak yang sudah menjadi bagian dr pergerakan difabel bagaimana?"

Itu pertanyaannya yang pertama. Lalu saya membaca pertanyaan berikutnya.

Apakah pergerakan difabel itu lebih baik diperjuangkan oleh teman difabel atau yang bukan difabel?

Sejauh mana seandainya teman yang bukan difabel boleh masuk dalam pergerakan yang diperjuangkan oleh teman difabel? Sepenuhnya, setengah atau bagaimana?

Bagaimana penelitian yang berkembang terkait difabel di indonesia? Apakah penelitian tersebut sudah terlihat berguna untuk perkembangan pergerakan difabel di Indonesia?

Ia menutup pertanyaannya dengan ucapan "Terimakasih, Kakak."

Saya lalu melirik sisi kanan bawah. Jam menunjukkan pukul 21.50 waktu Makassar, dan itu berarti belum pukul 9 malam di Yogyakarta.

"Belum jam 9," ujarku.

Setiba di rumah, saya menyiapkan dan membuka laptop. Jaringan wifi lalu terkoneksi otomatis. Saya lalu membuka laman facebook dan membaca kembali pertanyaan-pertanyaan tadi.

Pertanyaanmu sebenarnya terlalu luas, sehingga sulit menjawabnya secara sekaligus.

Pertama soal Hak Tuli, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mungkin kamu perlu menjelaskan dulu, kenapa kamu ingin mengetahui soal hak tuli? Lalu seberapa jauh kedekatanmu dengan Tuli sejauh ini? Hal ini perlu saya tahu supaya saya tak perlu menjelaskan untuk hal-hal yang mungkin kamu sudah tahu soal Tuli.

Ketut Ari menjawabnya.

Kenapa saya ingin mengetahui karena pertama, saya mempunyai keponakan Tuli yang sedang beranjak dewasa. Saya melihat teman-temannya sedang melakukan gerakan sosial yang memperjuangkan hak Tuli. Nah, sebagai salah satu orang yang memiliki keluarga Tuli, saya ingin tahu hak Tuli itu sebenarnya apa dan bagaimana saya sebagai bibinya membangun relasi yang tidak berpihak sebelah (misalnya ke arah

'Orang Dengar' saja). Saya punya ketakutan kalau saya sedang melanggar (hak Tuli) tersebut dalam lingkup keluarga.

Lalu, kedekatan saya dengan Tuli belum terlalu dalam, kak. Saya memiliki beberapa teman Tuli dan seorang keponakan, itu saja. Beranjak dari keponakan dan beberapa teman Tuli, saya beserta 3 teman sedang membuat program beasiswa khusus difabel. Apakah dengan membuat beasiswa khusus difabel termasuk kategori mengkotak-kotakan lagi (misalnya apakah bertentangan dengan semangat inklusi?)

Membaca jawabannya dari seberang sana, saya pun meresponnya.

Ok, saya mulai paham arah pertanyaanmu dengan posisimu seperti itu.

Kawan Tuli punya hak sebagaimana manusia dan siapapun bisa membela atau membantu membela agar hak itu dipenuhi oleh negara. Menurut slah satu pejuang Tuli dari Amerika Serikat yang pernah menjadi seorang presiden di salah satu kampus di US, kalau tidak salah Gallaudet University mengatakan bahwa satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh Tuli adalah mendengar. Jadi karena tidak bisa mendengar, maka dia tidak berbicara secara oral, tetapi dengan isyarat.

Untuk itu, hak pertama seorang Tuli adalah bahasa isyarat itu. Dengan bahasa maka mereka bisa berkomunikasi dan kemudian melahirkan satu budaya khusus yang berbeda dengan budaya manusia kebanyakan. Gerakan Tuli yang cukup radikal menyebut diri mereka bukan *person with disability*, mereka adalah pengguna bahasa minoritas atau *linguistic minority*. Persoalannya sebagai manusia hanyalah karena bahasanya tidak dipahami oleh kebanyakan manusia yang berbahasa oral dengan lisan.

Jadi, makanya penggunaan istilah difabel atau 'berbeda kemampuan' akan lebih relevan bagi Tuli ketimbang

penyandang disabilitas, di mana kawan-kawan lain seperti buta maupun difabel kinetik lainnya memprotes istilah penyandang disabilitas itu. karena bagi para aktivis difabel ini, kondisi tubuh mereka bukanlah alasan untuk menyebut mereka tidak mampu (disable).

Nah, persoalannya kemudian, di tengah perkembangan peradaban (bahasa, pengetahuan, teknologi, pembangunan, pendidikan dst) yang disusun oleh "orang-orang normal" dan pandangan mereka "bahwa hanya orang normal yang ada di dunia ini" lah yang kemudian membuat sejumlah desain sosial menjadi tidak akses bagi Tuli. Misalnya dari aspek bahasa tulis yang merupakan pengejawantahan dari budaya verbal (oral) dengan tata bahasa yang diatur sedemikian rupa, semisal rumus penulisan SPOK (Subjek, Predikat, Objek dan Kata keterangan). Nah rumus ini tidak begitu berlaku dalam bahasa isyarat Tuli.

Oh iya, ada dua bahasa isyarat (SIBI dan Bisindo). Bisindo yang dibuat oleh aktivis Gerakan Tuli tidak menggunakan rumus SPOK itu dan kemudian menjadi kesulitan memahami tulisan dengan struktur kalimat "serumit" itu. Ketika mereka tidak memperoleh pengetahuan terkait tata bahasa Indonesia, maka mereka akan kesulitan meraup pengetahuan dari buku-buku dan media literasi lainnya.

Ari menyahut, kenapa kakak mengatakan gerakan Tuli radikal? Apakah ada kategorisasi pergerakannya Kak?

Ya, Radikal karena mereka memutuskan mendefinisikan sendiri identitas mereka. Selama ini pihak luar (biasanya negaralah yang mendefiniskan atau melabeli warganya dengan kategori tertentu). Misalnya di Indonesia, mereka disebut Penyandang cacat, penyandang Tuna Rungu atau Tuna Wicara. Di sisi lain, mereka lebih suka menyebut diri mereka Tuli. Bagi

orang “Normal”, istilah Tuli tidak sopan, bagi Tuli, istilah tuli sudah tepat dan tidak berkonotasi jelek. orang normal kemudian membuatkan istilah yang lebih halus yang dipetik dari bahasa sangsekerta, yakni tuna rungu (tuna netra, tuna daksa, tuna grahita dst).

Mereka juga membuat bahasa isyarat sendiri dan berlaku secara lokal. Mereka menyebut bahasanya BISINDO yang kemudian membedakannya dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang diproduksi oleh negara melalui apartusnya.

Lalu soal istilah difabel.

Istilah ini memang sudah digunakan terlalu jauh. Jika dulu dipakai sebagai wacana tanding atas konsep kecacatan (yang terlalu medik dan bersifat individual), maka istilah difabel itu lebih merujuk kepada *rights based* dan *social model* atau pendekatan sosial. Tahun 1996 istilah tanding ini didiskusikan oleh Dr. Mansour Fakih (aktivis gerakan sosial) dan Setia Adi Purwanta (aktivis difabel netra) di Yogyakarta. Arti difabel adalah ‘berbeda kemampuan’ atau *differently abled* yang artinya bukan ketidakmampuan sebagaimana makna dari *dis-able*.

Tetapi istilah ini saat dibuat pertamakalinya tidak terlalu memusingkan pemaknaannya yang kemudian semakin meluas. Misalnya begini, kalau arti Difabel itu adalah berbeda kemampuan, maka bukankah semua orang memiliki perbedaan kemampuan? pertanyannya, apakah difabel itu adalah kata lain saja dari disabel, ataukah ia sebuah kualitas diri seseorang?

Saat istilah ini dibuat, di Eropa maupun di Amerika pemilahan perdebatan soal istilah sudah banyak terselesaikan berkat desakan gerakan difabel disana.

Misalnya, di Barat, ada 3 istilah dipakai jika mendiskusikan isu ini, yakni *impairment, disability,* dan *handycap*. Impairment adalah kondisi medik sehingga seorang harus diobati jika sedang sakit. Sebutlah ia berumur 5 tahun sebagai anak sehat, namun tiba-tiba sebuah penyakit atau virus menyerang matanya sehingga mengalami kebutaan. Fase ini: sakit hingga sembuhnya (keluar dari rumah sakit atau berhenti rawat jalan) disebutlah ia *impairmet*. jika karena *impairment* lantas dia sembuh dengan konsekuensi menjadi terganggu pendengarannya atau tuli maka tentu pertama-tama dia harus belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi, atau belajar membaca gerak bibir. Jika dia tidak memiliki kemampuan bahasa isyarat maka dia disebut disabilitas. Nah, dia akan disebut *handycap* jika misalnya dia Tuli, Bisa bahasa isyarat, tetapi rupanya ketika pergi sekolah di SD, tak ada satupun guru maupun anak sekolah yang bisa bahasa isyarat sehingga ia kesulitan bahkan gagal berkomunikasi dengan kawan maupun pengajarnya.

Lalu, jika menggunakan konsepsi ini, kapan seseorang disebut difabel? Menurut saya, seseorang disebut difabel adalah adalah di level di mana ia sudah memiliki kemampuan teknis dan berhak mengakses berbagai layanan publik.

Catatan tambahan—Saat ini, dalam studi disabilitas, konsep 'disabilitas' sudah menjadi konsep payung ketika berbicara soal 'difabel'. Jadi dikusi lebih lanjut adalah seberapa banyak kapabilitas seorang difabel itu terpenuhi dan seberapa jauh pemungsian (*functioning*) kapabilitas itu dialirkan sebagai kontribusi difabel di tengah-tengah masyarakat—

Tetapi bagi saya, ini pendapat pribadi hasil refleksiku, istilah difabel bukan lagi sebuah 'wacana tanding' sebagaimana pertamakali ia diperkenalkan. Dia sudah merupakan identitas gerakan. Jadi karena dia identitas, maka tidak ada kaitannya lagi apakah ia "penyandang disabilitas" atau "bukan". Jadi saya

walaupun secara medik dianggap sehat dan tidak punya gangguan fungsi tubuh maka tetaplah seorang aktivis difabel, karena saya ada dalam putaran roda gerakan sosial yang sedang bergerak ini. Jadi difabel bukan lagi kata ganti dari penyandang cacat atau disabilitas, tetapi orang yang berjuang meperjuangkan aksesibilitas khususnya bagi difabel dan melawan ideologi abelisme (*ableism*) yang mendekam di kepala-kepala para pegambil kebijakan.

Jadi, tidak ada masalah jika kita (sebutlah "non-difabel" ini) ingin berkontribusi kepada difabel dalam gerakan yang mereka bangun atau terlibat di dalamnya.

Saya menunggu sesaat dan tak ada respon.

"Sudah tidur ya?" tulisku dan menuju dapur untuk menyeduh segelas kopi Marasa dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Saya suka rasanya yang lembut.

Secangkir kopi yang masih kuaduk kuletakkan di meja tepat di sisi kiri laptop. Mataku tertuju ke inboks pesan.

Belum kakak, masih menyimak ha ha ha

Saya lalu mengetik lagi.

Saya baru habis bikin kopi, dan sial, yang tersisa tinggal kopi Kapal Api, padahal biasanya saya minum kopi Asli Sulawesi. Kopi Kapal Api rasanya berkarat! tapi saying, tidak ada pilihan lain hahaha

Ari membalas.

Haha saya malah tidak bisa ngopi kak. Sesak nafas.

Ia melanjutkan lagi kalimatnya.

Saya pernah dengar bisindo dibuat karena sibi itu dibuat negara/orang dengar, apakah benar begitu kak?

Iya, benar. Sibi terlalu rumit, sementara Bisindo adalah benar-benar menggunakan isyarat dan tidak rumit bagi penggunanya. Bisindo di setiap daerah menjadi bahasa ibu bagi setiap Tuli.

Tetapi sebenarnya, pada kenyataannya, SIBI dan Bisindo sering digunakan bersama-sama.

(tapi jujur, saya tak begitu paham bagaimana porsi SIBI dan Bisindo dalam percakapan sehari-hari. Yang jelas, setiap Tuli yang belajar di SLB akan dapat pelajaran SIBI.

Lalu komentar Ari*, apakah pergerakan BISINDO dibantu oleh relawan dengar? Artinya mirip dengan perkembangan SIBI yang dibuat bukan sepenhunya dari orang Tuli sendiri? Maksudnya hal-hal soal tuli apakah hanya bisa direspon oleh tuli saja?Mungkin/tidak mungkin?*

Menurutku, tidak relevan lagi bicara kemurnian gerakan berbasis Tuli – Non-tuli, atau difabel dan non-difabel. Pengkotak-kotakan berpikir dan bertindak seperti itu adalah warisan Rezim Orde-Baru yang memilah-milah orang ke dalam beberapa kategori.

Ari, Kalau ada Tuli yang menyinggung soal kemurnian itu, maka ia harus cepat-cepat *move-on*!

Non Tuli seharusnya bisa berjuang bersama-sama dengan Tuli untuk memperjuangkan HAM. Sebagaimana Tuli bisa memperjuangkan hak-hak warga buta, atau hak-hak komunitas marjinal misalnya petani Kendeng dari ekspansi korporasi semen.

Ari bertanya lagi.

Kak, aku pernah pingin tahu linguistik bahasa isyarat BISINDO, tapi yang boleh tahu rupanya hanya relawan dari komunitas itu. Apakah itu merupakan pengeklusifan komunitas?

Ya, itu sikap eksklusif, jawabku singkat.

Saran dong kak kalau berhadapan dengan masalah eksklusif tersebut?

Seharusnya komunitas Tuli tidak seeksklusif itu. Jika banyak orang pahama bahasa isyarat Bisindo, maka akan semakin baik. Seorang kawan dari SIGAB, Ismail saat ini sedang merampungkan aplikasi *signinteraktif* di mana para relawan penterjemah bahasa isyarat (sibi maupun bisindo) bisa membantu penggunanya untuk menterjemahkan dua bahasa berbeda: oral dan isyarat.

Itu artinya bahasa isyarat akan dipakai dan siapapun terbuka untuk bisa mempelajarinyan. malah, seharusnya BISINDO juga memiliki kamus dan selalu *diupdate*. coba bayangkan jika jumlah kosakatanya sudah menyamai kamus manusia berbahasa oral.

Kami lalu berbincang soal SIGAB dan bagaimana saya banyak belajar dari kawan-kawan aktivis yang berpengalaman di lembaga ini. Ia lalu tertarik mau belajar di SIGAB. Saya memintanya ke sana.

"Nah, terakhir soal penelitian," ketikku lagi.

Sebuah gerakan difabel itu tidak dilakukan dengan hanya teriak-teriak saja. Di SIGAB, kerja penelitian merupakan dapur gerakan. tanpa penelitian, maka kemampuan membaca situasi akan lemah dan kelemahan itu berimplikasi pada lemahnya solusi yang dipilih untuk menyelesaikan permaslaahan yang dihadapi difabel.

Jadi, penelitian yang dilakukan itu mencakup aspek teknis dan juga konseptual-teoritik. Beberapa penelitian difabel juga melahirkan satu 'model' menangani masalah difabel misalnya saat mereka berhadapan dengan hukum, atau model pmebelajaran bagi difabel mental-intelektual terkait pendidikan

seks sejak usia dini, atau model deteksi dini bagi balita-balita dan seterusnya.

Ada juga riset melihat cara pandang yang digunakan oleh aktor-aktor dalam mengatur soal disabilitas. Misalnya soal bagaimana negara atau perusahaan yang terlalu mengagungkan perspektif medik mengatur difabel. Salah satu implikasinya misalnya ketentuan 'sehat jasmani dan rohani kalau mau jadi pejabat publik. Lalu pertanyaannya adalah apakah difabel itu orang sakit atau bukan? atau apakah orang buta yang mau naik pesawat harus menandatangani surat pernyataan atau *inform consent* setiap mau naik pesawat karena dia dianggap sebagai sakit? dll dll, jadi penelitian dalam gerakan difabel adalah bagian dari kerja pengorganisasian ini.

Saya menuntaskan kalimat itu. Malam sudah larut di sini.

Tak ada respon.

Saya mengetik, Aih, Ari tidur lagi.

Buru-buru ia membalas, ada kata *typing*….. di inboks.

Belum tidur kak hahaha

Sudah terjawab semua toh? kalau kamu tidak puas, kamu ke SIGAB saja, nanti kenalan sendiri dengan teman-teman di sana.

Selebihnya obrolan ringan sampai akhirnya dia menyerah dengan kalimat ia sudah mengantuk[]

Makassar, 9 April 2017

GAGASAN
[5]

DIFABEL KULIAH DI PERGURUAN TINGGI, BISA?

March 28, 2017

DAPATKAH DIFABEL KULIAH DI PERGURUAN TINGGI?

Untuk menjawabnya tak semudah dengan sekadar menjawab 'dapat' atau 'tidak dapat'. Kalau dapat, bagaimana caranya? kalau tidak dapat, mengapa?

Dengan terpaksa, kita harus memulainya dengan melakukan serangkaian diskusi di sejumlah tempat dan beragam orang berdasarkan kapasitasnya masing-masing.

Kali ini, PerDIK dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin membangun sebuah inisiatif untuk memulainya. Mungkin kita bisa memulai dengan hal-hal yang paling mendasar, misalnya realitas atau pengalaman difabel mencari ilmu di berbagai jenjang pendidikan, sebutlah di Makassar. Atau terkait kebijakan pendidikan di Indonesia yang mengatur hak-hak difabel atas pendidikan dan bagaimana negara/pemerintah memenuhi kewajiban menyiapkan ruang pendidikan bagi warga difabel. Atau bahkan ke persoalan siapakah yang

dimaksud difabel dan bagaimana orang-orang, mulai dari keluarga, kerabat sampai tetangga dalam komunitas maupun masyarakatnya memikirkan pendidikan bagi difabel.

Tetapi, tentu kalian bisa menyumbangkan pendapat maupun pemikiran yang lebih kompleks terkait isu pendidikan dan difabel ini. Untuk itu, kami mengundang kawan-kawan sekalian untuk hadir dalam diskusi kali ini.

Tempat: Taman Sospol Unhas
Tanggal: Rabu, 29 Maret 2017
Pukul: 15.00 – selesai

Narasumber:
1. Abd **Rahman Gusdur** (Direktur PerDIK)
2. **Nur Syarif Ramadhan** (aktivis difabel PerDIK)

GAGASAN
[6]

PerDIK DAN UNIVERSITAS TEKNOLOGI SULAWESI BEKERJASAMA MENDIRIKAN PUSAT KAJIAN DIFABEL DAN LAYANAN AKSESIBILITAS

March 13, 2017

HARI INI, BADAN PENGURUS Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) dan pihak Rektorat Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) bertemu untuk membahas pentingnya Pendidikan Inklusi di tingkat Perguruan Tinggi. Pertemuan hari ini merupakan puncak dari sejumlah pertemuan sebelumnya untuk menjajaki sebuah kerjasama jangka panjang.

"Hari ini adalah penandatanganan MOU antara PerDIK dan UTS," ujar Abd. Rahman, direktur PerDIK sesaat setelah penandatanganan MOU antara PerDIK dan UTS.

Wakil Rektor II UTS, Drs. Andi Zainal Gunawan, SH. M.Si menyatakan bahwa kerjasama di bidang disabilitas ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimulai di Sulawesi Selatan. Ia mengambil contoh saat ia mengunjungi sejumlah Negeri Kangguru di mana lingkungan yang akses bagi difabel bukan hanya tampak di kampus, tetapi sudah sampai di sejumlah fasilitas publik baik sarana transportasi maupun taman.

Dalam MOU tersebut, UTS dan PerDIK merencanakan menjalankan dua aktivitas utama, yakni mendirikan Pusat Kajian Difabel dan Pusat Layanan Aksesibilitas bagi civitas Akademika.

Pusat Kajian Difabel ini akan menjalankan sejumlah kegiatan seperti: Diskusi rutin terkait isu-isu disabilitas, penelitian berkala, monitoring dan evaluasi bersama terhadap aspek-aspek aksesibilitas dalam perguruan tinggi baik terkait

dengan alat bantu maupun *reasonable accommodation*(akomodasi yang tepat) dalam proses belajar mengajar baik di UTS maupun universitas lainnya di Sulawesi Selatan, memberikan pelatihan model-model pembelajaran Inklusi bagi Civitas Akademika maupun tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar dan Menengah, mengadvokasi difabel dalam berhadapan dengan pihak-pihak tertentu yang menolak difabel menjalankan atau memenuhi hak-haknya, sosialisasi kebijakan maupun program-program pemerintah/non-pemerintah terkait disabilitas, menyiapkan media informasi via online bagi masyarakat luas terkait berita, hasil penilaian/penelitian, dan pusat pengaduan bagi difabel yang menghadapi permasalahan terkait hak-haknya.

Sementara itu, sebagai **Pusat Layanan Aksesibilitas**, Pengelola UTS dan Pengurus PerDIK nantinya akan merencanakan dan menjalankan sejumlah bentuk layanan kepada mahasiswa maupun civitas akademika lainnya, seperti: melayani seluruh mahasiswa/calon mahasiswa difabel dalam mengakses informasi maupun dalam proses belajar mengajar mulai dari proses pendaftaran, proses pembelajaran, ujian, KKN sampai pelaksanaan wisuda. Kemudian, memberikan pelayanan baik melalui pendampingan khusus maupun mandiri dengan memberi sejumlah alat bantu dan akomodasi yang layak, dan melakukan perancangan atau desain bangunan akses bagi civitas akademika difabel maupun meredesain bangunan atau fasilitas infrastruktur lama agar lebih akses sepenuhnya maupun bertahap.

Wakil Rektor II UTS menegaskan bahwa kerjasama ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan memulai dari hal-hal sederhana. Ia mengakui bahwa tantangan menjadikan UTS sebagai perguruan tinggi yang inklusif bukan pekerjaan mudah, tetapi jika dilakukan secara sedikit demi sedikit, penuh pengabdian serta menjalin kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak swasta maka tujuan kerjasama ini akan tercapai di masa mendatang.

"Setelah penandatanganan ini, kami masih akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas pendirian Pusat Kajian Difabel dan Layanan Aksesibilitas. Harapan kami, lembaga baru ini dapat segera terwujud," demikian harapan Abd. Rahman[].

GAGASAN
[7]

TAKSI ONLINE MENGURANGI DISKRIMINASI TERHADAP PENUMPANG DIFABEL

April 7, 2017

[Rilis Pengurus Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK). Jumat 7 April 2017]

DINAS PERHUBUNGAN SULAWESI SELATAN (Sulsel) mengeluarkan keputusan larangan beroperasi taksi online menyusul desakan dan aksi penolakan moda transportasi online berbasis ponsel ini di Makassar.

Syarif lebih mudah mengakses transportasi publik online melalui handphone android miliknya

Larangan yang dikeluarkan sejak Kamis, 7 April 2017 tersebut berlaku hingga diterbitkannya keputusan mengikat dari pemerintah.

"Kita sudah sepakat jangan dulu ada angkutan berbasis online yang beroperasi hingga keluar keputusan mengikat, " ungkap Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Ilyas.

Namun kebijikan tersebut sangat disayangkan oleh sejumlah pihak, termasuk pihak yang memiliki kebutuhan khusus alias difabel di Makassar.

Salah satu difabel netra di Makassar, Nur Syarif Ramadhan sangat menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Sebab

transportasi online sangat memudahkan dirinya dan teman-temannya yang juga difabel untuk melakukan aktivitas.

"Sejak mereka beroperasi kami tidak kesulitan lagi kalau mau kemana-mana, cukup melakukan pemesanan, maka mereka akan datang ke rumah kami, dan mengantar sampai ke tujuan." kata Syarif, Jumat (7/4/2017).

Berbeda dengan transportasi konvensional yang cenderung para sopirnya mendiskriminasi para difabel. Menurut Syarif, beberapa perlakuan diskriminasi kerap dialaminya saat hendak bepergian menggunakan transportasi konvensional. Seperti, para sopir angkutan umum Petepete. Difabel, kata dia, ditolak sangat oleh sopir Petepete dan dianggap sebagai sumber penghalang rejeki si sopir.

"Biasanya, kalau pagi-pagi kami mau bepergian, dan kami menunjukkan identitas kami sebagai difabel, sopir transportasi konvensional enggan mengambil kami. mereka berpendapat,

jika ada orang buta yang naik ke kendaraan mereka, maka rejeki mereka hari itu akan gelap. begitu pun kalau ada orang pincang yang naik, maka pendapatan mereka tidak akan lancar." ujar Syarif yang juga pengurus Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK).

Dia pun mempertanyakan dalih sejumlah sopir angkutan konvensional yang mengatakan taksi online meresahkan.

"Transportasi online lebih aman dan nyaman bagi kami. jadi apanya yang meresahkan rakyat?" Tanyanya.

"Sejak beroperasinya transportasi online, kami tidak perlu lagi ke jalan raya menunggu kendaraan jika kami ingin bepergian, kami tak takut lagi mendapatkan perlakuan diskriminatif, karena pada transportasi online, si penyedia jasa memberikan ruang kepada kami apabila ingin melaporkan jika menemukan hal yang kurang berkenan. lagi-lagi hal itu tak kami temukan pada transportasi konfensional." tambahnya.

Sependapat dengan hal tersebut, Abd Rahman yang saat ini sebagai Direktur PerDIK mengatakan sopir transportasi konvensional seperti taksi juga kerap tidak jujur dalam pembayaran.

Rahman yang mengalami netra ini mengaku beberapa kali dikibuli oleh sopir taksi. "Kita kan tidak bisa melihat argo sopir. Tapi mereka totalkan harga yang menurut saya tidak benar. Karena saya bukan satu dua kali naik taksi konvensional ke tempat itu. " jelasnya.

Selain itu, sopir taksi konvensional sering beralasan tidak punya uang kecil atau recehan untuk pengembalian. "Jika membayar uang besar kadang tiada ada kembalian. Alasannya tidak ada uang receh, uang kecil. Ini lah yang membuat saya kecewa." Kata Rahman.

Menurutnya berbeda saat dirinya menggunakan layanan taksi online. Dengan mengundug aplikasinya, kata dia, dirinya bisa mengetahui berapa ongkos yang harus dibayar dan jarak tempuh ke lokasi tujuan.

Sama halnya dengan Fauziah Erwin. Menurutnya bukan hanya difabel yang mengalami. “Saya sangat sering “kena”. Di argo tertera 42 ribu. Penumpang bayar dengan uang seratus. Dikembalikan 50 ribu, alasannya “maaf bu, tidak ada uang kecilku”. Kalo satu dua kali seperti itu, kita masih enak hati. Tapi kalo hampir selalu begitu kelakuannya, sudah kejahatan sistematis. ” kata mantan komisioner KPID Sulsel ini.

Tetapi, diluar aspek perilaku pengemudi itu, Fauziah Erwin juga menekankan aspek lain yang lebih bernada politik, atau perspektif ekonomi-politik, bahwa “Saat ini sudah eranya di mana Pemerintah tidak boleh membendung angkutan berbasis online hanya gara-gara membahayakan bisnis taksi konvensional milik korporasi pengusaha penguasa tertentu di Sulawesi. Masyarakat luas malah diuntungkan karena dapat harga kompetitif. Belum lagi soal kenyamanan seperti yang dikeluhkan teman-teman difabel dan non difabel. Tinggal, pemerintah membuat dan mengawasi aturan jaminan keamanan terhadap penunpang maupun pengemudinya,” tegas Uci—panggilan akrab Fauziah—di sela-sela kesibukannya menulis.

Diberitakan pada Kamis kemarin, Dinas Perhubungan melakukan razia terhadap kendaraan transportasi online yang beroperasi. Mereka menghentikan jika menemukan taksi online, memaksa mereka untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak beroperasi.

“Mestinya Dinas Perhubungan Sulsel harus mengkaji ulang pelarangan tersebut. sebelum semakin banyak pihak yang dirugikan. ” kata Syarif. ()

GAGASAN
[8]

SEBERAPA AKSES MASJID DI LINGKUNGAN ANDA BAGI DIFABEL?

May 10, 2017
Irawan Amiruddin

MASJID ADALAH TEMPAT IBADAH BAGI UMMAT Islam. Sangat banyak teks-teks suci yang mengambarkan keutamaan beribadah di masjid. Hingga wajar apabila setiap orang "mewajibkan" dirinya untuk beribadah di masjid. Namun persoalan yang muncul bukan hanya pada bagaimana beribadah itu dijamin kebebasannya dan dilindungi, tetapi bagaimana jaminan dan perlindungan itu menciptakan ruang atau struktur kemudahan bagi siapapun untuk beribadah di rumah ibadah tersebut.

Di sinilah letak persoalan besarnya. Dari sebuah diskusi terkait difabel, salah satu hal yang paling menonjol adalah terkait dengan aksesibilitas beribadah di masjid. Mulai dari akses ke masjid, parkiran, tempat berwudhu, toilet dan aksesbilitas informasi hingga dari persoalan konstruksi masjid yang tinggi dan megah yang rata-rata tidak memiliki konstruksi tangga yang aksesibel bagi jamaah difabel. Hal lainnya adalah tidak adanya fasilitas

kitab Al quran ataupun buku-buku keagamaan khusus buat difabel netra di masjid. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa difabel mengalami eksklusi atau pengabaian dari upayanya menikmati beribadah secara setara.

Kita bisa bertanya, untuk apa kemewahan sebuah masjid kalau justru mengabaikan hak difabel beribadah secara setara? Bukankah Nabi Muhammad saw sudah pernah ditegur dengan keras sekali oleh Allah SWT terkait pengabaian beliau terhadap Ibnu Ummi Maktum yang datang ke rumah Nabi untuk mendapatkan pencerahan? Coba baca surat Abasa (ayat 1 – 10) di bawah ini:

<u>Abasa Ayat 1 – 10 Dan Terjemah</u>

الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللهِ بِسْمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

وَتَوَلَّىٰ عَبَسَ .(1)

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,

الْأَعْمَىٰ جَاءَهُ أَنْ .(2)

karena telah datang seorang buta kepadanya.

يَزَّكَّىٰ لَعَلَّهُ يُدْرِيكَ وَمَا .(3)

Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).

الذِّكْرَىٰ فَتَنْفَعَهُ يَذَّكَّرُ أَوْ .(4)

atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya?

اسْتَغْنَىٰ مَنِ أَمَّا .(5)

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ (6).

maka kamu melayaninya.

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ (7).

Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ (8).

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

وَهُوَ يَخْشَىٰ (9).

sedang ia takut kepada (Allah),

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ (10).

maka kamu mengabaikannya.

Jangan ditanya, bagaimana nelangsanya Sang Nabi dapat teguran langsung dari Sang Khalik. Ayat-ayat tersebut merupakan bentuk kecintaan Tuhan kepada Nabi Muhammad dan telah membentuk pribadi Nabi menjadi amat peka terhadap penindasan kaum marjinal.

Lalu mengapa bentuk pengabaian semacam ini masih terjadi melalui desain-desain masjid yang tidak memperhatikan jamaah difabel, baik jamaah yang berkemampuan berbeda dalam bergerak (pengguna kursi roda, kaki palsu atau kruk), komunikasi (Tuli), dan seterusnya? Apakah para pengurus masjid kita atau bahkan para ulama kita hanya melihat orang atau jamaahnya hanya menggunakan standar "kenormalan" fisik saja? Apakah ini bukan berarti bahwa mereka memiliki mata tapi tidak menggunakannya untuk melihat hal-hal seperti di atas?

Jika kita ingin konsisten dengan ajaran agama sebagai agama rahmat bagi alam semesta, maka menciptakan masjid yang akses bagi semua adalah suatu KEHARUSAN.

Bagaimana memulai agar desain masjid di masa mendatang lebih akses? Berikut beberapa tipsnya. Setidaknya ada empat prinsip aksesibilitas, prinsip ini yang merupakan alat untuk mengakseskan sebuah kota (UNISCAP, 1995, dalam Harry kurniawan, UGM), namun prinsip-prinsip ini relevan dalam konteks menciptakan masjid yang ramah bagi kaum difabel, yakni :

1. Kemudahan untuk mencapai sebuah tempat
2. Kemudahan untuk masuk ke dalam tempat atau lingkungan tersebut
3. Kemudahan untuk mempergunakan semua fasilitas yang ada
4. Kemampuan untuk mencapai, masuk dan mempergunakan tanpa menjadi obyek belas kasihan.

Empat prinsip di atas dapat dijadikan pemandu dalam menciptakan masjid ataupun fasilitas publik lainnya yang aksesibel baik difabel.

Dari penelitian Deni sukanto dan Hetyorini tentang 'Peningkatan fungsi bangunan umum melalui upaya desain Masjid Baiturrahman Kota Semarang yang akses bagi difabel' terdapat beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Alur luar pejalan kaki dan parker

- Jalur pejalan kaki: jalur pejalan kaki harus di rancang baik, sehingga orang yang menggunakan fasilitas tersebut nyaman, aman, dan mandiri. Penempatan tiang lampu, kotak surat,

tempat sampah harus di luar lebar minimum yang di perlukan dari jalur trotoar atau pejalan kaki. Lebar minimum trotoar harus 1.500 mm.

- Parkir: area parkir harus nyaman dan aman bagi pengguna kursi roda dan pejalan kaki, parkir harus berada sedekat mungkin ke pintu utama dan dapat diakses untuk memberikan ruang yang cukup bagi keluar masuknya kendaraan. Harus ada penanda khusus (warna dan tektur lantai) pada jalan akses bagi difabel netra serta tanda akses bagi pengguna kursi roda.

Jalur Dalam

- Pintu Masuk: pintu masuk harus lebar hingga memudahkan akses bagi semua orang termasuk pengguna kursi roda.
- Tangga: tangga yang dibuat harus memperhatikan ketuhan bagi pengguana hingga nyaman, aman dan mandiri. Pencahayaan, kontras warna, signage, indicator peringatan wajib ada untuk meningkatkan keselamatan.
- Railing (pegangan tangan): ini fitur yang penting, difabel menggunakannya sebagai pemandu dan menjaga keseimbangan.
- Toilet: Toilet harus muda di akses dan di tandai dengan jelas (khusus difabel) dan kolam untuk cuci kaki dibuat terpisah agar difabel pengguna kursi roda dan kaki palsu (protese) tidak harus

melewati kolam itu yang bisa merusak "kaki" mereka (*tambahan penulis*).

- Lokasi shalat khusus buat difabel yang menggunakan kursi roda (*tambahan penulis*)
- Tempat wudhu yang memudahkan dengan fasilitas dan penanda yang jelas bagi kaum difabel (*tambahan penulis*).

Aksesibilitas Intelektual (*tambahan penulis*)

- Fasilitas membaca (alqur'an dan buku) yang dapat di akses dan di baca oleh difabel netra (*tambahan penulis*).
- Penerjemah bahasa isyarat, jika ada jamaah Tuli.

Dari hasil penelitian ini, setidaknya terdapat gambaran teknis yang dapat dijadikan rujukan bagaimana menciptakan masjid yang akses difabel sebagai bentuk perwujudan hak difabel dalam beribadah secara setara di masjid.

Jika masjid-masjid sekarang ini sudah terlanjur didesain hanya khusus untuk orang-orang yang tidak membutuhkan alat bantu bermobilitas, maka para pengurus masjid harus mulai memikirkan untuk melakukan redesain secara bertahap (sebutlah dalam setiap tahun 10% renovasi sehingga dalam 10 tahun mendatang sudah akses 100%).

Jangan bilang upaya membangun akses ini Mahal dan alasan-alasan sulit lainnya, karena harga yang harus Anda tanggung sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pembangunan masjid, dan Anda sebagai ulama yang berfungsi mencerahkan ummat jauh lebih mahal jika Allah SWT meminta pertanggungjawaban Anda diakherat nanti. Jangan sampai, karena Anda menutup masjid itu bagi kurang lebih 10% jamaah

difabel ini untuk datang beribadah akibat desain masjid Anda keliru, maka jatah Anda untuk masuk surga tertunda.

Jika demikian halnya, maka anggaplah saran dalam tulisan ini adalah teguran agar Anda lebih melihat lagi realitas dari jamaah yang selama ini mengalami peminggiran.

Demikian, semoga Anda tergerak meredesain atau membangun masjid yang akses bagi difabel.

Wallahu Alam Bishshowab!

GAGASAN

[9]

JIKA BISA BELAJAR DI SEKOLAH UMUM, MENGAPA DIFABEL HARUS KE SLB?

May 4, 2017

Nur Syarif Ramadhan

"BUTUH BERAPA PERTANYAAN yang harus saya ajukan agar Anda turut menyetujui pendapat saya bahwa sistem Sekolah Luar Biasa itu tidak sepantasnya ada di tanah Republik ini. Seharusnya setiap sekolah menerapkan sistem pendidikan inklusi. Setiap pendidik menempatkan persoalan kepada [penyesuaian] sistem pendidikan dan tidak menimpakan kesalahan atau persoalan kepada anak-anak dan kondisi dirinya."

Begitulah bunyi salah satu paragrap dalam tulisan Ishak Salim, Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK). Sebuah pandangan yang sudah sepatutnya diyakini oleh semua kalangan di republik ini.

Sebagai seorang difabel, saya telah merasakan betapa besarnya perbedaan yang saya rasakan ketika menempuh pendidikan di sekolah eksklusif (SLB) dan ketika saya menempuh pendidikan di sekolah yang masih berusaha menerapkan sistem pendidikan inklusif (sekolah umum/regular).

Menurut cerita mama, saat saya berusia 3 bulan, mama melihat sebuah keanehan pada bola mata saya. Ada bercak putih di kedua bola mata yang menutupi cahaya yang dapat masuk ke

dalam mata. Akibatnya, sejak saat itu, saya sudah tidak dapat melihat. Karena terbatasnya pengetahuan yang diperoleh pada saat itu, Mama hanya membawaku ke 'sandro' (dukun kampung), berkonsultasi tentang keanehan tersebut.

Lantas apa yang dukun itu nasihatkan pada Mama?

Sang dukun hanya memberikan segelas air kepada Mama dan berkata, "Teteskan air ini ke mata anakmu setiap hari, usai kau shalat magrib." Begitu titah sang dukun.

Dua tahun lebih mama menjalankan perintah itu, yakin betul jika kasiat air sakti pemberian sang dukun dapat bereaksi. Tentu saja, perintah gila nan aneh sang dukun tersebut tidak berdampak apa-apa, hingga pada akhirnya mama pun pasrah.

Bagaimana kami mengetahui kalau yang menyerang mata saya itu Katarak?

Saat berusia 14 tahun, tepatnya di penghujung 2007, saya dipertemukan dengan seorang dokter spesialis mata, yang ketika itu anggotanya berkunjung ke SLB tempat saya bersekolah. Namanya dokter Habibah, dokter spesialis yang saat itu bekerja di klinik Orbita, Hertasning.

“Ini katarak, bu. Sudah parah. Usianya sudah belasan tahun. Hampir seusia dengan anak ibu.” Itu diagnosa awal dokter Habiba.

“Kalau mau disembuhkan, sudah tidak memungkinkan lagi. namun setidaknya, jika mata anak ibu dioperasi sekarang, mungkin penglihatannya akan membaik sedikit. Andai ibu berkonsultasi dengan dokter ketika pertama kali menemukan bercak putih di bola mata anak ibu, mungkin, penglihatannya bisa kembali normal.”

Kami memutuskan untuk melakukan operasi saat itu juga. Yang dikatakan dokter Habiba betul. Pasca operasi, penglihatan saya mengalami perubahan. Jika sebelumnya saya hanya bisa melihat cahaya, usai operasi, kini saya bisa melihat dengan jarak pandang kurang lebih dua meter. Saya bisa melihat dan mengenal benda dihadapan saya jika benda tersebut berjarak kurang dari dua meter. Jika lebih, saya sudah kesulitan. Begitupun dengan warna, kini saya sudah bisa membedakannya. Yang sulit adalah mengenal wajah. Sebelum ataupun setelah operasi, saya tetap tidak dapat mengenali wajah seseorang, jika orang tersebut tidak berbicara, atau mengeluarkan suara.

Kembali ke masa kecil.

Karena tidak dapat melihat secara

sempurna, sejak kecil saya sudah merasa berbeda dengan anak lain. sejak berusia 4 tahun, saya terkadang bertanya, apakah saya bisa bersekolah seperti anak lainnya?

Saat itu, kebanyakan anak-anak seusiaku sudah bersekolah. Senin hingga sabtu, anak-anak sepanteranku itu berbondong-bondong ke taman kanak-kanak satu-satunya yang ada di kampung kami. Mamapun mencoba menyekolahkanku di TK tersebut. Namun, itu tidak berlangsung lama. Hampir tiap hari, saya mendapat masalah. Bukannya saya tidak mampu mengikuti sistem pembelajaran, melainkan banyak orang tua anak lain yang protes karena anaknya saya pukul. Sebenarnya, hal itu saya lakukan sebagai respon atas hinaan mereka.

Pada akhirnya, mama mengetahui jika ternyata ada sekolah yang dikhususkan bagi penyandang cacat (saat itu masih belum dikenal istilah disabilitas/difabel).

Sembilan tahun saya menempuh pendidikan di sekolah luar biasa, tepatnya di SDLB Negeri Somba Opu (SD) dan SLB A YAPTI Makassar (SMP). Namun, berkat bimbingan dan motivasi dari beberapa difabel lain, pada 2009, saya memberanikan diri melanjutkan sekolah di sekolah umum. Saat itu, saya mendaftar di SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 5 Makassar, dan SMA Negeri 6 Makassar.

Di sinilah saya mengenal istilah penolakan. Jauh sebelum Citacitata menyanyikan lagu 'sakitnya tuh disini', saya sudah terlebih dahulu mengetahui sakitnya di tolak. Berkat kesungguhan dan tekad yang menggelora untuk bersekolah di sekolah umum, akhirnya saya bisa meyakinkan kepala sekolah SMA Negeri 6 Makassar, untuk memberikan kesempatan bagi saya bersekolah di sekolah tersebut.

Sejak saat itu, saya bisa menilai perbedaan kualitas antara sekolah luar biasa dan sekolah umum. pertanyaan yang banyak

di lontarkan oleh mereka yang belum tahu dunia difabel, khususnya di kota Makassar ialah, 'bisakah difabel bersekolah di sekolah umum?' atau 'bagaimana mereka mengikuti pembelajaran?', 'bagaimana mereka bisa ke sekolah?' Dan seterusnya. Meskipun pertanyaan-pertanyaan tersebut telah berulang-kali kami menjawabnya baik melalui media, pemerhati, maupun difabel itu sendiri, pertanyaan-pertanyaan tersebut masih belum dianggap terjawab tuntas. Keraguan akan kemampuan difabel pun tetap berlangsung.

Baik, ikutilah cerita saya ini.

Sewaktu bersekolah di SMAN 6 Makassar, saya tinggal di asrama SLB A YAPTI Makassar yang beralamat di jalan Kapten Piere Tendean. Ada yang tahu di mana itu SMA 6? SMAN 6 Makassar terletak di pinggir tol, Jalan Ir. Sutami (didekat Kawasan Industri Makassar).

Nah, jarak dari asrama tempat tinggal saya dengan SMA 6 sekitar 9 kilometer. tetapi untuk menuju ke sekolah tersebut tak semudah yang teman-teman bayangkan. Pagi-pagi saya harus berjalan sekitar setengah kilometer melintasi jalan Kapten Piere Tendean, Jalan Gatot Subroto, lalu menyeberang di perempatan Teuku Umar – Jalan Sunu, dan menyeberang lagi menuju jalan Galangan Kapal.

Di situlah saya menunggu mobil Pete-Pete (angkutan umum) yang jalurnya memasuki jalan tol. Dari situ, saya naik mobil Pete-Pete sekitar 20 menit, turun di jembatan penyebrangan ketiga. Sudah sampaikah di SMA 6? Ternyata belum,

bro. setelah turun dari mobil pete-pete, saya harus menyeberang lagi, kemudian memanjat tangga jembatan penyebrangan, melintasi area dalam tol lewat atas. Kemudian turun dari jembatan, lantas sekali lagi harus menyeberang.

Sudah sampaikah di SMA 6?

Belum!

Dari situ, saya masih harus berjalan sekitar 40-50 meter untuk memasuki gerbang sekolah. Mudah kan? Tiga tahun saya menjalani itu. apakah itu sulit? Tidak kalau ada kemauan.

Hal yang sama juga saya alami ketika kuliah. Rumah saya terletak di perbatasan kabupaten Gowa-Takalar, atau tepatnya di wilayah Bontonompo. Sedangkan, saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar yang terletak di Jalan Raya Pendidikan kota Makassar. bayangkan, sekitar empat tahun lamanya saya harus menempuh perjalanan sekitar 35 kilometer, hanya untuk membuktikan kalau seorang difabel juga mampu berkuliah.

Beberapa orang mungkin akan berkata begini, "tetapi kamu kan *low-vision*?" alias masih memiliki penglihatan. Bung, sebelum saya bersekolah di SMA 6, sudah ada dua orang tunanetra total yang sebelumnya pernah bersekolah di sana. Begitupun di Universitas Negeri Makassar, saya bukanlah satu-satunya difabel yang pernah berkuliah di sana.

Dari apa yang telah saya contohkan di atas, jarak bukanlah penghalang bagi difabel untuk menempuh pendidikan (yang sayangnya tak berlaku dalam hal asmara). Bagaimana bunyi kalimat bijak itu? *there is a will, there is a way*. di mana ada kemauan, di situ ada jalan.

Lantas bagaimana dengan sistem pembelajaran? Bisakah difabel beradaptasi dengan sistem pembelajaran di sekolah reguler?

Sewaktu saya di tolak menjadi calon menantu, eh, maksud saya calon mahasiswa, ketakutan terbesar pihak universitas terletak pada sistem pembelajaran. Umumnya, penolakan-penolakan yang diperoleh seorang difabel saat mendaftar di sekolah regular juga seperti itu. asumsi yang sering dijadikan senjata ialah, 'kami belum pernah menerima siswa difabel', 'kami belum memiliki guru yang pernah memiliki pengalaman mengajar difabel', 'fasilitas sekolah/kampus kami belum lengkap'. Bagaimana mungkin persoalan-persoalan tersebut bisa terselesaikan jika sekolah/universitas tersebut belum pernah menerima peserta didik difabel?

Di sinilah dibutuhkan peranan difabel itu sendiri. Satu hal yang membuat saya sedih adalah, setiap tahun, jumlah SLB di kota Makassar terus bertambah. Bagi saya, hal ini akan membuat banyak difabel lalu tidak mau berusaha. Toh, jika bersekolah di SLB tidak membutuhkan usaha ekstra. Sudah gratis, dapat beasiswa pula. Tapi lihatlah perbedaan antara difabel yang hanya bersekolah di SLB dengan mereka yang bersekolah di sekolah regular.

Mari ikuti cerita saya lagi.

Apa serunya sih sekolah di SLB? Dulu, waktu di SD, selama 6 tahun, 12 cawu (saat itu masih dikenal istilah catur wulan) dan 6 semester, saya, tanpa ada yang mampu menyaingi, menduduki peringkat pertama secara terus-menerus. Kenapa? Karena siswa tunanetra di SDLB tersebut hanya saya. Hebat, kan? Bagi teman-teman difabel yang membaca tulisan ini, *come on!*, lanjutkan pendidikan di sekolah umum. Buat para pemerhati

pendidikan, daripada mendirikan SLB, mending sekolah umum yang sudah ada dijadikan sekolah inklusif.

Di SLB, kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Ini tentu berbeda dengan yang berlaku di sekolah umum. Di mana pada kurikulum pembelajaran, ada standarisasi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Dengan melihat perbedaan mendasar tersebut, kita telah dapat melihat lemahnya sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah SLB jika dibandingkan dengan yang berlaku di sekolah umum.

Dengan prinsip 'materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik', telah menghambat siswa difabel untuk mengembangkan dirinya. Hal tersebut pun semakin memprihatinkan jika melihat masih rendahnya kreativitas guru SLB. Sebagian guru SLB masih abai terhadap peserta didiknya. Tidak adanya standarisasi yang berlaku pada kurikulum SLB, telah membuat banyak guru SLB dapat mengajar dengan semaunya.

Jika ada sebuah materi pembelajaran yang tidak dapat dipahami oleh peserta didik difabel, sebagian besar guru SLB akan menarik kesimpulan jika siswa difabel tidak akan pernah mampu dalam memahami materi tersebut. Bukannya mencari solusi guna mengatasi permasalahan itu, mereka justeru berasumsi yang sama sekali telah mendiskreditkan kemampuan peserta didik difabel.

Pada mata pelajaran hitung-hitungan misalnya (matematika, fisika, kimia, dan akuntansi), sejauh ini guru SLB belumlah menemukan cara terbaik untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut kepada peserta didik difabel netra. Dampaknya adalah peserta didik difabel netra yang melanjutkan pendidikannya di sekolah regular (semisal SMA), khususnya di kota Makassar,

akan mendapatkan kesulitan pada mata pelajaran tersebut, mengapa? Karena sewaktu sekolah di SLB, pengetahuan dasar mereka terhadap mata pelajaran tersebut, sangat tidak memadai. Hal yang memprihatinkan justeru terjadi di sebagian SMA Luar Biasa yang saat ini lagi marak di kota Makassar. Para guru SLB, yang memang pada dasarnya tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mata pelajaran hitung-hitungan, akan mengajarkan materi rendahan kepada peserta didik difabel.

Dari riset sederhana yang pernah saya lakukan di tiga SMA LB di kota Makassar, saya membandingkan antara materi pembelajaran yang saya dapatkan di SMA regular dengan materi pembelajaran yang saya peroleh di SMA LB (sebagai difabel sensorik, low vision). Hasilnya sungguh di luar dugaan. Hampir 50% materi pembelajaran yang peserta didik difabel tersebut dapatkan di SMA LB bahkan jauh lebih rendah dari materi pembelajaran yang diperoleh non-difabel di SMP regular.

Dengan temuan tersebut, apakah kita bisa menarik kesimpulan jika peserta didik difabel (khususnya difabel netra), tidak begitu menguasai mata pelajaran yang membutuhkan keterampilan berhitung?

Persoalan ini sungguh menarik untuk didiskusikan. Sayangnya, sebagian besar difabel netra pada saat ini, masih abai dengan persoalan tersebut. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, mereka tidak mau susah, lebih memilih untuk tinggal di lingkungan SLB, mereka berpikir: toh hidup kami telah susah sejak menjadi difabel, buat apa pula dipersulit dengan hal yang tidak bisa kami lakukan.

Bagi saya, Para difabel yang berpandangan seperti ini telah termakan dengan opini yang dibangun oleh guru SLB!

Jangan pernah meragukan kemampuan intelektual difabel. Saya, menyelesaikan kuliah di UNM dalam waktu studi 46

bulan, dan Indeks Prestasi Kumulatif 3,55. Sewaktu bersekolah di SMAN 6 Makassar, tepatnya di kelas XI, dari 35 siswa yang menghuni kelas, selama dua semester berturut-turut, saya menduduki peringkat pertama. Sahabat saya, Hendi Hogia (difabel netra lulusan Universitas Indonesia), juga memiliki prestasi yang tak kalah membanggakan. Sewaktu bersekolah di SMA negeri 2 Bukit Tinggi, ia berhasil mematahkan opini para guru SLB. Ia menjadi salah satu lulusan terbaik di sekolahnya, yang kemudian membuatnya diterima di Universitas Indonesia tanpa tes. Tahukah kalian, apa yang menjadi mata pelajaran andalannya sewaktu SMA? Itulah mata pelajaran yang diasumsikan oleh guru SLB jika tunanetra tidak memiliki kemampuan dalam mata pelajaran tersebut, STATISTIK!

Jika punya kesempatan, saya ingin mempersilahkan para guru SLB, khususnya yang mengajar di SMA LB untuk melihat nilai rapor SMA dan Transkrip nilai S1 Hendi Hogia. Selama tiga semester belajar statistika di UI, Hendi Hogia selalu mendapat nilai A. hal yang bahkan sulit dicapai oleh mahasiswa non difabel saat ini.

Itu hanyalah prestasi biasa yang kami, para difabel miliki. Di luar sana, masih banyak prestasi yang diraih difabel lain yang tak kalah prestisius, yang dapat membuktikan bahwa secara intelektual, difabelpun tak ada bedanya dengan mereka yang non difabel.

Ketahuilah, bung, bahkan sudah banyak difabel asal Indonesia yang melanjutkan studinya di Australia dan Amerika!.

Selanjutnya soal fasilitas. Seperti yang sudah saya katakan di atas, fasilitas menjadi salah satu senjata yang sering digunakan untuk mempersulit difabel untuk bersekolah di sekolah umum.

Lantas apa solusinya?

Mudah saja, cukup terima dulu difabel yang ingin bersekolah di sekolah regular. Itu saja dulu. Nanti setelah siswa difabel diterima, barulah pihak sekolah menanyakan apa saja kebutuhan, fasilitas apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan sekolah agar anak itu bisa mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kalau masih bingung, berdialoglah dengan lembaga-lembaga difabel atau pemerhati difabel. Dengan berdialog, saya meyakini akan banyak persoalan yang dapat terselesaikan.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan sebuah cerita pengalaman nyata yang saya peroleh sewaktu masih berkuliah. Simaklah baik-baik.

Saat itu, karena keperluan tugas akhir, seorang dosen pembibing menyuruh saya mencari data sekolah inklusif di Makassar. Hal pertama yang terbersit dalam pikiran saya waktu itu adalah saya harus ke kantor Dinas Pendidikan Kota.

Maka pergilah saya ke kantor Dinas Pendidikan mencari data yang diperintahkan. Kabar baiknya, semua pegawai Dinas Pendidikan saat itu memperlakukan saya dengan baik. Tetapi, ketika saya menanyakan data yang saya butuhkan, mereka mengatakan tidak memiliki data tersebut. Jangankan sekolah inklusif, bahkan data jumlah SLB di kota Makassar mereka tidak punya.

Saya berpikir positif. Mungkin saja mereka lupa di mana menyimpan datanya. Besok dan besoknya lagi, saya kembali berkunjung ke tempat itu, mencoba bertanya ulang. Hasilnya nihil. Mereka mengatakan tidak ada. Ini membuktikan, dalam hal pendidikan, pemerintah kota ini belumlah terlalu peduli dengan difabel.

Pada akhirnya saya berhasil mendapatkan data tersebut setelah melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan propinsi.

Itupun datanya merupakan data lama yang belum diperbarui. Demikianlah. Pemerintah tercinta terkadang hanya sok peduli sewaktu pilkada, dan menjadi hipokrit saat berkuasa. Begitupun dengan sebagian guru SLB, mereka seolah-olah paham sekali dengan dunia pendidikan para difabel, sok ahli dengan segala hal yang berhubungan dengan ke-difabilitas-an, tetapi kenyataannya, mereka hanya mencari keuntungan dengan cara mengeksploitasi para difabel tanpa mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi para difabel.

Kalau memang kalian peduli kepada difabel, mari terapkan segala peraturan yang menjamin kesetaraan bagi difabel. Kami tidak mau ada kepala sekolah yang menolak difabel dengan asumsi tak mendasar seperti ini, "kan sudah ada SLB? Buat apa sekolah di sekolah umum?"

Hentikan berasumsi, sekolahkan difabel di sekolah-sekolah inklusi sekarang juga!

Bonto Langkasa hingga Minasa Upa, 25 maret 2017.

GAGASAN [10]

KURSUS BAHASA INGGRIS INKLUSI BERTEMAKAN DISABILITAS

April 21, 2017

PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA UNTUK KESETARAAN (PERDIK), dan Forum Kampung Bahasa Sulawesi (FKBS) resmi melakukan kerjasama pada 21 April 2017. Capaian ini merupakan tindak lanjut dari beberapa diskusi yang pernah PerDIK dan FKBS lakukan.

Dalam kerjasama ini, FKBS memberikan kesempatan bagi difabel di kota Makassar dan sekitarnya yang ingin belajar bahasa inggris, untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di sekertariat FKBS, (Jalan Tamalate 2 blok 11 no.11). Sebelumnya, PERDIK telah menawarkan program ini ke beberapa komunitas difabel di kota Makassar. dan pada akhirnya, ada 6 orang difabel netra yang berminat.

Salah satu hal yang menarik dalam kerjasama ini adalah, FKBS akan mencoba mempraktikkan sistem pembelajaran yang inklusif. Jadi nantinya, di ruang kelas, ke-6 difabel yang telah mendaftar akan belajar dengan peserta kursus lainnya. Jadi tidak ada perlakuan khusus dan pemisahan kelas dengan peserta kursus lainnya, seperti yang berlaku di Sekolah Luar Biasa. Selain itu, kursus ini akan dibuat tematik, di mana materi pembelajarannya akan banyak mengadopsi tema atau isu terkait difabilitas atau disability studies. Jadi jika tipe kelas kursusnya adalah speaking, maka materi percakapan atau diskusi adalah bertemakan isu disabilitas.

Untuk periode perdana ini, rencananya, pembelajaran akan diawali pada pekan depan (Akhir atau awal Mei 2017).

Nah, buat teman-teman difabel yang juga memiliki minat untuk belajar bahasa inggris (bukan sekedar angan-angan), PerDIK dan FKBS masih membuka kesempatan bagi yang berminat untuk mendaftar. bagi yang serius (bukan PHP), silahkan menghubungi: 085256233366 (Nur Syarif Ramadhan) untuk info lebih lanjut. pendaftaran dibuka hingga jumat, 05 Mei 2017.

Uuntuk info tentang FKBS, bisa di cek di :
http://fkbs.org/
terimakasih

GAGASAN
[11]

MEMIKIRKAN PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS

May 21, 2017

Ishak Salim

Komisi Nasional Disabilitas atau KND adalah amanat UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Bagaimanapun Lembaga ini harus terbentuk untuk mendukung percepatan pemenuhan Hak-hak Difabel, demikian argumentasi ahli hukum. Hanya saja, hingga saat ini, sebagai sebuah institusi yang kelak berdiri dia belum memiliki gagasan-gagasan soal struktur dan norma-norma seperti apa yang akan menopangnya. Untuk itu, seluruh pihak yang berkepentingan mengenai isu difabilitas atau kemanusiaan pada umumnya harus duduk bersama mendiskusikannya.

Jika KND adalah lembaga strategis dalam struktur kenegaraan, salah satu yang berkepentingan untuk "mengontrolnya" adalah Departemen Sosial. Departemen yang pernah dibubarkan oleh Presiden abdurrahman Wahid pada tahun 1999 ini sudah sejak lama mendominasi cara pandang dan kepengaturannya terhadap isu difabilitas.

Baik buruknya cara kementerian ini dalam mengurusi urusan difabilitas sudah kita ketahui. Cara pandangnya yang

mengadopsi Perspektif Medik sudah membawa banyak konsekuensi kurang bagus bagi difabel. Bagi Depsos, akar persoalan difabel ditumpukan kepada aspek individu sehingga sehingga "keterbatasan" fisik dan mental seseorang menjadi alasan ketidakberdayaannya dan untuk itu menjadi dasar bagi Depsos menyusun program-program bantuan sosial yang wujud-wujud fisiknya bisa kita saksikan dengan mudah: Panti Rehabilitasi sampai organisasi-organisasi kemasyarakatam berbasis kategori "disfungsi tubuh, intelektual, dan mental" berdiri dan memperpanjang praktik atau politik pemisahan dan pemilahan orang berdasarkan kondisi tubuhnya.

Jejak akibat cara berpikir itu sudah sangat panjang. Awalnya memang dipakai oleh pemerintah kolonial dan para misionaris, tetapi pemerintah pascakemerdekaan mengadopsinya dan menjaga cara pandang itu agar menjadi satu-satunya cara pandang resmi negara. Padahal, jika ingin mengubah sedikit saja posisi cara pandang kita, maka kita bisa menunjuk apa saja di luar diri difabel sebagai sebab yang telah berkontribusi menidakmampukan difabel. Mulai dari cara berpikir, model bangunan, norma sosial, tata krama, teks-teks kebijakan dan lembar-lembar akademik kampus, penafsiran ayat-ayat kitab suci, desain teknologi dll adalah sumber-sumber penghambat difabel untuk berpartisipasi di semua ranah penghidupan secara bermartabat.

Cara pandang seperti itu sudah menjalar ke mana-mana melaui sekolah, televisi, rumah-rumah ibadah, kampus-kampus, perusahaan, koran majalah cetak maupun online, akun-akun fesbuk dll. Siapapun, bahkan sejak ia lahir langsung mendapatkan warisan pemikiran yang menganggap difabel adalah pusat masalah bagi dirinya sendiri. Hanya keluarga tertentu yang memiliki pemikiran berbeda atau mendapat

hidayah 'pengetahuan pembebasan' yang tidak pernah risau dengan kondisi tubuhnya.

Jadi, cara pandang individualistik ini sudah menyatu dan nyaris sulit diubah. Maka keinginan medirikan satu Komisi Nasional untuk menangani isu Disabilitas adalah buah dari cara pandang dominan tadi. Itu hanyalah pelanggengan politik segregasi dalam wujud Komisi Nasional.

Tetapi, jika menurut sementara orang yang merasa paham cara kerja hukum, maka pembentukan KND ini adalah keharusan karena amanah Undang-Undang. Ya silakan saja perjuangkan struktur kelembagaannya dengan mengacu kepada teks kebijakannya.

Tetapi persoalannya bukan hanya pada lembaga itu hadir atau tidak di Republik ini. Persoalan sesungguhnya ada di ruang-ruang publik di mana saat ini difabel masih terus menerus berupaya mendekonstruksi cara pandang medik yang terlalu overdosis di kepala orang-orang: di rumah atau di luar rumah. Mereka yakin bahwa tanpa proses penyadaran melalui pengorganisasian pengetahuan, perlakuan dan pemberdayaan semua warga negara agar lebih adil dalam memaknai keberagaman maka diskriminasi atas difabel tidak akan habis-habisnya bahkan sampai kiamat sekalipun.

Jadi, KND, kalaupun dia berdiri, maka dia pada akhirnya sekadar menjadi produk turunan dari cara pandang lama yang sudah berurat akar. Tetapi, jika KND–yang boleh jadi menjadi incaran kementerian sosial tadi itu–memang harus berdiri, maka sudah sepatutnya norma-norma yang mengaturnya harus berisi pikiran-pikiran yang benar, bukan dominasi medik tetapi menggunakan cara pandang yang lebih bermartabat bagi difabel sebagai warga negara merdeka. KND harus jadi alat saja bagi organ gerakan difabel untuk melakukan perlawanan atas

diskriminasi, demedikalisasi, dekolonisasi disabilitas, destigtamitasi dan seterusnya. Dengan begitu, kita tidak sedang menambah pabrik ekslusi baru di Republik yang menjunjung tinggi inklusivitas ini.

Makassar, 23 Mei 2017

GAGASAN
[12]
OBROLAN DENGAN LUKAS DAN KERSTIN SOAL FISIOTERAPI BAGI DIFABEL

March 23, 2017

Kerstin, kawan di Makassar yang pernah bekerja untuk Penderita Kusta memperkenalkan seorang kawannya dari Amsterdaam, Lukas. Dia seorang Fisioterapis. Saat ini sedang bertugas di Tana Toraja, pada salah satu program berkaitan dengan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Dia punya pengalaman panjang terkait bekerja di ranah rumah tangga khusus isu disabilitas. Saat bertemu Kerstin, saya, Rahman gusdur (direktur PerDIK) dan Erwin meminta Kerstin agar menghubungi Lukas untuk bertemu di Perdik. Tadi Kerstin mengabari bahwa Hari Rabu ini, Sore, Lukas akan hadir.

Sore ini, Lukas dan Kerstin tiba di PerDIK dan kami pun mengobrol.

Lukas memperkenalkan pekerjaannya sebagai mahasiswa di Amsterdaam University dan sebagai Fisioterapis. Ia adalah terapis dari SOMOI, sebuah organisasi fisioterapis untuk kerja-kerja pembangunan di Indonesia. Organisasi ini sudah bekerja kurang lebih 15 tahun di Sulawesi Selatan. Setelah beberapa tahun berhenti, kini program SOMOI berjalan lagi. Lukas adalah salah satu yang dikirim dari Belanda untuk bekerja di Tana Toraja, khususnya di sejumlah SLB dan menangani terapi fisik bagi anak-anak difabel kinetek (fisik), seperti anak dengan Cerebral Palsy, polio, atau orang dewasa yang terkena stroke. Ia menyebutkan, di Toraja ada sekitar 500 anak dengan disabilitas

mobilitas. Itu angka yang cukup besar. Di luar anak-anak itu, yakni orang-orang dewasa, penyebab disabilitasnya kebanyakan karena pola hidupnya yang kurang sehat seperti pola makan, merokok, makan yang manis-manis dominan, dll.

Kami pun menjelaskan apa itu PerDIK dan apa tujuan utamanya organisasi ini berdiri. Kami menyampaikan bahwa PerDIK punya pekerjaan utama yaitu Advokasi dan Pengorganisasian difabel (tingkat keluarga) dan produksi pengetahuan. Pengorganisasian erat kaitannya dengan pemberdayaan difabel baik secara politik maupun ekonomi. Terkait dengan kebutuhan PerDIK untuk mengetahui terapi fisik ini, kami sampaikan bahwa PerDIK dapat bekerjasama dengan sejumlah organisasi (difabel maupun non-difabel) untuk melakukan kerja-kerja terapi. Lukas menyebutkan bahwa terapi bagi difabel bukan hanya fokus kepada terapi fisik, tetapi juga aspek non-fisik seperti pola pikir, dukungan keluarga dan masyarakat. Bahkan, untuk terapi fisik pun masih memerlukan sejumlah ketentuan, seperti perlunya perencanaan dalam terapi.

Kami lalu mengusulkan untuk mengadakan pelatihan bagi pelatih yang mau jadi terapis dan pelatih terapis. Caranya, kita bisa bekerjasama dengan sejumlah Organisasi difabel di kota Makassar dan mendiskukan soal rencana ini.

Lukas setuju dengan rencana itu dan berharap bisa dilaksanakan sebelum dia kembali ke Nederland pada Mei mendatang. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana kita mengupayakan pelaksanaan ini.

Bagaimana agang-agang?

GAGASAN
[13]

PRAKTIK JURNALISME SOLUSI SEBAGAI ALAT GERAKAN DIFABEL MEMBANGUN KESADARAN WARGA

January 27, 2017

DALAM DISKUSI kecil bertajuk peran media dalam gerakan difabel di Sulawesi Selatan, 22 Januari 2017 lalu, terbersit satu gagasan yang mengerucut. Pada intinya, baik pengurus PERDIK maupun pewarta yang turut dalam diskusi baik dari media cetak/online maupun televisi sepakat bahwa Media adalah Pembentuk opini warga yang paling berpengaruh dalam membentuk cara pandang dan perilaku seseorang.

Menurut Ketua PERDIK, Ishak Salim, dalam konteks isu disabilitas, persoalan-persoalan terkait marjinalisasi, sub-ordinasi, pemiskinan, dan stigmatisasi terhadap difabel salah satunya adalah efek dari cara media menampilkan difabel dalam pemberitaannya. Isi media kemudian dikonsumsi oleh pengambil kebijakan, tenaga pendidik sampai orang-orang di tingkat rumah tangga. Selain itu, banyak pelaku media

khususnya media mainstream terlalu mengabdi kepada pemilik perusahaan yang sayangnya lebih mengandalkan 'lakunya' berita ketimbang membangun kesadaran kritis warga. Meningkatnya oplah kerap ditopang oleh cara pewarta yang lebih mengeksploitasi sisi disabilitas seseorang ketimbang sisi bermartabat seorang difabel. Efeknya adalah Difabel menerima beragam label yang justru mendiskreditkan mereka, seperti difabel adalah orang sakit, objek amal, patut dikasihani, tidak mampu, beban sosial, memiliki dosa masa lalu, dan seterusnya.

Perlindungan Hak Difabel sebagaimana tertuang dalam CRPD yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 2009 dan menuangkannya ke dalam UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sesungguhnya semakin memperkuat posisi difabel. Namun, mengingat nilai-nilai itu belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pihak, maka saat ini amat penting menyebarluaskan nilai-nilai tersebut dan mempraktikkannya di setiap daerah hingga di level pemerintahan terendah seperti desa atau kelurahan. Media, sebagai alat yang dipercaya oleh aktivis gerakan difabel dalam hal ini PERDIK sebagai sarana paling baik menyebarkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat luas dan alat pendidikan yang baik perlu menjadi prioritas untuk dipedomani para pengelolanya.

"Ada satu praktik baru dalam jurnalisme yang saat ini sedang berkembang, yakni *the solutions journalism*," ujar Ishak dalam diskusi kecil di Wisma Tamu Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya.

Praktik Jurnalisme solusi berbeda dengan cara jurnalis memaparkan berita pada umumnya, yakni hanya sekadar memparkan fakta di lapangan. Dalam Jurnalisme solusi, fakta—khususnya pemaparan permasalahan ditulis dan dilengkapi dengan apa yang seharusnya masih perlu dilakukan baik oleh orang perorang, institusi maupun pihak lainnya yang terkait

dengan isu disabilitas, yakni sebentuk gagasan atau praktik yang bersifat 'jalan keluar'.

Menurut Ishak yang merujuk kepada hasil penelitian penggagas Jurnalisme solusi ini, berita yang dipaparkan hanya berdasarkan fakta (atau disebut versi pemberitaan tanpa solusi) tidak mengikat pembaca dibandingkan dengan pemberitaan (dengan versi plus solusi) yang lebih berhasil mengikat pembaca untuk memperhatikan isu yang dipaparkan dan bahkan bersedia dengan senang hati menyebarluaskannya di medsos jaringannya untuk menarik perhatian lebih banyak orang.

Untuk membangun praktik Jurnalisme Solusi, PERDIK mengajak kawan-kawan media serta bekerjasama untuk memperjuangkan nasib difabel.

Lagi pula, sampai saat ini, di Sulawesi Selatan belum tersedia media khusus difabel yang dengan mudah (akses) dijangkau oleh difabel dan pihak lain yang konsern atau peduli kepada isu disabilitas. Dengan tersedianya media junalisme solusi ini, maka upaya penyebaran informasi positif difabel akan mengimbangi pola pemberitaan negatif terhadap difabel. Selain itu, mengingat membangun "Rintisan Jurnalisme Solusi" ini nantinya akan didukung oleh para jurnalis dari berbagai media massa maka dengan sendirinya akan menambah pengetahuan para jurnalis terkait ketentuan pemberitaan difabel yang benar.

Apa yang bisa diubah oleh praktik Jurnalisme Solusi?

Perubahan yang diharapkan terjadi pertama-tama adalah cara pandang warga, pelaku media dan negara terkait difabel. Berubahnya cara pandang ini, menurut keyakinan PERDIK yang didasarkan pada sejumlah kisah sukses praktik jurnalisme solusi akan mempengaruhi perubahan kebijakan dan praktik perlindungan dan pemberdayaan difabel berdasarkan ketentuan CRPD (Konvensi Hak-Hak Difabel).

Kedua adalah perubaha dalam perilaku masyarakat dan pemerintah dalam memandang difabel. Difabel seharusnya tidak lagi dipandang sebagai orang tidak mampu, sakit, dan beban keluarga, melainkan difabel adalah aset sepanjang diberikan akses untuk beraktivitas dan berpartisipasi dalam ranah sosial. Tentunya, desain-desain sosial mencakup seluruh sektor penghidupan difabel dapat mengalami penyesuaian-penyesuaian (desain/redesain) guna memudahkan pencapaian tersebut.

Setelah menyepakati perlunya mencoba model Jurnalisme Solusi ini, kolaborasi PERDIK dengan Media nantinya akan memulainya dengan mendiskusikannya lebih jauh dengan kawan-kawan media secara lebih luas. Kebetulan, Ketua Aliansi Jurnalistik Independen Kota Makassar, Agam Qodri Sofyan menginisiasi diskusi soal Peran Media dalam mendorong perjuangan difabel di Kota Makassar, pada 28 Januari 2017 di sekretariat AJI.

Selanjutnya, dalam waktu dekat, akan terbentuk tim yang akan memulai mempraktikkan gagasan ini melalui pembelian domain dan hosting khusus dan sedapat mungkin di desain seaksesibel mungkin. Akses bagi pembaca difabel netra, baik buta maupun *low vision*, maupun Tuli. Setelah desain website ini jadi, aka nada perekrutan calon jurnalis, khususnya dari kalangan muda difabel maupun non-difabel untuk menjalani praktik Jurnalisme Solusi ini. Mereka merupakan contributor yang boleh jadi tinggal di luar kota Makassar. Hal penting lain, dalam kurun waktu tertentu semisal dua-bulanan akan diadakan diskusi rutin membahas liputan baik secara tematik untuk kemudian didorong isunya ke pengambil kebijakan maupun mendiskusikan aspek teknis lainnya misalnya pendalaman keterampilan para contributor ini. Entah itu melalui pelatihan investigative reporting ataupun keterampilan lainnya. Ke depan, *syukur-syukur* kalau pengalaman ini kemudian bisa

dibukukan dan menjadi panduan bagi pihak lain untuk juga mengembangkan jurnalisme solusi.

Tetapi, bagaimanapun optimisnya para penggagas jurnalisme solusi ini, tetap ada celah yang bisa membuatnya gagal. Misalnya, rendahnya kemampuan jurnalis 'Jurnalisme Solusi' sehingga isi beritanya kurang Memenuhi Aspek atau ketentuan jurnalisme solusi. Kedua adalah adanya pengunduran diri jurnalis karena berbagai alasan (seperti menurunnya komitmen) sehingga membutuhkan lagi perekrutan dan penjelasan baru terkait perspektif difabilitas. Ketiga, tidak aksesnya portal jurnalisme solusi bagi user atau penikmat berita.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka ke depan, pengurus PERDIK melalui direktur PERDIK Abdul Rahman akan menyiapkan Standar Operasional Kerja (SOP) bagi anggota tim Jurnalisme Solusi dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, untuk menjamin tersedianya portal media online yang akses bagi segala jenis difabel, maka PERDIK akan mendiskusikan rancangan laman dengan organisasi difabel di Makassar, seperti Pertuni, Gerkatin, Permata (Mandiri Kusta), HWDI maupun difabel lainnya yang tidak tergabung dalam organisasi difabel manapun. Informasi dari pengguna terkait aksesibilitasakan menjadi dasar desain laman dan aspek teknis sistem informasi dan komunikasi lainnya.

Tetapi, ini masih gagasan. Sore nanti, dalam diskusi dengan AJI Kota Makassar boleh jadi gagasan ini akan mendapatkan kritik. Tentu saja, bagi PERDIK, gagasan yang baik harus selalu terbuka dan siap untuk dikeroyok. Semoga gagasan ini bisa terlaksana[]

Salah satu buku terkait keberpihakan Media Terhadap Difabel yang akan segera terbit

GAGASAN
[14]

UANG BARU DAN POLEMIK TERKAIT AKSESIBILITASNYA BAGI DIFABEL

April 14, 2017

Nur Syarif Ramadhan

SORE KEMARIN, SAYA mengeposkan sebuah berita dari salah satu media online di Makassar ke dinding facebook saya. Media tersebut mewartakan kegiatan Bank Indonesia yang mensosialisasikan pecahan uang terbaru kepada 48 difabel netra di salah satu SLB yang khusus membina difabel netra.

Menurut media tersebut, pecahan uang terbaru ini cukup akses bagi difabel netra. Sehingga, ketika melakukan transaksi, difabel netra tak perlu lagi memeroleh bantuan dari orang lain atau 'orang bermata awas' jika ingin mengetahui jumlah nominal dari uang kertas tersebut. Cukup diraba, maka difabel netra akan mengetahuinya.

Media tersebut juga menjelaskan bahwa, "di setiap pecahan uang terbaru, ada kode yang berupa garis timbul di salah satu sisi uang. Jumlah garis tersebut berbeda-beda dari masing-masing nominal.

Lima menit usai saya memposting berita tersebut, handphone saya berbunyi. Sebuah notifikasi dari facebook. Dua menit kemudian, masuk lagi notifikasi dari messenger. Karena penasaran, saya lantas mengambil handphone, membuka kedua notifikasi tersebut.

Pertama, saya membuka notifikasi Facebook. Seorang aktivis netra menanggapi postingan saya tentang berita tadi.

"Apakah kau ikut dalam sosialisasi itu?"

Baru saja saya ingin menjawab pertanyaannya, si aktivis tiba-tiba melanjutkan komentarnya:

"Saya tidak percaya kalau uang baru itu aksesibel bagi difabel netra. Saya punya beberapa contohnya."

"Apa dasarmu? Kenapa kau beropini kalau uang baru itu aksesibel?" si aktivis terus mencecarku. Saya memilih bungkam. Membiarkannya terus berkomentar.

Akhirnya saya membuka aplikasi Messenger, mengecek notifikasi selanjutnya. Lagi-lagi, seorang aktivis dari pulau seberang, lawan debat saya sewaktu pilpres, ikut menanggapi postingan saya:

"Opini yang anda posting di Facebook barusan sangatlah keliru. Atas dasar apa Anda mengatakan kalau uang cetakan terbaru itu aksesibel bagi difabel netra? Pernahkah anda meneliti? Anda termasuk kumpulan orang-orang yang melakukan pembohongan publik!" katanya bernada kebencian.

Saya memilih mengabaikan kedua komentar di atas dengan dua alasan. Pertama, mereka tidak teliti dalam membaca postingan saya. Kedua, Saat itu saya sedang mengejar tenggat waktu penyelesaian draf tulisan yang akan saya ikutkan pada lomba mengarang braille ONKYO WBU AP ke-15 Tahun 2017. Lomba menulis ini secara teknis rumit. Sebenarnya saya sudah menyelesaikan tulisan sebanyak 1000 kata, namun saya masih harus membuatnya dalam versi braille secara manual. Dari tulisan saya versi dijital hanya 3 halaman, dalam versi braille menjadi 10 halaman. Bagi yang mengetahui bentuk huruf braile, tentu tahu mengapa jumlah halaman bertambah—Huruf

braille adalah huruf timbul, maka ukurannya tidak dapat diperkecil atau sebaliknya. Saya butuh tiga jam lebih untuk mentransfer 1000 kata tersebut ke dalam bentuk braille dengan menggunakan kertas tebal dan reglet braille.

Saya kembali ke postingan facebook. Ada komentar baru dari akun lain:

"Bagi saya, dalam kondisi tertentu, uang cetakan terbaru dapat dikatakan aksesibel. Asal kondisinya masih baru, belum kusut. Tetapi, kalau uangnya sudah menjelajah ke mana-mana, dan bentuknya sudah mulai lecek, lusuh, dan kumal, kemungkinan besar kode tunanetranya akan hilang, atau sudah tak bisa diraba."

Saya sependapat dengan pendapat di atas. Kuduga,si pemilik akun mungkin salah seorang difabel netra yang mungkin saja hadir dalam sosialisasi yang diwartakan media online tersebut.

Satu jam lebih saya menunggu, berharap si aktivis lokal kembali berkomentar. Tetapi nihil. Saya menduga, mungkin pembaca layar di Handphone-nya sedang ngadat, atau mungkin dia juga menunggu sanggahan saya? Akhirnya saya memutuskan membalas komentarnya:

"Maaf, Kak," saya memanggilnya kak, Karena umurnya memang lebih banyak dari saya, dan sewaktu di asrama, ia juga salah satu senior dalam pengaderan yang pernah saya ikuti. Kami juga cukup akrab, dan sama-sama aktif memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak difabel khususnya di Makassar.

"Cobaki baca baik-baik postingan diatas. Itu bukan opiniku. itu berita dari salah satu media online yang saya share. Baca maki baik-baik. adaji itu nama medianya dan orang-orang yang bilang kalau uang terbaru itu aksesibel."

"tidak bisa ki juga paksakan ki itu pandanganta, Karena ada juga difabel netra yang merasa kalau uang yang baru sangat aksesibel buatnya." Lanjutku.

Kutunggu beberapa saat, si aktivis tak jua merespon. Saya lantas mengalihkan perhatian ke *inbox messenger*, membaca ulang *chat* aktivis pulau seberang. Tapi saya sama sekali tak berselera membalasnya. Ia memang suka mendebat saya. Dalam satu forum tak resmi, kami pernah berdebat panjang lebar di Wisma PGI (Menteng-Tanggerang), soal Pendidikan luar biasa. Saat itu saya menggugat jurusan PLB sebagai jurusan yang tak becus mengatasi permasalahan yang banyak dihadapi difabel netra di sekolah reguler.

*

POLEMIK UANG CETAKAN TERBARU ini memang menarik untuk di diskusikan. Apalagi kalau berbicara "ke-aksesibilitisannya" bagi difabel netra

Setahu saya, sebelum pemerintah meresmikan dan mencetak uang seri terbaru ini, mereka pernah mengundang beberapa perwakilan difabel netra di Jakarta untuk mendiskusikan model dan desain terbaik agar kelak desain uang tersebut bisa diakses bagi semua orang.

Beberapa difabel netra yang hadir dalam diskusi tersebut berpendapat bahwa: ke-aksesibilitasan uang kertas dapat terpenuhi apabila Bank Indonesia melakukan perubahan pada bentuk dan ukuran uang. Dengan kata lain, tiap-tiap nominal uang memiliki bentuk ataupun ukuran panjang yang berbeda-beda. Misalnya: pecahan uang 1000, ukuran bentuk dan panjangnya berbeda dengan uang 2000. Begitupun dengan pecahan 5000 berbeda bentuk dan ukuran panjangnya dengan pecahan 10000. Semakin besar nilai uangnya, maka ukuran panjangnya pun akan semakin bertambah, seperti yang diberlakukan pada uang di Hongkong.

Akan tetapi, ketika uang seri terbaru dicetak dan diedarkan, pemerintah masih menggunakan sistem kode bagi difabel netra. Hal yang sebelumnya telah diberlakukan pada uang lama. Kabar baiknya, jika pada uang lama kode yang katanya disediakan sama sekali tidak terdeteksi, pembaruan kode yang diterapkan pada uang baru, sudah lebih terasa keberadaannya. Kodenya berupa garis kasar mungil yang di posisikan di sisi kanan uang. Tiap-tiap uang memiliki jumlah garis yang bervariasi.

Pada pecahan 100.000, jumlah garisnya ada 2. Selanjutnya pada pecahan 50.000 jumlah garisnya bertambah. Semakin kecil nilai uangnya, maka jumlah garisnya semakin banyak.

Apakah ini dapat diakses?

Kalau pembandingnya uang seri lama, tentu saja seri terbaru lebih aksesibel. namun, jika diteliti lebih lanjut, tetap saja uang seri terbaru ini menyisakan beberapa kekurangan.

Dari diskusi lepas yang pernah saya ikuti di grup Whats App kartunet, yang melibatkan beberapa intelektual difabel netra, yang bahkan diantaranya sempat berdiskusi dengan pemerintah, ditemukan sejumlah kendala dalam seri uang terbaru ini.

Yang paling urgen adalah kode itu sendiri. Garis kasar mungil yang diletakan di sisi kanan uang terbaru ini sangatlah rentan untuk tidak terdeteksi. Kalau uangnya masih baru, maka kode ini akan mudah diraba. Tetapi kalau kondisi uangnya sudah lecek, lusuh, dan kumal, kode tersebut secara perlahan akan menghilang.

Sebuah eksperimen dilakukan oleh Muhammad Luthfi, Difabel Netra yang saat ini kuliah di STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) Bandung. Untuk menguji kode garis kasar mungil pada uang seri terbaru, ia mencoba merendam semua nominal uang terbaru mulai dari yang terkecil: 1.000, hingga yang paling besar nilainya: 100.000. usai dimandikan, semua garis kasar mungil yang sebelumnya terdeteksi, menghilang. Kesimpulannya ialah, jika seri uang terbaru ini tidak sengaja terkena air, maka kode garis kasar akan menipis lalu merata.

Demikianlah. Dibutuhkan perjuangan yang ekstra keras agar difabel bisa mengakses segala fasilitas yang negara ciptakan.

Pemerintah semestinya harus lebih jeli dalam memandang masalah ini. Telah banyak kasus yang pernah dialami difabel netra Karena ketidakmampuannya mengenali nilai nominal uang kertas yang mereka desain. Sering terjadi, difabel Netra dikibuli oleh orang lain saat bertransaksi.

Teman saya, sebut saja Tapa, (difabel netra total yang saat ini berprofesi sebagai pedagang keripik keliling), pernah mengalaminya. Saat itu ia sedang keliling menawarkan dagangannya di daerah Bumi Tamalanrea Permai. Seorang mengaku pembeli mendekatinya. Ia meminta keripik sebanyak

lima bungkus keepada Tapa. Perbungkusnya, keripik itu dihargai 8000 rupiah. Si pembeli selanjutnya menyerahkan selembar uang 20.000 sambil berkata:

"Ini uang lima puluh. Kita ambilmi kembaliannya." Dalam hati teman saya ini sudah riang. Total harga dari 5 keripik itu Cuma 40.000. Artinya si pembeli masih memiliki 10.000.

Teman saya ini baru menyadari kalau ia dikibuli saat dagangannya telah habis dan pulang ke rumah. Saat ia menghitung uang hasil penjualannya, ia kehilangan 20.000. Uang 50.000 yang diberikan si pembeli tadi telah berubah jadi 20.000. Ah, andai uang itu dapat diakses, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi.

Saat ini, difabel netra sedang berusaha menemukan solusi agar alat tukar ini bisa lebih mudah dikenali. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi berbasis Android dan IOS. Sejauh ini, yang saya ketahui, ada beberapa pengembang aplikasi berusaha menciptakan program yang dapat membantu difabel netra dalam mengenal uang kertas.

Dua aplikasi pembaca uang pernah saya uji cobakan pada handphone *Xiaumi Redmi4 Prime* dan *Samsung Galaxi Grand Prime* milik saya. Nama aplikasinya: *Android Money Reader* (AMR), dan *Blind Droid Wallet*. Kedua aplikasi ini mudah di temukan di *Play Store*. Cara menggunakannya mudah. Install aplikasi ini terlebih dahulu. Setelah terinstal, aktifkan aplikasinya, lalu arahkan kamera belakang handphone ke uang kertas yang kita punyai. Setelah beberapa saat, akan ada suara robot yang akan menginformasikan nilai nominal uang tersebut. Gampang kan? Sayangnya, kedua aplikasi berbasis Android ini belum mampu mengenali uang keluaran seri terbaru.

Demikianlah, bagi difabel netra, kami harus kreatif dalam mengakali barang ciptaan pemerintah yang tidak

mempertimbangkan aspek aksesibilitasnya secara serius. Tetapi, kreativitas juga menuntut adanya kemampuan mengenali dan mengakses teknologi terkini.

Inilah salah satu tugas utama yang juga harus dilakukan, yakni bagaimana agar difabel netra itu dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Difabel netra, apalagi jika ia seorang aktivis gerakan sangat perlu meningkatkan kapasitas teknisnya, demi memudahkan mereka dalam berinteraksi dan berpartisipasi penuh di tengah persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya permasalahan difabel netra[].

Bonto Langkasa, 13 April 2017

GAGASAN
[15]

ISRA MI'RAJ DAN ALBERT EINSTEIN YANG DIFABEL

April 25, 2017

Nur Syarif Ramadhan

ALBERT EINSTEIN ADALAH penemu hukum relativitas waktu.

Hukum ini menyebutkan bahwa jika sebuah materi atau benda (m) diperjalankan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya (c kuadrat) maka ia akan menjadi Energi (E).

Rumus ini ditemukan Einstein dengan imajinasi karena tentu saja sulit mempraktikkan memperjalankan sebuah benda dengan kecepatan melebih perambatan cahaya matahari.

Hari ini, 24 April 2017 adalah hari memperingati Isra' dan Mi'raj. Ada sejumlah ulama menggunakan teori Einstein untuk menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad melakukan perjalanan antariksa pada malam itu. Bouraq, kendaraan yang dipakai Nabi diduga kendaraan yang geraknya melebihi kecepatan cahaya seperti yang dimaksud Einstein. Dengan cara itu, nabi melintasi planet
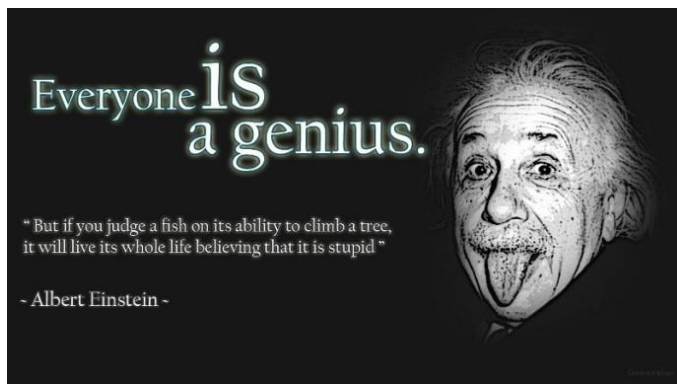
demi planet mulai dari mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunu, pluto dan sidratul muntaha di langit ke tujuh dan mendirikan shalat di masjid yang amat-amat teramat jauh (Al Aqsho).

Tahukah Anda, Albert Einstein adalah seorang difabel. Ia mengalami kesulitan belajar (learning difficulties) saat di sekolah dasar. Namun ia bisa melewatinya dengan dukungan dari orang-orang di rumah dan di lingkungan sosialnya.

Hukum relativitas waktu hanya salah satu dari banyak teorinya yang bermanfaat bagi ummat manusia.

Selamat Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Tertanda
Badan Pengurus PerDIK
(Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan).

GAGASAN
[16]

UPAYA PerDIK DAN GEMPITA: PELIBATAN DIFABEL DALAM PERTANIAN JAGUNG

June 4, 2017

Press Release PerDIK – Makassar, Sabtu 3 Juni 2017

SEGENAP PENGURUS GERAKAN Pemuda Tani Indonesia atau Gempita Indonesia bertemu dengan Pengurus Pergerakan Difabel Indonesia(PerDIK), kemarin 2 Juni 2017 di kantor PerDIK di Makassar.

Pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan peluang difabel di Sulawesi Selatan turut ambil bagian dalam program agraris, khususnya budidaya tanaman jagung di lahan-lahan tidur yang tersedia. Program ini merupakan inisiatif dari Gempita sebagai upaya mengurangi besaran impor pakan maupun pangan ke Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga petani melalui distribusi hasil panen yang lancar dan harga jual yang lebih terjamin.

Direktur PerDIK, Abd Rahman mengawali diskusi dengan menyampaikan bahwa PerDIK adalah gerakan difabel untuk mendorong inklusi di dalam proses pembangunan. Untuk itu, Ia sangat berharap agar program Gempita ini juga membuka peluang bagi difabel, khususnya yang berprofesi atau ingin bekerja sebagai petani untuk berkontribusi dalam gerakan.

Hadir dalam diskusi informal ini adalah jajaran pengurus Gempita tingkat nasional, yakni Abdul Waris (Sekretaris Jenderal Gempita Indonesia), Nurkanita Maruddani Kahfi dan Andi Anugerah Wijaya Baso (Koordinator Nasional Gempita),

Asrul Herman (Koordinator Gempita Sulsel), Syukur Natsir (Pengurus Gempita Sulsel). Sementara itu dari PerDIK, Ishak Salim (Board), Abd. Rahman (Direktur), Erwin T (koordinator Hubungan Antar daerah) dan Zulhajar (peneliti PerDIK).

Menurut Abdul Waris, program yang diusung oleh Gempita mendapat respon yang sangat luas di berbagai daerah. Bahkan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan geliat orang-orang muda petani yang hendak berpartisipasi semakin meningkat.

"Kami akan memastikan, keseluruhan proses mulai dari pembentukan kelompok, masa tanam, panen sampai distribusi hasil panen akan terus dikawal oleh Gempita," ujarnya semalam saat PerDIK mempertanyakan beberapa hal terkait tahapan pembentukan kelompok petani inklusi nanti.

Berdasarkan penjabaran Asrul Herman sebagai koordinator Gempita untuk Sulawesi Selatan, tahapan pelibatan petani dalam program ini kurang lebih dibagi dalam lima tahap. Kelima tahapan itu, meliputi: [1] memastikan terdapat 25 – 30 petani yang akan menjadi calon anggota kelompok petani dalam hal ini petani jagung, [2] memastikan terdapat calon lahan untuk penanaman jagung (pakan), [3] Jika sudah terdapat CPCL atau Calon Petani Calon Lahan, barulah menyepakati pendirian kelompok dan diajukan ke pihak terkait (dinas pertanian dan pemerintah desa), [4] tim Gempita kemudian melakukan verifikasi kelompok berikut lahan untuk tanaman jagung, lalu [5] jika hasil verifikasi berhasil, maka proses distribusi bantuan akan berjalan. Bantuannya berupa bibit jagung sebanyak 15 kg perhektar dengan jenis varietas sesuai permintaan, pupuk urea 50 – 100 kg perhektar dan alat-alat pertanian sesuai kebutuhan kelompok. Selain tahapan itu, Gempita juga sudah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait pertanian untuk memastikan proses pendampingan terhadap kelompok baik oleh Penyuluh Pertanian maupun kader atau pengurus lokal Gempita.

"Kami akan bekerja sama dengan Ikatan Alumni PSBD Wirajaya dan organisasi difabel di berbagai daerah. Kemarin sudah kami sampaikan melalui group internal IKA tentang peluang program Gempita mengikutsertakan difabel berpartisipasi dan respon alumni sangat antusias. Dari berbagai daerah ada banyak yang berminat mencobanya, seperti alumni dari Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Takalar, Enrekang, Luwu, dan Toraja," ujar Ishak Salim dari PerDIK.

"Kalau sudah ada sekelompok difabel di setiap daerah yang bersedia turut serta, maka nanti koordinator Gempita dari setiap kabupaten akan berkoordinasi dengan kelompok dan memberikan bantuan teknis jika dibutuhkan. Untuk kejelasan

yang lebih rinci, kami memiliki dokumen yang bisa dipelajari oleh PerDIK maupun jaringannya," ungkap Abdul Waris.

Koordinator Gempita Sulsel, Asrul Herman berharap kepastian tersedianya CPCL itu sudah tercapai pada akhir Juli, karena, masa tanam untuk sebagian wilayah Sulawesi Selatan adalah bulan September. Kami berharap pada bulan Juli sudah terbentuk sehingga bulan Agustus nanti proses pencairan bibit dan pupuk sudah bisa berjalan dan petani menanam pada awal bulan September.

Baik PerDIK maupun Gempita Indonesia berharap kerjasama ini bisa berjalan. "Jika difabel atau petani difabel bisa turut serta maka program ini bisa disebut sebagai 'Program Bertani Inklusi' dan menjadi wadah pergerakan dalam membangun martabat difabel di bidang pertanian," kata Ishak.[]

GAGASAN
[17]

PENYANDANG DISABILITAS ADALAH LABEL!

October 25, 2016

Ishak Salim

SIAPAKAH SESUNGGUHNYA YANG memiliki kuasa melabeli seseorang dengan embel-embel istilah dan semacamnya? Apakah tujuan dari pelabelan itu? Bagaimana respon dari orang-orang yang dilabeli? Dan bagaimana pula dampak dari pelabelan itu?

Mengajukan dan menjawab beberapa pertanyaan di atas adalah sebuah cara untuk mengetahui mengapa manusia membutuhkan label-label tertentu dan melekat atau dilekatkan ke dalam dirinya.

Negro adalah label bagi orang-orang Afrika yang didatangkan ke benua Amerika sebagai budak oleh para kulit putih (putih juga adalah label). Negro adalah budak atau warga kelas rendah dalam sistem ekonomi pasar yang mengandalkan penjajahan atas wilayah tertentu dan penindasan bagi penduduk terjajah. Sebagai mana negro melekat dalam diri orang-orang Afrika yang diperbudak, di negeri kita juga pernah melekat istilah inlander atau pribumi yang tertindas. Mereka pada dasarnya adalah *jongos* bagi si penjajah.

Dalam konteks kedua contoh di atas. Pelabelan adalah bentuk praktik kuasa membedakan antara sekelompok orang tertentu dengan sekelompok lainnya. Dalam konteks ini, baik negro maupun inlander adalah warga yang tak punya kuasa (powerless) dan penjajah (pihak yang melabeli) adalah yang berkuasa (powerfull).

Lalu bagaimana pelabelan bekerja?

Pelabelan merupakan produk pengetahuan. Di dalamnya tersimpan sejumlah konsep kepengaturan yang memungkinkan mesin-mesin kekuasaan bekerja. Label negro maupun label inlander terkandung aneka ragam pengetahuan yang saling kait mengait,dukung mendukung, demi memelihara tatanan sosial yang hirarkis: penguasa yang merampas dan yang dikuasai sebagai terampas. Pengetahuan-pengetahuan ini merupakan paket pendukung kekuasaan yang disebut teknologi kekuasaan. Penguasa menggunakannya untuk mendefinisikan (memberi batasan/cakupan) seseorang, menelusuri kelemahan dan permasalahannya, lalu menyiapkan paket jalan keluar atas ketertindasannya.

Misalnya saja, orang Afrika yang terjajah itu disebut sebagai negro karena kebodohannya. Demikian pula kaum inlander itu dianggap kaum tradisional yang terbelakang, tradisional dan bodoh. Berdasarkan pendefinisian itulah maka untuk agar mereka bisa mandiri dan tidak terjajah, mereka harus di sekolahkan, dimodernisasi dan seterusnya. Tetapi, paket solusi itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Mereka harus membayar untuk bisa bersekolah atau mengupayakan pendidikan mandiri untuk memutus rantai relasi kekuasaan yang menindas itu.

Dalam keadaan yang tak banyak pilihan itu, label-label yang kelak mengandung stigma negative akan melewati proses

subjektivasi atau penerimaan atas label-label itu. Bagi yang menerima label itu sebagai sebuah kebenaran, maka ia akan tunduk dan patuh kepada sang penjajah yang telah mengendalikan pengetahuan. Sementara mereka yang resisten atau melawan berbagai bentuk pelabelan yang tidak relevan bagi dirinya akan melakukan perlawanan sehari-hari demi menjaga kemandirian dalam dirinya.

Dalam konteks tulisan pendek ini, maka term atau konsep penyandang disabilitas tak lebih dan tak kurang adalah bentuk pelabelan juga. Siapa melabeli dan dilabeli? Mengapa mereka melabeli dan mengapa yang lain rela dan menerima dengan label itu?

Sekali lagi, setiap pelabelan dalam perjalanannya akan mengantar kepada sekian banyak stigma yang pada akhirnya dapat memerjinalkan posisi dan mengabaikan peran orang yang dilabeli sebagai penyandang disabilitas. Dahulu label bagi mereka adalah penderita dan penyandang cacat yang ditopang oleh pengetahuan berbasis medik (bio/tubuh). Dikarenakan bersandar kepada tubuh manusia, dalam hal ini disebut sebagai tubuh yang normal, maka perbedaan bentuk/fungsi tubuh itu kemudian disebut sebagai abnormal, tidak normal atau cacat. Label penyandang cacat atau penyandang disabilitas adalah label yang kemudian memberikan stigma kepada mereka. Masyarakat menerima pelabelan itu sebagai sebuah kebenaran, penyandang disabilitas juga menerimanya sebagai sebuah kenyataan, dan berdasarkan pengakuan itu terjalinlah sebuah relasi kuasa yang timpang, di mana penyandang disabilitas menjadi warga yang dikasihani, dibantu, dimaklumi, disantuni dan berbagai konteks lainnya yang kemudian berdampak kepada proses pelemahan peran sosial mereka di dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Tentu saja ada pula dari mereka yang dilabeli ‘cacat’ atau ‘disabilitas’ itu yang menolaknya dan emoh menggunakan label-

label itu dan pengetahuan yang menopangnya. Bagi mereka, label dan pengetahuan medik yang begitu dominan telah membawa konsekuensi yang luas bagi negeri ini, di mana mereka yang disebut cacat dan disabilitas ini seharusnya bisa menjadi aset bangsa namun ternyata hanya berfungsi sebagai beban bangsa.

Menamakan diri difabel atau berbeda kemampuan adalah cara sebagian dari mereka melakukan perlawanan atas para pemberi label berikut institusi penopangnya. Difabel bukan hanya konsep tanding, tetapi dia juga adalah alat pergerakan dan kini telah menjadi identitas gerakan melawan pelabelan yang merugikan mereka. Stigma adalah salah satu contoh yang paling sulit dihapuskan jika tidak ada upaya menemukan, meneliti dan membangun paket-paket pengetahuan baru yang lebih memandirikan dan menjadikan mereka sebagai warga negara atau subjek hukum yang diakui negara.

Boleh jadi difabel itu juga adalah label, tetapi label yang lahir dari kesadaran kritis para anti label cacat. Mereka menyiapkan lapis-lapis pengetahuan dan baris-baris pergerakan melakukan penghapusan stigma sosial. Mereka mendatangi rumah-rumah yang di dalamnya ada difabel dan keluarga yang diracuni berbagai pola pikir normal dan abnormal. Mereka juga mendatangi gedung-gedung pemerintah dan mendiskusikan jalan-jalan keluar yang lebih membebaskan bagi difabel. Mereka pun ke rumah-rumah ibadah atau rumah sakit untuk membenahi cara pandang dan meredesain bangunan-bangunan mereka. Bagaimanapun, otonomi individu difabel dalam dunia sosial/dunia publik adalah penting. Mereka harus diperlakukan setara baik dalam menikmati aksesibilitas fisik, intlektual, maupun akses di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Jadi, berhentilah mempertahankan label-label kecacatan dan disabilitas itu. Bangkitlah dengan label yang dibangun dari

kalangan sendiri dan pupuklah menjadi identitas yang bermartabat. Sudah cukup bantuan-bantuan berkepanjangan, paket-paket solusi yang salah sasaran, kebijakan-kebijakan yang bermuatan rasa kasihan, panti-panti yang melanggengkan ketergantungan dan seterusnya. Bangkitlah dengan kekuatan sendiri. Mulailah dengan memproduksi sendiri pengetahuan difabel dari aras paling bawah sekalipun. Jangan mudah tergoda oleh konsep dan pengetahuan berkedok skala nasional maupun internasional. Pengetahuan yang kita butuhkan adalah pengetahuan yang lahir dari pengalaman bersama sehari-hari dan jikapun kita membutuhkan duni luar, nasional maupun internasional, itu hanyalah hubungan pertukaran pengalaman dan pengetahuan dan bukan eksploitasi entitas pengetahuan yang satu dengan entitas pengetahuan lainnya[].

GAGASAN
[18]

RENCANA KERJA PERDIK 2017

April 3, 2017

BERIKUT ADALAH RENCANA KERJA PENGURUS Pelaksana Harian PerDIK periode April – Mei 2017. Terdapat 24 item kegiatan yang harus dikerjakan Pengurus Pelaksana Harian hasil mini-workshop penyusunan Rencana Kerja dua-bulanan pada 1 April 2017 di Kantor PerDIK.

Direktur Eksekutif

1. Memastikan setiap Manajer menjalankan rencana kerjanya
2. Berhubungan dengan lembaga lain untuk mengembangkan kerjasama dan berbagi informasi

*catatan: Direktur bersikap pro-aktif mengembangkan jaringan PerDIK baik secara formal maupun informal

Manajer Keuangan

1. Menyusun Rencana Pengeluaran Bulanan Badan Pengurus PerDIK

2. Menyelesaikan SOP Keuangan Organisasi

*catatan: Manajer Keuangan memberikan asistensi kepada bendahara

Manajer Kesekretariatan dan Administrasi

1. Membantu Direktur menyelesaikan Persyaratan administratif PerDIK: NPWP, Akun Bank.
2. Memastikan seluruh Media Sosial PerDIK terupdate: Facebook, Twitter, Instagram, email

*catatan: Kepala Sekretariat PerDIK mengorganisir penyelesaian Persyaratan Administratif PerDIK

Manajer Fundraising dan Kerjasama Antar Lembaga

1. Menyiapkan Profile Organisasi
2. Menyiapkan sistem Donasi Publik kepada PerDIK
3. Bersama Direktur dan rektorat UTS menyiapkan proses pembentukan dan Launching Puskaditas (Pusat Kajian Difabilitas dan Layanan Aksesibilitas)

*catatan: Manager Kerjasama Antar Lembaga meminta masukan ke pengurus terkait narasi dan bentuk Profile resmi PerDIK.

Manajer menyiapkan sistem donasi online ke PerDIK yang memudahkan dan efektif sebagai strategi penggalangan dana.

Manajer Produksi Pengetahuan

1. Menyelesaikan Form Pendataan Pemilih Difabel Kota Makassar
2. Bertemu dengan KPU Kota Makassar terkait Rencana Pemutakhiran data Pemilih Difabel Makassar
3. Diskusi Tengah Bulan 1: Budaya Tuli dan hal-hal yang belum diketahui
4. Diskusi Tengah Bulan 2:

    *catatan:

Form pendataan selesai pada minggu pertama April sebagai bahan diskusi dengan Komisioner KPU Makassar

Pastikan jenis penawaran PerDIK dan rencana anggara

Pastikan Diskusi berlangsung setiap pertengahan bulan. Lakukan dengan disiplin.

Manajer Relasi Media dan Pengelolaan Informasi

1. Uji coba Analisis Pemberitaan Dua Kasus:
   [1] Kasus Kekerasan Seksual Anak-Gadis Difabel di 3 daerah

(Makassar, Soppeng, Bulukumba)
[2] Kasus Pemilu dan Hak Politik difabel
2. Analisis Dua kasus
3. Membangun Sistem dan Program Perpustakaan Dijital bibli@bilitas

*Catatan:

Pengumpulan berita dilakukan pada bulan April. Pada bulan Mei dilakukan Analisis dan Presentasi Hasil Analisis

Manager memastikan Analisis menerima kumpulan berita dan melakukan analisis atas fenomena sosial difabel dalam bingkai media

Menemukan dua tim programmer sistem pustaka dijital dan mulai mendata buku-buku baik soft maupun hard copy.

Manajer Advokasi dan Pengorganisasian

1. Kompilasi Regulasi terkait Difabel berhadapan dengan Hukum
2. Diskusi terkait Strategi Pendampingan Difabel Berhadapan dengan Hukum: Bergerak di ranah Litigasi dan Non Litigasi (Sebagai upaya strategis menjangkau organisasi-organisasi yang konsern pada isu difabel)
3. Jappa-Jappa Ri Kota Daeng: Penilaian Aksesibilitas Ruang dan Tempat Publik ke-1.
4. Pelatihan Terapi Fisik (Fisioterapis) bagi relawan difabel–bekerjasama PUSKADITAS DAN PERDIK

*Catatan:

Manager selain melakukan pengumpulan regulasi secara mandiri dapat juga mengajukan permohonan bantuan data dari lembaga lain

Diskusi Difbel berhadapan dengan hukum ini akan menarik jika dibuat secara bekerjasama antar stakeholder dan memastikan setiap stakeholder semisal APH menjadi tuan rumah diskusi

Kegiatan ini bersifat Undangan Terbuka kepada publik, khususnya difabel dan dilakukan dengan semangat kerelawanan.

Diskusikan dengan Lukas Kasanrokijat dan Ketua Puskaditas UTS (Irawan Amiruddin)

Manajer Usaha Ekonomi Lembaga

1. Memproduksi 100 kaos terkait Kampanye Berpihak kepada Difabel (Strategi pencarian dana organisasi)
2. Distribusi Kaos ke Konsumen
3. Penyusunan Rencana Kerja Divisi UEL

*Catatan:

Manager usaha lembaga berkoordinasi dengan Manajer GENESA-ENREKANG Phalupy

Pastikan setiap pembeli membayar dengan sistem transfer atau cash sebelum menerima kaos.

Hubungan Antar Anggota

1. Pengembangan Jaringan

*Catatan:

Manajer tidak hadir dalam Rapat dwi-bulanan.

Demikianlah, semoga Pengurus Harian PerDIK dapat menyelesaikan rencana kerja ini dan dapat dievaluasi pada dua bulan selanjutnya.

Amin.

PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA UNTUK KESETARAAN

BAGIAN 6

EKSPEDISI
DIFABEL

EKSPEDISI DIFABEL?

October 24, 2016

PENYANDANG DISABILITAS ATAU DENGAN KATA yang lebih terhormat 'difabel' adalah warga dengan perbedaan kemampuan.

Difabel adalah singkatan dari istilah berbahasa Inggris, yakni Differently able atau berkemampuan berbeda. Difabel bukanlah penderita atau penyandang cacat yang dalam pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang rusak, orang tidak mampu, orang merugi (tuna) dan orang sakit.

Sebaliknya, difabel adalah warga berdaya dengan penuh kemampuan. Memang, setiap difabel kemampuannya berbeda antara difabel yang satu dengan difabel lainnya apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan non-difabel.

Seorang difabel melakukan aktivitas keseharian dan partisipasi sosialnya berbeda dari kebanyakan orang. Misalnya, difabel yang berjalan dengan kaki palsu atau kruk atau kursi roda atau dengan tongkat adalah sama saja dengan orang yang berjalan dengan kedua kakinya yang bisa berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Perbedaan terbesar hanyalah pada caranya berpindah dan dukungan model atau desain sarana dan prasarana yang menopang perpindahan seseorang atau benda. Jika di trotoar jalan utama merupakan sarana berpindah bagi para pedestrian, maka orang-orang dengan keragaman kemampuan ini sepatutnya dapat menikmati sarana jalannya secara aktif dan setara.

Orang buta selayaknya menikmati pedestrian yang aksesibel bagi kemampuannya dalam mendengar tanda atau rambu-rambu jalan bersuara, atau perabaan baik di lantai maupun dinding. Pun demikian bagi difabel berkursi roda di mana sudah sepatutnya dapat menikmati pedestrian atau taman kota dengan sarana pejalan yang memungkinkan kakinya (yang berupa kursi roda) melewati . Seharusnya tak ada undak-undak maupun selokan terbuka yang dapat menghalagi mobilitas kursi rodanya.

Sarana dan prasarana yang aksesibel, baik pada kantor-kantor layanan publik, kantor desa, taman-taman bermain, sekolah, masjid, puskesmas, stasiun, terminal, pasar dan seterusnya akan memampukan difabel dan memungkinkannya mendayagunakan aset dirinya untuk berkembang dan lebih bermakna dalam berkontribusi kepada masyarakat.

Dalam kenyataannya, ada banyak keragaman kemampuan baik dalam hal motorik, psikomotorik, intelektual, sosial dan psikososial, mental, bahasa dan seterusnya. contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil saja bagaimana agar kita memahami bahwa ada sekian banyak orang yang selama ini publik mengategorikannya sakit, tidak cakap, penderita, penuh stigma dan seterusnya ternyata dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bersama-sama. Selama ini, kebijakan negara sudah memisahkan mereka dari sistem pendidikan umum. Memang, kini mulai diterapkan sistem pendidikan inklusi namun tetap saja baru permulaan da nada banyak persiapan yang harus dipenuhi sampai peserta didik maupun tenaga pengajar difabel dapat masuk ke dalam sistem pendidikan secara luas dan menasional.

MENDAKI GUNUNG, apakah aktivitas ini hanyalah milik para orang muda yang memiliki anggota tubuh lengkap? Apakah

difabel muda yang juga bersemangat tinggi tak memungkinkan untuk turut mendaki? Tentu saja tidak, siapapun, sepanjang diberikan kesempatan dan dukungan penuh dari lingkungannya untuk berekembang, maka ia pasti bisa. Hanya saja, apakah cukup hanya dengan dukungan desain fisik? Tidak! Hambatan terbesar difabel sulit membuktikan dirinya mampu adalah justru datang dari stigma atau cap miring yang dilekatkan orang-orang kepadanya. Cap bahwa mereka sebagai orang sakit, cap mereka adalah tidak mampu, cap mereka adalah objek amal, cap bahwa mereka patut dikasihani dan tidak perlu atau akan dimaklumi jika ia tidak perlu mengajar atau mengobrol.

Kesulitan terbesar bagi difabel adalah melawan berbagai pelabelan yang disematkan pihak luar kepadanya. Pihak ini bisa saja datang dari keluarga sendiri, bisa dari kaum dokter dan tenaga medik lainnya, bisa dari kaum agamawan, bisa pula dari negara. Jika pelabelan ini merugikan difabel, maka dia harus menolak dan kemudian menanggalkan label-label miring itu. Setelah itu, barulah ia keluar dan membuktikan kepada khalayak bahwa dirinya punya potensi dan tak jauh beda dengan manusia lain pada umumnya. Difabel hanya perlu lebih pro-aktif untuk keluar melabrak dan menembus beragam dan berlapis-lapis batas yang selama ini membuatnya terkucil dan terpinggirkan.

Untuk itulah, mengapa **Ekspedisi Difabel Menembus Batas** ini harus kami lakukan. Tak lain adalah untuk membuktikan bahwa label, cap, asumsi, dan segala macam pemikiran terkait difabel atau penyandang disabilitas selama ini adalah keliru dan patut diubah. Untuk itu, difabel harus bahu-membahu untuk bersama-sama dengan berbagai pihak mendobrak batas-batas itu dan membangun desain-desain sosial yang lebih baru. Dengan desain sosial yang baru, maka siapapun kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk

mengoptimalkan kemampuannya sehingga memiliki fungsi besar untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Aspek Teknis Ekspedisi Difabel

TUJUAN EKSPEDISI

1. Memperingati Hari Disabilitas Internasional;
2. Menunjukkan Kemampuan Difabel dalam aktivitas pendakian;
3. Sosialisasi isu Inklusi dan Aksesibilitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

AKTIVITAS

1. Pendakian ke Gunung Latimojong
2. Sosialisasi Isu Inklusi dan Aksesibilitas dalam pembangunan desa di desa Karangan
3. Pendokumentasian proses pendakian (deskripsi, photo dan Video)
4. Penyusunan Trecking pendakian Akses bagi Pendaki Difabel.
5. Diskusi dan Talkshow Pengalaman difabel dalam Pendakian
6. Konferensi Pers

TIM EKSPEDISI

1. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK)
2. Makkassar Rescue (MR)
3. Kelompok Pencinta Alam (KPA) Capung Nusantara
4. Dinas Pemadam Kebakaran, Pemerintah Kota Makassar
5. Forum Pemerhati Lingkungan (FPL) Makassar
6. MADIPALA FIB-UNM
7. BEM STIKS Tamalanrea
8. Celebes TV

9. Kepal

STRUKTUR TIM EKSPEDISI

Tim Pendaki

1. Sweeper : Iman
2. Leader : Andi Fuad Khidayat
3. Koordinator Tim : Eko Peruge, dibantu oleh Andi Fuad, Abd Rahman, Ismi, Risma, Huzaifah, Ozan, Nurhidayat, Zaenal, Herman, Dilla, Zikrullah, Arfa, Opha, Fauzy, Rizky.
4. Tim Relawan : Ishak, Randi, Dian, Ahmad silaban

BUDGET

Rencana Biaya Ekspedisi ini adalah : Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)—terlampir

PERLENGKAPAN

Tenda, Sleeping Bag, Kompor dll, Nesting (panci), Matras, Head lamp, Kotak P3K, Carrier, Webbing (tali), Karabiner, Seat Harnest, Tracking Full, Ponco, GPS, Handy Talky, Lampu Tenda, Ransum,

[Calon] MITRA DAN SPONSOR (dukungan peralatan/perlengkapan pendakian)

1. Pemprov SulSel, Pemkot Makassar, Pemkab Enrekang, Pemdes Karangan, KODAM VII Wirabuana, POLDA SULSEL, Pertamina Reg. VII, PLN, TELKOMSEL, BNI 1946, Bank Sulselbar, PT Semen Tonasa, PT Bosowa, KALLA Group, PT SGM, EIGER, PDAM Makassar,
2. **[Calon] MITRA SPONSOR (dukungan media dan publikasi),** CELEBES TV, RRI Pro1, Fajar Cetak, Fajar TV, Tribun Timur, FAJAR FM, DELTA FM, E-Radio, Madama FM, Prambors FM, Makassar Terkini, Komunitas Blogger, AcSI – Kata Kerja, AJI SulSel, Inews TV.

MARI BERDONASI MENDUKUNG EKSPEDISI DIFABEL MENEMBUS BATAS 2016

Kami adalah Tim Ekspedisi Difabel Menembus Batas. Kami berasal dari berbagai lembaga yang konsern pada isu disabilitas dan lingkungan hidup. Salah satu lembaga utama pelaksana Ekspedisi ini adalah PERDIK atau Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan yang berkedudukan di Kota Makassar. Perdik menggalang dukungan dari beberapa Kelompok Pencinta Alam dan organisasi lain seperti Makassar Rescue dan Instansi Pemadam Kebakaran.

Saat ini, kami sudah menghimpun dukungan secara sosial dari berbagai pihak untuk mendukung kami memulai dan mempersiapkan ekspedisi pendakian gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, Gunung Latimojong (3478 mdpl). Pendakian dilakukan pada 29 Nopember – 6 Desember 2016 dengan diikuti 5 pendaki difabel dan belasan pendaki dari KPA kota Makassar dan kabupaten Enrekang. Selain pendakian, pada waktu yang sama, kami juga berdialog dengan pemerintah dan warga desa Latimojong terkait isu disabilitas dan pentingnya melibatkan difabel dalam kegiatan sosial dan pemerintahan di desa. Setelah pendakian, kami juga akan berbagi pengalaman terkait pendakian.

Untuk dapat mengikuti persiapan kami, silakan kunjungi **www.ekspedisidifabel.wordpress.com** dan jika membutuhkan sarana komunikasi via email, silakan tujukan kepada kami di email: perdiksulsel@gmail.com

Jika Anda tertarik dan hendak mendukung gerakan kami ini, silakan memberikan donasi kepada tim ini melalui: **https://kitabisa.com/ayoekspedisidifabel?ref=29a6e&utm_source=facebook&utm_medium=sharebutton_payment_summary&utm_campaign=projectshare**

EKSPEDISI DIFABEL [2]

PERSIAPAN UNTUK ESOK ADALH KERJA KERAS DI HARI INI?

November 11, 2016

JUDUL TULISAN INI ADALAH kutipan dari ucapan sang legendaris Kungfu, Bruce Lee. “Preparation for tomorrow is hard work today! Begitulah kira-kira gambaran upaya Tim Ekspedisi Difabel Menembus Batas mempersiapkan diri beberapa hari ini.

Ada beberapa [calon] pendaki yang sudah memastikan diri ikut dalam tim ekspedisi memperingati hari difabel internasional dengan mendaki ini tidak hadir berlatih. ini sudah memasuki minggu kedua latihan atau bina jasmani

berlangsung. Jika latihan esok (13 Nopember 2016) sang pendaki tak jua berlatih, maka keputusan akan diambil oleh koordinator tim ekspedisi, Eko Peruge untuk mencoret nama mereka dari tim.

"Kami masih memberi toleransi bagi kawan yang hingga malam ini belum bergabung!" ujar Eko tegas di sela-sela latihan di Kantor Federasi Penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan kemarin. Hingga menjelang tengah malam ini mereka masih berlatih dan latihan sudah berlangsung sejak siang tadi.

Beruntung tim ini memiliki Herman, anggota Makassar Rescue dan juga anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Ia memiliki pengalaman lebih dari anggota lainnya. Menurutnya, Organisasi Makassar Rescue adalah cerminan Wanadri, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung yang ternama di Indonesia. Herman sudah mengikuti sejumlah pelatihan SAR dan siap berbagi dengan tim pendaki yang kebanyakan masih tergolong pemula.

Oleh kawan-kawan sesama tim pendaki, Herman dipanggil Komandan. Dia bukan sekadar sedang berupaya membangun kedisiplinan dalam tim tetapi lebih dari itu, ia sedang mempersiapkan tim yang prima. Dalam latihan SRT (Single Rope Technique) atau bergelantungan pada bidang vertikal ia tidak segan-segan "menghukum" anggota tim yang keliru dalam memasangkan 'seat harness' kepada anggota tim yang akan mencoba teknik menggantung di tali tunggal ini.

"Push-up 50 kali!" hardiknya tak segan. Anggota tim menerima itu sebagai perintah komandan dan segera berujar lantang, Siap, Ndan!" lalu melakukan push-up dan menghitungnya.

Latihan ini bukan latihan SRT biasa. ada tiga pendaki difabel turut dalam latihan ini. setiap pendamping difabel berlatih lebih dulu baru kemudian pendaki difabel.

"Mungkin saja hal ini tidak akan kita lakukan dalam pendakian nanti, namun jika terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan misalnya anggota tim terjatuh maka dengan teknik ini kita bisa melakukan tindakan evakuasi dengan mudah," demikian ujar sang komandan.

"Begitu pula bagi pendaki yang bertugas sebagai tim medis, harus pula memiliki keahlian SRT ini!" tegasnya kepada Ismi yang bertugas sebagai tim medis dalam ekspedisi ini. Ismi adalah seorang apoteker dan juga anggota KPA Capung di Makassar.

Dua hari ini, anggota tim yang berlatih adalah Abd Rahman dan Syarif (keduanya difabel netra–low vision), EKo Peruge (Difabel kinetik dan sekaligus koordinator ekspedisi), Herman, Fuad, Rizky, Nurhidayat, Farid, Wahyu hidayat, dan Joja.

"Latihan berikutnya adalah hari Minggu, kami merencanakan bisa berenang di kolam renang," demikian ujar Herman.

Menjelang bubar, Herman meminta tim briefing. Menurutnya, briefing penting untuk mengevaluasi kegiatan. Setiap anggota dimintanya bertanya terkait apa saja, khususnya hal-hal yang belum diketahui dari materi pembelajaran yang diberikan.

Pendakian Gunung Latimojong akan berlangsung pada 29 Nop – 6 Desember. Jika perjalanan lancar, maka pada 3 Desember atau bertepatan dengan hari difabel Internasional, tim akan menggapai puncak rantai Mario. Untuk membangun harapan keberhasilan ekspedisi ini Herman meminta seluruh tim berdoa bersama.[]

EKSPEDISI DIFABEL

[3]

EKSPEDISI DIFABEL MENEMBUS BATAS: BUPATI ENREKANG SIAP MEMBANTU.

November 2, 2016

Bupati Enrekang, **H. Muslimin Bando** menerima kunjungan Tim Ekspedisi Difabel Menembus Batas pada 31 Nopember 2016. 3 Pendaki difabel, 2 Pencinta Alam dari KEPAL dan MAKASSAR RESCUE dan Pengurus PERDIK turut dalam kunjungan tersebut. Sebagaimana disampaikan dalam Konferensi Pers Tim Ekspedisi 28 Oktober 2016 yang lalu, tim Ekspedisi ini akan memeriahkan Hari Difabel Internasional 3 Desember mendatang dengan mendaki gunung tertinggi di Pulau Sulawesi, yakni Gunung Latimojong di Kabupaten Enrekang.

Menurut **Fuad**, perwakilan pendaki dari KEPAL yang turut dalam pendakian ini, audiensi dengan Bupati Enrekang adalah dalam rangka penyampaian dan permohonan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten. Dukungan itu sangat dibutuhkan Tim Ekspedisi karena ini adalah pendakian perdana di mana ada kolaborasi antara pendaki difabel dan non-difabel dalam satu

tim. Sebelumnya sudah banyak pendakian ke Gunung Latimojong tetapi kebanyakan hanya diikuti oleh pendaki non-difabel.

Sedangkan menurut **Eko Peruge**, penggagas pendakian inklusi ini, pendakian oleh difabel di Gunung Latimojong adalah untuk mengabarkan kepada khalayak umum bahwa difabel bukanlah insan yang lemah dan selamanya harus diperlakukan penuh rasa kasihan. DIfabel adalah orang yang memiliki perbedaan kemampuan. Apa yang tampak berbeda dalam tubuh kami bukanlah alasan untuk menyebut kami insan yang disabel atau tidak mampu. Kami, sebagaimana manusia pada umumnya mampu melakukan tindakan apapun bergantung kepada dukungan di luar dirinya. Justru yang menjadi penghalang atau yang membuat kami tidak mampu adalah karena disain sosial di sekitar kami yang menidakmampukan kami melakukan akitvitas dan berpartisipasi secara sosial.

"Saat ini, kami mendaki dengan pencinta alam dari berbagai organisasi. Kami akan mengorganisir kegiatan ini bersama-sama, berlatih jasmani bersama, menerima keterampilan-keterampilan teknis pendakian bersama-sama," demikian ungkap Eko di sela-sela kunjungan di kantor bupati.

Muslimin Bando menyambut Tim Ekspedisi di ruang kerjanya. Ia meminta penjelasan mengenai kegiatan Tim Ekspedisi dan begaimana ekspedisi akan berjalan. Abd Rahman, selaku direktur PERDIK menyampaikan secara runtut perihal aktivitas selama ekspedisi, yakni Talkshow di beberapa media dengan isu-isu disabilitas, diskusi desa ramah difabel (desa inklusi), dan Seminar Nasional berbagi pengalaman pendakian.

Herman, anggota tim SAR Makassar Rescue mengemukakan kepada Bupati Enrekang dan tim pendaki bahwa dirinya akan

memberikan beberapa keterampilan teknis yang ia pelajari dan alami dalam kerja-kerja Pencarian dan Evakuasi korban selama ini.

"Kami akan mempelajari beberapa teknik pendakian seperti teknik memanjat tali, baik memanjat maupun saat turun. Teknik ini penting untuk melatih kekuatan otot lengan pendaki yang dibutuhkan dalam pendakian di Latimojong. Termasuk teknik itu adalah beberapa teknik simpul dasar," demikian ujar Herman.

Setelah mendengarkan panjang lebar penjelasan Tim Ekspedisi, Bupati Enrekang siap membantu namun Bupati belum bisa memastikan bantuan apa yang bisa diberikan pemkab atas rencana ekspedisi difabel menembus batas ini. Sebelum menutup pertemuan, Bupati membuatkan disposisi yang ditujukan kepada kepala dinas sosial agar dibantu sesuai aturan.

Setelah itu, Tim Ekspedisi kemudian menemui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang Hj. Sawalia Baharuddin. Tim Ekspedisi menyampaikan disposisi bupati dan setelah itu mendiskusikan dukungan lebih lanjut dari Dinas Sosial terkait Ekspedisi pendakian Gunung Latimojong pada 29 Nop – 6 Desember 2016. Dalam perbincangan itu, kepala dinas memastikan bahwa saat ini sulit sekali memberikan dukungan finansial terhadap Tim Ekspedisi. Dinas sosial hanya mengeluarkan selembar surat pemberian izin meminta sumbangan ke dinas-dinas dan masyarakat Enrekang. Abd Rahman, direktur Perdik menyayangkan ketidakseriusan kepala dinas sosial menyikapi rencana ekpedisi inklusi ini. "Kami ingin berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mendorong agar isu-isu disabilitas bisa menjadi perhatian banyak pihak. Kami ingin berdiskusi dan berbuat yang terbaik bagi difabel di daerah. Jadi mari kita bergerak bersama-sama," ujar Rahman kecewa.

Selain menemui bupati dan kepala dinas sosial, Tim Ekspedisi yang terdiri dari Abd Rahman, Eko Peruge, Risma, Fuad, Herman dan Ishak Salim, juga menikmati obrolan dengan kelompok Literasi Enrekang di tepian sungai Saddang yakni di warung kopi Macca 36. Dari obrolan bersama Dadang salah seorang penggiat literasi Enrekang, Tim Ekspedisi berharap agar kelompok literasi Enrekang bisa membantu menuliskan pengalaman pendakian nanti.

Diskusi Tim Ekspedisi dengan personil KPA Sikolong di Kalimbua, Baraka.

Selanjutnya, menjelang sore, tim Ekspedisi juga menuju organisasi lokal yang sudah memastikan akan menjadi bagian dari tim Ekspedisi ini, yakni Kelompok Pencinta Alam SIKOLONG. Dari kota Enrekang, tim ekspedisi menuju Baraka dan kemudian berbelok ke Kalimbua menuju Sekretariat KPA Sikolong. Tim ekspedisi disambut oleh dua personil Sikolong di teras rumah panggung. Tak lama kemudian kedua tim ini mendiskusikan sejumlah persiapan menjelang pendakian[].

EKSPEDISI DIFABEL [4]

PerDIK PERINGATI HARI DIFABEL DI PUNCAK LATIMOJONG

November 4, 2016

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) akan melakukan pendakian Gunung Latimojong, 28 November hingga 3 Desember mendatang. Pendakian tersebut sebagai ajang pembuktian bahwa difabel juga mampu beraktivitas seperti masyarakat lain.

Direktur Perdik, Abdul Rahman, mengatakan pendakian ini juga untuk menyosialisasikan tentang hak-hak difabel. Sebelum mendaki, Perdik, akan melakukan sosialisasi di desa terakhir, kaki Gunung Latimojong, Desa Sarangan, Kabupaten Enrekang.

Di desa ini, Perdik akan menyosialisasikan UU nomor 8 tahun 2016, serta perda aksesibilitas difabel tahun 2016 yang telah disahkan.

Jika sesuai rencana, pada 3 Desember nanti, mereka akan melakukan upacara di puncak Rantemario untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional.

"Ini sebenarnya juga membuktikan pada masyarakat bahwa kalau memiliki keluarga yang difabel bukan aib, tidak seharusnya malu, tapi bagaimana merangkul mereka untuk bersama-sama mengisi kehidupan sehari-hari," ujar Rahman usai bertemu Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang diberitakan Rakyat Sulsel, Jumat (4/11).

Rahman menambahkan, hingga saat ini masih banyak hak difabel yang belum diberikan, seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, padahal itu diatur dalam UUD 1945.

Setiap tahun, lanjut Rahman, Indonesia juga harus mempertanggungjawabkan di depan PBB sampai sejauh mana realisasi pemenuhan hak bagi difabel.

Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang mengapresiasi kegiatan tersebut, apalagi mereka mengaku itu merupakan yang pertama di Indonesia.

"Ini sekaligus bisa mengenalkan potensi pariwisata di Sulsel, khususnya di Enrekang pada masyarakat Indonesia khususnya difabel," ujarnya. (***)

sumber berita: **http://rakyatsulsel.com/perdik-peringati-hari-disabilitas-di-puncak-latimojong.html** (4 Nop 2016)

EKSPEDISI DIFABEL

[5]

PERJUANGAN MENUJU PUNCAK: PENGALAMAN EKSPEDISI DIFABEL MENEMBUS BATAS 2016

December 30, 2016

Ishak Salim

PADA 3 DESEMBER 2016, tiga pendaki difabel, Eko Peruge, Abdul Rahman, dan Risma Irmawati bersama 25 pendaki lain dari berbagai kelompok pencinta alam berhasil mencapai puncak Rante Mario, Gunung Latimojong, dengan ketinggian 3478 mdpl. Menurut kebanyakan warga Dusun Karangan, ketiganya adalah pendaki difabel pertama yang mendaki di gunung tertinggi kelima di Indonesia. Gunung Latimojong juga dikenal sebagai "atap Sulawesi" karena tertinggi di Pulau Sulawesi. Eko mendaki dengan *kruk* dikarenakan kaki kanannya diamputasi saat remaja. Rahman mendaki dengan pendamping dikarenakan kedua matanya mengalami penurunan fungsi penglihatan sejak umur 12 tahun dan kini mengalami *low vision* kategori berat. Sementara, Risma sejak lahir memiliki perbedaan jumlah jemari di kedua tangannya sehingga memiliki perbedaan dalam menggenggam benda. Eko dan Rahman menggagas "Ekspedisi Difabel Menembus Batas" dan memulai ekspedisi pertama di Gunung Latimojong dari tujuh puncak yang direncanakan. Sebagai anggota tim ekspedisi, saya berupaya menuliskan pengalaman itu dan merefleksikan capaian ekspedisi ini.

SUDAH SEKITAR SATU jam para pendaki berjalan menyisir perbukitan menuju dusun Karangan, Desa Latimojong. Di sisi

GUNUNG LATIM

OJONG 3478mdpl

kiri mereka, hamparan pepohonan kopi terjajar rapi. Biji-biji kopi di pucuk-pucuk ranting di pohon-pohon itu masih muda, menghijau dan mengilap. Sesekali para pendaki juga melintasi mata air yang mengalir dengan liukan alami. Di bulan November ini, biji-biji kopi baru tumbuh. Empat bulan sebelumnya petani-petani memanen kopi mereka dan menjualnya di Pasar Baraka.

"Ke kiri sedikit, jalan becek," ujar Yayat yang berjalan paling depan, menginformasikan kepada Rahman yang berjalan dengan *trekking pole*(tongkat mendaki) di belakangnya.

"Agak ke kanan, ada jurang, … menunduk sedikit," Pendamping lain, Zainal dari *Makassar Rescue* memberitahu Rahman dari belakang.

"Berhenti dulu, haus *ka*!" ujar Rahman tampak kelelahan.

Kerongkongannya mengering dan peluh bercucuran di wajah dan punggungnya. Sejak tadi, suara serangga alam yang mendesis dan mengerik menghiburnya dalam perjalanan ini. Tapi gemercik air tiba-tiba menggetarkan gendang telinganya. Ia membayangkan jernihnya air itu dan ingin merasakan segarnya teguk demi teguk di mulut dan tenggorokannya.

Teman-temannya pun berhenti dan seseorang mengeluarkan botol plastik yang sudah tandas. Yayat memandu tangan Rahman menyentuh air yang memancar dari batang bambu yang terbelah.

Jalur pendaki yang saat ini mereka jalani adalah jalur pekebun kopi. Biasanya, dari Pasar Baraka, para pendaki akan langsung menuju dusun Karangan sebagai pos nol sebelum mendaki. Ada truk berukuran sedang atau *hardtop* yang bisa mengangkut para pendaki, khususnya di hari pasar, Senin dan Kamis. Tetapi saat ini, beberapa ruas jalan kendaraan sedang dibeton. Mobil truk

hanya bisa merapat di Dusun Angin-angin dan selanjutnya mereka harus berjalan sekitar 2 jam atau mengojek.

Rahman adalah ketua Persatuan Tuna Netra Seluruh Indonesia Kota Makassar. Selain itu, bersama kawan-kawan pendaki saat ini, ia adalah direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau PERDIK. Ia, Eko Peruge dan sejumlah aktivis PERDIK sedang memperjuangkan pengurangan stigma negatif terhadap difabel.

Stigma merupakan cap atau label yang disematkan oleh orang-orang berpengetahuan dan berkuasa. Mereka bisa berasal dari anggota keluarga difabel sampai para akademisi kampus atau penentu kebijakan publik. Mereka mampu memproduksi aneka label dengan bermacam alasan. Label itu kemudian disebarluaskan ke seluruh ruang di mana memungkinkan orang-orang meraup pengetahuan dan keuntungan tertentu. Jika label itu diakui benar, maka segeralah label itu dipakai terus menerus di dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di dalam proyek-proyek pembangunan. Tak peduli apakah orang yang dilabeli menerima label atau tidak, bukan hal penting. Sayangnya, penolakan label-label, yang menurut difabel merugikan mereka, ternyata tidak serta merta mudah dihilangkan. Label itu melekat, diakui, dan disebarluaskan sebagai sebuah identitas baru.

Cacat, penyandang cacat, penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, penyandang masalah kesejahteraan sosial, penderita cacat, tidak sehat jasmani, keterbelakangan mental dsb adalah contoh label yang diproduksi negara melalui institusi kesehatan dan kampus. Sementara *to kandala, to picco', to kasiasi, to pepe,* dan lain-lain adalah label lain yang diproduksi oleh anggota-anggota masyarakat tertentu di Sulawesi Selatan. Label itu kemudian bersentuhan dengan berbagai dinamika sosial di mana difabel hidup dan menjelma menjadi stigma yang meminggirkan, mengabaikan, bahkan memiskinkan para difabel.

Apakah kata atau istilah 'difabel' juga adalah sebuah label? Ya, tetapi label ini dan pelabelan istilah tersebut kepada orang-orang tertentu adalah label yang diciptakan sendiri oleh aktivis difabel. Label ini kemudian dipakai dan diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan membentuk suatu identitas spesifik yang tidak mendiskreditkan difabel tetapi justru menempatkan diri mereka lebih sebagai aset ketimbang beban bagi masyarakat maupun negara.

Bandingkan misalnya, difabel adalah akronim dari *differently-able* yang telah diindonesiakan yang berarti 'beda kemampuan'. Sementara disabilitas adalah pengindonesiaan dari *disability*, yang terdiri dari dua suku kata dis-able/ability atau 'tidak mampu'.

Gagasan di Balik Ekspedisi

Awalnya, gagasan pendakian Gunung Latimojong ini disuarakan oleh Eko sekitar 6 bulan yang lalu. Ia seorang yang memiliki beragam talenta. Umurnya muda dan semangatnya masih membara. Ia mengimpikan sebuah kelompok *backpacker disabilitas* kelak dan sejumlah mimpi lain untuk membantu difabel. Ia menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan seorang pendaki difabel asal Solo, bernama Sabar Gorky. Sama dengan dirinya, Sabar juga pernah diamputasi satu kakinya. Tetapi Sabar seorang pendaki dan pekerja keras. Saat ini Sabar sudah mendaki 4 Gunung tertinggi dunia seperti Gunung Kilimanjaro 5.892 mdpl (Tanzania, Afrika), Gunung Aconcagua 6.600 mdpl (Argentina), Gunung Elbrus 5.642 mdpl (Rusia), dan puncak Cartenz 4.884 mdpl (Papua, Indonesia). Ia masih menginginkan menapaki puncak-puncak yang lain (sumber, akun facebook Sabar Gorky).

Bagi Eko, pertemuan dengan Sabar adalah pertemuan yang memengaruhi dirinya untuk setidaknya bisa mengikuti jejak pendakian Sabar. Ia pun turut berlatih memanjat bersama Sabar

saat ia berada di Solo beberapa bulan lamanya untuk melatih diri dengan sejumlah keterampilan hidup.

Pendakian gunung Latimojong yang saat ini dilakoninya dengan Rahman dan Risma (Pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kab. Maros) serta 25 pendaki lain dari berbagai kelompok pencinta alam dan tim media adalah gunung pertama yang didaki dalam ekspedisi ini. Mereka menyebutnya sebagai Ekspedisi Difabel Menembus Batas.

Namanya pada awalnya adalah 'Difabel menembus batas dalam keterbatasan'. Tetapi kemudian setelah mendiskusikan bersama, kata dalam keterbatasan dihilangkan. Mengapa? Karena sesungguhnya 'keterbatasan' ada pada setiap orang, siapapun itu, dan keterbatasan juga bisa bertambah karena ketidaksiapan alat bantu dan desain sosial (khususnya infrastruktur publik) di luar diri seseorang.

"Jika kata 'dalam keterbatasan' disematkan karena ini dilakukan difabel, maka ini memperpanjang stigma atas difabel," ujar saya saat mendiskusikan nama ekspedisi ini.

"Setiap orang punya keterbatasan tetapi tidak ada yang tahu di mana garis batas itu berada. Padahal, kita melakukan ekspedisi untuk mengeskplorasi tingkat aksesibilitas *mountainering* (olah raga mendaki gunung) bagi difabel dan kemudian sekaligus mengampanyekan penghapusan stigma 'tidak berdaya' atas difabel," tambahku menggebu-gebu saat itu.

Setelah menerima gagasan ini dan kami berniat mewujudkannya, mulailah Rahman, Eko dan saya bergerilya mencari dukungan. Rahman memiliki jaringan perkawanan yang luas. Ia menghubungi kawan-kawannya di jurusan Pendidikan

Luar Biasa (PLB) Univ. Negeri Makassar (UNM), khususnya yang aktif dalam Kelompok Pencinta Alam (KPA).

Ia bertemu Fuad, kawan kuliahnya yang merupakan pengurus KPA KEPAL. Fuad kemudian menghubungi sejumlah kelompok pencinta alam di Makassar dan Enrekang. Di Makassar ia bertemu dengan pendaki-pendaki dari Forum Pencinta Lingkungan (FPL) Makassar, KPA Capung, KPA PLB UNM dan Makassar Rescue (SAR). Di Enrekang, ia juga menemui beberapa kawan dari KPA Sikolong, KPA PAKIS, khususnya Darwin dan Ma'un yang kemudian kedua orang ini mengabarkan ke KPA Buntu Batu Mario dan KPA Massenrepulu (Mapasse).

Rahman juga menghubungi jaringan media di mana selama ini ia memang banyak bergaul dengan para jurnalis. Ia melempar gagasan ini di group wartawan dan kemudian group lain entah apa. Ia bertemu dengan Agam, ketua AJI Makassar yang juga bekerja di iNews (MNC connection), Celebes TV, dan pengelola RRI Pro 1. Rahman juga membuka hubungan dengan pemerintah kota Makassar dan beberapa anggota DPRD yang selama ini punya perhatian pada isu difabilitas.

Sementara Eko saat itu belum bisa banyak bergerak mengingat harus membantu Komite Paralimpic Nasional Sulawesi Selatan (NPC) untuk mempersiapkan para atlet paralimpia menjelang dan saat *paralimpic games*tingkat nasional berlangsung di kota Bandung. Tetapi di sela-sela kesibukannya, ia tetap menyempatkan hadir di beberapa pertemuan tim ekspedisi yang telah terbentuk. Ia merekomendasikan seorang kawan di Enrekang untuk membantu persiapan, yakni Paluphy. Paluphy adalah kawan sesama alumni PSPBDW Sulsel. Paluphy—yang memiliki usaha percetakan GENESA di Cakke,

Enrekang—kemudian banyak bergerak menghubungkan tim ekspedisi ke Pemda Enrekang, khususnya Dinas Sosial Enrekang, PPDI Kab. Enrekang, dan beberapa KPA lokal.

Saya sendiri menyiapkan *Terms of References* Ekspedisi, berbagai narasi untuk kepentingan *press release*, menyiapkan dan mengisi situs web ekspedisi dengan berbagai informasi terkait ekspedisi (dapat dilihat di **www.ekspedisidifabel.wordpress.com**) dan pendokumentasian sejumlah aktivitas.

Sedapat mungkin, kami menjaga agar gagasan ekspedisi ini tidak terjebak pada sekadar gagasan 'rekreasional' atau 'gagah-gagahan' orang-orang muda saja tanpa punya efek mengatasi persoalan yang dihadapi difabel di Sulawesi Selatan. Jika hanya menjadi sekadar urusan rekreasional, foto *selfie*dan *update* status medsos, maka urusan marjinalisasi, sub-ordinasi, stigmatisasi, dan pemiskinan atas difabel tidak akan berhenti walaupun gunung tetinggi di Sulawesi dan gunung-gunung lainnya ini berhasil dijejaki puncaknya oleh tim pendaki.

Mengubah Cara Pandang atas Disabilitas

Dalam banyak kajian, apa yang dihadapi difabel saat ini berkelindan dengan berbagai isu sosial maupun politik yang berdampak pada situasi paling buruk bagi difabel, yakni menjadi rentan, miskin, dan tak berguna. Jika ditelusuri, maka akar persoalan pertama adalah soal cara pandang orang atas difabel. Salah satu cara pandang itu mengatakan bahwa difabel adalah 'orang sakit'. Apa yang dapat Anda lakukan jika sedang sakit?

Tetapi benarkah difabel orang sakit?

Di kelompok barisan depan dalam pendakian menuju puncak Rante Mario, Eko Peruge seperti tidak punya hambatan dalam perjalanan ini. Kecepatan langkahnya sebanding dengan

GUNUNG LATIMOJONG
3478 MDPL
SURVEYOR INDONESIA
RANTE MARIO
3478 MDPL

pendaki lainnya. Di depannya ada Ma'un (KPA Sikolong) dan dua kawannya dari KPA Talas Makassar, lalu Herman (Makassar Rescue), Cikku, Farid Parjo, dan Zaenal (FPL Makassar). Di belakangnya, ada Huzaifah (anggota dinas Pemadam Kebakaran Makassar), Dilla (KPA Capung) dan dua dari tim media massa yaitu Azis Kuba (iNEWS) dan Arul Ramadhan (Makassar Terkini).

Ia tidak mengenakan *protese* (kaki palsu) sebagaimana saat saya pertama kali bertemu dengannya dua tahun yang lalu. Ia lebih banyak memakai kruk dan membiarkan celana panjang bagian kanannya tergulung menggantung. Jemari tangan kanannya yang bersarung kukuh menggenggam pegangan *kruk* yang menopang sebagian beban tubuhnya saat berjalan. Saat perjalanan sudah semakin jauh, ia menggunakan *trekking pole* untuk membantunya berjalan.

Dengan kondisi prima saat dia melangkah itu, apakah lantas Eko layak disebut orang sakit? Apakah hanya karena satu kakinya telah diamputasi lantas ia masih layak disebut insan yang sakit?

"Eko nyaris tidak punya masalah saat pendakian," kata Darwin dari BPAN (Barisan Pemuda Adat Nusantara) Mansenrempulu. Ia cukup senior dalam hal pendakian gunung dan menilai Eko seorang pendaki yang kuat.

"Malah beberapa teman yang keteteran mengikuti langkah Eko," Caling dari KPA PAKIS juga mengagumi daya tahan Eko selama pendakian menuju Puncak Rante Mario.

Di cap sebagai insan yang sakit jelas menyakitkan bagi difabel. Mereka diberi label oleh sebuah institusi yang merasa berhak atau dianggap berwenang melabeli orang dengan kategori tertentu. Biasanya institusi itu adalah institusi kesehatan dengan perspektif medik yang kental. Pelabelan itu diproduksi

dari hasil kajian medik lalu disebarluaskan melalui tulisan maupun ucapan. Mulai dari pertemuan-pertemuan formal akademisi, parlementaria, sampai obrolah ala warung kopi.

Lihat saja aturan soal menduduki jabatan publik, seseorang harus dianggap sehat jasmani dan rohani. Presiden ketiga Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang memiliki kemampuan penglihatan yang rendah akhirnya terjegal saat akan mencalonkan diri sebagai calon presiden periode berikutnya karena dianggap tidak sehat jasmaninya.

Rahman yang juga buta atau setidaknya *low vision* kategori berat harus selalu "berkelahi" jika sedang mengurus penerbangan di bagian *check-in* bandara. Pasalnya, petugas bandara selalu memintanya menandatangani surat keterangan sedang sakit (*inform consent*).

"Saya buta, tapi saya tidak mengonsumsi obat!" ujarnya. Jika sudah teramat jengkel akibat ulah petugas bandara yang juga *ngeyel* atas nama menjalankan tugas, maka Rahman akan marah-marah dan tetap menolak bertandatangan.

Dalam banyak kasus, bukan hanya Rahman yang selalu menolak jika dipaksa bertandatangan. Ada banyak aktivis difabel melakukan hal yang sama. Kasus terakhir yang dialami oleh Dwi Ariyani (36), aktivis perempuan difabel saat menumpang pesawat *Etihad Air* yang diturunkan dari pesawat yang akan membawanya ke Geneva mengikuti pertemuan PBB. Perlakuan diskriminatif oleh perusahaan itu kemudian mendapatkan perlawanan dan protes di media sosial dan jalur advokasi dari kawan-kawan paralegal. Protes akhirnya berbuah permohonan maaf dari manajemen Etihad Air dan mengganti kerugian materil yang dialami Dwi.
(lihat **http://phinemo.com/penyandang-disabilitas-di-pesawat/** dan kemudian menggalang dukungan di media

sosial **http://change.com** yang mampu mengubah kebijakan Etihad Air. Masing-masing laman diunduh pada Agustus 2016).

Risma, pengorganisir warga desa di kabupaten Maros juga dikategorikan sebagai difabel. Ia memiliki kedua lengan yang jemarinya tidak utuh, sehingga akan berbeda dalam menggenggam sesuatu sebagaimana yang berjari lima. Selebihnya ia tidak memiliki perbedaan fisik sama sekali.

Pelabelan kecacatan dan kemudian diadposi kebanyakan orang menimpa pula diri Risma dan banyak perempuan difabel di negeri ini. Jemari yang berbeda seperti itu kemudian dilabeli sebagai cacat, di mana orangnya disebut penyandang cacat dan penyandang cacat adalah insan yang sakit. Konsep 'kecacatan' ini sudah lama dilawan oleh aktivis difabel yang anti pelabelan seperti itu.

Bagi mereka, yang cacat itu hanya barang atau benda buatan manusia. Tubuh manusia apalagi yang kondisinya berbeda sejak dalam kandungan (*congenital disabilities*) dan kemudian dilahirkan di dunia ini memiliki perbedaan bentuk dan kondisi tubuh tertentu tak layak disebut cacat atau rusak, karena ciptaan Tuhan tidaklah pantas disebut rusak.

"Saya hanya menghadapi kesulitan saat harus mengenggam akar-akar pepohonan," ujar Risma saat menceritakan pengalaman pendakiannya menuju pos 2 dan 3. Seperti saat ia menelusuri jalan setapak yang mengitari punggung bukit atau melewati kemiringan terjal di mana ia harus berpegangan pada akar-akar pepohonan, akar gantung maupun akar cabang. *Just it!* Selebihnya Risma adalah perempuan yang bisa menikmati alam bebas dengan caranya sendiri yang tak berbeda dengan pendaki lain. Ia mengenakan perlengkapan dan peralatan pendakian sebagaimana laiknya pendaki. Apa yang

membedakannya hanyalah karena label cacat atau label disabel atau penyandang disabilitas terlanjur dilekatkan pada dirinya.

Lalu, apakah disebut sebagai penyandang cacat akan ada konsekuensi yang harus diterima bagi difabel? Ya tentu saja. Salah satu konsekuensi itu adalah menjadi malu dengan kondisi tubuh yang tidak sama dengan yang lain.

Mengapa? Karena Orang menganggap atau orang berasumsi bahwa seseorang yang cacat atau menjadi cacat adalah orang tidak mampu, memanggul dosa masa lalu, menerima kutukan dan pada akhirnya disisihkan dari pergaulan.

Faktanya kemudian adalah, karena dianggap sakit maka difabel harus menerima resep tertentu secara medik di panti-panti rehabilitasi, menerima perlakuan sebagai pasien yang sedang direhab atau diperbaiki, memperoleh keterampilan-keterampilan hidup untuk pekerjaan di sektor-sektor informal dengan ragam keterampilan dasar, dan terabaikan di ranah publik yang lebih luas akibat desain sosial yang mengabaikan karakter atau kondisi uniknya.

Dalam kajian disabilitas, cara pandang dan perlakuan atas difabel yang berangkat dari norma 'kenormalan' tubuh manusia disebut *ableism* atau abelisme. Sebuah cara pandang yang menjadikan kondisi tubuh dan mental yang lengkap sebagai normal, dan kemudian berdasarkan konsep dan konteks 'manusia normal' orang mendesain apapun dengan standar itu. Pengabaian keragaman konteks kemanusiaan inilah yang justru paling berkontribusi membuat difabel tidak dapat mengakses apapun dan membawanya kepada kondisi selanjutnya sebagai masyarakat kelas terabaikan (*sub-ordination*), pinggiran (*marginal*), terbelakang dan dikasihani sepanjang masa.

Tak dapat dipungkiri, orang-orang pertama yang melakukan *trekking* di Gunung Latimojong sehingga saat ini ada

jalur pendakian dari pos nol sampai puncak bagi para pendaki atau pejalan dibuat oleh orang-orang "normal" tadi. Dakian demi dakian dalam jalur tersebut hanya dibuat bagi yang berkaki dan bermata awas, tanpa memedulikan bahwa hak mendaki atau berjalan menikmati panorama pengunungan adalah juga menjadi hak bagi orang yang berjalan dengan kruk, kursi roda, orang buta, orang kecil dan seterusnya. Jalur semacam ini bisa menjadi salah satu contoh desain orang normal di antara sekian banyak contoh desain yang dibuat dengan menafikan keberagaman manusia. Mulai dari desain rumah, permukiman dan perumahan, jalur transporasi dan perhubungan, gedung sekolah, perpustakaan, café, kantor perusahaan, pabrik-pabrik, hotel, Tempat Pemungutan Suara, Posyandu, balai desa, dan seterusnya.

Berbeda dengan Eko dan Risma, Rahman yang kemampuan melihatnya sangat terbatas menemui lebih banyak kesulitan melewati jalur di sepanjang pendakian. Aktivitas pendakian di gunung jelas medan jalannya tak beraturan. Di sepanjang hidupnya sebagai difabel netra, belum pernah sekalipun ia mempelajari teknik Orientasi dan Mobilitas (OM) berkarakter gunung. Biasanya ia hanya mempelajari lingkungan rumah atau bangunan pada umumnya. Ini pertama kalinya ia berjalan di gunung. Itulah pula yang membuat para pendamping Rahman menggunakan beragam alat bantu untuk membantunya berjalan/mendaki dengan mudah. Mulai dari *trekking pole,* tongkat yang digenggam bersama dirinya dan pendamping, memakaikan *harness* dan menariknya dengan tali *prusik*, helm dan beragam jenis instruksi untuk menjelaskan bentuk medan yang dilaluinya.

"Teman-teman pendamping kalau memberi instruksi misalnya turunan, kiri jurang, tidak langsung serta merta saya

akan merasa nyaman untuk menurun," ujar Rahman menceritakan pengalamannya.

"Saya mesti mengaitkan sejumlah informasi misalnya kemiringan turunannya bagaimana, Tekstur permukaan tanahnya bagaimana, Sedekat apa jurang di sisi kiri saya." Lanjutnya Rahman.

"Itulah yang membuat langkah saya menjadi begitu lambat dan setiap langkah saya harus berusaha menvisualkan instruksi pendamping," katanya tersenyum menyadari kelambanannya.

Dari beberapa cerita pendamping Rahman, upaya menemukan pola komunikasi antara pendamping dan *atlet* adalah penting.

"Kalau sudah saling sepakat soal pola komunikasinya, maka informasi untuk Rahman bisa lebih efektif disampaikan oleh pedamping," ujar Caling yang memutuskan turut mendampingi Rahman saat itu. Jika pola komunikasi keliru atau terlambat sedikit saja info diberikan maka bisa berakibat fatal, misalnya Rahman dapat terjatuh akibat salah memijakkan kaki atau menabrak pohon tepat dihadapannya.Tentu saja ia beberapakali tergelincir dan terjatuh. Misalnya saat wajahnya menabrak tubuh pohon, instruksi baru muncul, "Awas pohon!"

"*Apa pi,* kutabrak *mi*!" kata Rahman terbahak-bahak.

Mencapai Puncak Bukan Tujuan Utama

PENDAKIAN OLEH DIFABEL di Gunung Latimojong ini bukan ingin menunjukkan bahwa difabel bisa melalui jalur-jalur pendakian "normal" atau ekstreem. Bukan itu yang ingin kami tunjukkan. Eko dan Risma sebagai pendaki difabel memang bisa menunjukkan bahwa keduanya tidak mengalami

banyak hambatan jalur pendakian bagi orang-orang bertubuh lengkap. Jika keduanya bisa melewatinya apakah lantas mereka jadi lebih hebat dari pendaki pada umumnya?

Bisa jadi, ya! Tetapi bukan pencapaian seperti itu yang hendak tim ekspedisi ingin raih. Jelas pencapaian Eko, Rahman dan Risma menunjukkan bahwa mereka pun bisa melewati desain 'kenormalan'.

Melewati dakian demi dakian dengan menggunakan *webbing, harness*, dan *ascender* sebagaimana yang lain. Tetapi peralatan pendakian itu sendiri juga perlu dibuat akses bagi difabel. Pertanyaannya, apakah alat-alat pendakian itu akses bagi difabel kinetik bertangan satu? Difabel penglihatan yang buta total? difabel kinetik berkursi roda? dan seterusnya. Di sinilah letak perjuangan ekspedisi sesungguhnya. Ekspedisi memiliki makna 'perjalanan mengeksplorasi dengan sebuah tujuan'. Tujuannya adalah membuat aktivitas petualangan memungkinkan dilakukan difabel dan aktivitas *outdoor* di arena apapun lebih aksesibel daripada saat ini.

Aksesibilitas juga seharusnya dilihat dalam skala lebih luas, bukan sekadar akses dari aspek fisik. Misalnya untuk aktivitas *outdoor* bagi difabel, di mana kita seharusnya dapat mendesain jalur-jalur plus peralatan dan perlengkapannya yang akses bagi difabel. Bahkan lebih dari itu, aktivitas ini juga harus akses secara non-fisik yang meliputi akses secara intelektual maupun akses secara sosial.

Akses intelektual meliputi ketersediaan informasi aktivitas *outdoors* yang memungkinkan bagi beragam karakter pengguna (beragam difabel) mengetahuinya; baik media secara visual, audio, dan audio-visual. Sedangkan akses sosial adalah berkurangnya stigma negatif bagi difabel sehingga orang-orang baik dari kalangan keluarga, kerabat maupun masyarakat dan

pemerintah pada umumnya memberi ruang bagi difabel untuk mengisi peran-peran tertentu di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, difabel yang selama ini masih ragu dengan identitas kedifabelannya harus bisa keluar dari keterkungkungannya selama ini sebagai 'orang tidak mampu' dan 'tersingkir'.

Untuk hal ini perlu strategi di mana Eko, Rahman, dan Risma dan aktivis difabel lainnya yang telah menerima identitasnya sebagai difabel yang mampu—dan memiliki aset serta talenta untuk berbuat yang lebih baik bagi banyak orang—menjadi 'kawan-setara' yang bisa menjadi teman berdiskusi dan membangun kekuatan bersama. '*Nothing about us without us'* merupakan prinsip gerakan difabel internasional harus dipakai oleh sang aktivis difabel.

Dalam konteks gerakan difabel di Indonesia, perjuangan ini adalah upaya menuju 'budaya inklusi' di tengah masyarakat. Inklusi memiliki makna pelibatan setiap orang tanpa ada sekat-sekat perbedaan, baik perbedaan berdasar bentuk dan kondisi tubuh, orientasi seksual, keyakinan agama dan ideologi, etnisitas, dll. Penyingkiran difabel dalam proses pembangunan oleh negara maupun masyarakat selama ini dikarenakan adanya 'politik pemisahan' atau yang disebut dalam dunia pendidikan sebagai sistem pendidikan segregasi. Siswa difabel bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), warga difabel berorganisasi berdasarkan kondisi dan disfungsi tubuhnya (PPDI, Pertuni, Gerkatin, HWDI), mahasiswa difabel mengambil jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB), dan seterusnya.

Setelah menyadari bahwa sistem pemisahan dapat semakin meminggirkan peran difabel, maka dicobalah sistem pendidikan integrasi. Sistem ini memungkinkan difabel sekolah di sekolah umum namun tetap harus beradaptasi dengan segala model dan desain berbasis 'kenormalan'. Akibatnya, difabel harus berjuang lebih keras dibandingkan siswa atau mahasiswa lainnya. Untuk

itu, saat ini mulai dikembangkan sistem pendidikan inklusi, di mana fokus pendekatannya bukan lagi kepada siswa tetapi pada sistem pendidikan, manajemen sekolah, dan para guru serta orang tua siswa. Sistem menyesuaikan dengan segala ragam kebutuhan siswa.

Konsep 'inklusi' dalam ekspedisi ini yang sesungguhnya menjadi nafas dan cita-cita tim. Yakni mempelajari desain manajemen pendakian, desain jalur pendakian, etika pendakian dan lain-lain yang bisa menciptakan kesetaraan dalam upaya menikmati panorama alam dan olah raga gunung. Bukan sekadar menguji diri untuk mencoba desain-desain sosial yang sudah terlanjur dibangun oleh mereka yang tidak berperspektif difabilitas.

Alasan utama Ekspedisi Difabel ini adalah mengampanyekan Anti-diskriminasi kepada difabel, membangun kepercayaan diri difabel untuk tampil keluar, dan memikirkan cara-cara seperti apa agar bertualang dan khususnya melakukan aktivitas *outdoor* dapat di[re]desain agar akses bagi siapapun, baik orang lanjut usia, ibu-ibu yang sedang hamil besar sampai kepada difabel yang menggunakan kursi roda, kaki palsu, tongkat orang buta, orang kecil (*the little people*) dan seterusnya.

Jadi, setelah menapak puncak Rante Mario, tim ekspedisi jangan "mario" dulu. Jangan bergembira dulu. Jalan perjuangan menuju kesetaraan bagi difabel dalam bertualang maupun aktivitas *outdoors* lainnya masih panjang, terjal dan berliku. Tetap jaga semangat, kawan-kawan![]

EKSPEDISI DIFABEL

[6]

SABAR GORKY

November 4, 2016

"Semangat membuat hidupnya terus bangkit, menatap masa depan dengan segala kelebihan bukan kekurangannya…"

SABAR ADALAH NAMA ASLINYA, akhiran Gorky adalah nama baru yang di sematkan di belakang nama Sabar setelah dia berhasil mencapai puncak gunung Elbrus, Rusia. Menurut catatan sejarah Rusia, karena perjalanan hidupnya yang berliku maka pujangga Alexey Maximovich Peshkov mendapatkan panggilan baru Maxim Gorky, alias "Maxim si empunya hidup pahit." Nama akhir Gorky (pahit) yang awalnya merupakan olok – olokan bagi si Maxim kini justru menjadi sebuah julukan bernilai positif. Indonesia pun kini telah memiliki Gorky yang lain: Sabar Gorky.

Sabar Gorky tinggal di Desa Gendingan, RT 3 RW 6, Jebres, Solo. Pria kelahiran 9 September 1968 ini telah menggeluti dunia petualang sejak tahun 1985. Tentunya sudah tidak di ragukan lagi jam terbangnya dalam mengeksplorasi alam pegunungan di Indonesia. Pada tahun 1996, Sabar yang hobi naik sepeda, panjat dinding, dan arung jeram mengalami kecelakaan yang membuat kakinya sebelah kanan terpaksa harus di amputasi. Kenyataan ini ternyata tidak membuat dia memutuskan untuk berhenti dari hobinya, yaitu panjat tebing. Dengan keadaan yang serba terbatas dia juga masih tetap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya. Sebelum mengalami kecelakaan dia

Bersama Sabar Gorky dan Kang Bongkeng

telah aktif menggeluti dunia petualangan. Sederetan gunung tinggi di Indonesia seperti ***Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu,*** pernah didakinya. Selain mendaki gunung, ia juga aktif mengikuti perlombaan balap sepeda, dan panjat dinding. Ia bahkan pernah memenangkan medali emas kejuaraan panjat dinding Asia pada tahun 2009.

Setelah kehilangan kaki kanannya, penjelajahannya belumlah berhenti. Justru malah semakin berkibar sepak terjangnya. Terbukti beberapa prestasi telah dia ukir diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meraih ***medali emas Kejuaraan Panjat Dinding Asia*** di Korea Selatan pada tahun 2009.
2. Mencapai puncak tertinggi ***Gunung Elbrus***, gunung tertinggi di Eropa dengan ketinggian 5.642 mdpl pada 17 Agustus 2011. Sebuah momen yang sangat langka karena bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga spiritnya menular ke seantero nusantara bahwa

seorang pendaki tunadaksa mampu berkiprah dalam pencapaian prestasi kelas dunia.

3. Mencapai puncak tertinggi ***Gunung Kilimanjaro***, gunung tertinggi di Afrika dengan ketinggian 5.895 mdpl pada 13 November 2011. Kegiatan ini dilaksanakan berkaitan dengan hari Sumpah Pemuda dan hari Pahlawan. Sabar pun meraih gelar baru, pendaki tuna daksa pertama dunia yang berhasil menginjakkan kaki di puncak Gunung Kilimanjaro tanpa bantuan dari orang lain.
4. Memanjat dan mencapai puncak ***Monumen Nasional (Monas)*** di Jakarta dalam waktu 20 menit pada 4 Juni 2014.

*sumber tulisan dikutip dari **http://profil-inspirasiku.blogspot.co.id/2014/12/sabar-gorky.html**(tanggal 4 Nop 2016)

EKSPEDISI DIFABEL [7]

SETELAH LATOMOJONG, BERIKUTNYA EKSPEDISI DIFABEL BERSEPEDA.

january 26, 2017

MAKASSAR – Setelah sukses menapaki puncak Gunung Latimojong, pada Desember 2016 lalu, difabel netra dan daksa di Makassar kembali akan melakukan kegiatan ekspedisi. Kali ini mereka akan melakukan turing sepeda dengan rute Makassar – Bulukumba yang berjarak 153 Kilometer.
Salah satu atlet yang juga Direktur Pergerakan Difabel Indonesia (Perdik) Sulawesi Selatan, Abd Rahman mengatakan, kegiatan bersepeda jarak jauh ini rencananya akan digelar pada 28 April hingga 3 Mei 2017, dengan nama kegiatan "Touring Sepeda Difabel Menembus Batas – Makassar – Bulukumba".

Tema itu, kata dia, tidak berbeda dengan kegiatan ekspedisi pendakian Gunung Latimojong, Enrekang, yakni "Menembus Batas".

Turing sepeda ini juga untuk turut memperingatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei nanti.

"Saat ini kami sementara mempersiapkan segalanya, dari kesiapan para atlet, tim pendamping dari komunitas pesepeda dan relawan untuk membantu mewujudkan rencana ini, " kata Rahman, Jumat 27 Januari 2017.

Rencananya, kata Rahman, tim turing ini menggayuh sepeda dari Makassar kemudian ke Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba. "Kami targetkan satu hari perjalanan melintasi satu kabupaten. Kenapa? karena kami akan melakukan

sosialisasi Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas kepada Bupati, " kata dia.

Menurutnya, sambil bersepada tim turing sepeda difabel ini juga akan melakukan sosialisasi UU 8/2016, Peraturan Pemerintah Daerah Sulsel soal Disabilitas dan penandatangan nota kesepahaman atau MoU (Momerandum of Understanding) dan komitmen kepeda Kepala Pemerintahan yang dilintasi.

"Kami berharap tiap kepala daerah terbuka dan bersedia untuk menyambut kami dan bersedia menandatangi MoU sebagai komitmen keberpihakannya kepada difabel di daerahnya masing-masing, " kata Rahman.

Dia juga menceritakan bila kegiatan ini baru pertama kalinya dilakukan, tentu akan menghadapi beberapa kendala, karena itu kata Rahman, pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa pesepeda di Makassar untuk mendampingi dan melatih[].

"EKSPEDISI DIFABEL" 2017: DARI PENDAKIAN GUNUNG SESEAN KE DIALOG REFLEKTIF

December 12, 2017

Ishak Salim

Tahun lalu, 2016, saat hendak merayakan Hari Difabel Internasional, PerDIK menggagas sebuah ekspedisi pendakian Gunung tertinggi di pulau Sulawesi, Gunung Latimojong. Saat itu, peminatnya hanya 3 difabel, yang kemudian kami sebut sebagai atlet difabel untuk Ekspedisi. Tahun ini, 2017, PerDIK kembali merayakan hari difabel dengan pendakian bersama di Gunung Sesean dan dengan jumlah atlet difabel mencapai 10 pendaki dan tim pendukung yang juga jauh lebih besar.

Keinginan kali kedua kami mendaki gunung bersama difabel ini bukan ingin membuktikan bahwa difabel juga mampu mendaki. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa mendaki bersama-sama dan bahu membahu tanpa sekat perbedaan [berdasarkan perbedaan kondisi] tubuh adalah hal yang mungkin dilakukan dan sudah seharusnya menjadi kekuatan kita atau modal sosial untuk bersama-sama mengatasi upaya pelabelan negatif, stereotif, pemisahan, dan diskriminasi berbasis perbedaan tubuh.

Dengan motto Leave No One Behind atau Jangan Seorangpun Tertinggal kami maju bersama dan menuntaskan pendakian berharga ini.

Suasana Upacara Perayaan Hari Difabel Internasional di Puncak Gunung Sesean (2100 mdpl), 3 Desember 2017. (Dokumen PerDIK)

Pendakian puncak Sesean (2100 mdpl) tahun ini tergolong singkat dan medan yang ringan dibandingkan dengan pendakian menuju puncak Rante Mario (3478 mdpl) tahun lalu selama 5 hari. Dalam rangkaian pendakian bersama ini, malam kedua kami sudah kembali ke Enrekang dan bermalam di Dante Pine, sebuah wahana outdoor yang menyenangkan.

Esoknya, Bupati Enrekang H. Muslimin Bando menerima kami di pendoponya dan menjanjikan beberapa rencana untuk membantu pemberdayaan ekonoi difabel di kabupaten ini. Juga menjanjikan di tahun 2018 nanti, Enrekang sudah harus mengesahkan Perda baru tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Sore dan malam, kami juga bertemu dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ibu Hajjah Sawaliah. Sejak tahun lalu, ibu Kadis yang saat itu masih menjabat sebagai kadis sosial mencurahkan perhatian besar kepada tim kami. termasuk menjelang kepulangan sebagian kami ke Makassar.

Esoknya, di Makassar, giliran Kapolda Sulawesi Selatan yang baru, Irjen Umar Septono mengundang kami untuk menerima penghargaan kepada 10 atlet kami dan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- peratletnya. Kapolda baru ini merasa senang bisa bertemu dan berdiskusi dengan tim PerDIK dan berjanji akan mengupayakan adanya perlakuan bermartabat dan perlindungan bagi difabel saat berhadapan dengan hukum.

Kesepuluh atlet di atas adalah: Tim Makassar 1. Abd rahman, SPd (Direktur PerDIK) Difabel netra. 2. Arifin Amir, SPd, SS (Difabel Netra). 3. Eko Peruge (Difabel kinetik, luwu timur). Tim Enrekang 4. Adil Rani (difabel netra), 5. Jasri (Difabel intelektual), 6. Agussalim (difabel kinetik), 7. Syawal (difabel kinetik), 8. Ariandi (difabel kinetik), 9. Faluphy Mahmud (difabel kinetik), 10. Sukirman (difabel kinetik).

Dalam rangkaian memperingati Hari Difabel ini, kami masih ada satu agenda, yakni dialog akhir tahun 2017, yakni pada 20 Desember 2017.

Tema dialog ini adalah:

'SUDAHKAH PERANGKAT HUKUM REPUBLIK INI BERLAKU ADIL KEPADA DIFABEL?"

Tujuan dialog reflektif ini adalah [1] memberikan pemahaman bersama terkait isu difabel berhadapan dengan hukum dari berbagai institusi terkait: Difabel, Organisasi difabel, LBH, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah dengan SKPD terkait, maupun lembaga-lembaga negara baik setingkat kementrian maupun komisi-komisi nasional. [2] Menyiapkan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh bersama untuk memperbaiki kualitas layanan hukum bagi difabel, dan [3] Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan yang mengurusi difabel berhadapan dengan hukum yang berguna bagi pencapaian kualitas layanan hukum bagi difabel.

Tim pendukung

Kami berharap Menteri Hukum dan HAM bisa menghadiri dialog ini dan menjadi pemantik dialog dengan memberikan pengantar dialog terkait kondisi penegakan hukum dan HAM bagi difabel di Indonesia. Kemudian kami akan mengatur dialog ini ke dalam dua sesi,

Dialog sesi Pertama:

1. Kapolda Sulawesi Selatan.
   Tema: Pelayanan Hukum Bagi Difabel: Peran Kepolisian membangun Layanan Akses dan Bermartabat bagi Difabel.
2. Ketua HWDI Sulawesi Selatan

Tema: Bersama Paralegal Disabilitas mendorong Penegakan hukum atas penyandang disabilitas di Indonesia.

3. Ketua AJI Kota Makassar

Tema: Menelisik Pola Pemberitaan Difabel oleh Jurnalis Makassar

4. Akademisi Pusat Kajian dan Layanan Difabilitas Universitas Teknologi Sulawesi

Tema: Dinamika Kajian Disabilitas dan Advokasi Difabel di Indonesia

Dialog Sesi II

1. Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Tema: Sudahkan Proses Peradilan Negeri ini Ramah Bagi Difabel?

2. Direktur LBH Makassar

Tema: Kasus-kasus Difabel: Pengalaman Pendampingan Kasus Difabel di Sulawesi Selatan

3. Direktur PerDIK

Tema: Menimbang Peran Kerja Berjejaring dalam Menegakkan keadilan bagi difabel beradapan dengan hukum.

Nah, bagi rekan-rekan yang ingin turut memeringati Hari Difabel ini di Makassar, mari bergabung pada tanggal 20 Desember 2017. Sebagai penghubung informasi, sila hubungi 085396584550 (Rahman) atau 085395978474 (Yayat).
Terima kasih atas dukungannya dan kami, Perdik mengucapkan selamat hari difabel!

PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA UNTUK KESETARAAN
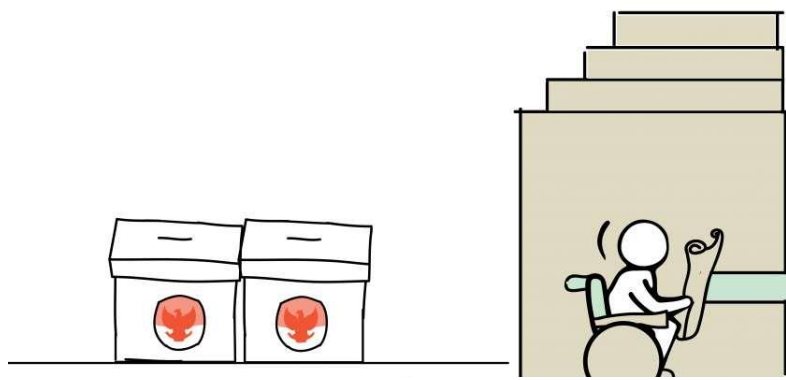
BAGIAN 7

PEMILU

AKSES

PEMILU AKSES
[1]

SIAPA PEDULI PEMILIH DIFABEL?

May 3, 2017

Ishak Salim

BANYAK ORANG TIDAK TAHU apa itu difabel dan bagaimana mereka menikmati hak-hak serta memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak politik difabel.

Bagi mereka yang mengikuti perkembangan Pemilihan Presiden Mei 2004, tentu ingat bagaimana KPU kemudian menggagalkan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai calon Presiden karena alasan sakit atau tidak 'sehat jasmani dan rohani'. Diktum ini, ada dalam regulasi, dan menjadi alat negara mendiskriminasikan warga difabel dalam berpartisipasi di bidang politik.

Diktum sederhana ini memang cukup ampuh menjegal hak politik seseorang untuk dipilih atau memilih dalam pemilihan umum sebagai pemimpin atau pejabat politik.

Memang, setelah adanya sejumlah desakan oleh aktivis Gerakan Difabel Indonesia dari berbagai negeri, diktum ini dalam politik, khususnya dalam konteks pemilu mulai ditinggalkan. Tetapi ketentuan seseorang harus 'sehat jasmani dan rohani' masih kuat mengakar di sektor-sektor lain. Sektor

transportasi publik misalnya. Di Bandara, warga difabel kerap memeroleh perlakuan diskriminatif ketika harus menandatangani surat keterangan sedang sakit (inform consent) jika sedang *check-in*. Tidak peduli jika difabel (misalnya menggunakan kursi roda) tersebut menyatakan diri tidak sedang sakit.

Mengapa difabel harus dipandang sebagai insan yang sakit? Salah satu penyebabnya adalah masih kuatnya rezim medik bersemayam di kepala dan pikiran banyak orang? Mengapa rezim medik begitu kuatnya mencengkeram alam kognisi warga negara? Itu karena rezim ini sudah sekian puluh atau ratus tahun menjadikan 'kesehatan' sebagai arus utama (*mainstream*) pengetahuan dengan basis-basis institusi penopangnya yang sudah semakin mapan dan dengan ahli-ahli yang semakin banyak dan menguasai sektor-sektor publik.

Dalam Perkembangan Politik Kewargaan (*citizenship*), warga difabel mengalami banyak ketertinggalan dibandingkan warga negara lainnya. Isu-isu partisipasi politik difabel merupakan isu kesekian yang dapat mereka penuhi setelah aspek-aspek lainnya terpenuhi. Dua diantara yang harus diatasi terlebih dulu adalah soal 'penerimaan diri sebagai difabel' dan 'kemampuan memenuhi alat bantu mobilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua hal ini bisa kita sebut sebagai 'ranah politik privat' sementara 'ranah politik publik' merupakan ranah difabel untuk berpartisipasi.

Pada ranah privat, misalnya dari aspek penerimaan diri sebagai difabel, seorang difabel, apakah dia menjadi difabel sejak lahir atau di fase-fase tertentu dalam kehidupannya (anak-anak, remaja, dewasa, tua) akan melewati masa pergolakan bathin dan pikiran antara menerima kenyataan diri sebagai difabel dan menganggap hal itu bukan hal negatif atau menerima itu sebagai kenyataan pahit dan disesali sepanjang

hidup. Adapun cara difabel 'menerima' dirinya itu sangat bergantung kepada bagaimana *input* atau asupan pengetahuan dan aksi pengalaman sehari-hari yang dijalaninya di lingkungan terdekatnya, yakni keluarga dan komunitas. Semakin baik dan positif anggota keluarga terhadap kondisi difabilitas itu, maka semakin baik pula penerimaan difabel atas dirinya.

Apa yang dimaksud hal 'baik dan positif' itu? Yaitu suatu sikap yang menganggap difabilitas bukan aspek medik dalam arti sebuah ke-sakit-an, sedang sakit atau menderita. Bukan pula aspek lain serupa kutukan atau dosa [orag tua] masa lalu. Artinya, di tingkat keluarga, difabel telah melakukan proses 'demedikalisasi' secara benar atau mengurangi cara pandang medik yang mainstream menuju cara pandang sosial yang inklusif. Di saat seperti inilah, maka proses pemberdayaan difabel dapat menemukan momentumnya.

Dalam keadaan penerimaan diri yang positif itulah, maka ia akan siap dengan persoalan sehari-harinya sebagai seorang anggota keluarga maupun anggota komunitasnya. Ia akan berupaya mengambil peran dalam aktivitas rumah tangga, semisal belajar/membaca masalah politik, mencuci, menyeterika, membersihkan halaman rumah, memasak, menjaga adik, memperbaiki lampu, dan seterusnya.

Tentunya, dalam menopang aktivitas itu, seorang difabel dengan beragam kategori kemampuannya tentu akan membutuhkan sejumlah alat bantu yang bisa memudahkannya untuk beraktivitas. Misalnya kacamata, tongkat putih dan HP atau laptop bersuara bagi difabel netra, alat bantu pendengaran dan bahasa isyarat bagi Tuli, kursi roda, kaki palsu, atau kruk bagi difabel kinetik, dan diskusi rutin secara online dan seterusnya. Pada aspek pemenuhan alat bantu inilah, maka kapasitas difabel bisa meningkat karena dapat mengakses

beragam informasi yang keluar dari berbagai media informasi, apakah cetak, audio, maupun visual dan audio-visual.

Setalah terpenuhinya kedua prasyarat ini: penerimaan diri dan pemenuhan alat-alat bantu, maka difabel akan siap berpartisipasi politik di ranah publik. Misalnya, ketika ia adalah siswa yang menggunakan kursi roda untuk memudahkan mobilitasnya, maka di sekolah ia harus bisa seleluasa pengguna dua kaki untuk bergerak dari satu ruang ke ruang lainnya. Sekolah harus akses bagi difabel kinetik, bagi difabel netra dan Tuli dan seterusnya. Inilah yang disebut ketersediaan 'akomodasi yang memadai' (*reasonable accommodations*) bagi difabel.

Jika apsek 'Akomodasi Layak' ini tidak terpenuhi, maka difabel akan mengalami diskriminasi yang berlapis-lapis. Pertama ia mengalami diskriminasi fisik di mana desain-desain fisik lingkungannya tidak memungkinkannya bergerak bebas. Kedua, dia akan mengalami diskriminasi sosial ketika kondisi lingkungan tersebut ternyata mendisabelkan atau menidakmampukannya untuk melakukan sesuatu, sehingga akan memperkokoh stigma lama bahwa difabel adalah orang sakit, tidak mampu, dan objek rasa kasihan.

Begitulah yang dihadapi pemilih difabel dalam perhelatan politk, yakni pemilu. Beberapa hambatan-hambatan beraktivitas maupun berpartisipasi itu harus diatasi oleh difabel dan pihak-pihak terkait.

Pemilu bukan Cuma mencoblos

Banyak salah kaprah terjadi, bahkan di tingkat komisioner sendiri terkait peran difabel dalam keseluruhan proses pemilu. Seolah-olah difabel hanya butuh aksesibilitas ke bilik suara atau paling banter ikut acara sosialisasi pemilu bagi pemilih.

Pemilu punya banyak tahapan dan setiap tahapan ada desain aktivitas yang dirancang oleh komisioner maupun staf KPU/D. Serangkaian aktivitas itu adalah interaksi antara semua elemen yang akan meramaikan pesta demokrasi ini. Mereka adalah pelaksana, peserta dengan beragam institusinya, relawan, dan tentu saja pemilih. Difabel, sebagai warga negara atau subjek politik yang bermartabat, harus memiliki akses ke seluruh macam aktivitas itu, mulai dari pendaftaran, pendataan, sosialisasi, kampanye, pencoblosan, penghitungan sampai kepada pengambilan sumpah dan evaluasi pemilu.

Hak politik difabel dalam pemilu, bukan hanya dipenuhi pada saat pencoblosan saja. Jauh sebelum dan sesudah pencoblosan, perlakuan setara difabel dalam 'berpolitik' tetap harus diutamakan.

Ketersediaan Data pemilih difabel, Penting!

Salah satu hal krusial guna mencermati partisipasi politik difabel adalah pada data pemilih difabel dan respon-respon atau opini mereka dalam politik. Saat ini belum ada 'data politik' yang cukup memuaskan bagi difabel soal mereka. Ada banyak institusi negara semisal BPS, sejumlah departemen/Dinas, sejumlah Non-Government Organizations yang melakukan pendataan. Tetapi data itu selalu saja jauh dari memadai. Salah satu faktor yang berkontribusi kepada buruknya kualitas data adalah karena pendataan difabel tidak benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh. Mari kita cermati data pemilih difabel.

Elemen penting dari KPU yang melakukan pendataan adalah PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dibantu oleh PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih). PPS melalui PPDP akan memperoleh data penduduk dari Dinas Dukcapil (berbasis e-KTP) di mana di dalamnya tidak ada kategorisasi disabilitas seseorang. Data ini kemudian diolah lalu menjadi DPS atau

Daftar Pemilih Sementara. Apakah sudah ada data pemilih difabel? bisa jadi ada, jika komisioner KPU sebelumnya memuatnya. Ada juga data difabel dari berbagai institusi negara, tetapi persoalannya, apakah KPU pernah meminta data semacam itu ke lembaga negara terkait? Apakah dokumen berbasis *by name by address* bisa dengan mudah diakses? Silakan KPU menjawab.

Jadi sampai kepada munculnya DPS boleh jadi tetap tidak akan muncul data pemilih difabel. sekali lagi, kalaupun muncul, maka tidak akan signifikan bukan hanya dari aspek jumlah tapi juga dari kategorisasi yang dipakai oleh KPU yang tidak detail.

Format lama masih menggenerilisir kategori difabel hanya pada aspek tuna daksa, netra, rungu dan grahita serta ganda. Padahal dengan aturan baru mengacu kepada UU Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016 ada 22 kategori. Selain itu, seharusnya ada informasi tambahan yang perlu dimasukkan dalam pendataan ini, yaitu soal jenis alat bantu yang sudah sedang dipakai atau tidak dimiliki difabel tapi dia butuhkan ketika akan mencoblos misalnya, atau mendatangi kampanye publik dst. Dengan adanya informasi jenis alat bantu yang menjadi bagian dari diri difabel, maka desain apapun dalam setiap aktivitas pemilukada akan dapat diketahui dan dapat dipenuhi.

Informasi spesifik ini penting karena akan menunjukkan seberapa jauh komisioner KPU bisa mengupayakan terselenggaranya Pemilu Akses bagi seluruh kategori pemilih, khususnya difabel. Untuk itu, mesin KPU haruslah bekerja maksimal, khususnya dari PPS dan PPDP. KPU harus segera menyiapkan Standar Operasional Pendataan/Pemutakhiran data pemilih difabel dan formulir pemutakhiran data pemilih difabel serta memasukkan perspektif difabilitas bagi petugas-petugas

tersebut agar bisa lebih serius dan bertanggung jawab dalam menyiapkan data pemilih difabel yang berkualitas.

Jika Data pemilih Difabel ini tersedia, maka menurut kami di PerDIK, kita akan mampu melakukan lompatan besar dalam kerja-kerja pengorganisasian difabel di bidang politik agar proses pemberdayaan politik difabel bisa terbangun dan difabel menjadi subjek politik yang bermartabat dan mandiri![]

Makassar, 3 Mei 2017

BAGAIMANA ALAT BANTU MENCOBLOS BAGI DIFABEL NETRA DISIAPKAN KPU?

February 11, 2017

MENCOBLOS ATAU MENGGUNAKAN HAK PILIH adalah hak bagi setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah.

Bagi Difabel Netra, kemudahan mencoblos dalam Pemilu yang bersandar kepada "budaya awas" atau para kaum yang melihat tidak akan terjadi. Bagi mereka yang matanya melihat akan mudah mencoblos dengan desain kertas suara seperti yang biasa Anda atau kalian coblos. Mata kalian bisa dengan mudah menangkap dan mengenali warna, membaca kalimat dan mengenali tanda semisal kotak atau lingkaran di mana pemilih harus mencentrang atau mencoblos.

Nah, saat ini pengelola pemilu mulai berpikir secara 'Universal Desain". Desain pemilu sampai ke hal paling detail haruslah memudahkan bagi siapapun pemilih. salah satunya adalah soal mencoblos bagi pemilih buta di atas. Ya, untuk itu, kalau pemilu sebelumnya, belum ada template braile disediakan secara massif, maka saat ini sudah tersedia di setiap TPS.

Pilkada di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, misalnya. Ada 351 TPS dan untuk itu butuh 351 Template Braille dan beberapa untuk keperluan sosialisasi kepada publik dan petugas KPPS.
Apakah Alat bantu ini akan membantu pemilih Netra?
Belum tentu!!!

Mengapa?

Karena ternyata, tidak semua orang buta pernah belajar bagaimana mengenali huruf, membaca dan menulis dengan huruf braile?

Tetapi tentu banyak orang buta bisa, apalagi kalau ia pernah sekolah di SLB atau sekolah reguler.

Kalau tidak bisa baca braille? Ya solusinya adalah petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk dibantu. Jika pemilih bersedia dibantu mencoblos, maka petugas atau saksi itu mesti menanda tangani formulir C3 untuk menjaga kerahasiaan pemilih tersebut.

Bersyukurlah, saat ini KPU Takalar sudah menyiapkan braille template tersebut dan semoga para difabel bisa berbondong-bondong menyetorkan pilihannya di TPS yang akses, Kotak suara yang akses, Kertas suara yang akses, dan pulang ke rumah dengan hati senang!

[3]

DEBAT KANDIDAT BUPATI/ WAKIL BUPATI TAKLAR: RESPEK TERHADAP DIFABEL

January 25, 2017

[SATU]

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Takalar sukses melaksanakan Debat Publik Pilkada Takalar semalam, 28 Desember 2016. Acara debat ini berlangsung di Ballroom Menara Bosowa, Jl, Jenderal Sudirman, Makassar dan disiarkan secara langsung oleh Celebes TV melalui kanal 31 UHF. Debat diikuti oleh 2 pasangan calon (paslon) yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Takalar. Kedua paslon yakni pasangan nomor urut 1 Burhanuddin B-M Natsir Ibrahim (HB-HN) dan pasangan nomor urut 2, Syamsari Kitta- Ahmad Se're (SK-HD).

Abd. Rahman, Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) hadir dalam debat publik tersebut atas undangan dari KPU Kabupaten Takalar. Menurut Rahman, upaya KPU memperhatikan isu disabilitas dalam pemilukada patut mendapatkan apresiasi. Rahman yang memiliki perbedaan kemampuan dalam penglihatan (difabel netra) hadir bersama pendamping mobilitasnya dan mendapatkan informasi mengenai gambaran situasi di dalam ruangan sebelum acara dimulai.

Menurut informasi yang diterima dari salah satu komisioner KPU Takalar, dalam siaran langsung ini, KPU telah meminta seorang penerjemah bahasa isyarat untuk membantu agar siaran debat publik ini juga akses bagi pemilih Tuli (Difabel

pendengaran/sensorik). Untuk memastikan hal tersebut dilakukan, Rahman mengonfirmasi ke salah satu rekannya yang sedang menonton debat publik ini di rumahnya. Memang benar, dalam siaran itu terdapat penterjemah bahasa isyarat, yakni Nurdayati, guru di SLBSD/SMP Pembina.

Sejak bertemu antara pengurus PERDIK dan komisioner KPU Takalar bertemu beberapa bulan lalu di kantor KPU Takalar, sudah ada kemajuan terkait perhatian KPU kepada pemilih difabel. Salah satu yang patut diapresiasi terhadap kinerja KPU adalah peningkatan jumlah pemilih difabel dalam DPT yang sudah dipublikasikan. "Jumlah awal dalam DPS adalah 192 pemilih difabel, dan setelah pendataan kembali oleh para pendata dari KPU, jumlah pemilih difabel itu meningkat mencapai 590 pemilih," demikian ungkap Rahman usai mengikuti debat semalam. Memang jumlah itu masih relatif kecil karena baru 0,29 persen dari total pemilih yang berjumlah sekitar 250 ribu orang. Tetapi peningkatan itu sendiri sudah patut diacungi jempol.

Sayangnya, menurut Rahman, dari keseluruhan perbincangan yang diperdebatkan oleh kedua kandidat, tak ada satupun isu disabilitas muncul. Hal ini membuktikan bahwa isu disabilitas masih berada di posisi marjinal. Memang ada isu kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak dibahas, namun hal itu belum lengkap jika tidak menyentuh isu-isu disabilitas, tegas Rahman. Seharusnya, isu disabilitas menjadi salah satu perhatian utama para kandidat mengingat jumlah difabel dari setiap daerah setidaknya mencapai 10 persen dari total populasi. Misalnya saja, saat kedua kandidat memperdebatkan soal program-program pembangunan di desa baik terkait soal pemberdayaan bagi petani maupun infrastruktur di desa. Mayoritas difabel tinggal di desa, namun mayoritas yang tinggal di desa mengalami marjinalisasi dan hidup dalam kerentanan.

Dalam keadaan seperti itu, sudah seharusnya pemerintah daerah selalu berpikir melibatkan difabel.

Jika pemerintah akan mengembangkan kelompok peternak, maka dalam kelompok itu katakanlah 10 orang ada 2 diantaranya difabel. Tidak perlu pemerintah membuat kelompok peternak difabel sendiri karena cara-cara pemisahan ini sudah harus dihilangkan. Saatnya setiap orang berpikir dalam kerangkan "inklusi", yakni pelibatan warga-warga paling rentan dalam program pembangunan di berbagai sektor.

Dalam kerangka berpikir inklusi itu, Rahman yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1nya di Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Makassar (UNM) meminta agar KPU selanjutnya menyiapkan sosialisasi dan simulasi pencoblosan secara inklusif. Tidak perlu KPU menyiapkan simulasi khusus bagi pemilih difabel, cukup melibatkan 10 persen difabel dari seluruh kegiatan publik KPU. Misalnya, jika ada lagi debat publik, maka 10 persen dari total peserta adalah difabel dari berbagai unsur; saat menyiapkan materi debat, setidaknya memasukkan isu disabilitas, dan seterusnya. Jika KPU Takalar saat ini mulai melakukan hal tersebut, maka tahun depan lebih banyak KPU membuka akses pemilih difabel dalam pilkada.

Adapun mengenai penerjemah bahasa isyarat, Nurdayati yang bertemu Rahman malam itu menyampaikan bahwa ini pengalaman pertama menjadi penerjemah isyarat dalam debat publik paslok pilkada. Untuk memastikan apakah kualitas terjemahannya bagus, Nurdayati akan bertanya kepada pemirsa Tuli yang menyaksikannya. Menurutnya, bahasa isyarat ada dua, yakni SIBI dan BISINDO. SIBI adalah sistem isyarat yang dibuat oleh pemerintah dan BISINDO adalah sistem isyarat yang dibuat oleh komunitas Tuli. Keduanya berbeda, jika SIBI menggunakan ejaan awalan dan akhiran, maka BISINDO murni isyarat tanpa ada model kata dasar berikut awalan dan

akhirannya. Nurdayati bisa menggunakan keduanya, namun karena beberapa kata belum ada sistem isyaratnya dalam BISINDO maka ia mencampurnya dengan SIBI.

Dari informasi yang diterima Rahman berupa foto layar saat siaran ini berlangsung, masih ada kekurangan dalam penterjemahan itu. Pertama adalah kostum penterjemah, di mana seharusnya memakai pakaian berwarna gelap seperti hitam atau biru tua dan background putih. Kedua adalah besar kecilnya kotak yang menampilkan penterjemah. Sayangnya, pakaian penterjemah malam itu berwarna terang dan bisa mempengaruhi tampilan isyarat tangan dan hal ini diperburuk oleh terlalu kecilnya kotak penterjemah. Walaupun demikian, Rahman tetap mengapresiasi kemajuan yang telah ditunjukkan oleh KPU Takalar, ujarnya saat menyalami ketua KPU malam itu, Bapak Jursalim Sammak[].

[DUA]

Lagi-lagi, PERDIK Sulsel perlu memberi apresiasi kepada Komisioner KPU Takalar yang melaksanakan event Debat Publik kandidat Bupati/Wakil Bupati Takalar 2017. Beberapa kemajuan itu adalah:

Pertama, jika pada debat pertama sudah tersedia seorang penerjemah bahasa isyarat maka debat publik kedua ini ada dua penerjemah bahasa isyarat. Tetapi, ukuran penerjemah masih kecil sehingga masih sulit dipahami oleh pirsawan Tuli. Apalagi kualitas gambar TV Streaming yang tidak begitu terang.

DEBAT PUBLIK KANDIDAT BUPATI/WAKIL BUPATI 2017
[TV streaming http://www.gotvsulsel.com/, 25/1/2017, 19.30 wita – selesai)
Menggunakan penerjemah Bahasa Isyarat, masih terlalu kecil dan sulit dipahami oleh pemirsa tuli

Kedua, dari sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh moderator, terdapat satu pertanyaan terkait isu disabilitas di Takalar. Pertanyaan ini dipilih oleh Kandidat bupati nomer urut 2. Kurang lebih pertanyaannya adalah bagaimana rencana kandidat bupati terkait dengan warga dengan disabilitas. Pertanyaan ini direspon oleh sang kandidat dengan mengaitkannya dengan isu ketenagakerjaan. Menurut kandidat, dari sepuluh ribu peluang kerja yang akan disediakan bagi warga Takalar, di dalamnya ada warga difabel. Kandidat urut dua ini juga akan menyiapkan konsep pemberdayaan difabel dengan model orang tua asuh.

Bagi PERDIK, gagasan kandidat kosong dua itu sangat menarik untuk didalami lebih jauh. Sayangnya, pertanyaan ini tidak ditanyakan ke kandidat pertama, sehingga tidak ada penjelasan dari petahana terkait kondisi difabel di Takalar dan rencana kandidat pertama ini ke depan.

DEBAT PUBLIK KANDIDAT BUPATI/WAKIL BUPATI 2017
[TV streaming, 25/1/2017, 19.30 wita – selesai)
Menggunakan penerjemah Bahasa Isyarat, masih terlalu kecil dan sulit dipahami oleh pemirsa tuli

Sayangnya, pada saat debat *head to head* kandidat bupati, penerjemahnya tidak muncul dalam layar TVStreaming. Ketidakmunculan ini tentu merugikan pirsawan Tuli, apalagi sebagaimana tampak di layar komputer, perdebatannya cukup seru dan menunjukkan kualitas kedua calon bupati. Nanti saat tiba giliran perdebatan kedua calon wakil bupati, penerjemah ini kembali muncul.

Perhatian KPU Takalar terhadap isu difabilitas dalam pilkada ini tak lepas dari peran PERDIK yang terus menerus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan kawan-kawan difabel. Misalnya saja terkait penerjemah bahasa isyarat. Direktur PERDIK Abd. Rahman mendatangi Pengurus GERKATIN Sulsel Ibu Hj. Ramlah dkk dan mendiskusikan mengenai kualitas penerjemahan pada debat publik pertama.

Menurut Hj Ramlah, seharusnya pihak KPU Takalar berkoordinasi dengan Gerkatin dalam memutuskan siapa yang akan menjadi penerjemah bahasa isyarat. Selain itu, jika melalui koordinasi dengan Gerkatin, maka pihak Gerkatin akan menyampaikan kepada teman-teman Tuli di Kabupaten Takalar sehingga dapat menonton acara itu. Dalam percakapan itu, terdapat penterjemah yang menerjemahkan ucapan demi ucapan dari Hj. Ramlah.

Contoh TV dari Yunani. Kiri adalah penerjemahnya. Ukurannya cukup besar, dibandingkan di TV Gosulsel.

Berdasarkan masukan tersebut, Abd Rahman kemudian menyampaikan kepada KPU Takalar dan KPI Sulsel agar berkoordinasi dengan Gerkatin Sulsel. Selain itu, Abd Rahman juga menegaskan agar ada pertanyaan yang terkait isu disabilitas.

Dari pengalaman debat publik ini, pelajaran penting terkait memperjuangkan hak-hak politik difabel dalam pemilu adalah melalui komunikasi yang intens antar stakeholder. Tanpa komunikasi, tanpa kritik, tanpa saran yang membangun, maka kemajuan-kemajuan di atas tentu tidak akan terjadi.

"Setelah debat ini, tentu masih ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan oleh komisioner KPU Takalar. Misalnya ruang TPS sedapat mungkin lebih akses bagi pengguna kursi roda, lebih mempertimbangkan kebutuhan difabel baik netra maupun Tuli dan difabel yang tak bisa keluar dari rumahnya," ujar Rahman usai mengikuti debat publik melalui TV. Sebenarnya KPU Takalar mengundang PERDIK untuk

mengikuti debat secara langsung secara langsung di Aula Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin., namun kehadirannya diwakili oleh anggota PERDIK yang lain.

Sementara saran kepada penegelola TVStreaming, Go-Sulsesl, Abd. Rahman juga berharap agar pengelolanya berkoordinasi dengan pengurus organisasi difabel.

"Sebaiknya pengelola TVStreaming berdiskusi dengan Pengurus Gerkatin SulSel dalam hal ini Ibu Hj. Ramlah untuk mendiskusikan standar penerjemahan di TV," ujar Rahman. namun terlepas dari masih adanya sejumlah kekurangan, lagi-lagi Abd. Rahman menyampaikan salut dan terima kasihnya kepada Ketua KPU Takalar dan pihak-pihak lain yang sudah membantu mengangkat isu disabilitas dalam Pilkada langsung ini[].

PEMILU AKSES

[4]

PARTISIPASI PEMILIH DIFABEL PADA PILKADA TAKALAR, TINGGI ATAU RENDAH?

February 17, 2017

RILIS PERDIK SULSEL

MAKASSAR – Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Takalar 2017 belum maksimal. Hal ini juga terjadi pada partisipasi difabel di Kabupaten ini.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) 209.833 pemilih, namun 175.283 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sekitar 83,5 persen. Sementara ada 174.954, total suara sah dan tidak sah sebesar 1.211 suara. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih difabel tidak sampai 50 persen. Dari 607 pemilih disabilitas yang tercatat di DPT KPU Takalar, yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 176 orang.

Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) Sulawesi Selatan, Abd Rahman menyebutkan menurunnya tingkat partisipasi difabel disebabkan beberapa faktor.

“Pertama, karena tidaknya adanya pendidikan politik bagi difabel dan tidak adanya visi, misi dan program yang berpihak ke difabel, ” kata Rahman, Kamis (16/2/2017).

Menurutnya, selama ini belum ada gerakan dari NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau partai politik yang memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. Begitu juga dengan para Pasangan Calon Bupati Takalar tidak ada yang peduli kepada difabel.

“Sepertinya Parpol kurang paham soal isu disabilitas. Padahal ini isu internasional, isu mendunia, ” jelas Gusdur, sapaan akrab Rahman.

Gusdur menjelaskan hal inilah yang mengurangi peran serta difabel menyalurkan hak suaranya. “Kenapa kami harus pilih kalau kami juga tidak dipedulikan, ” ujar alumnus jurusan Keguruan di Universitas Negeri Makassar ini.

Ketidakpeduli kepada difabel ini, kata Rahman, sudah terlihat sejak kampanye dan debat kandidat, meski debat kandidat kedua memasukan masalah disabilitas pada materi pembahasan, tapi bukan menjadi pokok pembahasan.

“Parahnya. Itu pun suatu yang kebetulan. Di mana salah calon Bupati mencabut pertanyaan soal kepedulian terhadap penyandang disabilitas, ” jelasnya.

Dia juga menyinggung penyebab membengkaknya jumlah DPT di Pilkada Takalar 2017 dari 294 pemilih di data DPT Pemilihan Calon Legislatif 2017 menjadi 607 pemilih.

“Jumlah ini bertambah setelah kami melakukan pendekatan dan masukan ke KPU untuk mendata ulang jumlah pemilih disabilitas berdasarkan kategori difabel, seperti difabel kinetik/daksa, difabel netra, difabel komunikasi/rungu/wicara, difabel intelektual/grahita dan difabel lainnya. Disabilitas yang lainnya ini pun masih banyak lagi. Seperti lumpuh layu. itu masuk dalam kategori difabel, ” kata Rahman.

Menurutnya, peremajaan data dan kategorisasi difabel itu berdasarkan Perubahan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2015 menjadi UU No 10 Tahun 2016.

Rahman juga menjelaskan bertambahnya jumlah difabel karena beberapa sebab. Seperti kecelakaan lalu lintas, malpraktek, kelahiran. "WHO (Badan Kesehatan Dunia) mencatat tiap tahun jumlah difabel bertambah 10 – 15 persen di seluruh dunia, "

Dia juga berterima kasi kepada KPU Takalar yang diberi kesempatan dalam bimbingan teknis (Bimtek) kepada petugas KPS untuk memberi penjelasan soal TPS bagi difabel.

"Kami memberi bimbingan mengenai standar-standar TPS yang ramah difabel dan sesuai dengan aturan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Penentuan lokasi TPS yang bukan di lantai dua, bukan di lapangan yang berbatu, meja, bilik suara dan kotak suara, " kata dia.

Konfirmasi
Direktur Perdik: Rahman 085396584550

PEMILU AKSES [5]

PENGURUS PERDIK DAN KPU TAKALAR SERAH TERIMA ALAT BANTU MENCOBLOS BAGI PEMILIH DIFABEL NETRA

February 11, 2017

Takalar, Jumat, 11 Februari 2017

KEMARIN, JUMAT 11 Februari 2017, Direktur PERDIK dan sejumlah pengurusnya mendatangi Kantor KPU Takalar. Hari ini adalah serah terima Alat Bantu Mencoblos bagi pemilih difabel netra yang akan digunakan di 351 TPS di Kabupaten Takalar.

Menurut Abd. Rahman, pelaksanaan pemilu akses bagi difabel di Takalar sudah didiskusikan beberapa kali bersama komisioner dan staf KPU Takalar. Hasil diskusi itu menunjukkan adanya perubahan mendasar. Salah satunya adalah pembuatan alat bantu mencoblos.

KPU mempercayakan pembuatan alat bantu mencoblos tersebut kepada PERDIK dan setelah mengerjakannya selama kurang lebih seminggu sebanyak 390 alat bantu siap diserahkan.

Ketua KPU Takalar, Jusalim Sammak dan beberapa staf yang mengurusi logistic tampak senang dengan hasil kerja PERDIK yang rapih dan siap digunakan. Abd. Rahman menyatakan bahwa template ini sudah diujicobakan kepada 3 difabel netra mengenai kalimat yang tertera dalam template tersebut. Ketiganya menyebutkan bahwa tata letak dan nama-nama calon dapat terbaca dengan baik dan hal ini akan

memudahkan 162 pemilih netra dari total 607 pemilih difabel pada hari pencoblosan 15 Februari mendatang.

Dalam serah terima barang tersebut, Ketua KPU Takalar juga menyampaikan rencana sosialisasi pemilihan ini kepada sejumlah pemilih di Takalar. Sosialisasi ini tidak akan mengikuti cara biasa di mana selalu ada sosilisasi terpisah antara pemilih difabel dengan non-difabel.

"Kami akan melakukannya secara bersama-sama. Kami tidak ingin ada sosialisasi yang terpisah antara difabel dan non difabel," ujar Jusalim Sammak dengan penuh semangat.

Abd. Rahman menyetujui pendapat ketua KPU Takalar dan bersedia berbagi pengalaman dalam sosialisasi tersebut. Ia berharap dengan segala upaya KPU Takalar ini mengurangi segala hambatan dalam menggunakan hak pilih warga, maka tingkat partisipasi pemilih difabel yang pergi mencoblos akan meningkat tajam[].

PEMILU AKSES
[6]

PERDIK DAN KPU MAKASSAR MENJAJAKI KERJASAMA PEMBENAHAN DATA PEMILIH DIFABEL

March 11, 2017

MERESPON TAWARAN SALAH SATU komisioner KPU kota Makassar, PerDIK melakukan diskusi internal terkait pemilu dan hal difabilitas. Banyak isu yang di diskusikan dengan tema besar terkait bagaimana menempatkan difabel sebagai "subjek politik" yang bermartabat. Intinya, difabel adalah pelaku aktif politik yang memiliki hak politik sebagai warga negara dan

bukan hanya objek politik pasif dan tereksklusi dari isu dan agenda-agenda politik. Poinnya, isu difabel harus menjadi isu arus utama dengan berbasis hak dan kesetaraan.

Terkait dengan isu kepemiluan, setidaknya ada beberapa point yang menjadi titik berat atas proses pencapaian martabat difabel dalam politik, yakni:

1. Harus ada kesamaan hak yang setara dalam proses pendataan pemilih.
2. Adanya informasi yang aksesibel bagi difabel terkait seluruh tahapan/proses pemilukada serta terkait kontestan pilkada/pileg, visi misi dll.
3. Menjadikan isu difabel sebagai isu atau agenda politik para kontestan politik berikut konsekuensi jika tidak di wujudkan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang aksesibel di setiap arena politik seperti TPS sesuai dengan aturan berlaku.
5. Difabel juga memiliki hak sama sebagai penyelenggara pemilu.
6. Terbukanya akses Pendidikan politik berkelanjutan bagi difabel (bukan sekadar pelatihan mencoblos).
7. Meningkatkan partisipasi politik difabel (dalam partisipasi memilih, agenda isu, respsentasi, regulasi).

Kemarin, 10 Maret 2017, komisioner KPU Kota Makassar, Rahmah bertemu dengan pengurus PerDIK.Pertemuan dengan komisioner KPU setidaknya melahirkan beberapa hal yang disepakati perlu dijajaki lebih lanjut.

1. Setidaknya ada beberapa poin penting yang di bicarakan, yakni;
2. Pendataan yang komprehensif terkait difabel yang telah memiliki hak politik/memilih atau dipilih.

3. Pada proses pendataan bukan hanya mendata nama dan alamat akan tetapi menambahkan instrumen baru terkait apa kebutuhan dan kendala difabel dalam memperjuangkan partisipasi politik/hak politiknya. Hal ini penting untuk menemukan serta memetakan kondisi struktural, kultural maupun teknisnya.
4. Mendesain model sosialisasi informasi/data yang aksesibel buat semua jenis difabel.
5. Melakukan pelatihan bagi pendata terkait isu difabilitas.
6. Diskusi (tentatif) dengan KPU, parpol, Panwas dengan sejumlah institusi yang bergerak di isu difabel terkait pilkada dan hak-hak politik difabel,
7. Terlibat aktif (mendata dan pengawasan) terhadap proses pendataan pemilih.
8. Memperjuangkan difabel menjadi penyelenggara pemilu atau peserta pemilu.
9. Segera menyusun draf MOU di kedua belah pihak.
10. Terkait wacana e-voting, mengupayakan "simulasi" terkait hal tersebut untuk semua jenis difabel

Abd Rahman selaku direktur PerDIK berharap agar budaya mendiskusikan hak dan kepentingan difabel harus terus dilakukan. Hal ini dikarenakan permasalaha difabel juga berkembang dan tantangannya akan semakin besar guna mewujudkan hak-hak difabel.

Lebih lanjut, baik Rahma maupun Rahman percaya bahwa memperbaiki data pemilih difabel saat ini akan sangat bermanfaat di masa mendatang. Data yang baik akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan solusi seperti apa yang akan ditempuh.

Salah satu hal yang membingunkan dari rilis data difabel kota Makassar per Mei 2016 yang diperlihatkan komisioner KPU Kota Makassar adalah tingginya angka penyandang kusta

(sekitar 80% dari seluruh difabel). Belum lagi beberapa nama aktivis difabel yang tinggal di Makassar tidak terdaftar dan sebaliknya salah satu sesepuh organisasi difabel di Makassar yangbtelah meninggal dunia, Makmur Kam, juga masih terdaftar.

"Semoga kerjasama antara PerDIK DAN KPU Kota Makassar bisa dilanjutkan secara formal dan pelibatan lebih banyak stakeholder. Dengan bekerjasama, maka masalah lingkungan sosial yang menghambat partisipasi politik difabel di masa mendatang akan dapat teratasi," demikian harap Abd. Rahman[].

PEMILU AKSES
[7]

KPU KOTA MAKASSAR BERPELUANG SIAPKAN DATA AKURAT PEMILIH DIFABEL 2018

December 21, 2017

PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA UNTUK KESETARAAN (PerDIK) menginisiasi kegiatan Sosialisasi Pemilihan walikota – wakil walikota Makassar 2018 dan upaya mendorong konsolidasi seluruh elemen gerakan difabel kota Makassar guna mendukung terselenggaranya pilwali Makassar akses dan inklusif. Acara yang berlangsung di auditorium Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya ini (Rabu, 20 Desember 2018) dihadiri beberapa organisasi difabel di kota Makassar dan beberapa difabel asal kabupaten Enrekang.

Menurut Abd Rahman, direktur PerDIK Sulsel yang memandu jalannya diskusi, kegiatan ini bukan sekadar memberikan kesempatan pihak KPU Kota Makassar menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilihan walikota/wakil walikota, namun juga untuk memberikan masukan kepada komisioner terkait pentingnya mendesain sistem pemilukada inklusif atau akses bagi semua orang. "Untuk itu, selain poin sosialisasi tahapan pilwali kota Makassar, kami juga ingin agar pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi elemen

gerakan difabel di Kota Makassar untuk bersama-sama mengawal dan membantu KPU Kota Makassar," ujar Rahman saat membuka sesi sosialisasi.

Syaifuddin, komisioner KPU kota Makassar bidang Sosialisasi yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa keterlibatan pemilih difabel dalam ajang sosialisasi ini merupakan harapan kami. "Kami sangat membutuhkan masukan dari para sahabat agar kinerja kami sebagai penyelenggara pilwali bagus," ujar Syaifuddin dihadapan peserta sosialisasi.

"Dalam waktu dekat, kami sudah akan melakukan pemutakhiran data pemilih, di mana KPU kota akan merekrut anggota PPDP (*Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih, red*) dan melakukan pemutakhiran," lanjut komisioner ini.

Arfan, aktivis Tuli dari Gerkatin Sulsel menyatakan dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh Mardathilla (relawan dari UnDEAFeated) bahwa pemilih difabel masih menghadapi banyak hambatan dalam memilih. Ia mencontohkan bagaimana desain TPS yang membuat pemilih berkursi roda kesulitan memberikan hak suaranya. Begitupula pemilih Tuli di mana penyelenggara tidak berkomunikasi dengan kami dalam proses pelaksanaan pemilu ini.

"sebaiknya pihak KPU melibatkan Gerkatin dalam mendesain media-media kampanye. Misalnya, Kami siap membantu KPU dalam mendesain media kampanye dalam bentuk video pendek yang akses bagi Tuli. Nanti kami yang akan menyediakan penerjemah isyarat dan *subtitle*," demikian ujar Mardathilla menyampaikan pesan peserta Tuli yang hadir dalam sosialisasi ini.

Dalam kesempatan ini, komisioner KPU Kota Makassar, Syaifuddin juga berharap agar organisasi disabilitas bisa memberikan data difabel di kota ini. “Kami sangat membutuhkan data disabilitas, untuk itu bantulah kami dengan memberikan data disabilitas,” demikian permintaan Syaifuddin.

Merespon hal tersebut, Ishak Salim dari PerDIK justru memberikan tantangan kepada KPU Kota. “Kalau soal data disabilitas saat ini tentu saja tersedia. Dinas Sosial punya data soal disabilitas, tapi datanya berbasis kemiskinan bukan keseluruhan difabel. Dinas Kesehatan punya data, tetapi berdasarkan kategori penyakit atau disfungsi tubuh. Organisasi Disabilitas punya data, tapi

hanya berbasis keanggotaannya. Bahkan dinas Dukcapil pun punya data kependudukan, namun apakah ada kategori penduduk dengan disabilitasnya itu masih perlu ditelusuri lagi. Justru peluang ketersediaan data disabilitas kota Makassar yang bagus itu ada pada KPU Kota saat ini," ujar Ishak panjang lebar.

Dalam waktu dekat KPU Kota akan melakukan pemutakhiran data pemilih dan pada momen itulah ada peluang KPU kota bisa berbuat yang terbaik untuk memperoleh data disabilitas yang jauh lebih valid.

"Masalahnya tinggal apakah KPU Kota mau melakukannya dengan benar? Jika KPU kota serius, maka pertama-tama bersediakan KPU menyiapkan kuota 10-20% pendata dari aktivis disabilitas kota makassar. Lalu bersediakah KPU melakukan diskresi dengan mengubah form pendataan (form A-KWK, red) agar jenis disabilitas bukan lagi hanya 5 kategori melainkan 23 kategori berdasarkan UU Penyandang disabilitas yang baru, Lalu mengubah pula master inputnya. Kemudian bersediakah KPU melibatkan PerDIK atau organisasi difabel lainnya dalam proses peningkatan kapasitas pendata (PPDP), kapasitas PPK dan PPS terkait perspektif disabilitas dan memastikan agar pendataan pemilih disabilitas berjalan baik dan data pemilih disabilitas bisa tersaji bukan sekadar informasi jenis disabilitasnya tapi juga jenis kebutuhannya mulai dari tahap awal hingga tahap akhir pilwali," ujar Ishak lagi.

Menurut Ishak, hal sama sudah ia sampaikan juga saat berlangsung kegiatan Rakor KPU dengan stakeholder terkait pemutakhiran data pemilih.

"Masalahnya sekarang adalah apakah KPU berani untuk berbuat yang terbaik bagi difabel!" ujarnya menutup penyampaiannya.

Selain anggota komisioner KPU Kota Makassar, PerDIK juga menghadirkan staf ahli bidang politik PerDIK, Risal Suaib untuk memberikan gambaran pentingnya pembentukan 'kaukus disabilitas' dalam upaya mendorong terlaksananya Pilwali akses dan inklusif ini. "Seluruh elemen aktivis difabel harus bersatu dalam kaukus ini. Jangan hanya mengupayakan kepentingan kelompok sendiri berdasarkan jenis disabilitasnya," ujar Risal yang merupakan pakar sistem politik pemilu dan kepartaian ini[].

BAGIAN 8

[1]

CATATAN RINGAN SEORANG RELAWAN PENERJEMAH BAHASA ISYARAT BISINDO

July 14, 2017

Andi muhammad mardhatilla

DI SUATU SIANG, TEMAN-TEMAN TULI dari GERKATIN Makassar (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) beserta sejumlah volunteer UNDEAFEATED sedang saling berbagi pengetahuan seputar Bahasa Isyarat Indonesia dan kata-kata [isyarat] dalam Bahasa Indonesia. Berikut saya hendak berbagi obrolan tersebut melalui catatan ringan berikut ini.

Mungkin beberapa teman sudah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat dua bahasa Isyarat yang digunakan teman Tuli: SIBI dan BISINDO. SIBI adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, sementara BISINDO merupakan singkatan dari Bahasa Isyarat Indonesia. Mari kita tengok sepintas sejarah perjalanan kedua jenis bahasa isyarat ini.

SIBI disusun atas inisiatif sejumlah kepala SLB, seperti Anton Widyatmoko (sekitar 1980/90-an). Saat itu ia adalah Kepala Sekolah dari salah satu Sekolah Luar Biasa bagi Tuli di Jakarta. Bagi Tuli yang mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar LB hingga Menengah ke Atas LB menggunakan SIBI sebagai bahasa pengantar di sekolah (sebagaimana diwajibkan

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0161/U/1994, *red*). SIBI—sebagaimana dari namanya adalah sistem isyarat—atau SIBI merupakan Bahasa Indonesia lisan yang diubah menjadi sejumlah 'gerak isyarat'. Dalam menggunakan sistem isyarat ini, sebagian Tuli kurang bahkan tidak mengerti dengan Tata Bahasa Indonesia lisan yang digunakan oleh 'teman dengar', misalnya pada konteks ketatabahasaan aturan penggunaan 'imbuhan'—berupa awalan dan akhiran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Isyarat.

Contohnya, kata dasar "bangun" yang berimbuhan 'pe' (awalan) dan 'an' (akhiran) telah diterjemahkan menjadi 3 jenis isyarat, yakni isyarat bagi imbuhan 'pe[m]', lalu kemudian isyarat 'bangun', dan isyarat 'an'. Dengan demikian, dalam mengisyaratkan satu kata 'pembangunan', maka akan ada tiga gerakan isyarat: pem-bangun-an. Sayangnya, sebagai sebuah bagian dari struktur kebahasaan, setiap kata yang seharusnya memiliki makna menjadi terlepas maknanya, sebagaimana isyarat 'pembangunan' itu yang tinggal menjadi sebuah isyarat pe[m], bangun, dan an. Isyarat 'bangun' dalam SIBI bisa saja memiliki makna bangkit dari kejatuhan, atau bangkit dari posisi berbaring, namun istilah itu akan menjadi tidak sama maknanya setelah menjadi kata 'pembangunan' (bahkan menjadi hilang penjelasan kontekstualnya). Disamping "kerumitan" itu, kata "bangun" masih bisa diimbuhi beberapa awalan dan akhiran yang masing-masing kata tersebut ketika diberi imbuhan berbeda akan menghasilkan arti yang berbeda, misalnya 'membangunkan', 'membangun',dan 'terbangun'.

Beragam kesulitan penerapan SIBI di atas merupakan konsekuensi dari tidak sesuainya 'identitas linguistik Tuli'—yang memiliki budaya berbahasa tersendiri. Apalagi dalam sejarah pembuatan SIBI sejak awal memang kurang atau bahkan tidak

melibatkan kelompok Tuli. Kesulitan itu misalnya disebabkan oleh sejumlah besar Tuli—termasuk Hard of Hearing (HoH) memang tidak pernah mendengar Bahasa Indonesia secara lisan.

Sebenarnya, kelompok Tuli dalam aspek kesejarahannya sudah membuat sendiri sistem isyaratnya sebagai konsekuensi kebutuhan akan bahasa dalam menyambungkan komunikasi antara dua Tuli atau lebih. Sejak tahun 1960-an, sejumlah organisasi Tuli di daerah-daerah—seperti Serikat Kaum Tuli Bisu Indonesia (SEKATUBI Bandung), Persatuan Tuna Rungu Semarang (PTRS) , Perhimpunan Tuna Rungu Indonesia (PERTRI Jogyakarta), Perkumpulan Kaum Tuli Surabaya (PEKATUR Surabaya)—sudah menggunakan sejumlah isyarat lokal yang kemudian mereka sebut sebagai Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO. Setelah saling mengenali organisasi masing-masing, mereka pun bersepakat mendirikan satu organisasi yang bisa mempersatukan mereka, yakni GERKATIN. Dalam keputusan Rapat kerja GERKATIN (1981[?]) diputuskan bahwa Gerkatin menjadikan 'BISINDO sebagai wadah komunikasi horisontal bagi seluruh anggota demi perolehan dan pertukaran informasi maupun pengalaman antar sesama [teman] Tuli maupun antara Tuli dan 'teman dengar', sebagai sarana pendidikan mentalitas bagi seluruh

anggota dan pengurus Tuli dalam berorganisasi, melakukan standardisasi BISINDO untuk pembuatan buku pengantar bahasa isyarat sebagai pedoman pelatihan penerjermahan bahasa isyarat bagi umum (teman dengar) yang berminat membantu Tuli berkomunikasi, serta menasionalkan kosa kata isyarat dari berbagai daerah se-Indonesia untuk menjadi satu sistem isyarat konseptual dalam pencetakan buku kamus besar BISINDO.

Pendeknya, Tuli berusaha untuk membuat bahasa Isyarat mereka dan sekaligus merepresentasikan identitas linguistik mereka, yaitu BISINDO. BISINDO dianggap lebih mudah untuk digunakan dikarenakan gerakannya mudah diingat dan dipahami oleh pengguna Tuli yang mengandalkan komunikasi secara visual.

Terkait mempelajari BISINDO, setelah beberapa kali bertemu dan belajar BISINDO bersama teman-teman Tuli di Makassar, kami masih sering bertanya tentang kata-kata bahasa Indonesia dalam BISINDO. Sebagian dari kata-kata tersebut dijelaskan oleh teman-teman Tuli dan sebagiannya juga masih belum memiliki bahasa Isyarat. Sebagai contoh, saya pernah bertanya kepada teman-teman Tuli Makassar tentang kata "hasil" dalam BISINDO dan ternyata teman-teman tuli belum mengetahui bahasa isyarat "hasil". Sebagian teman-teman Tuli di Makassar juga sering bertanya tentang perbedaan kata "membangun" dan "membangunkan". Sehingga kami menyimpulkan bahwa BISINDO adalah bahasa Isyarat yang masih berkembang di Makassar dan akan terus disempurnakan.

Tadi sore ditemani es teh manis bermerek dan ubi goreng hangat, teman-teman volunteer mengajarkan konteks penggunaan beberapa kata dasar bahasa Indonesia yang telah diberi imbuhan. Kami menyadari bahwa kami mengalami

kesulitan dan hambatan komunikasi, sehinga kami harus membuat skenario dan ber-akting untuk menjelaskan konteks penggunaan kata yang telah diimbuhi awalan dan akhiran.

Misalnya untuk menjelaskan kata “ketinggalan” kami harus memberikan contoh situasi “ketinggalan buku pelajaran setelah belajar bersama” kemudian kami berakting sebagai orang yang lupa membawa buku sehabis belajar bersama. Lalu untuk menjelaskan kata “meninggalkan” kami harus berakting sebagai keluarga, di mana kakak tertua akan pergi ke Jakarta dan sang adik memohon untuk diikutkan ke Jakarta, tetapi kakak tertua

tidak mau dan meninggalkan adiknya dirumah. Cukup sulit bukan?

Kami menganggap bahwa proses mengajar tadi sekaligus proses belajar bagi kami dalam memahami BISINDO, sehingga kami lebih muda dalam berinteraksi dengan teman-teman Tuli.

Berupaya memahami hak Tuli dalam kebijakan disabilitas di negeri ini

Beberapa minggu lalu, 18 Maret 2017, teman teman Tuli bekerja sama dengan dengan PEMKOT, Dinas Sosial dan US *Embassy* mengadakan seminar mengenai Hukum serta Hak Tuli yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas. Selama seminar tersebut dijelaskan beberapa hal mengenai UU terkait hak-hak disabilitas misalnya hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan fasilitas publik,serta hak dalam pendidikan.

UU No. 8 Tahun 2016 sebenarnya merupakan bentuk reformasi hukum UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang secara substansi sudah tidak sesuai dengan UU No. 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Disabilitas. UU No. 4 Tahun 1997 memiliki kesan bahwa pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas didasarkan oleh amal (*charity based*). Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 2016 menjadi bentuk reformasi Undang-Undang lama. UU No. 8 Tahun 2016 memberikan kemajuan perlindungan baik itu dalam penjaminan hak-hak penyandang disabilitas serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

Hal yang pertama dijelaskan dalam seminar bahwa Tuli dan penyandang disabilitas lainnya memiliki hak untuk bekerja baik dalam pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta. UU terkait

penyandang disabilitas mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling tidak sedikitnya 2 % dari total karyawan sedangkan 1% untuk perusahaan swasta.

Setelah seminar usai saya kemudian mencari lebih lanjut tentang penjelasan UU tersebut. Sejauh ini belum ada sosialisasi terkait fasilitas apa yang perlu dipersiapkan oleh institusi tersebut demi pemenuhan hak teman teman penyandang disabilitas secara menyeluruh. Selain itu belum ada penjelasan mengenai insetif yang diterima bagi institusi/perusahaan yang mempekerjakan teman-teman penyandang disabilitas.

Selain itu, poin dari seminar tersebut yang perlu saya pertegas yaitu terkait hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan yang layak. Karena seminar tersebut berbicara tentang hak-hak tuli, maka yang saya akan jelaskan yaitu tentang kondisi yang dialami teman-teman Tuli yang saya pahami dari cerita yang mereka bagikan selama seminar. Banyak dari teman-teman Tuli meceritakan bahwa pendidikan yang dulu mereka dapatkan di SLB dianggap tidak setara dengan pendidikan yang didapatkan oleh teman teman dengar. Beberapa teman teman Tuli menceritakan bahwa kebanyakan dari mereka heran mengapa pelajaran yang mereka dapatkan tidak mengalami perubahan (baik dari kurikulum serta bahan ajar) mulai dari Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia teman-teman Tuli. Banyak dari mereka tidak mampu menyelesaikan soal-soal Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Nasional dikarenakan selain tidak adanya fasilitas penunjang bagi teman-teman Tuli melainkan juga karena ketidaktahuan mereka terhadap pelajaran-pelajaran yang diujikan dalam SBMPTN.

Syukur, Alhamdulillah dikarenakan adanya reformasi UU Penyandang Disabiltas memberikan harapan terhadap

perbaikan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 pasal 44 dijelaskan bahwa Universitas yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib mengajarkan mata kuliah inklusif disabilitas dalam kurikulum. Undang-undang tersebut memberikan hal yang positif bagi dunia pendidikan Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 bahwa negara memiliki kewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan nantinya bahwa UU tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya teman-teman Tuli dan penyandang disabilitas lainnya.

Selain itu, UU No. 8 Tahun 2016 pasal 44 sejalan dengan peraturan pemerintah yang memberikan kuota bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan. Mengapa demikian? Menurut saya, sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwa reformasi UU penyandang disabilitas dilakukan demi melakukan pemberdayaan terhadap teman-teman

penyandang disabilitas. Hal ini juga berimplikasi terhadap terciptanya narasi untuk memberikan kesempatan kerja bukan hanya demi memberikan pekerjaan bagi teman-teman Tuli atau karena perasaan terhadap teman-teman Tuli (ataupun teman-teman penyandang disabilitas lainnya) yang berbeda, melainkan karena mereka mempunyai kualitas sumber daya manusia yang setara dengan teman-teman dengar.

Sebagai kesimpulan, Pertama, perlunya sosialisasi terkait insentif dan penjelasan teknis dalam menciptakan lapangan dan lingkungan kerja yang kondusif bagi penyandang disabilitas.

Kedua, Diharapkan UU No. 8 Tahun 2016 pasal 44 dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia teman-teman Tuli dan penyandang disabilitas lainnya sehingga mereka mempunyai kesempatan kerja layaknya seperti teman-teman dengar.

Bagi teman-teman yang punya ketertarikan terhadap isu-isu yang dihadapi teman-teman Tuli, teman-teman bisa follow Instagram @undeafeated. Melalui instagram tersebut kami akan membagikan beberapa hal-hal seputar Bahasa Isyarat Indonesia dan juga perkembangannya. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas Bahasa Isyarat Indonesia dan berkomunikasi langsung dengan teman-teman Tuli, teman-teman Tuli juga membuka kelas yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali yang diadakan di Pantai Losari[].

Penulis adalah salah satu pendiri **UNDEAFEATED** Makassar

BAGIAN 9

SPIRIT

[1]

SELAMAT HARI PEDULI AUTIS INTERNASIONAL, 2 ARPIL 2017

April 2, 2017

[the text's going blue]

UNTUK MEMAHAMI LEBIH MENDALAM ISU AUTISME dalam Gerakan Difabel Indonesia menuju Kesetaraan, tim PerDIK beramai-ramai ke Anjungan Mandar, Pantai Losari Kota Makassar. Pada hari ini, 2 April 2017 sedang ada perayaan Hari Peduli Autisme Internasional yang digelar oleh POAAM Sulawesi Selatan.

Minggu pagi itu, perayaan sederhana yang dihadiri sejumlah penggiat Persatuan Orang Tua Anak Autis Makassar dan penggiat PKK Kota Makassar. Terdapat dua tenda berdiri untuk menopang sejumlah kegiatan pagi yang beberapa kali diguyur hujan itu. Ada sejumlah titik kumpul untuk bisa saling mengobrol. Kami pun memperkenalkan diri dan mengobrol dengan sejumlah penggiat isu Autisme ini.

Menghadiri perayaan seperti ini bagi kami adalah suatu cara saling mendukung dan berbagi semangat dalam memperjuangkan isu-isu difabel. Selain itu, sebagaimana menjadi tujuan awal kedatangan kami adalah ingin mengetahui lebih banyak soal bagaimana kawan-kawan POAAM menangani isu Autisme ini. Semoga kita semua tetap bisa berjuang dan saling mendukung untuk mencapai tujuan perjuangan yang lebih besar, yankni memanusiakan manusia.

Selamat Hari Peduli Autisme Internasional 2017!

berikut petikan puisi sederhana dari Sally Meyer (2000) untuk kedua orang tuanya.

BEFORE I GO TO SLEEP…

Mommy, don't you cry now and Daddy don't you weep.
I want to whisper something before I go to sleep.
I know that when I cam here I looked perfect in every way.
And you were so proud, Daddy; when you held me on that day.
And Mommy, when you kissed me and wrapped me up so tight,
I knew that I belonged here and everything was right.
But then I stopped talking and began to slip away,
I saw your worried faces as you knelt by me to pray.
And Daddy, I always notice how you wipe away a tear,
When you watch the other children as they run and laugh and cheer.

I may not be able to tell you how much I love you so,
Or even show you how I feel and what I really know.
But when you hold me, Mommy, at night when all is still,
I feel the love you have for me and I know that all is well.
And Daddy, when you take me to the park to run and play
I know that you still love me thought the words I cannot say.
I want to tell you something before I go to sleep.
I may be sort of direct and you may not understand,
I know that I am not that little held that you and Daddy planned.
But I love you both so very much and I know you love me too,
And if I could only speak my heart, you would feel my love for you.

I know the future is unknown and you will always have to be,
The ones who love and listen and take good care of me.
I know that you are frightened and you shed so many tears,
And if I could I'd wipe them dry and take away your fears.
So Mommy, don't you cry now and Daddy please don't weep.
I want to say…

I love you both, before I go to sleep.

SPIRIT
[2]

SELAMAT HARI BURUH INTERNASIONAL: PENUHI HAK ATAS PEKERJAAN BAGI DIFABEL

May 1, 2017

SEMUA ORANG, BERDASARKAN USIA produktifnya berhak atas pekerjaan. Difabel adalah salah satu elemen kependudukan suatu negara yang paling mengalami perlakuan diskriminatif dan pengabaian atas hak atas pekerjaan tersebut.

Mengapa pihak yang bertanggungjawab atas ketersediaan lapangan pekerjaan dan penerimaan pekerja ini melakukan tindakan diskriminatif dan pengabaian? ada banyak faktor yang mendorongnya.

Salah satu faktor itu dan merupakan hal paling mendasar adalah kekeliruan mereka dalam memaknai disabilitas seseorang. Misalnya saja adalah istilah penyandang cacat atau penyandang disabilitas itu sendiri. Istilah ini lebih banyak mengantar orang untuk memikirkan kondisi tubuh, mental dan pikiran seorang difabel yang menyebabkan ketidakmpuan ketimbang aspek kemampuannya di luar soal kondisi tubuhnya itu. Inilah yang kemudian disebut asumsi, asumsi yang penuh kekeliruan.

Pekerja atau buruh difabel adalah produk dari institusi pendidikan di mana ia pernah menimba pengetahuan, produk pengalaman di mana ia pernah belajar sambil bekerja, dan produk dari sistem ketenagakerjaan di sebuah daerah atau negara. Bekerjanya sistem pendidikan dan sistem ketenagkerjaan yang tidak mempertimbangkan kemampuan difabel (malah fokus pada kondisi tubuhnya) telah berkontribusi atas rendahnya daya serap setiap lembaga ekonomi atau lembaga-

lembaga lainnya yang mempekerjakan difabel. Kondisi lemahnya daya serap ini diperparah lagi oleh ketidakseriusan penegakan hukum terkait keadilan ketenagakerjaan di Indonesia dan dukungan finansial bagi setiap lembaga yang terkait untuk menyiapkan alat kerja akses dan sejumlah akomodasi yang baik/sesuai dengan kebutuhan difabel saat bekerja.

Untuk itu, maka perjuangan buruh internasional, yang hari ini sedang diramaikan perayaannya oleh kaum buruh sedunia harus memasukkan agenda perjuangan kaum Buruh Difabel, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya.

Tuntutannya,

1. Siapkan dan berikan Pekerjaan bagi Difabel!
2. Penuhi Aksesibilitas secara menyeluruh dalam lingkungan kerja (Baik fisik, non-fisik, intelektual [informasi], dan lain-lain), khususnya terkait Reasonable Accommodation bagi pekerja difabel.
3. Siapkan pusat pendidikan kerja difabel bukan sekadar untuk mengisi pekerjaan di sektor informal tetapi juga untuk mengisi pos-pos kepemimpinan, manajerial dan kemampuan teknis terbaru lainnya.
4. Masukkan Agenda kepedulian kepada persoalan Buruh Difabel ke dalam Agenda seluruh asosiasi buruh di Indonesia dan atau dirikan Asosiasi Buruh Difabel se-Indonesia (note: masukan dari Mas Sapto Nugroho).

Demikian, tertanda:

Badan Pengurus PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk KESETARAAN) mengucapkan:

SELAMAT HARI BURUH SEDUNIA!
BURUH DIBAFEL SEDUNIA, BERSATULAH!

Makassar, 1 Mei 2017

SPIRIT

[3]

TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN ANDA KEPADA EKSPEDISI DIFABEL MENEMBUS BATAS 2016

January 27, 2017

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, Pelaksanaan **Ekspedisi Difabel Menembus Batas (EDMB)2016** telah terlaksana. Kami yang terdiri dari 3 Pendaki/Atlet difabel (Abd. Rahman, Eko Peruge dan Risma Irmawati) bersama 25 pendaki dari berbagai lembaga dan kelompok pe[n]cinta alam telah berhasil mendaki Gunung Latimojong (3478 mdpl) pada 29 Nopember – 5 Desember 2016. Kesuksesan ini tak lepas dari kerjasama dari berbagai partisipan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentu, bukanlah karena Ekspedisi ini diikuti oleh Difabel sehingga hal ini berhasil, tetapi karena pendakian ini dilakukan bersama-sama dengan kesungguhan saling membantu dan mendukung satu sama lain.

Atas keberhasilan itu, maka Kami segenap pengurus **Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK)** dan segenap anggota Tim EDMB mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Agus Arifin Nu'mang, MS (Wakil Gubernur Sulawesi Selatan)
2. Bapak Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto (Walikota Makassar)
3. Bapak H. Muslimin Bando,.M.pd. (Bupati Enrekang)

4. Ibu Sawalia Baharuddin, SE, MM (Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Enrekang dan segenap jajarannya)
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Makassar
7. Kepala Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Wirajaya Kota Makassar
8. Rektor Universitas Teknologi Sulawesi, Kota Makassar
9. Bapak Sabar Gorky (Pendaki Senior)
10. Bapak Djukardi "Bongkeng" Adriana (Pendaki senior)
11. Segenap Pengurus dan Anggota Forum Pencinta Lingkungan (FPL) Kota Makassar
12. Segenap Pengurus dan Anggota Kelompok Pecinta Alam dan Lingkungan (KEPAL), Kota Makassar
13. Segenap Pengurus dan Anggota KPA Capung, Kota Makassar
14. Segenap Pengurus dan Anggota KPA Talas, Kota Makassar
15. Segenap Pengurus dan Anggota BEM STIKS Tamalanrea, Kota Makassar
16. Segenap Pengurus dan Anggota Makassar Rescue, Kota Makassar
17. Segenap Pengurus dan Anggota KPA Sikolong, Kab. Enrekang
18. Segenap Pengurus dan Anggota KPA PAKIS, Kab. Enrekang
19. Segenap Pengurus dan Anggota KPA Buntu Batu Mario, Kab. Enrekang
20. Segenap Pengurus dan Anggota KPA Mapasse, Kab. Enrekang
21. Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) Sulawesi Selatan

22. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Maros
23. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Makassar
24. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Massenrempulu Kabupaten Enrekang
25. Kepala Dusun Karangan, Desa Latimojong, Kab. Enrekang
26. Keluarga Ambe Meluk, Dusun Karangan, Desa Latimojong, Kab. Enrekang
27. Keluarga Ambe Simen, Dusun Karangan, Desa Latimojong, Kab. Enrekang
28. Keluarga Lutfi Pandi, Kecamatan Cakke, Kab. Enrekang (Percetakan Genesa)
29. Keluarga Darwin Aruan Mori, Desa Kalimbua, Kecamatan Baraka, Kab. Enrekang
30. Keluarga Hairuddin Baco, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang
31. Keluarga Risma Irmawati, Leang-Leang Kab. Maros
32. Keluarga Ismi, Makassar
33. Tim Tagana Kabupaten Enrekang
34. Donatur pada (**https://kitabisa.com/ayoekspedisidifabel**) terdiri dari Bahrul Fuad, Rival Ahmad, Budhi Bahroelim, Annisa Husni, Itha Keren, Rendhafajar Pragowoaji, Hj. Suri Said, Andi Tenri Sompa, Desi Indrimayutri, Ishak Salim, Anonim [1], dan Anonim [2]. Ardadi Darwis.
35. YASMIB Sulsel
36. Komunitas ININNAWA: AcSI, Kata Kerja dan Ruang Baca
37. Niko YAPTI
38. Tim/Panitia Pendukung Sarasehan Berbagi Pengalaman Difabel Menembus Batas
39. Tim Penari Paddupa dan Anggaru

40. Kru Café MACCA, Kabupaten Enrekang
41. Kru Café DZ, Kota Makassar
42. Tim Pewarta/Jurnalis/Media (iNews, MakassarTerkini, Celebes TV, dll)
43. Tim Relawan EDMB
44. dan sahabat-sahabat lainnya yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga dukungan kalian terus mengalir kepada kami dan kepada orang-orang yang punya tujuan baik yang saat ini sedang bergerak!

Salam INKLUSI!

SPIRIT
[4]

SELAMAT TAHUN BARU 2018 KAWAN-KAWAN PERDIK DAN AKTIVIS DIFABEL!

January 1, 2018

SEMOGA TAHUN INI KITA BISA berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi untuk kemanusiaan. Semoga semakin bertambah orang sadar bahwa Disabilitas bukanlah urusan sehat tidaknya seseorang, bukan pula soal rasa malu dan rendah diri difabel maupun anggota keluarga lainnnya, bukan urusan dosa masa lalu.

Urusan Disabilitas lebih dari semua itu. Dia adalah urusan semua orang, urusan mendasar bagaimana kita mengubah pikiran dan tindakan yang selama ini keliru dalam memperlakukan Difabel. Kita, kita semua, perlu berbuat untuk membuat lebih banyak dan lebih banyak lagi orang tahu dan menyadari bahwa kita harus bersama-sama memecahkan soal-soal ini. Baik soal-soal yang sudah pernah terjadi tapi belum jua tuntas terpecahkan maupun soal-soal yang datang kemudian akibat berubahnya tata sosial kehidupan ini.

Untuk itu, kita perlu berbuat agar lebih banyak ruang/arena/tempat yang akses bagi difabel, lebih banyak difabel masuk sekolah dan perguruan tinggi untuk bersekolah atau kuliah, lebih banyak peluang kerja akses bagi Difabel sehingga DIfabel juga bekerja di sektor formal, dan lebih penting lagi semakin banyak pengetahuan yang kita produksi sebagai bahan baku untuk menggerakkan perubahan sosial itu..

Tentu saja impian itu untuk kita jalankan tahun ini, 2018 dan tahun-tahun mendatang. Sekecil apapun pencapaian dari upaya-upaya komunal kita, akan kita rayakan lagi nanti, di penghujung 2018.

Semoga semoga semoga…Amin.

Tertanda,
Pengurus PerDIK
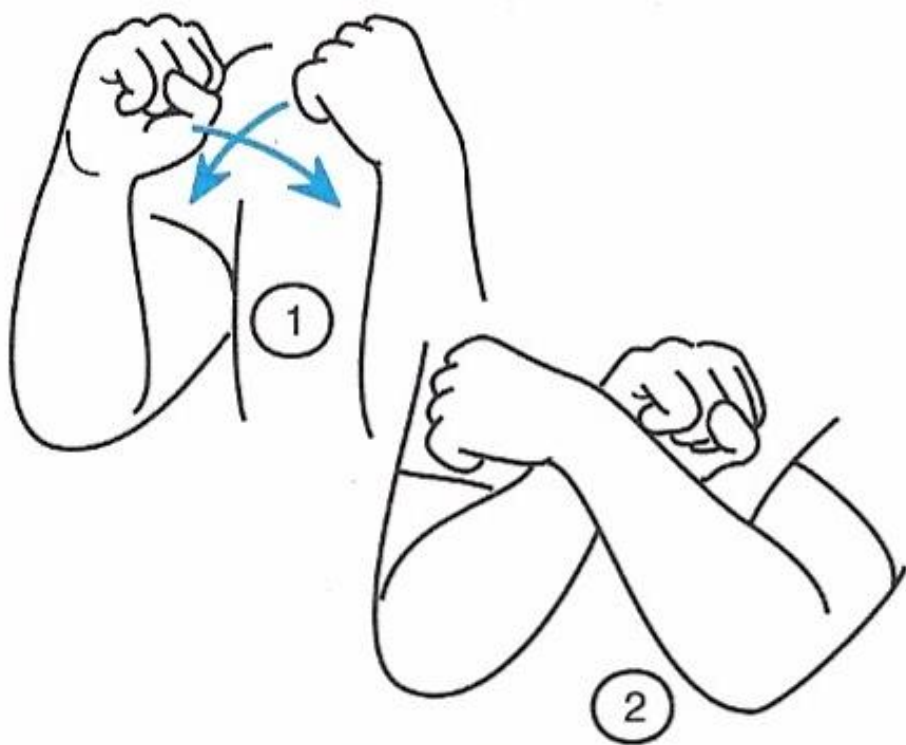
MELAWAN dalam Bahasa Isyarat

Tunggu apalagi?
Segera beranjak dan lanjutkan perlawanan!